



# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

2018



# DAFTAR ISI

## Table of Content

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance	02
STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Structure, Mechanism and Corporate Governance Policy	17
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners	42
ASESMEN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Assessment to Performance of the Board of Commissioners and Board of Directors	76
RAPAT DEWAN KOMISARIS Meeting of the Board of Commissioners	84
RAPAT DIREKSI Board of Directors Meeting	88
PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Disclosure of Related Affiliation of the Board of Commissioners and Board of Directors	94



KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS Committees under the Board of Commissioners	97	PEDOMAN PERILAKU Code of Conduct	214
KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI Committees under the Board of Directors	122	WHISTLEBLOWING SYSTEM Whistleblowing System	230
SEKRETARIS PERUSAHAAN Company Secretary	144	KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Diversity Policy Composition Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors	235
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Application of the Internal Audit Function	158	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Application of Risk Management	237
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Implementation of the External Audit Function	169	STRATEGI PERMODALAN Capital Strategy	261
AKSES INFORMASI Information Access	186	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Implementation of Risk Management	268
RENCANA STRATEGIS BANK Bank Strategic Plan	191	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility (CSR)	312

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



## PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang dipercaya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, mempunyai fungsi intermediasi yaitu menerima dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, selalu berhadapan dengan berbagai bentuk dan potensi risiko.

Dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya Bank NTT selalu berhadapan dengan potensi risiko dan tantangan bisnis yang kompleks. Oleh karena itu untuk menghadapi dan meminimalisir tantangan risiko tersebut dibutuhkan strategi bisnis yang tepat (efektif dan efisien).

## INTRODUCTION

Banks are financial institutions that are trusted as companies engaged in financial services, having an intermediary function, namely receiving funds and redistributing them in the form of financing, always dealing with various forms and potential risks.

In implementing and developing its business, Bank NTT is always faced with potential risks and complex business challenges. Therefore, to deal with and minimize the risk challenges, an appropriate (effective and efficient) business strategy is needed.

## Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara berkelanjutan untuk tercapainya visi Bank NTT “ Menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya”

Bank NTT continues to improve and improve the implementation of sustainable Good Corporate Governance to achieve the vision of Bank NTT “ To be a healthy, strong and reliable bank”.

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan (potensi) kerugian bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan Bank.

Sehubungan dengan risiko dan tantangan tersebut maka Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan untuk tercapainya visi Bank NTT “ menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya” dan 4 misi Bank NTT yakni menjadi (i) pelopor penggerak

Risk is the potential for an event (*event*) that can cause (potential) bank losses. Risk in the banking context is a potential event, both anticipated and unpredictable (*unanticipated*) that has a negative impact on the Bank's income and capital.

In connection with these risks and challenges, Bank NTT continues to improve and improve the implementation of sustainable Good Corporate Governance to achieve the vision of Bank NTT “ to be a healthy, strong and reliable bank ” and 4 Bank NTT's missions namely become (i) a pioneer in driving the people's economy; (ii) digging potential sources

ekonomi rakyat; (ii) penggali sumber potensi daerah; (iii) peningkatan sumber pendapatan asli daerah; dan (iv) optimalisasi fungsi intermediasi, serta upaya pencapaian 2 grand target strategis Bank NTT yakni (i) berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif; dan (ii) mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan public dan industrialisasi komoditi unggulan NTT.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank serta pembiayaan infrastruktur dan sektor – sektor prioritas ditetapkan kebijakan di tahun 2018 antara lain :

1. Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable growth*)
2. Meningkatkan pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan sektor-sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan APBD/N pemerintah propinsi, kabupaten dan kota.
3. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga, dan perbaikan struktur pendanaan (penerbitan obligasi)
4. Ikut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan investasi baru di masing-masing Kabupaten dan Kota
5. Penyempurnaan kebijakan/pedoman yang berhubungan dengan bidang dana dan kredit
6. Penyempurnaan aplikasi core banking.
7. Diversifikasi produk-produk Bank NTT.
8. Pengembalian fungsi internal control ke Divisi Pengawasan/SKAI
9. Memperkuat *riks management* dan tata kelola perusahaan yang baik
10. Peningkatan program pengembangan Sumber Daya Manusia

of the area; (iii) enhancing local revenue sources; and (iv) optimization of the intermediation function, and efforts to achieve the 2 grand strategic targets of Bank NTT namely (i) to play an active role in reducing poverty and unemployment programs in NTT through productive business financing; and (ii) encouraging the creation of accelerated economic growth through public service infrastructure financing and the superior industrialization of commodities in NTT.

To support the growth of the bank's business and financing infrastructure and priority sectors, the policy set in 2018 includes:

1. Maintaining sustainable business growth (*sustainable growth*)
2. Increasing the growth of MSME Credit based on the leading sectors of each district / city in accordance with the APBD / N of the provincial, district and city governments.
3. Increasing Third Party Funds, and improving the funding structure (bond issuance)
4. Participate in financing infrastructure and new investments in each Regency and City
5. Improvement of policies / guidelines relating to the field of funds and credit
6. Completion of core banking applications.
7. Diversification of Bank NTT products.
8. Returns the internal control function to the Supervision / SKAI Division
9. Strengthening management checks and good corporate governance
10. Increased Human Resource development program

11. Peningkatan dan penguatan organisasi dan *corporate culture* yang berorientasi pada kinerja dan sumber daya manusia.

Hal ini sejalan dengan visi Program Transformasi BPD adalah menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan (*sustainable*). Melalui program Transformasi BPD, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya sendiri dan sebagai group bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional.

Sebagai bank daerah, Bank NTT akan terus berperan sebagai BPD yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini. Visi Transformasi BPD sebagai bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah masing-masing serta dapat menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui program transformasi ini diharapkan Bank NTT terus menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi di NTT.

Dari tiga sasaran program transformasi BPD yakni peningkatan daya saing (kompetitif), penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah ditempuh dengan enam strategi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko mencakup : pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio serta penguatan likuiditas dan permodalan.

11. Increasing and strengthening organizations and corporate culture oriented to performance and human resources.

This is in line with the vision of the BPD Transformation Program to become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to the sustainable growth and regional economic equality. Through the BPD Transformation program, it is expected that the BPD will become the leader in its own region and as the largest, best and strongest bank group in the national banking industry.

As a regional bank, Bank NTT will continue to play a role as a BPD that supports regional economic growth through the current BPD transformation program. Vision Transformation of BPD as a competitive, strong and contributive bank for each regional development and can become a highly competitive and strong bank and contribute significantly to sustainable growth and regional economic equality. Through this transformation program, it is expected that Bank NTT will continue to be the leader of economic growth in NTT.

Of the three BPD transformation program objectives, namely increasing competitiveness, strengthening institutional resilience and increasing contributions to regional development, six strategies were implemented to improve the effectiveness of business processes and risks including: product development, service management, marketing development, network management, portfolio management and strengthening liquidity and capital.

Untuk mendukung efektivitas proses bisnis di atas, diperlukan elemen pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang perlu dikembangkan melalui talent management secara profesional, infrastruktur (IT dan jaringan distribusi) yang memadai yang wajib disediakan serta kebijakan dan pedoman operasional lengkap yang terus disesuaikan sesuai perkembangan bank dengan dilandasi dengan fondasi yang kuat, Budaya Perusahaan (*corporate culture*), tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Proyeksi keuangan 2018 – 2020 disusun secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi makro dan mikro serta proyeksi perekonomian di tahun 2018. Sejalan dengan itu, di tahun 2018, pertumbuhan asset bank diproyeksikan tumbuh 8%-10%, Kredit diproyeksikan tumbuh rata-rata 9%-12%, Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tumbuh 10%-13%.

Untuk mendukung rencana pencapaian bisnis dimaksud maka yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang menjadi prioritas utama Bank NTT yakni :

## Visi dan Misi Bank NTT :

Visi :

**"Menjadi Bank yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"**

Misi:

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
3. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
4. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana

To support the effectiveness of the above business processes, supporting elements are needed, namely human capital that needs to be developed through professional talent management, adequate infrastructure (IT and distribution network) that must be provided as well as complete operational policies and guidelines that are continuously adjusted accordingly development of the bank based on a strong foundation, corporate culture, good governance (GCG), risk management and effective internal control to support operating effectiveness and competitiveness.

2018-2020 financial projections are prepared in a comprehensive manner by taking into account macro and micro conditions and economic projections in 2018. In line with that, in 2018, the growth of bank assets is projected to grow 8% -10%, Loans are projected to grow an average of 9% -12 %, Third Party Funds are projected to grow 10% -13%.

To support the business achievement plan, what needs to be considered is the factors that are the main priority of Bank NTT, namely:

## Bank NTT's Vision and Mission:

Vision:

**"Becoming a Healthy, Strong and Reliable Bank"**

Mission:

1. A pioneer in driving the people's economy
2. Exploring the source of regional potential to be cultivated productively for the welfare of the people of NTT.
3. Increasing the source of Regional Original Income
4. Optimizing the intermediary function of the bank through raising and channeling funds



kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mengupayakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat NTT.

## Arah dan Kebijakan Bank

Pengembangan strategis bisnis Bank diarahkan pada pencapaian 2 (dua) grand target strategis yakni :

1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

Arah kebijakan Bank sejalan dengan sasaran utama bank dalam program transformasi BPD yakni : menjadi Bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

## Langkah-langkah Strategis Manajemen

Kebijakan Strategis Manajemen Tahun Buku 2018 – 2020 adalah "pertumbuhan yang berkelanjutan" (*Sustainable Growth*) yang bertumbuh pada pencapaian indikator, parameter dan rencana tindak berdasarkan 4 (empat) strategi Balance scorecard sebagai berikut :

1. Perspektif Financial :
  - Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable growth*); dengan strategi peningkatan pertumbuhan bisnis bank, inline dengan Visi dan Misi Bank NTT.

to the community in the form of credit to seek employment opportunities and business opportunities to increase the income of the people of NTT.

## Bank Direction and Policy

The development of the Bank's business strategy is directed at achieving 2 (two) strategic grand targets, namely:

1. Take an active role in reducing poverty and unemployment programs in NTT through productive business financing at the scale of micro, small and medium enterprises.
2. Encouraging the creation of accelerated economic growth through financing public service infrastructure and leading commodity industrialization in NTT.

The direction of the Bank's policy is in line with the bank's main target in the BPD transformation program namely: becoming a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to regional economic growth and equity.

## Strategic Management Steps

The Strategic Management Policy for the 2018 - 2020 Book Year is "sustainable growth" (*Sustainable Growth*) which grows on the achievement of indicators, parameters and action plans based on 4 (four) Balance scorecard strategies as follows:

1. Financial Perspective:
  - Maintain sustainable business growth (*sustainable growth*); with a strategy to increase bank business growth, inline with Bank NTT's Vision and Mission.

## 2. Perspektif Customer :

- Meningkatkan pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan sektor-sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan APBD/N Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga, dan perbaikan struktur pendanaan (Penerbitan Obligasi)
- Ikut serta dalam pembiayaan infrastruktur dan investasi baru di masing-masing kabupaten dan kota.

## 3. Perspektif *Internal Business Process* :

- Penyempurnaan kebijakan/pedoman yang berhubungan dengan bidang dana dan kredit
- Penyempurnaan aplikasi *core banking*.
- Diversifikasi produk-produk Bank NTT
- Memperkuat risk management dan tata kelola perusahaan yang baik.

## 4. Perspektif *Learning & Growth* :

- Peningkatan program pengembangan sumber daya manusia
- Peningkatan dan penguatan organisasi dan corporate culture yang berorientasi pada kinerja dan Sumber Daya Manusia

## Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia terus melakukan transformasi pembenahan di segala lini sebagai komitmen untuk memperbesar kontribusi BPD dalam membangun perekonomian daerah yang pada akhirnya memberi dampak bagi perekonomian nasional. Program transformasi diharapkan dapat menjadikan BPD menjadi kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah serta menjadi pilihan masyarakat.

Program transformasi dibangun pada 3 (tiga) pilar sebagai sasaran utama yakni :

## 2. Customer's Perspective:

- Increase the growth of MSME Credit based on the leading sectors of each district / city in accordance with the APBD / N of the Provincial Government, Regency and City.
- Increasing Third Party Funds, and improving the funding structure (Issuance of Bonds)
- Participate in financing infrastructure and new investments in each district and city.

## 3. Internal Business Process Perspective:

- Completion of policies / guidelines relating to the field of funding and credit
- Compilation of core banking applications.
- Diversification of Bank NTT products
- Strengthening risk management and good corporate governance.

## 4. Learning & Growth Perspective:

- Increased human resource development program
- Enhancing and strengthening organizations and corporate culture that is oriented towards performance and Human Resources

## Regional Development Bank Transformation Program

Regional Development Banks throughout Indonesia continue to reform reform in all lines as a commitment to enlarge the contribution of the BPD in developing regional economies which ultimately has an impact on the national economy. The transformation program is expected to be able to make the BPD competitive, strong and contributive to regional development as well as being the people's choice.

The transformation program is built on 3 (three) pillars as the main target, namely:

1. Peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan
2. Penguatan ketahanan dan kelembagaan
3. Peningkatan kontribusi untuk pembangunan daerah.

1. Increased business and service capabilities
2. Strengthening resilience and institutions
3. Increased contribution to regional development.

Ketiga sasaran utama di atas dilandasi oleh penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governace*), manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif serta budaya kerja (*corporate culture*) yang kuat serta didukung oleh permodalan, sumber daya manusia serta infrastruktur dan system operating procedure yang memadai.

The three main targets above are based on the implementation of good corporate governance, risk management, compliance and effective internal control and strong corporate culture and are supported by capital, human resources and infrastructure and operating procedures adequate.

Mengacu pada target dan strategis tersebut, maka pada Tahun Buku 2018, Bank NTT berhasil mencatat kinerja keuangan dengan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 342.070 (Tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah)

Referring to these targets and strategies, in Book Year 2018, Bank NTT succeeded in recording financial performance by posting a pre-tax profit of Rp. 342,070 (Three hundred forty two billion seventy million rupiahs)

## Iktisar Keuangan Bank NTT per 31 Desember 2018

NERACA	2014	2015	2016	2017	2018	NERACA
Jumlah Aset	8.318.305	9.551.162	9.597.927	10.379.174	11.215.954	Total Assets
Aset Produktif	7.477.861	8.569.144	8.529.880	9.365.667	10.318.670	Productive Assset
Kredit Yang Diberikan (Bruto)	5.499.936	6.559.610	7.297.412	7.995.393	8.769.591	Credit Provided (Gross)
CKPN Kredit	(67.655)	(89.313)	(127.548)	(158.982)	(130.070)	CKPN Credit
Dana Pihak Ketiga	6.272.516	7.281.385	6.795.263	7.012.950	7.607.449	Third-party funds
Jumlah Ekuitas	1.182.183	1.494.820	1.668.984	1.809.460	1.938.772	Total Equity
Modal Disetor	727.448	790.448	1.081.098	1.211.598	1.284.598	Paid-up capital
Modal Sumbangan	247	247	247	247	247	Donation capital
Dana Modal Disetor	42.900	167.650	48.500	35.000	43.479	Paid up capital

NERACA	2014	2015	2016	2017	2018	NERACA
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(64.443)	15.961	15.361	(2.786)	9.688	Benefits (losses) of defined benefit actuarial programs
Cadangan Umum & Cadangan Tujuan	226.460	256.994	289.934	319.165	349.944	General Reserves & Reserve Objectives
Laba Tahun Lalu	3.305	5.291	-	-	-	Last year's profit
Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak	246.266	258.229	233.844	246.236	250.816	Current Year Profit After Tax
Jumlah Lembar Saham yang ditempatkan & disetor	72.744.835 Lembar	79.044.835 Lembar	108.109.835 Lembar	121.159.835 Lembar	128.459.835 Lembar	Current Year Profit After Tax

Dalam Jutaan Rupiah

LABA (RUGI)	2014	2015	2016	2017	2018	PROFIT AND LOSS
Pendapatan Bunga	1.046.028	1.226.531	1.256.441	1.276.681	1.363.861	Interest income
Beban Bunga	(257.450)	(335.982)	(300.394)	(320.465)	(383.780)	Interest expense
Pendapatan Bunga Bersih	788.578	890.549	956.047	956.250	980.081	Net interest income
Pendapatan Operasional Lainnya	36.309	40.776	41.540	54.520	72.281	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(489.271)	(542.064)	(679.181)	(667.411)	(706.763)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	335.616	389.261	318.406	343.359	345.394	Operational profit
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(921)	(11.182)	3.521	(1.721)	(3.324)	Non-operating income (expenses)
Laba Sebelum Pajak	334.695	378.079	321.927	341.638	342.070	Profit before tax
Pajak Penghasilan	(88.429)	(119.850)	(88.083)	(95.402)	(91.254)	Income tax
Laba Bersih Setelah Pajak	246.266	258.229	233.844	246.236	250.816	Net Income After Tax

Dalam Jutaan Rupiah

LABA (RUGI)	2014	2015	2016	2017	2018	PROFIT AND LOSS
Penghasilan (beban) Komprehensif lain yang tidak direklasifikasikan ke Laba rugi	(16.310)	80.403	(599)	(18.147)	12.475	Other Comprehensive Income (expenses) that are not reclassified to profit or loss
Jumlah Laba Komprehensif	229.956	338.632	233.245	228.089	263.291	Total Comprehensive Profit
Laba Bersih Perlembar Saham	3.325	3.029	2.283	2.089	1.955	Share Net Profit

RATIO PENTING	2014	2015	2016	2017	2018	IMPORTANT RATIO
PERMODALAN :						PERMODALAN :
Kewajiban Penyediaan Modal (KPMM)	18.16	23.49	23.57	22.66	21.59	Capital Provision Obligations (KPMM)
ASET PRODUKTIF :						PRODUCTIVE ASSETS
Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif bermasalah terhadap total Asset Produktif dan Asset Non Produktif	1.15	1.80	2.03	2.77	2.14	Problematic Productive Assets & Non-Earning Assets Problems with Total Productive Assets and Non-Earning Assets
Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif	1.16	1.87	2.11	2.90	2.25	Productive Asset Problems with Total Asset Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Terhadap Asset Produktif	0.94	1.10	1.58	1.79	1.34	Reserves of Financial Asset Impairment Losses (CKPN) Against Productive Assets
NPL Gross	1.52	2.32	2.34	3.22	2.50	Gross NPL
NPL Net	0.37	1.05	0.77	1.37	1.27	Net NPL
RENTABILITAS (PROFITABILITAS USAHA) :						RENTABILITY (BUSINESS PROFITABILITY)
Return On Asset (ROA)	3.72	3.44	2.94	2.98	2.77	Return On Asset (ROA)
Return On Equity (ROE)	24.94	23.66	16.96	16.28	15.31	Return On Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	10.13	9.19	9.73	9.51	9.11	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69.24	69.28	75.72	67.37	75.95	Operational Costs for Operating Income (BOPO)

RATIO PENTING	2014	2015	2016	2017	2018	IMPORTANT RATIO
Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA)	77.87	76.83	78.24	71.30	69.50	Savings & Current Accounts against Total Third Party Funds (CASA)
LIKUIDITAS :						LIQUIDITY
Loan to Deposit Ratio (LDR)	87.68	90.09	107.39	114.01	115.28	Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio Lancar	119.57	121.32	119.40	119.46	124.05	Current Ratio
SOLVABILITAS :						SOLVABILITY :
Liabilitas terhadap total Aset	85.79	84.35	82.61	82.57	82.71	Liabilities against total assets
Liabilitas terhadap Ekuitas	603.64	538.95	475.08	473.61	478.51	Liabilities to Equity
KEPATUHAN :						OBEDIENCE :
Persentase pelanggaran BMPK)	-	-	-	-	-	Percentage of BMPK violations
Persentase pelampauan BMPK	-	-	-	-	-	Percentage of excess BMPK
Giro Wajib Minimum (GWM) - Utama Rp.	8.12	9.54	7.15	7.06	6.72	Statutory Reserves (GWM) - Main Rp.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan aktifitas bisnis sepanjang tahun buku 2018, kinerja Bank NTT mengalami :

1. Peningkatan pertumbuhan asset Bank yang mencapai 8,06% dari tahun 2017 sebesar Rp.10.3 triliun.
2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga:
  - a. Mengalami peningkatan sebesar 8.48% dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.01 triliun.
  - b. Target pertumbuhan minimal 10.78% dengan marker share 33% .
3. Peningkatan kualitas Penyaluran Kredit:
  - a. Mengalami peningkatan sebesar 9.68% dari tahun 2017 sebesar Rp.7.99 triliun
  - b. Menargetkan penyaluran kredit sebesar minimal 9% dengan market share 33%
4. Penguatan struktur modal bank, terutama dari setoran modal Pemerintah Daerah
  - a. Mengalami peningkatan sebesar 7.15 % dari tahun 2017 sebesar Rp.1.81 triliun

Furthermore, related to the development of business activities throughout the 2018 financial year, Bank NTT's performance has experienced:

1. Increased growth in bank assets which reached 8.06% from 2017 amounting to Rp. 10.3 trillion.
2. Collection of Third Party Funds:
  - a. Increased by 8.48% from 2017 of Rp. 7.01 trillion.
  - b. Minimum growth target of 10.78% with 33% marker share.
3. Improving the quality of Credit Distribution:
  - a. Increased by 9.68% from 2017 amounting to Rp.7.99 trillion
  - b. Targeting credit distribution of at least 9% with a 33% market share
4. Strengthening bank capital structure, especially from regional government capital deposits
  - a. Increased by 7.15% from 2017 amounting to Rp. 1.81 trillion

- b. Menargetkan pertumbuhan modal minimal 11.55 %
- 5. Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal control
  - a. Menargetkan tingkat kesehatan bank minimal sehat
  - b. Meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal
  - c. Menyelesaikan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal
  - d. Pencegahan terjadinya fraud.
- 6. Pengembangan produk dan jasa perbankan yakni peningkatan layanan jasa perbankan dan treasury.
- 7. Peningkatkan layanan jaringan kepada stakeholder, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kantor Pusat : 1 Unit
  - b. Kantor Cabang Utama : 1 Unit
  - c. Kantor Cabang Khusus ; 1 Unit
  - d. Kantor Cabang : 22 Unit
  - e. Kantor Cabang Pembantu : 40 Unit;
  - f. Kantor Kas : 64 Unit;
  - g. Kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) : 53 Unit;
  - h. Payment Point : 19 Unit;
  - i. Kas Mobil : 13 Unit;
  - j. Mesin ATM : 184 Unit;
  - k. EDC : 397 Unit
  - l. Laku Pandai : 62 Unit

- b. Targeting a minimum capital growth of 11.55%
- 5. Increased Risk Management, Compliance, Internal control
  - a. Targeting the health level of the bank is at least healthy
  - b. Improve bank compliance with internal and external provisions
  - c. Complete follow-up to internal and external audit findings
  - d. Prevention of fraud.
- 6. Development of banking products and services, namely improving banking and treasury services.
- 7. Enhancing network services to stakeholders, with details as follows:
  - a. Head Office: 1 Unit
  - b. Main Branch Office: 1 Unit
  - c. Special Branch Offices: 1 Unit
  - d. Branch Office: 22 Units
  - e. Sub-branch Office: 40 Units;
  - f. Cash Office: 64 Units;
  - g. Village Savings and Loan Unit Office (USPD): 53 Units;
  - h. Payment Point: 19 Units;
  - i. Car Cash: 13 Units;
  - j. ATM Machine: 184 Units;
  - k. EDC: 397 Units
  - l. Smart Laku: 62 Units

## DASAR PENILAIAN TATA KELOLA

### Ketentuan yang mendasari penilaian Tata Kelola :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun

## BASIC CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

### Provisions underlying the Corporate Governance assessment:

1. Law of the Republic of Indonesia Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Reuplik State Gazette of Indonesia Year 2007

- 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
2. Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
  7. Peraturan Bapepam-LK No:Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian laporan emiten dan perusahaan public.
  8. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.30 Tahun 2006 tentang Penetapan Pedoman *Code Of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*.
2. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Act Number 10 of 1998;
  3. Financial Services Authority Regulation Nomor 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks
  4. Financial Services Authority Circular Letter Number 13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
  5. Regulation of the Financial Services Authority Number: 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Soundness Rating of Commercial Banks
  6. Letter of the Financial Services Authority No. 14 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning Rating of Commercial Bank Soundness Levels;
  7. Bapepam-LK Regulation No: Kep-431 / BL / 2012 dated August 1, 2012 concerning the submission of reports of issuers and public companies.
  8. Decision of the Directors of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara No.30 of 2006 concerning Determination of Code of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance.

## Tujuan Penerapan Tata Kelola Di Bank NTT

Di tahun 2018 Bank NTT berkomitmen untuk terus melanjutkan dan berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di setiap aktivitas bisnisnya, dalam upaya mewujudkan perbankan yang berkinerja tinggi dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya visi Bank NTT yaitu "Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya".

## The Aim Of Application Of Corporate Governance In Bank Ntt

In 2018 Bank NTT is committed to continuing and striving to implement good corporate governance in each of its business activities, in an effort to realize high-performing banking by staying compliant with the rules and regulations to achieve the vision of Bank NTT, namely " Becoming a Healthy, Strong and Reliable Bank ".



Bahwa kelanjutan penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank NTT, masih mengacu pada Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduc dan Code of Corporate Governance, dimana pada ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* Bank NTT, yaitu :

1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan;
2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai FLOBAMORA
3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai FLOBAMORA;

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank NTT berpedoman sepenuhnya pada 5 (lima) prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Pencantuman prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesamaan pandangan, dan kesatuan langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank selalu berpedoman GCG dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

That the continuation of the implementation of *Good Corporate Governance* by Bank NTT, still refers to the Decree of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 30 of 2006 concerning the Determination of the Code of Conduc Guidebook and the Code of Corporate Governance, which stipulates the objectives of implementing *Good Corporate Governance* Bank NTT, namely:

1. Maximizing the value of Bank NTT by improving the principles adopted by the company, which in the end to achieve the stated vision and mission;
2. Realizing a professional NTT Bank management system characterized by work according to FLOBAMORA values
3. Increasing the independence and resilience of Bank NTT's organs to influences and practices that conflict with the principles of *Good Corporate Governance*;
4. Improve the performance of Bank NTT, protect the interests of stakeholders and improve compliance with applicable laws and regulations as well as the values of FLOBAMORA;

In implementing *Good Corporate Governance* (GCG), Bank NTT is fully guided in 5 (five) main principles, namely transparency, accountability, accountability, independence and fairness. Inclusion of GCG principles aims to create uniformity, similarity of views, and unity of operational steps and ensure that all levels of the bank are always guided by GCG in carrying out their daily work.

Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik GCG secara menyeluruh di Bank seperti yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, bank telah memiliki pedoman kebijakan dan implementasi GCG sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

In order to improve the implementation of overall GCG practices in the Bank as required in the applicable provisions, banks have established policy guidelines and implementation of GCG in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance For Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Number: 13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

# STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

## Structure, Mechanism and Corporate Governance Policy

Sebagai perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maka sesuai dengan mandat yang diberikan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai Fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

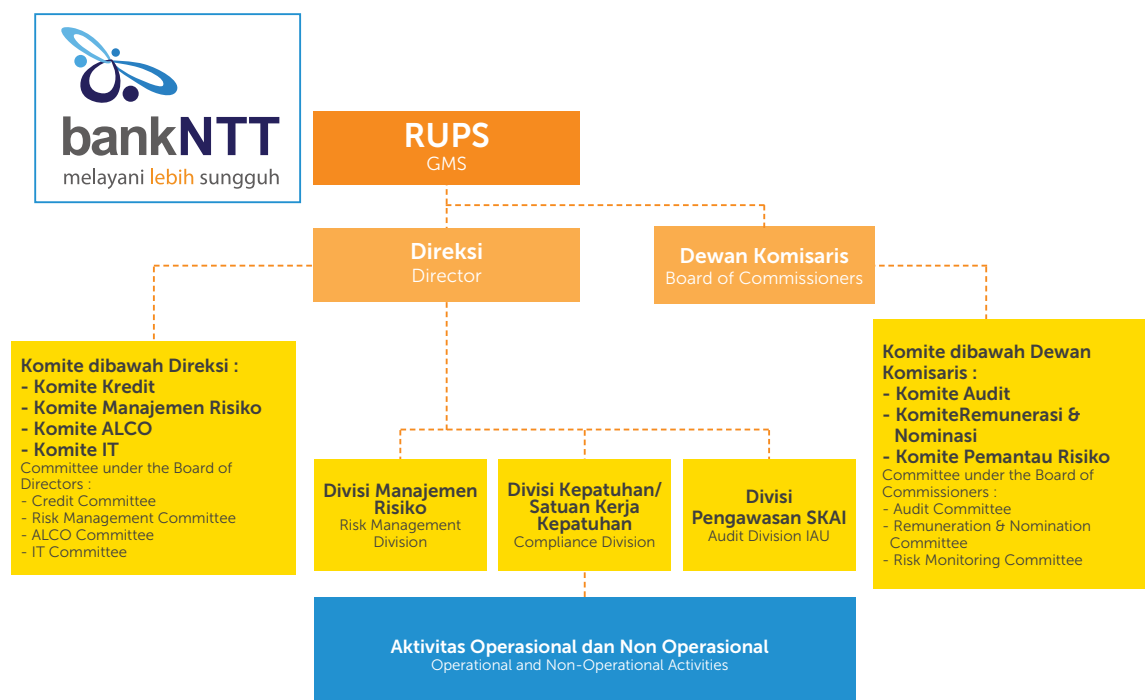
As a company incorporated as a Limited Liability Company with company organs consisting of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors, according to the mandate given, the Board of Commissioners and Directors have clear authority and responsibility according to their functions as mandated in the Articles of Association and applicable legislation.

Untuk lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dari sisi kepengurusan Bank NTT, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Demikian juga dengan Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantauan Risiko.

To further enhance the implementation of good Corporate Governance from the management side of Bank NTT, the Board of Directors is supported by an effective management structure. Likewise, the Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and the Risk Monitoring Committee.

### Struktur Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance Structure



## Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Secara legalitas Bank NTT merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan struktur perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui RUPS diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seperti struktur tata kelola perusahaan diatas jelas tergambar bahwa kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbedah tetapi dalam satu tatanan Visi dan Misi yang sama.

Pengelolaan bank dijalankan oleh Direksi yang didukung oleh struktur manajemen yang solid serta efektif. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepenasehatan Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan berada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana RUPS melakukan pengambilan keputusan penting terkait dengan pengelolaan Bank baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan arah perkembangan Bank NTT ke depan yang diinginkan tetapi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Governance Mechanism

Legally, Bank NTT is a company incorporated as a Limited Liability Company with a corporate structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors.

Through the GMS, the Board of Commissioners and the Directors are given the authority to manage the company in accordance with their respective duties and functions.

As the above corporate governance structure is clearly illustrated, the position of the Board of Commissioners and Directors is the same but has different duties and functions but in the same Vision and Mission order.

Bank management is run by a Board of Directors supported by a solid and effective management structure. However, in carrying out the supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Risk Monitoring Committee.

The highest authority in decision making is at the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the Bank's Articles of Association and the Law on Limited Liability Companies, where the GMS makes important decisions related to Bank management both long and short term in accordance with the direction of Bank NTT's development to desired front but must still refer to the applicable laws and regulations.

Secara kualitas Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelola serta melakukan fungsi pengawasannya terhadap Bank.

Untuk itu segala kemampuan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terukur lewat pencapaian yang diperoleh dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk setiap Tahun Buku berjalan.

### **Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**

Bank NTT membuat sejumlah kebijakan dalam menjalankan tata kelola perusahaan untuk mendukung struktur serta mekanisme tata kelola perusahaan pada Bank NTT. Kebijakan tata kelola Bank NTT disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi serta merujuk pada *best practice* industri perbankan di Indonesia.

Kebijakan tata kelola perusahaan di Bank NTT meliputi *Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure* dimana seluruh kebijakan yang ada diterapkan untuk setiap lini yang ada mulai dari lini manajemen sampai ke setiap karyawan Bank NTT.

### **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

In quality, the Board of Commissioners and the Directors collectively have the knowledge and expertise in carrying out the mandate given in managing and carrying out their supervisory functions towards the Bank.

For this reason, all abilities possessed by the Board of Commissioners and Directors are truly used to improve the performance of the company that is measured through the achievements obtained and accounted for at the General Meeting of Shareholders (GMS) for each fiscal year running.

### **Corporate Governance Policy**

Bank NTT has made a number of policies in implementing corporate governance to support the structure and mechanism of corporate governance at Bank NTT. Bank NTT's governance policies are prepared by referring to the applicable laws and regulations, vision and mission and referring to the banking industry best practices in Indonesia.

The corporate governance policy at NTT Bank includes *Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedures* where all existing policies are applied to every line that starts from the management line to every Bank NTT employee.

### **General Meeting of Shareholders (GMS)**

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ that has not been given to the Directors or Commissioners within the limits specified in the Law or Articles of Association.

Untuk itu melalui RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan atau pertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris berkaitan dengan pengelolaan serta pengawasan terhadap operasional bank.

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Mangangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris.
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit.
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan.
5. Mengubah Anggaran Dasar.
6. Membubarkan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam prakteknya biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

RUPS Tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS - LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan pengendalian.

## Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan terhadap Para Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS diadakan dengan memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS.

For this reason, through the GMS, Shareholders have the right to obtain information or accountability from the Directors and Commissioners regarding the management and supervision of bank operations.

The authority not given to the Directors and Board of Commissioners is as follows:

1. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Commissioners.
2. Approve merger, consolidation, expropriation or separation.
3. Approve the submission of an application so that the company is declared bankrupt.
4. Approved the extension of the company's establishment period ..
5. Change the Articles of Association.
6. Dissolves the company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual GMS and other GMS or in practice commonly called the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS-LB).

Annual GMS must be carried out within a period of no later than six months after the financial year ends, while the Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time based on the need for the sake of control.

## Procedure for Organizing a GMS

To carry out the General Meeting of Shareholders (GMS) the Board of Directors and the Board of Commissioners will summon the Shareholders within 14 (fourteen) days before the date of the GMS is held taking into account the date of the GMS and the date of the GMS.

Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dimana dalam surat tersebut tercantum tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai penyampaian materi bagi para pemegang saham serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS disediakan Bank sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh pemegang saham pengendali. Dalam pelaksanaan RUPS disesuaikan dengan agenda yang telah ditetapkan namun agenda RUPS dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS.

## Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sepanjang tahun buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 47, yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn di Kupang dengan agenda-agenda sebagai berikut :
  - a. Pengesahan Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2013 – 2017) sampai dengan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT Hasil Fit dan Proper Test;

Summons made by registered mail wherein the letter lists the date, time, place and agenda of the GMS accompanied by the submission of material to shareholders as well as notification that the material to be discussed at the GMS is provided by the Bank from the date of the GMS until the date of the GMS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by the controlling shareholders. In the implementation of the GMS it is adjusted to the predetermined agenda but the agenda of the GMS can be added according to the needs and insofar as it does not conflict with the company's interests if it is approved by the participants of the GMS.

## Organizing General Meeting of Shareholders (GMS)

Throughout the 2018 financial year PT the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara has held 4 (four) GMS, with details as follows:

1. Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held on January 25, 2018 as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders Number: 47, made by Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn in Kupang with an agenda - Agenda as follows:
  - a. Ratification of the Provisional Extension of Management Position (Board of Commissioners and Directors), PT East Nusa Tenggara Regional Development Bank Period 2013 - 2017) until the inauguration of the Board of Commissioners and Directors of the NTT Results of Fit and Proper Tests;

- b. Persetujuan dan Pengesahan Sistem dan Prosedur (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT;
- c. Lain-lain;

- b. Approval and Ratification of the System and Procedure (SOP) for the Election and / or Replacement of the Board of Commissioners and Directors of NTT Bank;
- c. Etc;

**Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2018 :**

**Results of the Decision of the Extraordinary GMS Agenda dated January 25, 2018:**

1. Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 47 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn Notaris di Kupang, terdapat beberapa keputusan RUPS sebagai berikut :
  - 1) Memperpanjang sementara Masa Jabatan Pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2017 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 333/KEP/HK/2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi hasil Fit dan Proper Test.
  - 2) SOP atau Sisdur yang sudah berlaku saat ini akan dipakai seharusnya untuk RUPS karena merupakan jabaran dari Anggaran dasar yang telah kita sepakati bersama;
  - 3) Bahwa RUPS-RUPS kedepan diposisi masa jabatan Dewan Komisaris dan Posisi Direksi tidak bersamaan dan harus ada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang Direksi sebelumnya yang tersisa sehingga dapat menyiapkan kelanjutan pergantian jabatan pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke depan.

1. That based on the agenda stipulated in the Minutes of Minutes of General Meeting of Shareholders of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 47 dated January 25, 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn Notary in Kupang, there are several resolutions of the GMS as follows :
  - 1) Prolonging the Provisional Term of Office (Board of Commissioners and Board of Directors) of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the period 2013 - 2017 according to Governor Decree Number: 333 / KEP / HK / 2017, dated 29 December 2017 concerning Provisional and Proper Test Provisions of the Board of Commissioners and Directors.
  - 2) The SOP or Sisdur that is currently in force will be used should be for the GMS because it is a description of the Articles of Association that we have agreed to together;
  - 3) Whereas the GMS in the future is positioned by the Board of Commissioners and the Board of Directors' position is not concurrent and there must be 2 (two) members of the Board of Commissioners and 2 (two) previous Directors remaining so that they can prepare for the continuation of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank in the future.



2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 78 yang dibuat Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn di Kupang dengan Agenda-agenda sebagai berikut :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas penyelenggaraan Perseroan Tahun Buku 2017.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Tahun Buku 2017 .
- 3) Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2018 – 2020, Penetapan KAP, Rencana Pembagian Laba Tahun Buku 2017 dan Penawaran Saham untuk Tahun 2018.
- 4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank NTT Tindak lanjut pembahasan Pasal RUPS TB 2016.

**Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 25 Mei 2018 :**

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 78 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn Notaris di Kupang, terdapat beberapa keputusan RUPS sebagai berikut :

- 1) Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Harsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam

2. The Annual General Meeting of Shareholders held on May 25, 2018, as stated in the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 78 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn in Kupang with the following agendas:

- 1) Directors' Accountability Report for the implementation of the 2017 Financial Year.
- 2) Board of Commissioners Accountability Report or Implementation of Supervision Function in the Year Book 2017.
- 3) Report on Work and Budget Plans for the Book Year 2018 - 2020, Determination of KAP, Plan for Profit Sharing 2017 and Stock Offer for 2018.
- 4) Modification of Bank NTT Pension Fund Regulation (PDP) Follow-up discussion on the 2016 TB AGM.

**Results of the Decision of the 2017 Annual GMS Agenda Decision May 25 2018:**

That based on the agenda set out in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number 78 dated May 25, 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn Notary in Kupang, there are several resolutions of the GMS as follows:

- 1) Receive and approve the Financial Statements for the 2017 Financial Year which have been audited by the Public Accountants Office of the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Harsono, Retno, Palilingan and Rekan as contained

Laporannya tertanggal 28 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" yang disertai dengan paragraph penjelasannya;

- 2) Menyatakan membebaskan tanggung jawab sepenuhnya dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selama tahun buku 2017 sepanjang pertanggung jawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud;
- 3) Pembagian Penggunaan Laba setelah pajak Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 246.235.515.005 adalah sebagai berikut :
  - Dividen 87.5% atau sebesar Rp. 215.456.075.629,-
  - Cadangan Umum: 12.5% atau sebesar Rp. 30.779.439.375
  - Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran Dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.
- 4) Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2017 sebesar 15% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan; Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2017 sebesar 4.5% yang dihitung setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
- 5) Mengesahkan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;

in the Report dated February 28, 2018 with the opinion "Fair in All Things The Material" which is accompanied by paragraph explanations;

- 2) Declare freeing the full responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the implementation of the management and supervision of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara during the 2017 financial year insofar as the accountability is reflected in the said report;
- 3) Distribution of Use of Profit after 2017 fiscal year tax of Rp. 246,235,515,005 are as follows:
  - Dividend 87.5% or Rp. 215,456,075,629, -
  - General Reserves: 12.5% or Rp. 30,779,439,375
  - The Board of Directors is empowered with substitution rights to determine the method of payment of dividends including all actions needed in connection with these matters including the payment schedule.
- 4) Ratifying Employee Production Services for Fiscal Year 2017 amounting to 15% of post-tax profit before reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds; Ratifying 2017 Production Management Services for Fiscal Year 4.5% which is calculated after tax before the reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;
- 5) Ratifying the Employee Welfare Fund for the Fiscal Year 2017 through the Employee Welfare Agency in the amount of 1.5% of profit after tax before the reserves of employee production services, management services and employee welfare funds;

- 6) Menyatakan setuju menerima Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2018 – 2020 sebagai berikut :
    - a. Menetapkan penyisihan biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2018 sebesar 16.5 % dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
    - b. Menetapkan penyisihan Biaya Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2018 sebesar 3 %, dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
    - c. Menetapkan penyisihan dana Kesejahteraan Karyawan TB 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
  - 7) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah kredit macet untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada RUPS secara rinci dan detail penyebab dan realisasi penyelesaiannya.
  - 8) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya selama tahun buku 2018.
  - 9) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi;
  - 10) Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank NTT tindak lanjut Pembahasan pada RUPS Tahunan TB 2016 dengan keputusan sebagai berikut :
- 6) Declare to agree to accept the Bank's Business Plan for the Fiscal Year 2018 - 2020 as follows:
    - a. Establishing allowance for Production Services for 2018 Fiscal Year amounting to 16.5% of after-tax Profit before reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;
    - b. Establish allowance for Management Production Services Fee for 2018 for 3%, from post-tax profit before reserves for employee production services, management production services and employee welfare funds;
    - c. Determine 2017 TB Employee Welfare fund provision through the Employee Welfare Agency in the amount of 1.5% of post-tax profit before the reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;
  - 7) To approve the authorization of the Board of Commissioners to evaluate and resolve the problem of bad credit, which will subsequently be reported to the GMS in detail and details of the causes and realization of the settlement.
  - 8) Giving authority to the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital in the form of money and other forms during the 2018 financial year.
  - 9) Giving authority to the Board of Commissioners to appoint and establish a Public Accounting Firm that is proficient and registered with the Financial Services Authority by observing the Board of Directors' proposals;
  - 10) Approved the Amendment of Bank NTT Pension Fund (PDP) Regulation to follow-up discussion at the 2016 TB Annual GMS with the following decisions:

- a. Perubahan besar MANFAAT LAIN DARI 1 (satu) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN Menjadi 2 (dua) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN.
- b. Kenaikan Manfaat Pensiun dari sampai dengan tahun 1991 sebesar 25 % , tahun 1992 s.d tahun 2000 sebesar 20 % , tahun 2001 s.d 2003 sebesar 15 % . Tahun 2004 s.d tahun 2009 sebesar 10 % , tahun 2010 s.d 2017 sebesar 5 % .
- c. Manfaat Pensiun minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dinaikan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah dan/atau diatas Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dinaikan menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan Pemberian Penambahan Manfaat Lain, tidak membebani Pendiri Dana Pensiun dengan Iuran Tambahan karena Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan penambahan Manfaat Pensiun diambil dari surplus Pendanaan Dana Pensiun.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01, yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kupang dengan agenda-agenda sebagai berikut :
  - 1) Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang proses pencalonan jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- a. Major changes in OTHER BENEFITS FROM 1 (one) MONTHLY PENSION BENEFITS to 2 (two) MONTHLY PENSION BENEFITS.
- b. The increase in pension benefits from 1991 to 25%, in 1992 in 2000 by 20%, in 2001 at 2003 in the amount of 15%. In 2004, in 2009, it was 10%, in 2010, in 2017, at 5%.
- c. A minimum pension benefit of Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs) is increased to Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs and / or above Rp.500,000 (five hundred thousand rupiahs) and below Rp.1,000,000 (one million rupiahs) raised to Rp.1,000,000 (one million rupiah).

This decision is based on the consideration of the Addition of Other Benefits, not to burden the Founder of the Pension Fund with Additional Contributions due to the Amendment to the Pension Fund Regulation which has resulted in the addition of the Pension Benefits taken from the surplus of the Pension Fund.

3. Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) was held on July 2, 2018 as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 01, made by Roberto Valentino Mambaitfeto, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Kupang with agendas as follows:
  - 1) Remuneration and Nomination Committee Report of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara about the process of nominating the position of President Director and General Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara;

- 2) Pemilihan Nama Calon-calun Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- 3) Lain – lain;

**Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa tanggal 02 Juli 2018 :**

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 tanggal 02 Juli 2018 oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kupang menetapkan beberapa keputusan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi calon Direktur Utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasoius Ola Masan dan Didakus Leba yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti *Fit and Proper Test*.
- 2) Menugaskan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan/mengadakan RUPS Luar Biasa lagi setelah adanya penetapan nama-nama Direktur Utama dan Direktur umum oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh salah satu Direksi yaitu antara Direktur Kredit atau Direktur Kepatuhan.
- 3) Menyetujui memberi kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan dan dan melantik Direktur Utama dan Direktur Umum setelah memperoleh *Fit And Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Selection of Candidates for President Director and General Director PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.
- 3) Others;

**Results of the Decision of the Extraordinary GMS Agenda July 2, 2018:**

That based on the Deed of Minutes of the Ordinary Luara General Meeting of Shareholders of the PT Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 01 dated July 2, 2018 by Roberto Valentino Mambaitfeto, Bachelor of Laws, Master of Notaries, Notary in Kupang determined the following decisions:

- 1) Approve proposals from the Remuneration and Nomination Committee of the President Director candidates, Absalom Sine and Hilarius Minggu and candidates for the General Director, namely Bonefasoius Ola Masan and Didakus Leba recommended by the Remuneration and Nomination Committee to follow the Fit and Proper Test.
- 2) Assign the Remuneration and Nomination Committee to carry out / hold an Extraordinary GMS again after the establishment of the names of the President Director and General Director by the Financial Services Authority, to fill the position left by one of the Directors, namely between the Director of Credit or the Compliance Director.
- 3) To approve the authorization of the Controlling Shareholders to determine and and inaugurate the President Director and General Director after obtaining the Fit And Proper Test from the Financial Services Authority (OJK), if each of them passes the position of President Director

(OJK), apabila yang lolos dari jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tersebut masing-masing 1 (satu) orang, namun apabila dari jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tersebut yang dinyatakan lolos oleh OJK masing-masing 2 (dua) orang maka untuk memilih salah satu dari dua orang tersebut, yakni calon Direktur Utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasius Ola Masan dan Didakus Leba.

- 4) Menyetujui apabila pejabat yang mengikuti Fit and Praper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan tidak lolos, maka pejabat tersebut tetap kembali pada jabatan semula.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 48 yang dibuat oleh SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kupang dengan agenda-agenda sebagai berikut :

- 1) Pembatalan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya 02 (dua) Juli 2018 (dua ribu delapan belas);
- 2) Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum.
- 4) Lain – lain;

and General Director (1 ) people, but if the position of President Director and General Director is declared to have passed by the OJK each of 2 (two) people then to choose one of the two people, namely the Main Director candidate namely Absalom Sine and Hilarius Minggu and the candidate General Director namely Bonefasius Ola Masan and Didakus Leba.

- 4) Agree that if the officials who follow the Fit and Praper Test of the Financial Services Authority (OJK) are declared not qualified, then the official will continue to return to his original position.

4. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) was held on November 28, 2018 as stated in the Declaration of the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 48 made by SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, Bachelor of Law, Master of Notary, notary in Kupang with the following agendas:

- 1) Cancellation of GMS Nomination of Directors prior to 02 (two) July 2018 (two thousand and eighteen);
- 2) Changes in the SOP for the Selection and Replacement of the Board of Commissioners and Directors;
- 3) Requesting the Remuneration and Nomination Committee of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara to re-select candidates for the Board of Commissioners, President Director and General Director.
- 4) Others;

**Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 28 November 2018 :**

Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 48 yang dibuat oleh SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kupang Notaris di Kupang menetapkan beberapa keputusan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Pembatalan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya 02 (dua) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR" Nomor : 01, tertanggal 02 (dua) November 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Kupang;
- 2) Menyetujui Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris;
- 3) Menyetujui dan meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum, dimana Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan hasilnya akan diputuskan oleh Pemegang Saham Pengendali;
- 4) Lain – lain ;
  - Segala permasalahan yang disampaikan oleh para Pemegang Saham antara lain berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, Gaji

**Results of the Extraordinary Keputusa GMS Implementation November 28, 2018:**

That based on the Statement of the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 48 made by SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, Bachelor of Law, Notary Master, notary in Kupang Notary in Kupang determined several decisions as follows:

- 1) Approve the Cancellation of the Nomination of the GMS of the Board of Directors before 02 (two) July 2018 (two thousand and eighteen), namely the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders "PT. DEVELOPMENT BANK OF THE EAST NUSA TENGGARA REGION "Number: 01, dated 02 (two) November 2018 (two thousand and eighteen) made by Roberto Valentino Mambaitfeto, Bachelor of Law, Master of Notary, in Kupang;
- 2) Approving Changes to SOP for the Selection and Replacement of the Board of Commissioners;
- 3) Approve and request the Remuneration and Nomination Committee of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for re-selection of candidates for the Board of Commissioners, President Director and General Director, where the Remuneration and Nomination Committee will consult with the Controlling Shareholders and the results will be decided by the Controlling Shareholders;
- 4) Others;
  - All issues presented by the Shareholders are related to the settlement of bad loans, Directors, Board of Commissioners and

Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Bank NTT, pemilikan bangunan untuk kantor Cabang Utama di Kupang, Kantor Bank NTT di Surabaya dan Mbai, penggunaan asset-asset pemda yang dipakai oleh Bank NTT sebagai kantor, tetapi belum melakukan pembayaran, selisih kas antara Pemda Ngada dan Bank NTT Cabang Bajawa, akan dijadikan catatan dan diselesaikan oleh manajemen yang baru yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang baru;

- Meminta kepada Notaris untuk menuangkan hasil Rapat ini ke dalam suatu Akta Notariil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memastikan seluruh acara dan keputusan dicatat secara lengkap dan benar;

### **Tindak Lanjut Hasil Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan RUPS LB Tahun 2018.**

Bank NTT Salaries, building ownership for Main Branch offices in Kupang, NTT Bank Offices in Surabaya and Mbai, the use of local government assets used by Bank NTT as an office, but has not made payments, the cash difference between the Ngada Regional Government and the NTT Branch of Bajawa Bank will be recorded and completed by the new management, namely the new Board of Commissioners and Directors;

- Request the Notary to put the results of this Meeting into a Notarial Deed in accordance with applicable laws and regulations to ensure that all events and decisions are recorded in a complete and correct manner;

### **Follow-Up to the Results of the Decision of the Agenda for the Annual GMS for 2018 Book Year and the 2018 LB GMS.**



RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
I	Tindaklanjut Hasil Keputusan RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 25 Januari 2018 di Kupang <a href="#">FollowResults of the GMS 2018 Book Decision dated January 25, 2018 in Kupang</a>		
1.	Memperpanjang sementara Masa Jabatan Pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode 2013 – 2017 sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 333/KEP/HK/2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi hasil Fit dan Proper Test. <a href="#">Provisionally prolonging the Management Position (Board of Commissioners and Board of Directors) of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the period 2013 - 2017 according to Governor Decree Number: 333 / KEP / HK / 2017, dated 29 December 2017 concerning Provisional and Proper Test Provisions of the Board of Commissioners and Directors.</a>	Ditindaklanjuti Oleh Komite Remunerasi <a href="#">Followed by the Remuneration Committee</a>	Perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 333/KEP/HK/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan Pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi Hasil Fit dan Proper Test. <a href="#">Extended based on the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number: 333 / KEP / HK / 2017 dated 29 December 2017 concerning the Provisional Extension of the Board of Commissioners and Directors' Term of Office until the Inauguration of the Fit and Proper Test Board of Commissioners and Directors.</a>
2.	Persetujuan dan Pengesahan Sistem dan Prosedur (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT; <a href="#">Approval and Ratification of the System and Procedure (SOP) for the Election and / or Replacement of the Board of Commissioners and Directors of NTT Bank;</a>	Ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi Dewan Komisaris Bank NTT. <a href="#">Followed by the Bank NTT Board of Commissioners' Remuneration Committee.</a>	Bank telah memiliki Sistem dan Prosedur Pemilihan/ Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.01 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018 <a href="#">The Bank has a System and Procedure for Selecting Commissioners and Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara No.01 Year 2018 dated 25 January 2018</a>

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
II	Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 25 Mei 2018 : Results of the Decision of Agenda for Annual GMS for Fiscal Year 25 May 2018:		
1.	<p>Pembagian Penggunaan Laba setelah pajak Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 246.235.515.005 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dividen 87.5% atau sebesar Rp. 215.456.075.629,-</li> <li>- Cadangan Umum: 12.5% atau sebesar Rp. 30.779.439.375</li> <li>- Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran Dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.</li> </ul> <p>Distribution of Use of Profit after 2017 fiscal year tax of Rp. 246,235,515,005 is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dividend 87.5% or Rp. 215,456,075,629, -</li> <li>- General Reserves: 12.5% or Rp. 30,779,439,375</li> <li>- Directors are authorized with substitution rights to determine how to pay dividends including all actions needed in connection with these matters including the payment schedule.</li> </ul>	<p>Ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT</p> <p>Followed by the HR Division and the Bank NTT Operational Division.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti sesuai Keputusan RUPS.</p> <p>Follow up according to the GMS Decision.</p>
2.	<p>Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2017 sebesar 15% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan; Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2017 sebesar 4.5% yang dihitung setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan</p> <p>Ratifying Employee Production Services for Fiscal Year 2017 of 15% of post-tax profit before the reserves of employee production services, management services and employee welfare funds; Ratifying 2017 Production Management Board for 4.5% which is calculated after tax before employee production service reserves, management production services and employee welfare funds</p>	<p>Ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT</p> <p>Followed up by the HR Division and Operational Division of Bank NTT</p>	<p>Menetapkan Penyisihan biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2017 sebesar 15% dari laba sebelum pajak sebelum Cadangan Jasa Produksi karyawan, Jasa Produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan; Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus 4.5% yang dihitung setelah Pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan</p> <p>Establishing 2017 Production Services Allowance for 15% of profit before tax before Reserve Employee Production Services, Management Production Services and Employee Welfare Funds; Passing 4.5% Management Production Services calculated after Taxes before employee production service reserves, management production services and employee welfare funds</p>

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
3	Mengesahkan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;	Ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT Followed by the HR Division and Operational Division of Bank NTT	Menetapkan Penyisihan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari Laba sebelum Pajak sebelum Cadangan Jasa Produksi Karyawan, Jasa Produksi Pengurus dan Dana Kesejahteraan Karyawan Establishing Employee Welfare Funds for 2017 through the Employee Entity Board of 1.5% of Pre-Tax Profit before Employee Production Services, Management Production Services and Employee Welfare Funds

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
4	<p>Menyatakan setuju menerima Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2018 – 2020 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan penyisihan biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2018 sebesar 16.5 % dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;</li> <li>- Menetapkan penyisihan Biaya Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2018 sebesar 3 %, dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;</li> <li>- Menetapkan penyisihan dana Kesejahteraan Karyawan TB 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;</li> </ul> <p>states agree to accept the Bank's Business Plan for the Fiscal Year 2018 - 2020 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Establish allowance for Production Services for 2018 Book Year amounting to 16.5% of post-tax Profit before employee production service reserves, management production services and employee welfare funds;</li> <li>- Establish allowance for Management Production Services Fee for 2018 for 3%, from post-tax profit before reserves for employee production services, management production services and employee welfare funds;</li> <li>- Determine 2017 TB Employee Welfare fund provision through the Employee Welfare Agency in the amount of 1.5% of post-tax profit before the reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;</li> </ul>	<p>Ditindaklanjuti Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT.</p> <p>Followed by the Board of Commissioners and Directors of PT. Bank NTT.</p>	<p>Menetapkan penyisihan biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2018 sebesar 16.5 % dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan, penyisihan Biaya Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2018 sebesar 3 %, dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan, penyisihan dana Kesejahteraan Karyawan TB 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;</p> <p>Establishing allowance for Production Services for 2018 Fiscal Year amounting to 16.5% of after-tax earnings before reserves for employee production services, management services and employee welfare funds, provision of Management Production Services Fee for 2018 for 3%, after post-tax profit before employee production reserves , management production services and employee welfare funds, 2017 TB Employee Benefits fund provision through the Employee Welfare Agency amounting to 1.5% of post-tax profit before the reserve of employee production services, management production services and employee welfare funds;</p>

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
5	<p>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya selama tahun buku 2018.</p> <p>Giving authority to the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital in other forms during the 2018 financial year.</p>	<p>Ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Bank NTT</p> <p>Followed by the Board of Commissioners of Bank NTT</p>	<p>Telah ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor :</p> <p>1. Surat No.06/Dk Bank NTT/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal : Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor</p> <p>2. Surat Nomor : 22/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT</p> <p>3. Surat No.130/Dk Bank NTT/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal : Persetujuan Penambahan Setoran pada Modal Disetor.</p> <p>Has been followed up based on letter Number:No.</p> <p>1. Letter06 / Dk Bank NTT / I / 2018, 23rd January 2018, regarding: Capital Addition Agreement on Paid-in Capital</p> <p>2. Letter Number: 22 / DK Bank NTT / III / 2018 dated 13 March 2018 Subject: Additional Approval of NTT Bank's Capital Deposit</p> <p>3. Letter No.130 / Dk Bank NTT / XII / 2018 dated 17 December 2018 subject: Approval of Addition of Deposit to Paid-in Capital.</p>

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
6	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi; Giving authority to the Board of Commissioners to appoint and establish a Public Accounting Firm that is proficient and registered with the Financial Services Authority by observing the Board of Directors' proposals;	Ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Bank NTT Followed by the Board of Commissioners of Bank NTT	Ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor : 50/DK bankNTT/ VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal : Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pemeriksaan Keuangan Bank NTT yang berakhir periode 30 Juni 2018 dan yang berakhir 31 Desember 2018 serta pendampingan Obligasi berkelanjutan Tahun Buku 2018. Followed up based on letter Number: 50 / DK bankNTT / VII / 2018 dated 9 July 2018 concerning: Procurement of Public Accountant Services and Public Accountants' Office of Bank NTT's Financial Examination that expires 30 June 2018 and ends 31 December 2018 and Continuing bond assistance for Book Year 2018.

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
7	<p>Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank NTT tindak lanjut Pembahasan pada RUPS Tahunan TB 2016 dengan keputusan sebagai berikut :</p> <p>a. Perubahan besar MANFAAT LAIN DARI 1 (satu) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN Menjadi 2 (dua) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN.</p> <p>b. Kenaikan Manfaat Pensiun dari sampai dengan tahun 1991 sebesar 25 % , tahun 1992 s.d tahun 2000 sebesar 20 % , tahun 2001 s.d 2003 sebesar 15 % . Tahun 2004 s.d tahun 2009 sebesar 10 % , tahun 2010 s.d 2017 sebesar 5 % .</p> <p>c. Manfaat Pensiun minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dinaikan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah dan/atau diatas Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dinaikan menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).</p> <p>d. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan Pemberian Penambahan Manfaat Lain, tidak membebani Pendiri Dana Pensiun dengan luran Tambahan karena Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan penambahan Manfaaf Pensiun diambil dari surplus Pendanaan Dana Pensiun.</p> <p><a href="#">Approved the Amendment of Bank NTT Pension Fund (PDP) Regulation to follow-up Discussion at the 2016 TB Annual GMS with the following decisions:</a></p> <p><a href="#">a. Major changes to OTHER BENEFITS FROM 1 (one) MONTH PENSION BENEFITS To 2 (two) times MONTHLY PENSION BENEFITS.</a></p> <p><a href="#">b. The increase in Pension Benefits from 1991 to 25%, from 1992 to 2000 at 20%, from 2001 to 2003 at 15%. 2004 to 2009 amounted to 10%, in 2010 to 2017 at 5%.</a></p> <p><a href="#">c. A minimum pension benefit of Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs) is increased to Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs and / or above Rp.500,000 (five hundred thousand rupiahs) and below Rp.1,000,000 (one million rupiahs) are raised to Rp.1,000,000 (one million rupiah) .This</a></p> <p><a href="#">d. decision is based on consideration of Granting Addition to Other Benefits, does not burden the Founder of the Pension Fund with Additional Contributions due to the Amendment of Pension Fund Regulations which resulted in the addition of Pension Funds taken from the Pension Fund Funding</a></p>	<p>Ditindaklanjuti oleh Direksi Bank NTT</p> <p><a href="#">Followed by the Board of Directors of Bank NTT</a></p>	<p>Telah ditindaklanjuti sesuai Keputusan Direksi Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank NTT Yang Telah Disahkan Dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/NB.1/2018</p> <p><a href="#">Followed up according to Directors Decree Number: 56 of 2018 concerning Pension Fund Regulations Pension of NTT Bank Ratified by the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-59 / NB.1 / 2018</a></p>

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
III	Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa tanggal 02 Juli 2018 : Results of the Decision of the Extraordinary GMS Agenda dated 02 July 2018:		
1.	Menyetujui usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi calon Direktur Utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasoius Ola Masan dan Didakus Leba yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti Fit and Proper Test. Approved the proposal from the Remuneration and Nomination Committee of the President Director namely Absalom Sine and Hilarius Sunday and candidates for General Director namely Bonefasoius Ola Masan and Didakus Leba recommended by the Remuneration and Nomination Committee to participate in Fit and Proper Test.	Ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Bank NTT. Followed by the Bank NTT Board of Commissioners' Remuneration Committee.	Telah ditindaklanjuti dan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Fit and Proper Test. It has been followed up and submitted to the Financial Services Authority to conduct a Fit and Proper Test.
2	Menugaskan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan/mengadakan RUPS Luar Biasa lagi setelah adanya penetapan nama-nama Direktur Utama dan Direktur umum oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh salah satu Direksi yaitu antara Direktur Kredit atau Direktur Kepatuhan. Assign the Remuneration and Nomination Committee to carry out / hold an Extraordinary GMS again after the appointment of the names of the President Director and General Director by the Financial Services Authority, to fill the position left by one of the Directors, namely between the Director of Credit or the Compliance Director.	Ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Bank NTT Followed by the Board of Commissioners of Bank NTT	Telah ditindaklanjuti Oleh Dewan Komisaris dengan mengadakan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Nopember 2018 sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 48. It has been followed up by the Board of Commissioners by holding an Extraordinary GMS on 28 November 2018 in accordance with the Declaration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 48.



RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
IV	Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 28 November 2018 : Results of the Extraordinary GMS Decision dated November 28 2018:		
1.	Menyetujui Pembatalan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya 02 (dua) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR" Nomor : 01, tertanggal 02 (dua) November 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Kupang; Approved the Cancellation of the Nomination of the GMS of the Board of Directors before 02 (two) July 2018 (two thousand and eighteen), namely the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders "PT. DEVELOPMENT BANK OF THE EAST NUSA TENGGARA REGION "Number: 01, dated 02 (two) November 2018 (two thousand and eighteen) made by Roberto Valentino Mambaitfeto, Bachelor of Law, Master of Notary, in Kupang;	Ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Bank NTT Followed by the Board of Commissioners of Bank NTT	Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris membatalkan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya, tanggal 02 Juli 2018.. Follow-up by the Board of Commissioners canceled the previous Board of Directors Nomination GMS, July 2, 2018 ...
2	Menyetujui Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris; Approved Changes to the SOP for the Selection and Replacement of the Board of Commissioners;	Ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT Followed by the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT	Telah merubah dan menetapkan SOP Pemilihan/ Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank NTT Nomor 48 tanggal 28 November 2018. Has changed and determined the SOP of the Selection / Replacement of Members of the Board of Commissioners and Directors in accordance with the Minutes of Extraordinary GMS of Limited Liability Company PT. NTT Bank Number 48 dated 28 November 2018.

RUPS Tahunan			
No	Agenda AGENDA	Tindak Lanjut Tindak Lanjut	Keterangan Keterangan
3	Menyetujui dan meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum, dimana Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan hasilnya akan diputuskan oleh Pemegang Saham Pengendali. <i>Approve and request the Remuneration and Nomination Committee of PT. The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the re-selection of candidates for the Board of Commissioners, President Director and General Director, where the Remuneration and Nomination Committee will consult with the Controlling Shareholders and the results will be decided by the Controlling Shareholders.</i>	Ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT <i>Followed up by Bank NTT's Remuneration and Nomination Committee.</i>	Telah ditindaklanjuti dengan menyeleksi ulang Calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Utama . <i>Follow up was done by re-selecting Candidates for the Board of Commissioners, President Director and Managing Director.</i>

## Struktur Organisasi

Pelaksanaan tata kerja Bank NTT Tahun Buku 2018 mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Penerapan ketentuan ini masih akan terus dievaluasi sejalan dengan perkembangan usaha dan rencana bisnis bank.

## Hubungan Direksi Dan Dewan Komisaris Bank NTT

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kota

## Organizational Structure

The working procedure of Bank NTT 2018 refers to the Board of Directors Decree Number: 29 of 2014 dated April 1, 2014 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT. East Nusa Tenggara Development Bank. The implementation of this provision will continue to be evaluated in line with the development of the business and the bank's business plan.

## Relationship Of The Board Of Directors And The Board Of Commissioners Bank NTT

In the governance of Bank NTT the relationship between the Board of Commissioners and the Directors is based on the provisions of the Republic of Indonesia Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Republik State Gazette of Indonesia Number: 106; Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) and PT's Articles of Association The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara as stipulated in the Articles of Association Number: 122 dated 12 April 1999 was made before Silvester Joseph Mambaitfeto,

Kupang, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014, dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya prinsip-prinsip:

1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, baik itu tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan nasihat terhadap seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Bank NTT;
2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam artian senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme tertulis atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
4. Bahwa Direksi bertanggung jawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris;
5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan tersebut.

SH, Notary in the City of Kupang, as amended several times and lastly by the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Number : 61 July 10, 2014, made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Notice of Amendment to Company Data Number: AHU-34837.40.22. 2014 dated October 9, 2014 and was registered in the Register of Companies Number: AHU-0104499.40. 80.2014 of 2014, wherein the relationship is known by the principles of:

1. Respect each other's responsibilities and authorities, both the responsibility and authority of the Board of Commissioners in supervising and advising all of the Directors' policies and the responsibilities and authorities of the Board of Directors in managing the Bank NTT;
2. That the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a written mechanism or correspondence that can be accounted for;
3. That the Board of Commissioners has the right to obtain information from Bank NTT in a timely, measurable and complete manner;
4. That the Board of Directors is responsible for the timeliness, accuracy and completeness of the submission of information to the Board of Commissioners;
5. That in the working relationship between the organs of the Board of Commissioners and the organ of the Board of Directors that have not been regulated, the Board of Commissioners and the Board of Directors must make prior agreement on matters that have not been determined.

## DEWAN KOMISARIS

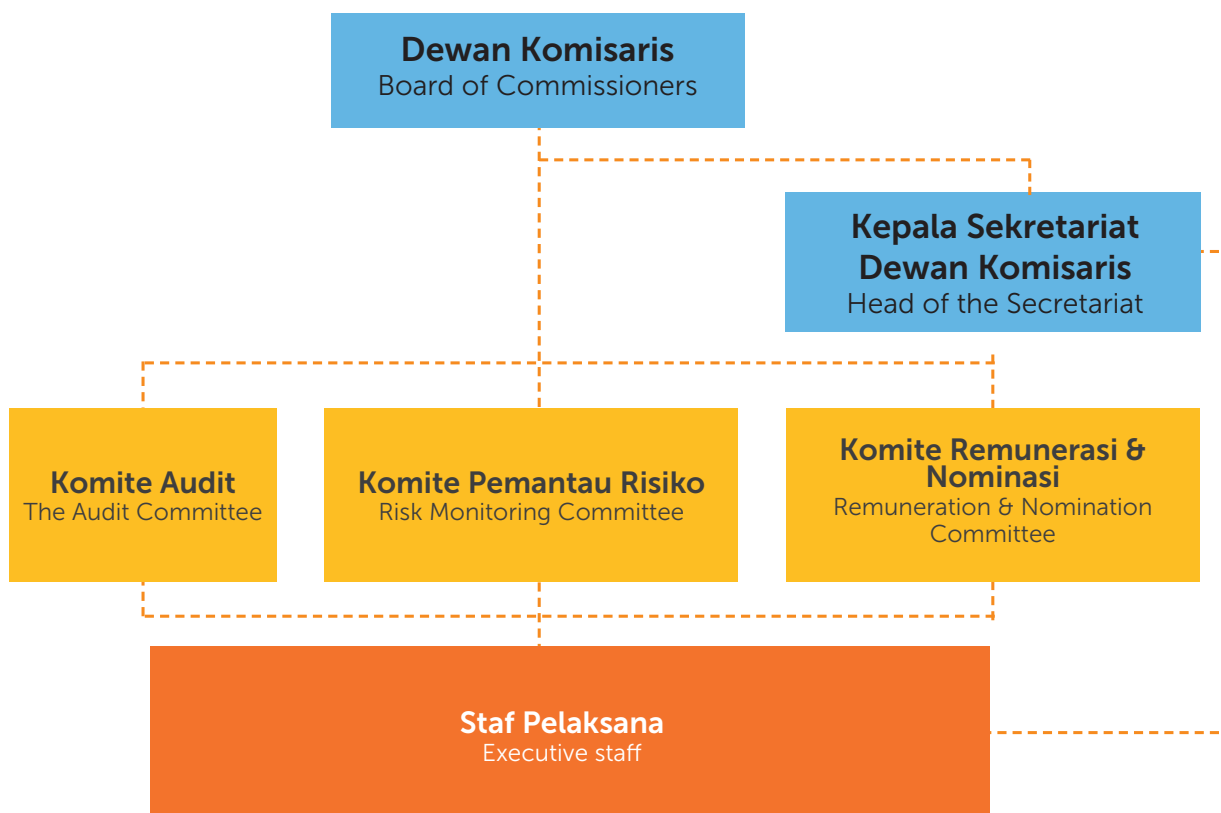
Board of Commissioners

### Struktur Organisasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Rancangan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dimana ketentuan tersebut memuat tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal dan internal, standar operasional dan prosedur sesuai dengan misi jabatan, yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kerja, sebagai berikut:

### Organizational Structure of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities the Board of Commissioners has guidelines and procedures for carrying out the work of the Board of Commissioners as stipulated in the Draft Decree of the Board of Commissioners of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number 03 Year 2010 dated May 7, 2010 concerning Bank NTT Board of Commissioners' Organizational Structure and Job Manual where the provisions contain the main tasks, additional duties, authority of office, responsibility, work relations with external and internal parties, operational standards and procedures in accordance with the mission of the position, which are described in the organizational structure and work procedures, as follows:



## Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Menurut ketentuan anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditegaskan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance* Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Selain itu Dewan Komisaris diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berhak membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi guna mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya.
3. Berhak memperoleh akses akan informasi Bank NTT secara tepat waktu dan lengkap.
4. Berhak memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategic yang diusulkan oleh Direksi,
5. Berhak mengevaluasi, memantau penerapan manajemen risiko, dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

## Composition, Criteria and Independence of the Board of Commissioners

According to the provisions of the Articles of Association of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara which are affirmed by the Decree of the Board of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 30 of 2006 concerning the Establishment of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance as the organ of the company in general supervision and provide advice to the Directors in running the company.

In addition, the Board of Commissioners is given duties, authority and responsibilities, including:

1. Entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if the member of the Board of Directors acts in contravention of the articles of association and / or applicable legislation;
2. Have the right to form an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee to support the effectiveness of their duties and responsibilities.
3. Have the right to get access to Bank NTT information in a timely and complete manner.
4. Have the right to provide recommendations regarding the remuneration of members of the Board of Directors, evaluate and approve management decisions and strategic actions proposed by the Board of Directors,
5. Have the right to evaluate, monitor the implementation of risk management, and follow up on internal and external audit findings.

## Komposisi Dewan Komisaris

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 83 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh Bank NTT memenuhi ketentuan GCG bank yang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Jumlah Komisaris Independen Bank NTT terdiri dari 2 (dua) orang yakni Sukardan Aloysius dan Samuel Djoh Despansianus.

Perangkapan hanya pada 1 anggota Dewan Komisaris yakni Hali Lanan Elias selain menjabat sebagai Komisaris Utama, juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun buku 2018 diatur berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 76, tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;

## Composition of the Board of Commissioners

Following up on the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, then in the General Meeting of Shareholders as stated in the Deed of Appointment of Members of the Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 83 dated May 28, 2018, made by Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn, it has been determined that the composition of the membership of the Board of Commissioners is 3 (three) people. The Independent Board of Commissioners owned by Bank NTT fulfills the requirements of the bank's GCG which states that the number of Independent Commissioner members is at least 50% of all existing members of the Board of Commissioners. The number of Bank NTT Independent Commissioners consists of 2 (two) people namely Sukardan Aloysius and Samuel Djoh Despansianus.

The only arrest was for one member of the Board of Commissioners, namely Hali Lanan Elias besides serving as the President Commissioner, he also served as the Head of the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency East Nusa Tenggara Province.

The composition of the Board of Commissioners of Bank NTT in the 2018 fiscal year is regulated based on the following provisions:

1. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 76, dated January 23, 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;

2. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 157, tanggal; 30 April 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;
  3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 77, tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;
  4. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 61, tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang;
  5. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 06, tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat Gervatius Portasius Mude, SH di Maumere;
  6. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 47 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H.,M.Kn.
  7. Akta Pernyataan Pengangkatan Anggota Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor : 83, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H.,M.Kn.
  8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 166/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pengangkatan Saudara Hali Lanan Elias, sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
2. Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 157, date; April 30, 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;
  3. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 77, dated 12 June 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;
  4. Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 61, dated 10 July 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notary in Kupang;
  5. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 06, August 11, 2017 made by Gervatius Portasius Mude, SH in Maumere;
  6. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 47 dated January 25, 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn.
  7. Deed of Appointment of Members of the Board of Directors and Commissioners of Limited Liability Companies "PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara "Number: 83, May 28, 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn.
  8. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 166 / KEP / HK / 2018 dated 18 May 2018 concerning Appointment of Brother Hali Lanan Elias, as President Commissioner of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara;

9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 167/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pengangkatan Saudara Sukardan Aloysius, sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despansianus, sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
11. Surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-68/PB.12/2018 tanggal 13 April 2018, perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT BPD Nusa Tenggara Timur, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

9. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 167 / KEP / HK / 2018 dated 18 May 2018 concerning Appointment of Sukardan Aloysius, as Independent Commissioner of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara;
10. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara / Controlling Shareholder of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 168 / KEP / HK / 2018 dated 18 May 2018 concerning the Appointment of Brother Samuel Djoh Despansianus, as Independent Commissioner of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara;
11. Letter of the Financial Services Authority of East Nusa Tenggara Province Number: SR-68 / PB.12 / 2018 dated 13 April 2018, concerning: Submission of Copies of Decision on Capability and Compliance Assessment of Nomination of PT BPD East Nusa Tenggara Management, the composition of the Board of Commissioners is as following:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Periode
Hali Lanan Elias	Komisaris Utama Main Commissioner	2018 – 2022
Sukardan Aloysius	Komisaris Independen Independent Commissioner	2018 – 2022
Semuel Djoh Despansianus	Komisaris Independen Independent Commissioner	2018 – 2022

Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi yang disyaratkan oleh OJK melalui *fit and proper test* serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain:

All members of the Bank NTT Board of Commissioners have good integrity, competence and reputation, this is evidenced by the competency tests required by OJK through the fit and proper test and fulfilling OJK requirements, including:



1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS;
3. Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.

### Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPS, dan sejalan dengan pemberian rekomendasi tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Kriteria utama Dewan Komisaris yaitu :

#### Persyaratan Umum :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
- 3) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter;
- 5) Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Srata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;

1. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia;
2. Replacement and / or appointment of the Board of Commissioners by the GMS;
3. All Members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test; and
4. There are no members of the Board of Commissioners who have family ties to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors.

### Criteria for the Board of Commissioners

Each appointment and / or replacement of members of the Board of Commissioners always pays attention to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and is subsequently decided by the GMS, and in line with the provision of these recommendations, the Remuneration and Nomination Committee has determined the main Criteria for the Board of Commissioners, namely:

#### General Requirements:

- 1) Faith in God Almighty.
- 2) Faithful and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia
- 3) Not directly or indirectly involved in activities of betrayal to the State;
- 4) Physical and spiritual health as evidenced by a certificate about the results of a complete examination from a doctor;
- 5) Educated and certified at least Srata 1 (S1) as evidenced by photocopies of diplomas legalized by authorized officials;
- 6) Their voting rights are not revoked based on court decisions;

7) Mempunyai integritas yang meliputi syarat :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

8) Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan :

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
- Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

9) Memiliki kompetensi yang meliputi syarat :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan

7) Having integrity which includes the following conditions:

- Having good character and morals, among others, is shown by being obedient to the applicable provisions, including never being convicted of a criminal offense that is detrimental to the State's finances and / or related to the financial sector;
- Having a commitment to comply with applicable laws and regulations;
- Having a commitment to the development of sound Bank operations;

8) Having a financial reputation, among others, proven by:

- Do not have bad credit;
- Does not have debt due and has problems;
- Have never been declared bankrupt and have never been a shareholder, a member of the board of commissioners or a board of directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt based on the provisions of the court within the last 5 (five) years before being nominated; and
- Have a commitment to make necessary efforts if the Bank faces capital and liquidity difficulties.

9) Having competencies which include the following conditions:

- Adequate and relevant knowledge in banking in his position;
- Experience in banking and / or financial fields

### **Persyaratan Khusus Calon Anggota Dewan Komisaris :**

- 1) Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Calon/kandidat yang telah ditetapkan oleh RUPS wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi//profesi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal level 2 untuk komisaris independen dan minimal level 1 untuk komisaris utama.  
Apabila calon komisaris belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan namun telah memenuhi semua persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko dengan tidak menunda target tanggal pendaftaran ke OJK.
- 3) Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan pada saat menjabat.
- 4) Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Dewan Komisaris yang dinyatakan secara tertulis.
- 5) Menyampaikan surat lamaran dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan *curriculum vitae*.

### **Persyaratan Lainnya Calon Anggota Dewan Komisaris :**

- 1) Sebelum mengikuti test uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Otoritas Jasa Keuangan, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No,39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris.

### **Special Requirements for Prospective Members of the Board of Commissioners:**

- 1) Age when applying for the first time does not exceed 60 (sixty) years.
- 2) Candidates / candidates who have been determined by the GMS must have a risk management certificate issued by the certification body // profession recognized by the Financial Services Authority (OJK) of at least level 2 for independent commissioners and at least level 1 for the main commissioner.  
If the prospective commissioner does not yet have the certificate as required but has fulfilled all other special requirements, then the candidate concerned is permitted to take part in the risk management certification process by not delaying the target date of registration to the OJK.
- 3) Not being an administrator or member of a political party at the time of nomination and at the time of office.
- 4) Willing to settle in the Kupang City area and its surroundings while serving as the Board of Commissioners stated in writing.
- 5) Submitting a cover letter complete with all the requirements contained and attached to the curriculum vitae.

### **Other Requirements Prospective Members of the Board of Commissioners:**

- 1) Before taking the fit and proper test at the Financial Services Authority, the KRN will first pass the fulfillment of integrity, financial reputation and competency requirements for prospective members of the Board of Commissioners to be submitted as covered in the Authority Circular Financial Services No, 39 / SEOJK.03 / 2016 concerning the Fit and Proper Test for prospective members of the Board of Commissioners.

- 2) Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar.
- 3) Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Umum.

### Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar

- 2) Between fellow members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors there must be no family relationship up to the second degree, either in a straight line or side line including son-in-law, in-laws and brother-in-law.
- 3) Particularly for Independent Commissioner Candidates must have independence, namely not having financial, management, share ownership and / or family relations relations to the second degree with members of the Board of Commissioners, Directors and / or PSP or relations with Banks that can affect their ability to act independently as referred to in the provisions on the implementation of governance for Commercial Banks.

### Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a corporate organ that collectively has the duty to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the Articles of Association and provide advice to the Directors. The Board of Commissioners does not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS.

Based on the Bank's Articles of Association, the main task of the Board of Commissioners is to oversee management policies, general management, both the company and the Company's business, and provide advice to the Board of Directors for the Bank's interests in accordance with the Bank's objectives, implement

sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen.

## **Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris**

Secara garis besar, selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain:

1. Pembahasan tentang Kelengkapan berkas calon pengurus sesuai permintaan OJK
2. Pembahasan tentang Kenaikan Penghasilan pegawai
3. Pembahasan tentang Persiapan RUPS Tahunan dan Luar Biasa
4. Pembahasan tentang Penghargaan kepada Pengurus
5. Pembicaraan tentang Komposisi Komite Dewan Komisaris dan Perangkapan tugas Plt. Direksi
6. Pembahasan tentang penyempurnaan Keputusan & lampiran Standar operasional Tugas dan Tanggungjawab PLT. Direksi Bank NTT.
7. Pembahasan tentang pernyataan tentang Propinsi NTT sebagai Propinsi termiskin ke 3 di seluruh Indonesia.
8. Pembahasan untuk lebih memberikan perhatian kepada UMKM
9. Menyelesaikan pemindahan Kantor Cabang Surabaya
10. Penyelesaian NPL
11. Pembahasan tentang efisiensi untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif

and ensure implementation risk management and governance principles in every business activity of the company at all levels or levels of the organization, and in carrying out their duties independently.

## **Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners**

Broadly speaking, during 2018 the Board of Commissioners has carried out several things related to the implementation of their duties and responsibilities, including:

1. Discussion of the completeness of the candidate management files as requested by the FSA
2. Discussion of Employee Income Increase
3. Discussion on the Preparation of Annual and Extraordinary GMS
4. Discussion of the Award to the Management
5. Talks about the Composition of the Board of Commissioners' Committees and the Trap of Work Plt. Directors
6. Discussion on improvement of Decisions & attachments to operational Standards Tasks and Responsibilities of PLT. Bank NTT Directors.
7. Discussion of statements about NTT Province as the 3rd poorest province in all of Indonesia.
8. Discussion to give more attention to MSMEs
9. Complete the transfer of the Surabaya Branch Office
10. Completion of NPL
11. Discussion about efficiency to avoid unproductive things

12. Mempersiapkan bahan laporan Kepada Bapak Gubernur oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tentang Penghasilan Pengurus Bank NTT terkait berita di media on line.
13. Pembahasan tentang Kantor Cabang Surabaya yang akan informasikan kepada Gubernur karena sudah berproses 3 tahun tetapi tidak ada kepastian dari OJK.
14. Finalisasi laporan Direksi Bank NTT kepada Bapak Gubernur terkait isu penghasilan pengurus Bank NTT
15. Pembahasan Revisi Perjalanan dinas di Bank NTT

### **Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi NTT.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, dimana yang bersangkutan disamping sebagai Komisaris Bank juga tidak duduk sebagai pengurus pada beberapa perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan "Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan

12. Preparing material for the report to the Governor by the Board of Commissioners and Directors of the NTT Bank regarding the Income of the Management of the Bank of NTT regarding news in the online media.
13. Discussion of the Surabaya Branch Office that will inform the Governor because it has been processed for 3 years but there is no certainty from the OJK.
14. Finalization of NTT Bank Directors' report to Mr. Governor regarding the issue of Bank NTT management income
15. Discussion of Revision of Official Travel at Bank NTT

### **Transparency, Financial Relations, Management and Family and Prohibition of the Board of Commissioners**

Members of the Board of Commissioners of the Bank do not hold shares in Bank NTT, other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled both within and outside the NTT Province.

There are no concurrent positions of members of the Board of Commissioners, wherein the person concerned as well as the Commissioner of the Bank also does not sit as a manager for several companies.

Members of the Board of Commissioners do not have family relations up to the second degree among members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Members of the Board of Commissioners do not have a financial relationship with "other Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders

yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

and from Companies whose Controlling Shareholders are the other Board of Commissioners and / or Board of Directors of the Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

Members of the Board of Commissioners do not use the Bank for personal, family and / or other party interests that harm or reduce the Bank's profits, and do not take and / or receive personal benefits from the Bank.

### Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

### Compliance with the Fit & Proper Test Conditions

All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority with the following details:

No Surat	Lembaga/ Instansi	Tanggal	Perihal	Keterangan
SR-68/ PB.12/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April 2018	Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT.BPD Nusa Tenggara Timur. Delivering Copy of Decision Making Ability and Claim on Nomination of PT.BPD Nusa Tenggara Timur Manager.	1. Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama 2. Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen 3. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Idependen. 1. Hali Lanan Elias as President Commissioner 2. Sukardan Aloysius as Independent Commissioner 3. Samuel Djoh Despansianus as Independent Commissioner.

### Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Buku Pedoman Code of Conduc dan *Code of Corporate Governance* Dewan Komisaris dan sesuai lampiran 2 Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2010,

### Board of Commissioners Competency Development Program

Based on the Decree of the Board of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 3 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Determination of the Code of Conduc Guidelines and the Board of Commissioners Code of Corporate Governance and in accordance with Attachment 2 the Decision of the Board of Commissioners of PT.

Nomor : 5 Tahun 2010 dan Nomor : 6 Tahun 2011, diharuskan untuk mengikuti program pengembangan Kompetensi. Selain itu untuk memenuhi Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 4 of 2010, Number: 5 of 2010 and Number: 6 of 2011, are required to participate in the Competency development program. In addition to fulfilling Article 12 and Article 13 of Bank Indonesia Regulation Number 11/19 / PBI / 2009 dated June 4, 2009 concerning Risk Management Certification for Managers and Public Bank Officials.

Bank NTT terus mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas yang diemban, dan selama tahun 2018 para Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut :

Bank NTT continues to encourage the development of competencies for all levels including the Board of Commissioners so as to be able to support the implementation of tasks carried out, and during 2018 the Board of Commissioners has attended the following training and seminar activities:

Nama Name	Jenis Pelatihan Types of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Agency	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
Semuel Djoh Despantsianus	1.Undangan Two Day Workshop: Credit Remedial & Kasus Hapus Buku. Teknis Implementasi Remedial, Portofolio Management dan Litigasi di Jakarta. 1. Two Day Workshop Invitation: Remedial Credit & Book Delete Cases. Technical Remedial Implementation, Portfolio Management and Litigation in Jakarta.	Risk Management Guard (RMG)	7 – 10 Agustus/ August 2018
Sukardan Aloysius	2.Seminar peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pencegahan Deteksi dan Investigasi Fraud di Perbankan di Pontianak. 2.Seminar on the role of the Board of Commissioners and Directors in Prevention of Detection and Fraud Investigation in Banking in Pontianak.	FKDKP BPDSI	14 – 15 Nopember/ November 2018



## **Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Dewan Komisaris**

Untuk pelaksanaan manual board diperlukan komitmen bersama Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola perusahaan, untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya yang diatur dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor "03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan *Job Manual* Dewan Komisaris Bank NTT.

Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektifitas dan kinerja Komisaris serta Direksi

## **Informasi mengenai Komisaris Independen**

### **Kriteria penentuan Komisaris Independen**

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

## **Manual and Board of Commissioners' Work Procedure**

For the implementation of the manual board, a joint commitment of the Commissioners and Directors is needed in order to manage the company, in the interests of shareholders and stakeholders in general, regulated by the Decree of the Board of Commissioners of PT Nusa Tenggara Timur Development Number "03 of 2010 dated May 7, 2010 concerning Organizational Structure and Job Manual of Bank NTT's Board of Commissioners.

With the clarity of the main tasks and functions of each, it is expected to encourage the effectiveness and performance of the Commissioners and Directors

## **Information about Independent Commissioners**

### **Criteria for determining Independent Commissioners**

As a company that has issued bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the company is subject to the rules issued by the regulator regarding the criteria for determining an Independent Commissioner.

The existence of an Independent Commissioner has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through the IDX Regulation since July 20, 2001 regarding several criteria regarding the Independent Commissioner that is also used by the company as follows:

1. The Independent Commissioner has no affiliation with the majority shareholder or controlling shareholders of the concerned Listed Company.

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. Komisaris Independen diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan dipilih/ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

### **Status Independensi Dewan Komisaris;**

Kriteria Komisaris Independen Bank NTT telah sesuai dengan definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.3/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2. The Independent Commissioner has no relationship with the director and / or other commissioner of the Listed Company concerned.
3. The Independent Commissioner does not have a dual position in another company affiliated with the Listed Company concerned;
4. Independent Commissioners must understand the laws and regulations in the Capital Market sector;
5. Independent Commissioners are proposed by the Remuneration and Nomination Committee and selected / determined by the General Meeting of Shareholders (GMS)

### **Status of Independence of the Board of Commissioners;**

The criteria of the NTT Bank Independent Commissioner are in accordance with the definition of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and POJK No.3 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning Issuers and Board of Commissioners. Public Company article 21, as follows:

1. Not having shares directly or indirectly with the Issuer or Public Company;
2. Not affiliated with the Issuer or Public Company, Commissioner, Directors or Major Shareholders of the Issuer or Public Company;
3. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company.

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali Komisaris Utama Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi NTT.

To avoid conflicts of interest, all members of the Board of Commissioners of Bank NTT do not have financial, management, share ownership and family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Directors and / or Controlling Shareholders that can affect their ability to act independently except the President Commissioner Bank NTT directly has a financial relationship with the Bank's Controlling Shareholders because at the moment the position in question is as Head of the Revenue Agency and Asset Management Finance of the NTT Province.

### Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen :

### Statement on Independence of Independent:

Aspek Independensi Independence Aspect	Hali Lanan Elias	Sukardan Aloysius	Semuel Djoh Despantsonianus
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di Bank NTT. Has no affiliation with the Director and / or other members of the Board of Commissioners at Bank NTT.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT Not serving as a Board of Directors in a company affiliated with Bank NTT	✓	✓	✓
Tidak bekerja pada lembaga Pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun Not working for a Government institution within 3 years	-	-	-
Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working at the NTT Bank or its affiliates in the past three years	✓	✓	✓
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya It does not have financial links, directly or indirectly with Bank NTT or other companies that provide services and products to NTT Bank and its affiliates	✓	✓	✓

**Aspek Independensi**  
Independence Aspect

Hali Lanan Elias

Sukardan Aloysius

Semuel Djoh  
Despantianus

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di- lingkup Bank NTT.

Free from interests and business activities or other relationships that can hinder or disrupt the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the Bank NTT.



**Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2018 oleh Dewan Komisaris :**

1. RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya selama tahun buku 2018 .

Dewan Komisaris telah menindaklanjuti sesuai surat Nomor :

- 1) Surat Nomor : 06/Dk Bank NTT/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal : Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor
- 2) Surat Nomor : 21/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, Perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT
- 3) Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018, perihal :Persetujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor

2. RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi;

**Commissioners:Follow-up on the Results of the 2018 Annual GMS Decision by the Board of Commissioners:**

1. The GMS authorizes the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital in cash and in other forms during the 2018 financial year.

The Board of Commissioners has followed up according to the letter Number:

- 1) Letter Number: 06 / Dk Bank NTT / I / 2018, dated January 23, 2018, concerning: Approval of Capital Additions to Paid Up Capital
- 2) Letter Number: 21 / DK Bank NTT / III / 2018 dated March 13, 2018, Regarding: Additional Approval of Bank NTT Capital Deposit
- 3) Letter No130 / Dk Bank NTT / XII / 2018 dated December 17, 2018, concerning: Approval of Addition of Deposit to Paid-in Capital

2. The GMS authorizes the Board of Commissioners to appoint and establish a professional Public Accountant Office that is registered with the Financial Services Authority by observing the Board of Directors' proposals;

- Dewan Komisaris telah menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik melalui surat Dewan Komisaris Nomor 50/DK bank NTT/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Keuangan Bank NTT yang berakhir 30 Juni 2018 dan yang berakhir 31 Desember 2018 serta pendampingan Obligasi Berkelanjutan Tahun Buku 2018.

3. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank NTT tindaklanjut Pembahasan pada RUPS Tahunan TB 2016 dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Perubahan besar MANFAAT LAIN dari 1 (satu) kali  
MANFAAT PENSIUN BULANAN 2 (dua) kali  
MANFAAT PENSIUN BULANAN
- b. Kenaikan Manfaat Pensiunan dari sampai dengan tahun 1991 sebesar 25%, tahun 1992 s.d tahun 2000 sebesar 20% tahun 2001 s.d 2003 sebesar 15 %. Tahun 2004 s.d tahun 2009 sebesar 10%, tahun 2010 s.d tahun 2017 sebesar 5%.
- c. Manfaat Pensiun minimal dibawah Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dinaikan menjadi Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan/atau diatas Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dinaikan menjadi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) .  
Direksi Bank NTT Telah menindaklanjuti sesuai Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank NTT yang telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/NB/2018.

- The Board of Commissioners has appointed and determined the Public Accountant Office through a letter of the Board of Commissioners Number 50 / DK bank NTT / VII / 2018 dated 9 July 2018, regarding Procurement of Public Accountant Services for NTT Bank Financial Examination which expires 30 June 2018 and which ends 31 December 2018 and mentoring of Sustainable Bonds for fiscal year 2018.

3. Approved the Amendment of Bank NTT Pension Fund (PDP) Regulations to follow up the Discussion at the 2016 TB Annual GMS with the following decisions:

- a. Major change in OTHER BENEFITS from 1 (one) time  
MONTHLY PENSION BENEFITS 2 (two) times  
MONTHLY PENSION BENEFITS
- b. Pension Benefit increase from up to 1991 amounted to 25%, in 1992 d. In 2000 amounted to 20% in 2001 in 2003 as much as 15%. In 2004 the year 2009 was 10%, in 2010 the year 2017 was 5%.
- c. Pension benefits of at least under Rp.500,000 (five hundred thousand Rupiah) are increased to Rp.500,000 (five hundred thousand Rupiah) and / or above Rp.500,000 (five hundred thousand rupiahs) and under Rp.1,000,000 (one million rupiahs) are raised become Rp. 1,000,000 (one million rupiah).  
Bank NTT Directors have followed up according to NTT Bank Directors Decree Number 56 of 2018 concerning Pension Fund Regulations from the NTT Bank Pension Fund which has been ratified by the Financial Services Authority Board of Commissioners Decree Number KEP-59 / NB / 2018.

**Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 25 Mei 2018 :**

1. Pembagian Penggunaan Laba setelah pajak Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 246.235.515.005 adalah sebagai berikut :
  - Dividen 87.5% atau sebesar Rp. 215.456.075.629,-
  - Cadangan Umum: 12.5% atau sebesar Rp. 30.779.439.375

Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran Dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.

- Telah ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT sesuai Keputusan RUPS.
2. Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2017 sebesar 15% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan; Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2017 sebesar 4.5% yang dihitung setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan
    - Telah ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT sesuai Keputusan RUPS.
  3. Mengesahkan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
    - Telah ditindaklanjuti oleh Divisi SDM dan Divisi Operasional Bank NTT sesuai Keputusan RUPS.

**Results of the Decision of the 2017 Annual GMS Agenda Decision May 25 2018:**

1. Distribution of Use of Profit after 2017 fiscal year tax of Rp. 246,235,515,005 are as follows:
  - Dividend 87.5% or Rp. 215,456,075,629, -
  - General Reserves: 12.5% or Rp. 30,779,439,375

The Board of Directors is authorized with substitution rights to determine the method of payment of dividends including all actions needed in connection with these matters including the payment schedule.

- Followed up by the NTT HR Division and Operational Division according to the GMS Decision.
2. Ratifying Employee Production Services for Fiscal Year 2017 of 15% of post-tax profit before the reserves of employee production services, management services and employee welfare funds; Ratifying 2017 Production Management Services for Fiscal Year 4.5% which is calculated after tax before the reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds
    - Followed up by the HR Division and the Bank NTT Operational Division according to the GMS Decision.
  3. Ratifying the Employee Welfare Fund for the Fiscal Year 2017 through the Employee Welfare Agency in the amount of 1.5% of profit after tax before the reserve of employee production services, management production services and employee welfare funds;
    - It has been followed up by the HR Division and the Operational Division of Bank NTT in

4. Menyatakan setuju menerima Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2018 – 2020 sebagai berikut :

- a. Menetapkan penyisihan biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2018 sebesar 16.5 % dari Laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
  - b. Menetapkan penyisihan Biaya Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2018 sebesar 3 %, dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
  - c. Menetapkan penyisihan dana Kesejahteraan Karyawan TB 2017 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1.5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
- Telah di tindaklanjuti Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT sesuai Keputusan RUPS.

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya selama tahun buku 2018.

Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat Nomor :

- a. Surat Nomor : 06/Dk Bank NTT/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal : Persetujuan Penambahan Setoran Modal pada Modal Disetor
- b. Surat Nomor : 22/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT

accordance with the GMS Decision.

4. Declare agree to accept the Bank's Business Plan for Fiscal Year 2018 - 2020 as follows:

- a. Establishing allowance for Production Services for 2018 Fiscal Year amounting to 16.5% of after-tax Profit before reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;
- b. Establish allowance for Management Production Services Fee for 2018 for 3%, from post-tax profit before reserves for employee production services, management production services and employee welfare funds;
- c. Determine 2017 TB Employee Welfare fund provision through the Employee Welfare Agency in the amount of 1.5% of post-tax profit before the reserves of employee production services, management production services and employee welfare funds;

The Board of Commissioners and Directors of PT. Bank NTT according to the GMS Decision.

5. Giving authority to the Board of Commissioners to approve additional paid-in capital in the form of money and other forms during the 2018 financial year.

Has been followed up by the Board of Commissioners based on the letter Number:

- a. Letter Number: 06 / Dk Bank NTT / I / 2018, dated January 23, 2018, concerning: Approval of Addition of Capital Deposit to Paid Up Capital
- b. Letter Number: 22 / DK Bank NTT / III / 2018 dated March 13, 2018 Subject: Additional

c. Surat Nomor : 130 /Dk Bank NTT/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal : Persetujuan penambahan Setoran Modal pada Modal Disetor.

6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan usulan Direksi.

- Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Bank NTT berdasarkan surat Nomor : 50/DK bankNTT/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal : Pengadaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Untuk Pemeriksaan Keuangan Bank NTT yang Berakhir Periode 30 Juni 2018 dan Yang Berakhir 31 Desember 2018 serta Pendampingan Obligasi Berkelanjutan Tahun Buku 2018.

7. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank NTT tindak lanjut Pembahasan pada RUPS Tahunan TB 2016 dengan keputusan sebagai berikut :

a. Perubahan besar MANFAAT LAIN DARI 1 (satu) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN Menjadi 2 (dua) kali MANFAAT PENSIUN BULANAN.

b. Kenaikan Manfaat Pensiun dari sampai dengan tahun 1991 sebesar 25 % , tahun 1992 s.d tahun 2000 sebesar 20 % , tahun 2001 s.d 2003 sebesar 15 % . Tahun 2004 s.d tahun 2009 sebesar 10 % , tahun 2010 s.d 2017 sebesar 5 % .

c. Manfaat Pensiun minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dinaikan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah dan/atau

Approval of Bank NTT Capital Deposit

c. Letter Number: 130 / Dk Bank NTT / XII / 2018 dated 17 December 2018 concerning: Approval of the addition of Capital Deposit to Paid-up Capital.

6. Giving authority to the Board of Commissioners to appoint and establish a professional Public Accountant Office that is registered with the Financial Services Authority by observing the Board of Directors' proposals.

- It has been followed up by the Board of Commissioners of Bank NTT based on letter Number: 50 / DK bankNTT / VII / 2018 dated 9 July 2018 concerning: Procurement of Public Accountant Services and Public Accountant Offices for NTT Bank Financial Examinations that are Expected for 30 June 2018 and Ended 31 December 2018 and Assistance to Sustainable Bonds for 2018 Book Year.

7. Approved the Amendment of Bank NTT Pension Fund (PDP) Regulation to follow-up discussion at the 2016 TB Annual GMS with the following decisions:

a. Major changes in OTHER BENEFITS FROM 1 (one) MONTHLY PENSION BENEFITS to 2 (two) MONTHLY PENSION BENEFITS.

b. The increase in pension benefits from 1991 to 25%, in 1992 in 2000 by 20%, in 2001 at 2003 in the amount of 15%. In 2004, in 2009, it was 10%, in 2010, in 2017, at 5%.

c. A minimum pension benefit of Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs) is increased to Rp. 500,000 (five hundred thousand rupiahs and /



diatas Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dinaikan menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- d. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan Pemberian Penambahan Manfaat Lain, tidak membebani Pendiri Dana Pensiun dengan luran Tambahan karena Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan penambahan Manfaaf Pensiun diambil dari surplus Pendanaan Dana Pensiun.
- Direksi Bank NTT telah menindaklanjuti sesuai Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank NTT yang telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/NB/2018.

**Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa tanggal 02 Juli 2018 :**

1. Menyetujui usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi calon Direktur Utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasius Ola Masan dan Didakus Leba yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti *Fit and Proper Test*. Telah ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi Dewan Komisaris Bank NTT dan telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan *Fit and Proper Test*.
2. Menugaskan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan/mengadakan RUPS Luar Biasa lagi setelah adanya penetapan nama-nama

or above Rp.500,000 (five hundred thousand rupiahs) and below Rp.1,000,000 (one million rupiahs) raised to Rp.1,000,000 (one million rupiah).

- d. This decision is based on the consideration of the Addition of Other Benefits, not to burden the Founder of the Pension Fund with Additional Contributions due to the Amendment to the Pension Fund Regulation which has resulted in the addition of the Pension Benefits taken from the surplus of the Pension Fund.
- The NTT Bank Directors have followed up according to NTT Bank Directors Decree Number 56 of 2018 concerning Pension Fund Regulations from the NTT Bank Pension Fund which has been ratified by the Financial Services Authority Board of Commissioners Decree Number KEP-59 / NB / 2018.

**Results of the Decision of the Extraordinary GMS Agenda July 2, 2018:**

1. Approve proposals from the Remuneration and Nomination Committee of the President Director candidates namely Absalom Sine and Hilarius Minggu and candidates for the General Director namely Bonefasius Ola Masan and Leba Didakus recommended by the Remuneration and Nomination Committee to follow the *Fit and Proper Test*. It has been followed up by the Bank NTT Board of Commissioners' Remuneration Committee and has been submitted to the Financial Services Authority to conduct a *Fit and Proper Test*.
2. Assign the Remuneration and Nomination Committee to carry out / hold an Extraordinary GMS again after the appointment of the names

Direktur Utama dan Direktur umum oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh salah satu Direksi yaitu antara Direktur Kredit atau Direktur Kepatuhan.

- Telah ditindaklanjuti Oleh Dewan Komisaris, akan tetapi telah dibatalkan dengan mengadakan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Nopember 2018 sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor 48.

#### Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 28 November 2018

1. Menyetujui Pembatalan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya 02 (dua) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR" Nomor : 01, tertanggal 02 (dua) November 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, di Kupang; Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris membatalkan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya, tanggal 02 Juli 2018.
2. Menyetujui Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris; Dewan Komisaris telah merubah dan menetapkan SOP Pemilihan/ Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menyetujui dan meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur

of the President Director and General Director by the Financial Services Authority, to fill the position left by one of the Directors, namely between the Director of Credit or the Compliance Director.

- It has been followed up by the Board of Commissioners, but has been canceled by holding an Extraordinary GMS on November 28, 2018 in accordance with the Declaration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara "Number 48.

#### Results of the Extraordinary GMS Decision November 28, 2018

1. Approved the Cancellation of the Nomination of the GMS of the Board of Directors before 02 (two) July 2018 (two thousand and eighteen), namely the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders "PT. DEVELOPMENT BANK OF THE EAST NUSA TENGGARA REGION "Number: 01, dated 02 (two) November 2018 (two thousand and eighteen) made by Roberto Valentino Mambaitfeto, Bachelor of Law, Master of Notary, in Kupang; Follow up by the Board of Commissioners to cancel the previous Board of Directors Nomination GMS on July 2, 2018.
2. Approve the Amendment to the SOP of the Board of Commissioners' Selection and Replacement; The Board of Commissioners has amended and determined the SOP for the Selection / Replacement of Members of the Board of Commissioners and Directors.
3. Approve and request the Remuneration and Nomination Committee of PT. The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the re-selection of candidates for the Board

Umum, dimana Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan hasilnya akan diputuskan oleh Pemegang Saham Pengendali.

- Telah ditindaklanjuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan menyeleksi ulang Calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Utama .

**Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 48 Tahun 2018, tanggal 28 November 2018.**

1. Menindaklanjuti Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Bank NTT No. 48, tanggal 28 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Darmawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan di Kupang, maka RUPS menyetujui membatalkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor : 01 tanggal 02 Juli 2018 yang dibuat oleh ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kupang tentang Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi :
2. Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah menindaklanjuti Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Nama-nama Calon Dewan Komisaris dan Direksi telah diusul oleh Komite Remunerasi dan Nominasi ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti *Fit and Proper Test*.

of Commissioners, President Director and General Director, where the Remuneration and Nomination Committee will consult with the Controlling Shareholders and the results will be decided by the Controlling Shareholders.

- It has been followed up by the Remuneration and Nomination Committee by re-selecting Candidates for the Board of Commissioners, President Director and President Director.

**Statement of Decision of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company "PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara" No. 48 of 2018, November 28, 2018.**

1. Following up on the Declaration of the Decision of the Extraordinary GMS of PT Bank NTT No. 48, November 28, 2018 made by Notary Serlina Sari Darmawan, Bachelor of Law, Master of Notary in Kupang, the GMS agreed to cancel the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies "PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara" Number: 01 dated July 2, 2018 made by ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in Kupang about Amendments to SOP for the Selection and Replacement of the Board of Commissioners and Directors:
2. Remuneration and Nomination Committee of PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank has followed up on Amendments to the SOP for the Selection and Replacement of the Board of Commissioners and Directors.
3. Names of Candidates for the Board of Commissioners and Directors have been submitted by the Remuneration and Nomination Committee to the Financial Services Authority to follow the Fit and Proper Test.

## DIREKSI

### Board of Directors

#### Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014, dan Keputusan Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 333/KEP/HK/2017 tanggal 29 Desember 2017, Direksi Bank NTT berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Pemasaran Dana merangkap Plt. Direktur Utama dan Direktur Umum, dan 1 (satu) orang Direktur Pemasaran Dana merangkap Plt. Direktur Kepatuhan.

Sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 27 Mei 2018 Komposisi Direksi Bank NTT terdiri atas 2 (dua) orang yakni Eduardus Bria Seran, SE sebagai Pelaksana Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 334/KEP/HK/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan Absalom Sine, SE sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 335/KEP/HK/2017, tanggal 29 Desember 2017, dan ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

#### Composition, Criteria and Independence of Directors

Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara as stated in the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Number: 61 dated 10 July 2014 made by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-34837.40.22. 2014 dated October 9, 2014 and was registered in the Register of Companies Number: AHU-0104499.40. 80.2014 of 2014, and the Decree of the Governor of NTT as the Controlling Shareholder of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara No. 333 / KEP / HK / 2017 dated 29 December 2017, Directors of Bank NTT numbered 2 (two) people, consisting of 1 (one) Fund Marketing Director and Acting. Managing Director and General Director, and 1 (one) Fund Marketing Director concurrently Plt. Compliance Director.

From December 29, 2017 to May 27, 2018 Composition of Directors of NTT Bank consists of 2 (two) people namely Eduardus Bria Seran, SE as Managing Director and General Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara based on the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number: 334 / KEP / HK / 2017, dated 29 December 2017 and Absalom Sine, SE as Acting Director (PLT) of the Compliance Director of PT. The Development Bank of East Nusa Tenggara is based on the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number: 335 / KEP / HK / 2017, 29 December 2017, and stipulated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT. Regional Development

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 47 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H.,M.Kn di Kupang.

Sejak tanggal 28 Mei 2018, komposisi Direksi Bank NTT menjadi 3 (tiga) orang yakni Absalom Sine, SE Direktur Pemasaran Kredit merangkap sebagai Plt. Direktur Utama, Harry Alexander Riwu Kaho Direktur Pemasaran Dana merangkap sebagai Plt. Direktur Umum dan Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan, berdasarkan Akta Pernyataan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H.,M.Kn di Kupang.

Ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, tidak saling memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, telah diimplementasikan dengan pembuatan Surat Pernyataan Direksi sebelum mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).

## **Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Direksi**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan jadwal rapat yaitu

Bank of East Nusa Tenggara Number: 47 dated January 25, 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn in Kupang.

Since May 28, 2018, the composition of the Board of Directors of Bank NTT has become 3 (three) people namely Absalom Sine, SE Credit Marketing Director and concurrently Acting. Managing Director, Harry Alexander Riwu Kaho Marketing Director Dana concurrently as Acting. Sunday's General Director and Hilarius as Compliance Director, based on the Appointment Deed of Members of the Board of Directors and Commissioners of the Limited Liability Company "Regional Development Bank of East Nusa Tenggara" dated 28 May 2018 made by Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn in Kupang.

Provisions stating that all Bank Directors do not have multiple positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at banks, companies and or other institutions, do not own shares in other companies, either individually or jointly, do not have mutual financial relationships and families up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners, have been implemented by making a Directors' Statement before taking the fit and proper test.

## **The Board of Directors' Manual and Code of Conduct**

The implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the provisions governing work ethics, work time and meeting

sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi Nomor: 123 Tahun 2012 tentang Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

### **Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi**

Dalam mengelola perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 123 Tahun 2012 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung.jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu bahwa masing – masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya.

Selain dari hak dan wewenang tersebut di atas, Direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang –

schedule, namely as stipulated in the Board of Commissioners' Decree Number: 11 of 2009 concerning Rules and Procedures for Running Directors of the Nusa Tenggara Regional Development Bank East which has subsequently been followed up by Directors Decree Number: 123 of 2012 concerning Tasks, Authorities and Work Rules of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

### **Duties, Authorities and Responsibilities of the Directors**

In managing the company, the Board of Directors is always guided by the Decree of the Board of Directors of the Regional Development Board of East Nusa Tenggara Number: 123 of 2012 concerning the Distribution of Tasks, Authorities and Work Rules of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

By referring to these provisions, the implementation of the duties of the Board of Directors as a corporate organ that is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company, as well as representing the company both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association, can run well and optimally.

The duties and responsibilities of the Board of Directors have been carried out with collegial principles, namely that each Director can act and make decisions in accordance with their rights and authority.

Apart from the rights and authorities mentioned above, the Board of Directors also has other rights and authorities relating to the management of Bank NTT in accordance with the Articles of Association,

undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing Direktur tetap merupakan tanggungjawab bersama.

the provisions of the GMS, and the applicable laws and regulations. However, the implementation of duties by each Director remains a joint responsibility.

## Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Direksi

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
<p>Direktur Utama President Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas tugas pengawasan dan pengendalian internal.</li> <li>• Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Divisi Satuan Kerja Audit Intern.</li> <li>• Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Bank, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan para Direktur lainnya.</li> <li>• Direktur Utama juga bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Perencanaan dan Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Pengawasan/SKAI.</li> <li>• Coordinating the implementation of Bank management through all Directors and directly responsible for the duties of supervision and internal control.</li> <li>• The President Director is in charge of coordinating the activities and implementation of the duties of all Directors, paying attention and immediately taking the necessary steps for everything stated in each audit report made by the Internal Audit Unit Division.</li> <li>• The President Director is also responsible for coordinating all the Bank’s operational activities, which in its implementation are assisted and in collaboration with other Directors.</li> <li>• The Managing Director is also in charge and responsible in planning, leading, coordinating and directly monitoring the implementation of work and achievement of the Bank’s performance and Divisions under its supervision, including the Planning Division and Corporate Secretary, and the Supervision / SKAI Division.</li> </ul>

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
<p>Direktur Umum general director</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Umum bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Operasional, Divisi Umum, Divisi Informasi Teknologi dan Divisi Sumber Daya Manusia serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> <li>• Tugas utamanya adalah membina, mengembangkan dan mengawasi operasional di tingkat cabang dan wilayah operasional dari sentra proses tingkat pusat.</li> <li>• Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya.</li> <li>• Bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Bank NTT, memonitor penyajian laporan keuangan guna memastikan kepatuhan dengan standar keuangan dan akuntansi serta peraturan yang diterapkan. Berperan sebagai mitra bisnis dalam menciptakan nilai tambah melalui pelaporan dan analisis kinerja strategi dan operasional dari masing-masing bisnis.</li> <li>• Bertanggung jawab menyelaraskan visi dan strategi IT bank dengan strategi bisnis serta membangun platform.</li> <li>• General Director in charge and responsible in planning, leading, coordinating, supervising directly the implementation of work and performance achievement and overseeing directly the implementation of work and achievement of the performance of the Bank and Divisions under its supervision, including the Operations Division, General Division, Information Technology Division and the Division of Human Resources and achievement of the Bank's performance in accordance with its duties and functions.</li> <li>• Its main task is to foster, develop and supervise operations at the branch level and operational areas of the central level process centers.</li> <li>• Responsible for overseeing the implementation of the work and the achievement of the performance of the divisions under its supervision.</li> <li>• Responsible for directing and overseeing all financial activities of Bank NTT, monitoring the presentation of financial statements to ensure compliance with financial standards and accounting as well as the regulations applied. Acting as a business partner in creating added value through reporting and analyzing the strategy and operational performance of each business.</li> <li>• Responsible for aligning the vision and strategy of IT banks with business strategies and building platforms.</li> </ul>



Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Pemasaran Dana bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi – divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Treasury, Divisi Kualitas Layanan dan Produk serta Divisi Dana &amp; Jasa.</li> <li>• Bertanggung Jawab memformulasikan strategi dan memastikan esksekusi dan pencapaian target bisnisnya.</li> <li>• Bertanggung Jawab atas manajemen secara optimal dan hati-hati atas Neraca Bank NTT terkait pemenuhan GWM dan Manajemen Likuiditas.</li> <li>• Bertanggung Jawab merencanakan dan melaksanakan pendanaan Bank NTT.</li> <li>• Bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan strategy dan produk cash management, produk dan layanan trade finance (dalam pasar uang).</li> <li>• The Fund Marketing Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the work and performance achievements of the Bank and Divisions under its supervision, including the Treasury Division, Service and Product Quality Division and Funds &amp; Services Division.</li> <li>• Responsible for formulating strategies and ensuring execution and achievement of business targets.</li> <li>• Responsible for optimal and careful management of the Bank NTT Balance Sheet related to the fulfillment of GWM and Liquidity Management.</li> <li>• Responsible for planning and implementing Bank NTT funding.</li> <li>• Responsible for developing and implementing cash management strategies and products, trade finance products and services (in money markets).</li> </ul>
Direktur Kepatuhan Compliance Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada di bawah supervisinya meliputi Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan/ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak regulator maupun pihak internal dalam rangka pemenuhan kepatuhan dan risiko.</li> <li>• Bertanggung jawab atas kepatuhan Bank NTT terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan maupun penerapan Anti Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (APU PPT).</li> <li>• Bertanggung jawab memastikan bahwa risk taking unit memahami dan mengelola risiko, selain itu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan strategi risiko.</li> <li>• The Compliance Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating, supervising the implementation of the work and achieving the Bank's performance and under the supervising divisions including the Compliance Division and the Risk Management Division, as well as determining the steps needed to ensure the Company meets all applicable regulations / provisions, whether issued by the regulator or internal parties in order to fulfill compliance and risk.</li> <li>• Responsible for NTT Bank compliance with regulations including Bank Indonesia / Financial Services Authority regulations and the implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (APU PPT).</li> <li>• Responsible for ensuring that the risk taking unit understands and manages risk, besides being responsible for communicating the risk strategy.</li> </ul>

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Pemasaran Kredit bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Suporting Kredit dan Divisi Pemasaran Kredit serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> <li>Bertanggung jawab memformulasikan strategi perkreditan dan memastikan eksekusi serta pencapaian target bisnis serta ekspansi di bidang perkreditan.</li> <li>Bertanggung jawab dalam pengembangan grup line business consumer dalam kredit konsumsi (multi guna, multi usaha dan KPR)</li> <li>Bertanggung jawab dalam grup line bussiness UKM (kredit produktif, modal kerja dan investasi)</li> <li>Bertanggung jawab dalam grup line bussiness mikro (Kredit Mikro, KUR)</li> <li>Beranggung jawab dalam grup line business comersil (kredit produktif, KMK, dan KI di atas Rp. 5 M).</li> <li>Bertanggung jawab dalam pengembangan produk kredit dan supervisi.</li> <li>Bertanggung jawab terhadap progress yang optimal dan penurunan NPL dengan kegiatan satuan khusus penyelamatan kredit macet.</li> <li>The Credit Marketing Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work and performance achievements of the Bank and Divisions under its supervision, including the Credit Suporting Division and the Credit Marketing Division and the Bank's performance in accordance with its duties and functions.</li> <li>Responsible for formulating credit strategies and ensuring execution and achievement of business targets and expansion in credit.</li> <li>Responsible for developing the business consumer line group in consumer loans (multi-use, multi-business and mortgage)</li> <li>Responsible in the SME line business group (productive credit, working capital and investment)</li> <li>Responsible for the micro bussiness line group (Micro Credit, KUR)</li> <li>Responsible for the line business communication group (productive credit, KMK and KI above Rp. 5 M).</li> <li>Responsible for credit product development and supervision.</li> <li>Responsible for optimal progress and decreasing NPL with the activities of a special unit to save bad credit.</li> </ul>

## Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test

Berdasarkan Akta Pernyataan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 83 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaifeto, S.H.,M.Kn, seluruh anggota Direksi untuk masa jabatan tahun 2018 - 2022 telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut :

## Compliance with the Fit & Proper Test Conditions

Based on the Deed of Appointment of Members of the Board of Directors and Commissioners of the Limited Liability Company "PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara "Number: 83 May 28, 2018 made by Roberto Valentino Mambaifeto, SH, M.Kn, all members of the Board of Directors for the term of office 2018 - 2022 have been declared to have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority with the following details:

No Surat Letter No	Lembaga/ Instansi Institution / Agency	Tanggal Date	Perihal In terms of	Keterangan Description
18/KEP/ HK/2015	Gubernur Nusa Tenggara Timur	22 Januari/ January 2015	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT <a href="#">Decision of the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT BPD NTT</a>	Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. <a href="#">Determination of Brother Absalom Sine as Marketing Director of PT Credit for the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.</a>
KEP -71/ d.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April/ April 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. <a href="#">Decision of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners on the Results of Capability and Compliance Assessment.</a>	Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. <a href="#">Determination of Brother Harry Alexander Riwu Kaho as Marketing Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.</a>
KEP -71/ d.03/2018	Otoritas Jasa Keuangan	13 April/ April 2018	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. <a href="#">Decision of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners on the Results of Capability and Compliance Assessment.</a>	Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. <a href="#">Determination of Sunday's Brother Hilarius as Compliance Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara</a>

Dengan hasil uji kemampuan dan- kepatutan (*fit and proper test*) tersebut, maka seluruh anggota Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja secara profesional.

### Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2018 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut :

With the results of the fit and proper test, all members of the NTT Bank Board of Directors are declared to have competence, integrity, character and morals that meet the criteria so that they can act and work professionally.

### Directors' Training and Seminar Program

Throughout 2018 the Directors have participated in several training / seminars / workshops organized by external parties as follows:

Nama Name	Jenis Pelatihan Types of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Agency	Waktu Pelaksanaan Execution time
Absalom Sine	1. Workshop Optimalisasi Fungsi Kepatuhan: Membangun Interpretasi Yang Tepat pada Peraturan OJK No. : 46/POJK.03/2017 dan Strategi Implementasinya. 1. Workshop on Optimizing Compliance Function: Establishing the Right Interpretation of OJK Regulation No. : 46 / POJK.03 / 2017 and its Implementation Strategy.	RMG	8 – 9 Februari/ February 2018
	2. Pelatihan Reguler FKDKP Angkatan ke – 1 TB 2018. 2. Regular FKDKP Training 1st batch TB 2018.	FKDKP	14 – 15 Maret/ March 2018
	3. Pembekalan dan ujian BSMR Level 5. 3. Briefing and BSMR Level 5 examinations	RMG & LSPP	7 – 9 Juni/ June 2018
	4. Indonesia Risk Managemen Outlook 2019 "Achieving High Performance Amid Political Risk" 4. Indonesia Risk Management Outlook 2019 "Achieving High Performance Amid Political Risk"	LPPI	6 November/ November 2018
Harry A. Riwu Kaho	1. Seminar dan Silaturahmi dalam rangka meningkatkan Kerjasama Bisnis. 1. Seminar and Gathering in order to improve Business Cooperation.	Panin Bank	20 – 22 Juli/ July 2018
	2. Workshop Penerapan Financial Teknologi, Treasury, Liquidity GAP, Strategy, Teknologi Informasi dan Fraud 2. Workshop on Application of Technology Financial, Treasury, Liquidity GAP, Strategy, Information Technology and fraud	OJK	3 – 4 Oktober/ October 2018

Nama Name	Jenis Pelatihan Types of Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Agency	Waktu Pelaksanaan Execution time
Hilarius Minggu	1. Pelatihan Membangun Sinergi Unit Kerja APU-PPT dan Manajemen Risiko : Implementasi Risk. 1. Training on Building Synergy of APU-PPT Work Units and Risk Management: Risk Implementation.	RMG	21 – 22 Februari/ February 2018
	2. Pembekalan Materi dan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Tahun 2018 Angkatan 2. 2. Debriefing of Materials and Compliance Certification Exams Level 1 Year 2018 Force 2.	FKDKP	28 – 31 Maret/ March 2018
	3. Sosialisasi Ketentuan Bank Umum. 3. Dissemination of Commercial Bank Provisions.	OJK	19 April/ April 2018
	4. Pelatihan Efisiensi Bisnis Melalui Peringkat Rasio CASA. 4. Business Efficiency Training Through CASA Ratio Ranking.	Leinad Aganis Consultant	02 – 03 Mei/ May 2018
	5. Seminar Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan FKDKP. 5. Seminar on FKDKP's Annual General Meeting (RUA).	FKDKP	26 Juni/ June 2018
	6. Bank Compliance Training 6. Bank Compliance Training	Equivalent	7 – 8 Agustus/ August 2018
	7. Sertifikasi Kepatuhan Level 2 Batch 2. 7. Level 2 Batch 2 Compliance Certification.	FKDKP	8 – 10 Agustus/ August 2018
	8. Pembekalan Materi dan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 2 8. Debriefing of Materials and Level 2 Compliance Certification Exams	FKDKP	29 Agustus – 01 September 2018. 29 August – 01 September 2018.
	9. Workshop Sertifikasi Kepatuhan Level Eksekutif (Level 3) 9. Executive Level Compliance Certification Workshop (Level 3)	FKDKP	04 – 06 Oktober/ October 2018
	10. Seminar Nasional FKDKP-SI 10. FKDKP-SI National Seminar	FKDKP	14 – 15 November/ November 2018

## ASESMEN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment to Performance of The Board of Commissioners and Board of Directors

### Prosedur Pelaksanaan Asesmen

**Prosesur asesmen/penilaian atas kinerja Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui RUPS.**

Bank NTT melalui Pemegang Saham telah menerapkan mekanisme evaluasi atas kinerja Direksi, pendekatan tersebut adalah dalam implementasi strategi dan penilaian kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank NTT untuk memastikan bahwa strategi terfokus dan berjalan dengan baik, sasaran strategis diterjemahkan menjadi *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi di Tahun 2018 dilakukan berdasarkan parameter kinerja kolegial yang dilakukan oleh Pemegang saham melalui forum RUPS.

### Kriteria/Indikator Asesmen

Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Assessment Procedure

**The assessment / assessment process for the performance of the Commissioners and Directors is carried out through the GMS.**

The NTT Bank through the Shareholders has implemented an evaluation mechanism for the performance of the Board of Directors, the approach is in the implementation of strategies and performance appraisals. This is in line with Bank NTT's policy to ensure that the strategy is focused and running well, the strategic target is translated into the Key Performance Indicators (KPI) agreed upon by the Board of Directors and lowered to the lowest ranks. The performance evaluation of Commissioners and Directors in 2018 is carried out based on collegial performance parameters carried out by shareholders through the GMS forum.

### Assessment Criteria / Indicators

The criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners are the implementation of the duties of the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company's policies and giving advice to the Board of Directors for the interests and objectives of the Company and the implementation of tasks specifically given in accordance with the GMS decisions in the statutory regulations, applicable laws.

Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2018; Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Lebih lanjut, dasar dari pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dapat tercermin dari Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup aspek profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas dan permodalan.

While the criteria / performance indicators for measuring the performance of the Board of Directors include:

- 1) Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association;
- 2) Implementation of the resolutions of the 2018 Annual GMS;  
The performance assessment has considered quantitative and qualitative factors. Furthermore, the basis for measuring the success of the Board of Directors' performance can be reflected in the Company's Health Level which includes aspects of risk profile, governance, profitability and capital.

NO	Sasaran Strategis Strategic Target	Ukuran Scale	Realisasi Realization
1	Peningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Increase Third Party Funds (TPF) in the form of Demand Deposits, Savings and Deposits.	Target pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 10.78 %. The growth target of Third Party Funds (TPF) is 10.78%.	Realisasi pertumbuhan DPK meningkat sebesar 8.48% Realization of deposits growth increased by 8.48%
2	Meningkatkan target penyaluran kredit Increase the target of lending	Target pertumbuhan kredit minimal 9 % Growth target minimum credit of 9%	Realisasi pertumbuhan kredit sebesar 9.68% Realization of credit growth of 9.68%
3	Meningkatkan kredit UMKM Increase MSME loans	Target Komposisi penyaluran kredit UMKM sebesar 22.79% The target for MSME lending is 22.79%.	Realisasi komposisi penyaluran Kredit UMKM tumbuh sebesar 20.89% . The realization of the composition of MSME loan distribution grew by 20.89%
4	Meningkatkan fungsi intermediasi Improve intermediation function	Target LDR sebesar 112.18%. The LDR target is 112.18%.	Realisasi LDR sebesar 115.28 %. LDR realization of 115.28%.
5	Meningkatkan efisiensi Increase efficiency	Target rasio BOPO sebesar 76.13 % BOPO ratio target of 76.13%	Realisasi rasio BOPO sebesar 75.95 % LDR realization of 115.28%.
6	Upaya meminimalisir kredit bermasalah NPL Efforts to minimize NPL problem loans	Target rasio NPL maksimal 2.70 % The maximum NPL ratio target is 2.70%	Realisasi Rasio NPL Gross berada dibawah target sebesar 2.50 % Realization of the BOPO ratio of 75.95%

NO	Sasaran Strategis Strategic Target	Ukuran Scale	Realisasi Realization
7	Mempertahankan tata kelola yang baik Maintain good governance	Target GCG adalah <i>Low to Moderate</i> (2) The GCG target is <i>Low to Moderate</i> (2)	Hasil Penilaian OJK adalah <i>Moderate</i> (3) Realization of Gross NPL Ratio is below the target of 2.50%
8	Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehat Maintaining a sound bank soundness	Target <i>Low to Moderat</i> (2) <i>Low to Moderate</i> target (2)	Penilaian OJK adalah <i>Moderat</i> (3) The results of the OJK Assessment are <i>Moderate</i>

## Pihak yang melaksanakan Assesment

Pihak yang melakukan Assesment terhadap Kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian kinerja Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2018 termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Hasil evaluasi selama tahun 2018, menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perusahaan dengan baik yang ditunjukkan oleh pencapaian target finansial Bank NTT.

Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset serta stabilitas Perusahaan agar tetap menunjukkan kinerja yang optimal dan baik.

## The party carrying out the assessment

The party conducting the Assessment of the Board of Commissioners' Performance is the GMS, while the assessment of the performance of the Board of Directors is the Board of Commissioners and the GMS. In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the performance achievement indicators of the Board of Directors as described above. The Board of Commissioners and Directors account for their performance achievements in the 2018 period including the implementation of their duties and responsibilities in the GMS held in 2019.

The results of the evaluation during 2018 show that the Board of Directors has managed the Company well as indicated by the achievement of Bank NTT's financial targets.

The Board of Directors always prioritizes the principle of prudence in maintaining asset quality and the stability of the Company in order to maintain optimal and good performance.



## Pengungkapan Prosedur dan Besaran remunerasi Dewan Komisaris

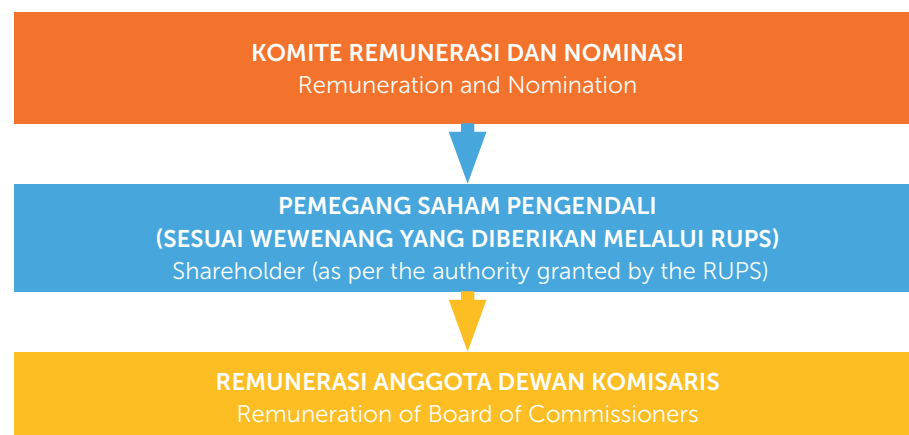
Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero). Penghasilan Komisaris meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan.

Berikut adalah prosedur pengungkapan Remunerasi Dewan komisaris :

## Procedure Disclosure and the amount of remuneration for the Board of Commissioners

Remuneration for the Board of Commissioners is determined by the GMS referring to the Company Shareholders' Decision. Commissioners' income includes remuneration and benefits and bonuses based on the Company's performance and achievements.

The following is the procedure for disclosure of the Board of Commissioners' Remuneration: Remuneration



Komposisi Gaji Direksi dan Komisaris per bulan tahun 2018 :

No.	Nama Name	Nominal Nominal (Rupiah)	Komposisi Composition
<b>Direksi</b>			
<b>Direksi</b>			
1	Direktur Utama President Director	-	-
2	Direktur Umum general director	-	90 % dari Dirut 90% of the Managing Director
3	Direktur Kepatuhan Compliance Director	83.517.677,-	90 % dari Dirut 90% of the Managing Director

No.	Nama Name	Nominal Nominal (Rupiah)	Komposisi Composition
4	Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director	83.839.102,-	90 % dari Dirut 90% of the Managing Director
5	Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director	83.356.952,-	90 % dari Dirut 90% of the Managing Director
<b>Komisaris Commissioner</b>			
1	Komisaris Utama The president commissioner	46.112.500,-	70 % dari Dirut 90% of the Managing Director
2	Komisaris Independen Komisaris Independen	41.501.250,-	90 % dari Komut 90% of the President Commissioner
3	Komisaris Independen Independent Commissioner	41.501.250,-	90 % dari Komut 90% of the President Commissioner

### Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris;

Sepanjang tahun 2018 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp.8.645.029.648 (Delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

**Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut :**

Policy Package and other facilities of the Board of Commissioners;

Throughout 2018 the amount of salaries and other benefits which included remuneration in kind and non-nature provided to the Board of Commissioners amounted to Rp.8,645,029,648 (Eight billion six hundred forty five million twenty nine thousand six hundred forty eight rupiahs).

**The remuneration of the Board of Commissioners in 2018 is shown in the following table:**

No	Jenis Penerimaan Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris Jumlah Komisaris	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
1.	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll) Remuneration in the form of non-nature (salary and other fixed income, including tantiem, etc.)	5	8.645.029.648
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of natural / non-natural (other non-permanent facilities including housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	5	-
Jumlah/ Total			8.645.029.648

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2018 adalah 5 orang dengan rincian 2 orang menerima remunerasi selama 5 bulan (Januari – Mei 2018) dan 3 orang menerima 7 bulan (Juni – Desember 2018), yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasil, terlihat dalam tabel dibawah ini :

The number of members of the Board of Commissioners who receive remuneration packages during 2018 are 5 people with details 2 people receive remuneration for 5 months (January - May 2018) and 3 people receive 7 months (June - December 2018), which are grouped in the range of producer levels, visible in the table below:

Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun 1 year Nominal Remuneration Group	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp 2 miliar Above 2 billion IDR	2
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Above 1 billion to 2 billion IDR	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Over 500 million and Rp. 1 billion IDR	3
Rp 500 juta ke bawah 500 million IDR and below	-
Jumlah/ Total	5

## Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

## Remuneration Policy Package and other Facilities of the Directors

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 tahun pada tahun 2018, sebagai berikut:

Remuneration and other facilities received in 1 year in 2018, as follows:

No	Jenis Penerimaan Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi Jumlah Direksi	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
1.	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll) Remuneration in the form of non-nature (salary and other fixed income, including tantiem, etc.)	4	12.977.782.835,-
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of natural / non-natural (other non-permanent facilities including housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	4	-
Jumlah/ Total			12.977.782.835,-

Sepanjang tahun 2018 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp. 12.977.782.835,- (Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2018 adalah 4 orang dengan rincian 1 orang menerima remunerasi selama 5 bulan, 1 orang menerima 12 bulan dan 2 orang menerima selama 7 bulan, yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel dibawah :

Throughout 2018 the amount of salaries and other benefits which included remuneration in kind and non-nature provided to the Directors was Rp. 12,977,782,835, - (Twelve billion nine hundred seventy seven million seven hundred eighty two thousand eight hundred thirty five rupiahs).

The number of members of the Board of Directors who receive the remuneration package during 2018 is 4 people with details of 1 person receiving remuneration for 5 months, 1 person receiving 12 months and 2 people receiving 7 months, grouped in the range of income levels, shown in the table below:

Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun 1 year Nominal Remuneration Group	Jumlah Direksi Number of Directors
Di atas Rp 2 miliar Above 2 billion IDR	2
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Above 1 billion to 2 billion IDR	2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Over 500 million and Rp. 1 billion IDR	-
Rp 500 juta ke bawah 500 million IDR and below	-
Jumlah/ Total	4

## RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang terendah sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

## SALARY RATIO AND EMPLOYEE COMPOSITION

### Highest and Lowest Salary Ratio

For the ratio / salary ratio between the highest Board of Commissioners' salary and the lowest, the highest Directors' salary with the lowest, the highest Employee's salary with the lowest, and between the highest Directors' salary with the lowest employee salary throughout 2018 can be seen in the following table:

No	Jabatan Position	Gaji (dalam rupiah) Salary (in rupiah)		Rasio Perbandingan Comparison Ratio
		Tertinggi Highest (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	
1.	Gaji Komisaris Commissioner's salary	64.040.500	52.453.250	18.09%
2.	Gaji Direksi Directors' Salary	83.839.102	83.356.952	0.58%
3.	Gaji Kepala Divisi Head Divisions' Salary	31.694.206	21.931.695	30.80%
3.	Gaji Pegawai Employee salary	31.694.206	2.412.962	92.39%
4.	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Terendah Highest Board of Directors Salaries & Lowest Employees	83.839.102	2.412.962	97.12%

\*Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.

\*The above employees are Bank employees with permanent employee status, and are not included in the monthly contract and Employee Staff.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Meeting of the Board of Commissioners

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, Board of Commissioners meetings must be held at least 4 (four) times a year and must be attended by all members of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris Bank NTT telah melaksanakan banyak rapat, dimana rapat Dewan Komisaris sendiri sebanyak 2 (dua) kali, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 5 (lima) kali dan rapat Komite sebanyak 1 (satu) yang berada di bawah Dewan Komisaris :

Throughout 2018 the Board of Commissioners of Bank NTT has held many meetings, where the Board of Commissioners' own meetings are 2 (two) times, 5 (five) Board of Commissioners and Directors meetings and 1 (one) Committee meetings under the Board of Commissioners:

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code				
			1	2	3	4	5
1.	05 Maret/ March 2018	1. Kelengkapan berkas calon pengurus 2. Kenaikan penghasilan pegawai 3. Persiapan RUPS Tahunan/LB 4. Penghargaan kepada Pengurus 1. <a href="#">Completeness of the prospective management files</a> 2. <a href="#">Increase in employee income</a> 3. <a href="#">Preparation of the Annual GMS / LB</a> 4. <a href="#">Appreciation to the Management</a>	√	√	BB	BB	BB
2.	28 Mei/ May 2018	1. Pembicaraan tentang Komposisi Komite Dewan Komisaris 2. Perangkapan Tugas PLH Direksi 3. Lain – lain 1. <a href="#">Talks about the Composition of the Board of Commissioners' Committees</a> 2. <a href="#">Board of Directors' PLH Task Capture</a> 3. <a href="#">Others</a>	B	B	√	√	√

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code				
			1	2	3	4	5
3.	30 Mei/ May 2018	<p>Rapat Perdana Dewan Komisaris Baru dengan Direksi Bank NTT membahas tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran Umum Bank NTT terkait data kualitatif dan kuantitatif triwulan II dan III dan memasuki bulan ke enam dalam triwulan II.</li> <li>- RBB Tahun Buku 2018 yang telah di presentasikan dan diterima OJK untuk menjadi patokan realisasi dalam Tahun Buku 2018</li> <li>- Pembahasan tentang kendala likuiditas akhir tahun.</li> <li>- Strategi manajemen untuk pencapaian target laba diakhir tahun.</li> <li>- Pembahasan tentang proses pencalonan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil rapat KRN.</li> <li>- dll</li> </ul> <p><a href="#">New Board of Commissioners' First Meeting with Bank NTT Directors discussing:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Bank NTT's general description regarding the second and third quarter qualitative and quantitative data and enters the sixth month in the second quarter.</a></li> <li>- <a href="#">RBB 2018 Book Year which was presented and accepted by OJK to become a benchmark for realization in the 2018 Book Year</a></li> <li>- <a href="#">Discussion of year-end liquidity constraints.</a></li> <li>- <a href="#">Management strategies for achieving profit targets at the end of the year.</a></li> <li>- <a href="#">Discussion of the process of nominating the President Director and General Director based on the results of the KRN meeting.</a></li> <li>- etc</li> </ul>	-	-	√	√	√
4.	29 Juni/ June 2018	<p>1. Pembahasan tentang Persiapan RUPS LB pada tanggal 02 Juli 2018.</p> <p>2. Pembahasan Konsep perubahan SOP pemilihan/ pergantian Pengurus Bank NTT.</p> <p>3. Pembahasan Hasil kerja KRN proses pencalonan Direktur Utama &amp; Direktur Umum Bank NTT.</p> <p><a href="#">1. Discussion of the Preparation of the LB GMS on July 2, 2018.</a></p> <p><a href="#">2. Discussion of the Concept of changes in the SOP for the selection / replacement of Bank NTT Management.</a></p> <p><a href="#">3. Discussion The work of the KRN for nominating the President Director &amp; General Director of Bank NTT.</a></p>	-	-	√	√	√

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code				
			1	2	3	4	5
5.	23 Agustus/ August 2018	Pembahasan/penyempurnaan Keputusan dan lampiran Standar operasional tugas dan Tanggung Jawab PLT.Direksi Bank NTT Discussion / refinement of Decision and attachment of operational Standard duties and Responsibilities of PLT.Direksi Bank NTT	-	-	√	√	√
6.	17 September/ September 2018	1. Pembahasan tentang Propinsi NTT sebagai Propinsi termiskin ke-3 di seluruh Indonesia 2. Pembahasan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada UMKM. 3. Menyelesaikan pemindahan Kantor Cabang Surabaya 4. Penyelesaian NPL 5. Pembahasan tentang efisiensi untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif 1. Discussion of NTT Province as the 3rd poorest province throughout Indonesia 2. Discussion to give more attention to MSMEs. 3. Complete the transfer of the Surabaya Branch Office 4. Settlement of NPL 5. Discussion about efficiency to avoid unproductive things	-	-	√	√	√
7.	05 Oktober/ October 2018	Pembahasan tentang Finalisasi laporan Direksi Bank NTT ke Bapak Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT Discussion of Finalization of NTT Bank Directors' report to NTT Governor / Bank NTT Controlling Shareholders	-	-	√	√	√
8.	03 Desember/ December 2018	Pembahasan Revisi perjalanan Dinas di bank NTT. Discussion of Revision of Official travel in NTT banks.	-	-	√	√	√

\* Code Description Name of Participant

\*Keterangan Kode Nama Peserta

(1) Frans Salem

(2) Petrus E. Jemadu

(3) Hali Lanan Elias

(4) Sukardan Aloysius

(5) Samuel Djoh Despansianus

\*Keterangan kehadiran :

√ = Hadir

BB = Belum Berhenti

B = Berhenti

\* Attendance information:

-√ = Present

BB = Not Stopped

B = Stop



## Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan Pejabat Eksekutif, dapat terlihat di dalam tabel berikut:

## Frequency of Attendance of Board of Commissioners' Meetings

The results of the meeting are stated in the minutes of the meeting and are well documented. The physical attendance of the members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners' meetings, both held internally by the Board of Commissioners and inviting Directors and Executive Officers, can be seen in the following table:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Frans Salem	1	100%
Petrus E. Jemadu	1	100%
Hali Lanan Elias	7	100%
Sukardan Aloysius	7	100%
Semuel Djoh Despantsianus	7	100%

## RAPAT DEWAN DIREKSI

### Board of Directors Meeting

Sepanjang tahun buku 2018 Rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertemuan/ rapat, baik rapat Direksi (Direksi sendiri) maupun rapat koordinasi (Direksi dengan unit terkait). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

Pada tahun buku 2018 Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 4 (empat) kali, terdiri dari rapat internal maupun rapat dengan pejabat Bank terkait.

Tabel berikut ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2018 :

Throughout the 2018 fiscal year Directors' Meetings are held at any time if deemed necessary and held regularly at least once in 1 (one) month.

Directors can hold meetings outside of the schedule above based on written requests:

1. One or more members of the Board of Directors
2. A written request from one or more members of the Board of Commissioners.
3. A written request of 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total shares.

The Board of Directors has held several meetings / meetings, both the Board of Directors (Directors themselves) meetings and coordination meetings (Directors and related units). The Board of Directors meeting serves to establish policies in strategic decision making.

In the 2018 financial year the Directors have held 4 (four) Directors meetings, consisting of internal meetings and meetings with relevant Bank officials.

The following table describes the schedule and agenda of the Board of Directors' Meetings during 2018:

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code*		
			1	2	3
1.	05 Juni 2018	1. Persiapan Kegiatan Operasional sebelum dan sesudah Libur Nasional Idul Fitri 1412 Hijrah; 2. Pemindehan Kantor Cabang Surabaya 3. Lain-lain 1. Preparation of Operational Activities before and after the Idul Fitri National Holiday 1412 Hijrah; 2. Transfer of Surabaya Branch Office 3. Others	√	√	√

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code*		
2	22 Juni 2018	1. Persiapan RUPS Luar Biasa; 2. Persiapan Ulang Tahun Bank NTT ke 56; 3. Penyesuaian RBB tahun Buku 2018; 4. Lain-lain : a. Pemindahan Gedung Kantor Surabaya b. Fasilitas Pengurus; c. Kelangsungan Core Banking d. Beberapa program kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas operasional  1. Extraordinary GMS Preparation; 2. 56th NTT Bank Preparation; 3. RBB Adjustment for 2018 Book Year; 4. Others: a. Transfer of Surabaya Office Building b. Management Facilities; c. Continuity of Core Banking d. Some work programs in the framework of operational efficiency and effectiveness	√	√	√
3	26 Juli 2018	1. Kinerja Keuangan di Triwulan II 2. Rencana Tindaklanjut atas Pemeriksaan OJK 3. Agenda lain-lain : a. Perkembangan Perpanjangan Core Banking System b. Rencana Sentralisasi Pengelolaan ATM c. Rencana Sosialisasi Pelaksanaan CMS  1. Financial Performance in Quarter II 2. Follow-up Plan for OJK Examination 3. Other agendas: a. Development of Extension of Core Banking System b. ATM Centralized Management Plan c. Plan for Disseminating CMS Implementation	√	√	√
4	09 November 2018	1. Persiapan Pelaksanaan RUPS LB Bank NTT berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 104/DK Bank NTT/XI/2018, perihal : Informasi rencana Pelaksanaan RUPS LB Bank NTT 2. Lain - lain 1. Preparation for the Implementation of the NTT LB Bank GMS based on the Board of Commissioners' Letter Number: 104 / DK Bank NTT / XI / 2018, regarding: Information on the planned implementation of the NTT LB Bank GMS 2. Others	√	√	√

Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi didalam setiap pertemuan/rapat sepanjang tahun 2018 ;

The table below reveals the frequency and level of attendance of Directors in each meeting / meeting throughout 2018

<b>Nama</b> Name	<b>Jumlah Kehadiran</b> Total of Attendance	<b>% Kehadirawn</b> % Attendance
Absalom Sine	4	100%
Harry Aleksander Riwu Kaho	4	100%
Hilarius Minggu	4	100%

\*Keterangan Kode Nama Peserta

- (1) Absalom Sine
- (2) Harry A. Riwu Kaho
- (3) Hilarius Minggu

\*Keterangan kehadiran :

- √ = Hadir

\*Code Description Name of Participant

- (1) Absalom Sine
- (2) Harry A. Riwu Kaho
- (3) Hilarius Sunday

\* Attendance information:

- √ = Present

## Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus/Gabungan)

Sepanjang tahun 2018 Direksi dengan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 5 (lima) kali dengan jadwal rapat sebagai berikut:

## Board of Directors and Board of Commissioners Meetings (Management / Combined Meetings)

Throughout 2018 the Board of Directors and the Board of Commissioners held 5 (five) meetings / meetings with the following schedule:

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code*					
			1	2	3	4	5	6
	30 Mei 2018	<p>Rapat Perdana Dewan Komisaris Baru dengan Direksi Bank NTT membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Umum Bank NTT terkait data kualitatif dan kuantitatif triwulan II dan III dan memasuki bulan ke enam dalam triwulan II.</li> <li>2. RBB Tahun Buku 2018 yang telah di presentasikan dan diterima OJK untuk menjadi patokan realisasi dalam Tahun Buku 2018</li> <li>3. Pembahasan tentang kendala likuiditas akhir tahun.</li> <li>4. Strategi manajemen untuk pencapaian target laba diakhir tahun.</li> <li>5. Pembahasan tentang proses pencalonan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil rapat KRN.</li> </ol> <p>New Board of Commissioners' First Meeting with Bank NTT Directors discussing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank NTT's general description regarding the second and third quarter qualitative and quantitative data and enters the sixth month in the second quarter.</li> <li>2. RBB 2018 Book Year which was presented and accepted by OJK to become a benchmark for realization in the 2018 Book Year</li> <li>3. Discussion of year-end liquidity constraints.</li> <li>4. Management strategies for achieving profit targets at the end of the year.</li> <li>5. Discussion of the process of nominating the President Director and General Director based on the results of the KRN meeting.</li> </ol>	√	√	√	√	√	√
	29 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan tentang Persiapan RUPS LB pada tanggal 02 Juli 2018.</li> <li>2. Pembahasan Konsep perubahan SOP pemilihan/ pergantian Pengurus Bank NTT.</li> <li>3. Pembahasan Hasil kerja KRN proses pencalonan Direktur Utama &amp; Direktur Umum Bank NTT.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussion of the Preparation of the LB GMS on July 2, 2018.</li> <li>2. Discussion of the concept of changes to the SOP for the selection / replacement of Bank NTT Management.</li> <li>3. Discussion The work of the KRN for nominating the President Director &amp; General Director of Bank NTT.</li> </ol>	√	√	√	√	DL	√

No.	Tanggal Date	Materi Material	Kode Peserta* Participant Code*					
	17 September 2018	1. Pembahasan tentang Propinsi NTT sebagai Propinsi termiskin ke-3 di seluruh Indonesia. 2. Pembahasan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada UMKM. 3. Menyelesaikan pemindahan Kantor Cabang Surabaya 4. Penyelesaian NPL 5. Pembahasan tentang efisiensi untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif 1. Discussion of NTT Province as the 3rd poorest province throughout Indonesia. 2. Discussion to give more attention to MSMEs. 3. Complete the transfer of the Surabaya Branch Office 4. Settlement of NPL 5. Discussion about efficiency to avoid unproductive things	√	√	√	√	√	√
	05 Oktober 2018	Kinerja Keuangan sampai dengan Pembahasan tentang Finalisasi laporan Direksi Bank NTT ke Bapak Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT Financial Performance up to Discussion on Finalizing the NTT Bank Directors report to NTT Governor / Bank NTT Controlling Shareholders	√	√	√	√	√	DL
	03 Desember 2018	Pembahasan Revisi perjanjian Dinas di Bank NTT Discussion on Revision of Dinas travel in Bank NTT	√	√	√	√	√	√

\*Keterangan Kode Nama Peserta

- (1) Hali Lanan Elias
- (2) Sukardan Aloysius
- (3) Samuel Djoh Despansianus

\*Keterangan kehadiran :

- √ = Hadir
- DL = Dinas Luar

\*Code Description Name of Participant

- (4) Absalom Sine, SE
- (5) Harry Alexander Riwu Kaho
- (6) Hilarius Minggu

\* Attendance information:

- √ = Present
- DL = External Service

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris didalam setiap pertemuan/rapat yang diselenggarakan Direksi sepanjang tahun 2018, terungkap pada tabel berikut:

The frequency and level of attendance of Directors and Commissioners in each meeting / meeting held by the Board of Directors throughout 2018, is revealed in the following table:

No.	Nama Nama	Jumlah Kehadiran Jumlah Kehadiran	% Kehadiran % Kehadiran
1	Hali Lanan Elias	5	100%
2	Sukardan Aloysius	5	100%
3	Semuel Djoh Despantsianus	5	100%
5	Absalom Sine	5	100%
6	Harry Alexander Riwu Kaho	4	80%
7	Hilarius Minggu	4	80%

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi ketidaksesuaian maka dilaksanakan pemungutan suara, dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

The decision of the Board of Directors meeting is taken based on deliberation to reach consensus, if there is a discrepancy, a vote is held, and all the results of the board of directors' meeting have been recorded in the minutes of the meeting and have been fairly well documented.

## PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Disclosure of Related Affiliation of The Board of Commissioners and Board of Directors

Ketiga anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Sedangkan Komisaris Utama mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali. Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The three members of the Board of Commissioners do not have financial, management, share ownership and / or family relations relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. While the President Commissioner has a financial relationship with the Controlling Shareholders. Family and financial relations can be seen in the table as follows

Nama Pengurus Management Name	Hubungan Keluarga Family Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship						Keterangan Bila Ada Hubungan Keluarga/ Keuangan Remarks When There Are Family / Financial Relationships
	Dekom Dekom		Direksi Direksi		PSP PSP		Dekom Dekom		Direksi Direksi		PSP PSP		
	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	
Hali Lanan Elias		√		√		√		√		√		√	Secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan PSP Bank karena pada saat ini posisi yang ber-sangkutan adalah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah Propinsi NTT. Directly has a financial relationship with the PSP Bank because at this time the related position is as the Head of the Revenue Agency and Asset Management Finance of the NTT Province.
Sukardan Aloysius		√		√		√		√		√		√	
Semuel Djoh Despansianus		√		√		√		√		√		√	
Absalom Sine		√		√		√		√		√		√	
Harry Alexander Riwu Kaho		√		√		√		√		√		√	
Hilarius Minggu		√		√		√		√		√		√	



## Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan lainnya akan tetapi sebagai Pejabat Eksekutif pada Lembaga Pemerintah.

Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Rangkap Jabatan Double Position					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other companies	Keterangan Keterangan
Hali Lanan Elis	-	√	-	-	Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah Propinsi NTT. Head of Revenue Agency and Asset Finance Manager for NTT Province.
Sukardan Aloysius	-	-	-	-	-
Semuel Djoh	-	-	-	-	-
Despantsianus	-	-	-	-	-

## Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya.

Jabatan rangkap anggota Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Double Position of Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in other companies but as Executive Officers in Government Institutions.

Multiple positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:

## Double Position of Directors

Members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors in other companies.

Multiple positions of members of the Board of Directors can be seen in the table below:

Rangkap Jabatan Double Position					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other companies	Keterangan Keterangan
Absalom Sine	-	-	-	-	-
Harry Alexander Riwu Kaho	-	-	-	-	-
Hilarius Minggu	-	-	-	-	-

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

### Shareholders of the Board of Commissioners and Directors

The company requires members of the Board of Commissioners and Board of Directors to disclose their share ownership, both in the Company and other companies, which are domiciled at home and abroad in a report that must be renewed annually.

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The details of the Shareholdings of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

Kepemilikan Saham Shareholding					
Nama Name	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Government agencies	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other companies	Keterangan Keterangan
Hali Lanan Elias	-	-	-	-	-
Sukardan Aloysius	-	-	-	-	-
Semuel Djoh Despantianus	-	-	-	-	-
Absalom Sine	-	-	-	-	-
Harry Alexander Riwu Kaho	-	-	-	-	-
Hilarius Minggu	-	-	-	-	-

## KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

### Committees under the Board of Commissioners

Sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Implementasi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat di dua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

As the Decree of the Board of Commissioners of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number 03 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Organizational Structure and Job Manual of Bank NTT's Board of Commissioners and Decision of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 30 of 2006 concerning the Establishment of Code of Conduct and Code of Corporate Governance, the Board of Commissioners is equipped with an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Implementation of these duties and responsibilities, the Board of Commissioners has issued the Decree of the Board of Commissioners of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 01 of 2008 concerning Audit Committee Guidelines, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank.

The management of each Committee is still carried out and is held by several members of the Board of Commissioners, so that a member of the Board of Commissioners can serve on two different Committees. This does not conflict with the Corporate Manual (BPP) of the Good Corporate Governance of Bank NTT, that the chairman of the committee can only hold concurrent positions as chairman of the committee at most in 1 (one) other committee.

## Profil Anggota Komite dari Pihak Independen

### Sukardan Aloysius

Diangkat menjadi Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 25 Mei 2018.

Lulus dari fakultas Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 1985, memperoleh gelar M.Hum pada Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dan memperoleh gelar Program Doktor (S3) pada Universitas Airlangga.

Meniti karier sebagai Dosen pada Universitas Undana Kupang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ini, dan pada tahun 2008 – 2016 menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Mempunyai pendidikan S2 dan S3 melakukan penelitian tentang perbankan.

Menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2018 – 2019.

### Semuel Djoh Despantsianus

Diangkat menjadi Anggota Komite dari pihak Independen sejak 25 Mei 2018, Lulus dari Akademi Keuangan dan Perbankan Semarang tahun 1993 dan Fakultas Ekonomi/Manajemen Universitas Terbuka Jakarta pada tahun 2007.

## Profile of Committee Members from Independent Parties

### Sukardan Aloysius

Appointed as Independent Commissioner of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara since May 25, 2018.

Graduating from the Faculty of Law at the University of Nusa Cendana Kupang in 1985, obtained his M.Hum degree at Padjadjaran University in 2001 and obtained his Doctoral (S3) degree at Airlangga University.

He worked as a lecturer at Undana University Kupang from 1986 until now, and in 2008-2016 served as Dean of the Faculty of Law, University of Nusa Cendana Kupang. Having S2 and S3 education doing research on banking.

Become Chair of the Risk Monitoring Committee and Chair of the Remuneration and Nomination Committee for the 2018 - 2019 period.

### Semuel Djoh Despantsianus

Appointed as a Committee Member from an Independent party since May 25, 2018, Graduated from the Semarang Academy of Finance and Banking in 1993 and the Faculty of Economics / Management, Jakarta Open University in 2007.

Pada tahun 1984 – 1985, menjadi Pegawai Bank NTT Kupang sebagai Analis Kredit Investasi dan Modal Kerja, pada tahun 1985 - 1998 menjadi Pegawai Pelaksana Bank Indonesia Kupang pada Seksi Akunting dan kliring, Seksi kredit, Seksi ekonomi dan Statistik, Seksi Pengawasan Bank, pada tahun 1998 – 1999 menjadi Asisten Manajer Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, pada tahun 1999 – 2005 menjadi Asisten Manajer/Pengawas Bank Junior, pada tahun 2005 – 2011 menjadi Manajer/ Pengawas Bank Muda Senior, pada tahun 2011 – 2013 menjadi Assisten Direktur/Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Kupang Bidang Sistik Pembayaran Manajemen Intern dan Pengawasan Bank dan pada tahun 2014 menjadi Assisten Direktur/Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Kupang Bidang Sistik Pembayaran & Manajemen Intern.

Menjadi Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2018 – 2019.

### **Yosep Dasi Jawa, SH**

Diangkat menjadi Anggota Komite Audit dari pihak Independen sejak Februari 2014. Lulus dari Fakultas Hukum Undana Kupang pada tahun 1996.

Meniti karier sebagai Aktivist LSM Pusat Informasi & Advokasi Rakyat (PIAR) NTT sejak tahun 1997 – 1999, Asisten KPP HAM Pasca Jajak Pendapat Timor Timur pada tahun 1999, Ketua Lembaga Pemantau Pemilu Forum Rakyat Pejuang Demokrasi (FORAPSI) NTT Tahun 1999, Direktur Lembaga Advokasi & Penelitian (LAP) TIMORIS Tahun 1999-2003, Anggota KPU Propinsi NTT tahun 2003-2013, diangkat menjadi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank NTT. Pada tahun 2018 dipercaya kembali menjadi anggota Komite Audit periode 2018 – 2019.

In 1984 - 1985, he became an employee of Bank NTT Kupang as an Investment and Working Capital Credit Analyst, in 1985 - 1999 becoming an Executive Officer of Bank Indonesia Kupang in the Accounting and Clearing Section, Credit Section, Economy and Statistics Section, Bank Supervision Section, in 1998 - 1999 became Assistant Manager of the Executing Section of Monetary Policy, in 1999 - 2005 becoming Assistant Manager / Supervisor of the Junior Bank, in 2005 - 2011 became Manager / Supervisor of the Senior Young Bank, in 2011 - 2013 became Assistant Director / Deputy Head of Bank Representatives Indonesia NTT Kupang Province for Internal Management Payment Systems and Bank Supervision and in 2014 became Assistant Director / Deputy Head of Bank Indonesia NTT Kupang Province for Payment System & Internal Management.

Became Chair of the Audit Committee and Members of the Remuneration and Nomination Committee for the period 2018 - 2019.

### **Yosep Dasi Jawa, SH**

Appointed as an Audit Committee Member from an Independent party since February 2014. Graduated from the Kupang Law Faculty Undana in 1996.

Career career as an NGO activist at the Center for People's Advocacy & Information (PIAR) NTT since 1997 - 1999, Assistant KPP HAM Post-ballot in East Timor in 1999, Chair of the Election Observation Forum of the People's Forum for Democratic Fighters (FORAPSI) in 1999, Director of the Advocacy Institute & TIMORIS Research (LAP) 1999-2003, NTT Province KPU Members from 2003-2013, were appointed as members of the Audit Committee of Bank NTT's Board of Commissioners. In 2018 it is believed that it will again become a member of the Audit Committee for the period 2018 - 2019.

## Dencik Syamsurizal

Diangkat menjadi Anggota Komite Audit dari pihak Independen sejak Juli 2015. Lulus dari Akademi Manajemen Perusahaan (AMP) YKPN- Yogyakarta. Meniti karier sebagai Staf pada Bank NTT sejak tahun 1985 – 1989, Kabag Riset & Pengembangan Bank NTT tahun 1989-1991, Kabag. Akuntansi merangkap Kabag. Pemberian Kredit Bank NTT tahun 1991-1994, sebagai Kabag. Pengawasan Kredit tahun 1994-1997, sebagai Kabag. Pengawasan Wilayah I Bank NTT sejak 1997 –2003, sebagai PLH. Karo Pengawasan / SKAI sejak 2002- 2003, Pemimpin Bank NTT Cabang Ende sejak 2003 – 2006, Kadiv Pengawasan & SKAI tahun 2006 – 2011 dan memasuki pensiun pada tahun 2011. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris Bank NTT sejak Juli 2015 dan dipercaya kembali menjadi anggota Komite Audit periode 2018 – 2019.

## Michael Ngefak

Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen sejak Juli 2015. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 1977. Meniti karier PTU pada Bank Indonesia tahun 1980 – 1987, staf pada bagian pendidikan Bank Indonesia tahun 1987 -1988, sebagai Pengawas Bank Junior (PBY) pada Biro Pemeriksaan Bank Pemerintah (Biro PBP) Kantor Pusat bank Indonesia Jakarta, Kepala Seksi Pengawas Bank Muda Senior (PBMS) 1997 – 2005 di KBI Kupang, 2005 – 2008 pada Tim Pengawasan BPR 1, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta. Pensiun pada tahun 2008. Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko Komisaris Bank NTT sejak Juli 2015 periode (2015 – 2017) dan dipercaya kembali menjadi anggota Komite Pemantau Risiko periode 2018 – 2019.

## Dencik Syamsurizal

Appointed as an Audit Committee Member from an Independent party since July 2015. Graduated from the YKPN-Yogyakarta Corporate Management Academy (AMP). Career as a Staff at Bank NTT since 1985 - 1989, Head of NTT Bank Research & Development in 1989-1991, Head of Section. Accounting concurrently Kabag. Providing NTT Bank Loans in 1991-1994, as Head of Section. Credit Supervision in 1994-1997, as Head of Section. NTT Bank I Region I supervision since 1997-2003, as PLH. Karo Supervision / SKAI since 2002-2003, Head of Bank NTT Ende Branch since 2003 - 2006, Head of Monitoring & Internal Audit Division in 2006 - 2011 and entered retirement in 2011. Appointed as Member of the Audit Committee of Bank NTT's Board of Commissioners since July 2015 and trusted to become Audit Committee members for the period 2018 - 2019.

## Michael Ngefak

Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee from an independent party since July 2015. Graduated from the Faculty of Economics at Satya Wacana Christian University in Salatiga in 1977. He took care of PTU's career with Bank Indonesia in 1980 - 1987, staff in the education department of Bank Indonesia in 1987-1988, as Bank Supervisor Junior (PBY) at Government Bank Examination Bureau (PBP Bureau) Jakarta Indonesia Head Office, Senior Young Bank (PBMS) Supervisory Section Head (PBMS) 1997 - 2005 at Kupang KBI, 2005 - 2008 at BPR 1 Monitoring Team, Credit, BPR and UMKM Directorate (DKBU) Head Office of Bank Indonesia Jakarta. Retired in 2008. Appointed as Member of the Risk Monitoring Committee of Bank NTT Commissioner since July 2015 (2015 - 2017) and trusted to be a member of the Risk Monitoring Committee for the period 2018 - 2019.

## **Thresia Gitamora Dua Nurak, SH.MH**

Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen sejak Februari 2014 ., Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar-Bali tahun 1996 dan memperoleh gelar MH pada Universitas Udayana Denpasar Bali tahun 2001. Meniti karier sebagai Dosen Fakultas Hukum UNFLOR tahun 2001 – 2005, sebagai Direktris Lembaga Bantuan Hukum DIKAYOMA Kupang tahun 2005 – 2008 sebagai Anggota KPU Sikka periode 2008 – 2013, memiliki banyak pengalaman organisasi diantaranya : Anggota PMKRI Cabang Denpasar, Anggota Pemuda Katholik Cabang Denpasar, Wakil Ketua Gema Perjuangan Sarinah Prov. NTT, Ketua Kaukus perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT, bendahara Organisasi PERWIRA (Perempuan Wirausaha) Prov.NTT dan Anggota Divisi Hukum P2TP2A Prov. NTT.

Dipercaya kembali menjadi anggota Komite Pemantai Risiko periode 2018 - 2019

## **Sola Thadeus**

Diangkat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Bank NTT sejak 31 Juli 2017 , meniti karier pada Bank NTT sejak Maret 1989 dan menduduki Jabatan penting pada Bank NTT sebagai Kasie Akunt/PDE/Umum KCU Kupang tahun 1995 - 2001, Wakil Pemimpin Cabang Maumere tahun 2001 – 2002, Pjs. Pemimpin Cabang Larantuka tahun 2002 - 2003, Pemimpin Cabang Lewoleba tahun 2003 - 2006 Pemimpin Cabang/Manager Bisnis Cabang Bajawa tahun 2006 – 2009, Pemimpin Cabang/Manager Bisnis Cabang Ende tahun 2009 – 2016, Wakil Pemimpin Cabang Utama Bidang Bisnis tahun 2016 – 2017, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia tahun 2018 sampai dengan sekarang .

## **Thresia Gitamora Dua Nurak, SH. MH**

Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee from an independent party since February 2014. Graduated from the Faculty of Law of Udayana University Denpasar-Bali in 1996 and obtained his MH degree at Udayana University Denpasar Bali in 2001. Career career as a UNFLOR Faculty of Law Lecturer 2001 - 2005, as Director of the Kupang Legal Aid Agency DIKAYOMA 2005-2008 as Sikka KPU Member for the period 2008 - 2013, had many organizational experiences including: Members of PMKRI Denpasar Branch, Members of the Catholic Youth Denpasar Branch, Deputy Chair of Gema Perjuangan Sarinah Prov. NTT, Chair of the Indonesian Political Caucus (KPPI) NTT, treasurer of the PERWIRA Organization (Entrepreneurial Women) NTT Province and Member of the Legal Division of P2TP2A Prov. NTT.

Believed to be a member of the Risk Relaxing Committee 2018 - 2019

## **Sola Thadeus**

Appointed as a Member of the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT since 31 July 2017, career at Bank NTT since March 1989 and occupy an important position at Bank NTT as Head of Accountant / PDE / General KCU Kupang in 1995 - 2001, Deputy Branch Manager Maumere in 2001 - 2002, Acting Leader of Larantuka Branch in 2002 - 2003, Leader of Lewoleba Branch in 2003 - 2006 Branch Manager / Branch Manager of Business Bajawa in 2006 - 2009, Branch Manager / Branch Manager of Ende Business in 2009-2016, Deputy Leader of Main Branch of Business in 2016 - 2017, Head of the Human Resources Division in 2018 until now.

## KOMITE AUDIT

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka ditetapkan susunan anggota Komite Audit dengan persyaratan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

### Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Dalam upaya meningkat kinerja Komite Audit Bank NTT, maka sejak tahun 2015 Direksi Bank NTT telah melakukan penggantian Anggota Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun buku 2018 sejak tanggal 1 Januari s/d 27 Mei 2018 susunan Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang sebagai anggota, akan tetapi sejak tanggal 28 Mei 2018

## AUDIT COMMITTEE

### Structure, Membership, Integrity and Independence of the Audit Committee

Referring to the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 01 of 2008 concerning Audit Committee Guidelines, Risk Monitoring Committee and PT Remuneration and Nomination Committee of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the Audit Committee members are stipulated on the condition that the Audit Committee members at least consisting of an Independent Commissioner, an independent party with expertise in finance or accounting and an independent party who has expertise in law or banking.

### Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In an effort to improve the performance of the Bank NTT Audit Committee, since 2015 the Board of Directors of Bank NTT has replaced the Audit Committee Members as determined by the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 69 of 2015 dated 15 July 2015 concerning of Dismissal and Appointment of Chairperson and Member of the Board of Commissioners of PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

In fiscal year 2018 from 1 January to 27 May 2018 the composition of the Audit Committee consists of 3 (three) people consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson, 2 (two) people as members, but since May 28 2018 to December 31, 2018,



s/d 31 Desember 2018, sesuai SK. Direksi No.36 tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal : Komposisi Keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka terhitung tanggal 28 Mei 2018, Bapak Samuel Djoh Despriansianus menggantikan Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum sebagai Ketua Komite Audit.

according to SK. Directors No.36 year 2018 dated 28 May 2018 concerning: Audit Committee Membership Composition The Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, as of May 28, 2018, Mr. Samuel Djoh Despriansianus replaced Peter Elias Jemadu, S.H, M. Hum as Chair of the Audit Committee.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit, sebagai berikut:

The composition and composition of the Audit Committee membership are as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Audit Bank NTT Bank NTT Audit Committee Membership Composition	
Nama Name	Jabatan Position
Petrus Elias Jemadu S.H,M.Hum	Ketua (Komisaris Independen) (sampai dengan 27 Mei 2018) Chairperson (Independent Commissioner) (up to May 27, 2018)
Semuel Djoh Despriansianus	Ketua (Komisaris Independen) (28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019) Chairperson (Independent Commissioner) (May 28, 2018 to May 27, 2019)
Dencik Syamsirizal	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Parties)
Yos Dasi Jawa	Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Parties)

Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

All members of the Audit Committee have fulfilled the criteria of independence, expertise, integrity and morality that are required in the NTT Bank Good Corporate Governance Guidelines and other related regulations / provisions.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Audit Committee do not have financial, management, share ownership and / or family relations with the Board of Commissioners, Directors and / or Controlling Shareholders or relations with the Bank, which can affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Independence Aspect	Semuel Djoh Despantianus	Dencik Syamsurizal	Yos Dasi Jawa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi; <i>Do not have financial relations with the Board of Commissioners and Directors;</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi; <i>Has no management relationship at Bank NTT, subsidiaries or affiliated companies;</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT. <i>Does not have a shareholding relationship at Bank NTT.</i>	√	√	√

Dalam penggantian anggota komite tersebut, susunan keanggotaanya tetap berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bahwa Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum atau perbankan yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, pemantauan atas tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

*In replacing the committee members, the composition of its members is still guided by the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, namely that the Audit Committee Members consist of 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one ) people from independent parties who have expertise in finance or accounting and 1 (one) independent party who has expertise in the field of law or banking who is tasked with monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, monitoring the follow-up of audit results on the implementation of IAU duties , the suitability of the audit by the Public Accountant Office with the applicable standards, the suitability of financial statements with applicable accounting standards and the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of IAU, Public Accountants and the results of Bank Indonesia / OJK supervision.*

*The Audit Committee is required to provide recommendations regarding the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Office to the Commissioner to be submitted to the GMS.*

## Tindak Lanjut Program Kerja Komite Audit

Secara garis besar, selama tahun 2018 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan piagam komite audit sebagai berikut:

1. Pembahasan Hasil Audit SKAI Triwulan IV Tahun 2017
2. Pembahasan Profil Risiko triwulan IV Tahun 2017
3. Pembahasan Hasil Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2017)
4. Pembahasan tentang Program Kerja Divisi Pengawasan dan SKAI Tahun 2018
5. Hasil audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan I (Januari s/d Maret 2018)
6. Tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
7. Pembahasan konsep Internal Audit Charter
8. Kajian Hasil Audit Divisi Pengawasan dan SKAI triwulan III (Juli s/d September 2018)

## Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2018 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 4 (empat) kali rapat/pertemuan.

## Follow-up of the Audit Committee Work Program

Broadly speaking, during 2018 the Audit Committee carried out activities in accordance with the charter of the audit committee as follows:

1. Discussion of Audit Results of the Internal Audit Unit for Quarter IV of 2017
2. Discussion of Risk Profiles for the fourth quarter of 2017
3. Discussion of Audit Results of the Quarterly Supervision and IAU Division (October to December 2017)
4. Discussion of the 2018 Supervision and Internal Audit Division Work Program
5. Audit results of the First Quarter Monitoring and SKAI Division (January to March 2018)
6. Follow-up on the results of internal and external audits.
7. Discussion of the concept of the Internal Audit Charter
8. Audit Results Study of the quarterly Supervision and SKAI Division (July to September 2018)

## Audit Committee Meeting Activities

The Audit Committee meetings have been carried out according to the needs of the Bank and can only be implemented if attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including an Independent Commissioner.

Based on the tasks and focus of the aforementioned activities, during 2018 the Audit Committee had discussed and submitted suggestions covering various important activities carried out by the Bank in 4 (four) meetings.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali rapat bersama Komite lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Meetings held by the Audit Committee internally as many as 2 (two) times and 2 (two) meetings with other Committees, with details as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
1.	1 Maret 2018	1. Pembahasan Hasil Audit SKAI Triwulan IV tahun 2017 2. Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV tahun 2017. 1. Discussion of Audit Results of the 2017 Quarter IV SKAI 2. Discussion of the Risk Profile for the 4th Quarter of 2017.	√	√	√	BMA
2.	1 Maret 2018	1. Pembahasan Hasil Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2017) 2. Lain - lain 1. Discussion of Audit Results of Quarter IV Supervision and SKAI Division (October to December 2017) 2. Others	√	√	√	BMA
3.	05 Juni 2018	1. Pembahasan Program Kerja Divisi Pengawasan dan SKAI tahun 2018. 2. Hasil Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan I (Januari s/d Maret 2018). 3. Tindak lanjut hasil Audit internal dan eksternal. 1. Discussion of the 2018 Supervision and Internal Audit Division Work Program. 2. Audit Results of First Quarter Monitoring and SKAI Division (January to March 2018). 3. Follow-up on internal and external audit results.	B	√	√	√
4.	06 Juli 2018	1. Pembahasan konsep Internal Audit Charter. 2. Lain-lain 1. Discussion of the concept of the Internal Audit Charter. 2. Others	B	TH	√	√

\*Keterangan Kode Nama Peserta :

- (1) Piet E. Jemadu, SH.M.Hum
- (2) Dencik Syamsurizal
- (3) Yosep Dasi Jawa,SH
- (4) Samuel Djoh Despansianus

Code Description Participant Name:

- (1) Piet E. Jemadu, SH.M.Hum
- (2) Dencik Syamsurizal
- (3) Yosep Dasi Jawa, SH
- (4) After Djoh Despansianus

\*Keterangan kehadiran :

- √ = Hadir
- BMA = Belum Menjadi Anggota
- B = Berhenti
- TH = Tidak Hadir

\* Attendance information:

- √ = Present
- BMA = Not yet a Member
- B = Stop
- TH = Not Present

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

The decision of a committee meeting is based on consensus agreement, in the event that deliberations do not occur, the decision is made based on the majority of votes.

The results of the decisions of the Committee meetings are stated in a minutes of meeting signed by all members of the Committee present and well documented. The results of the Committee meeting are recommendations that can be utilized properly by the Board of Commissioners.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

The attendance level of each member in the Audit Committee meetings both internally and coordination meetings is as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Piet E. Jemadu, SH.M.Hum	2	100%
Dencik Syamsurizal	3	75 %
Yosep Dasi Jawa,SH	4	100%
Semuel Djoh Despansianus	2	100%

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Direksi Bank NTT menetapkan Pembentukan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pengangkatan Ketua

## RISK MONITOR COMMITTEE

### Structure, Membership, Expertise and Independence of the Risk Monitoring Committee

Following up on the Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 01 of 2008 concerning Audit Committee Guidelines, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Regional Development Bank East Nusa Tenggara, the Board of Directors of Bank NTT stipulates the Establishment of Membership of the Risk Monitoring Committee through Decree Directors No. 69 of 2015

dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, memutuskan bahwa susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank NTT terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang pihak independen.

Pada tahun buku 2018 sejak tanggal 1 Januari s/d 27 Mei 2018 susunan Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang sebagai anggota, akan tetapi sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018, sesuai SK. Direksi No.36 tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal : Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka terhitung tanggal 28 Mei 2018, Bapak Sukardan Aloysius menggantikan Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Maksud dari pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja Manajemen Risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap exposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan

dated 15 July 2015 concerning the Appointment of Chairperson and Members of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and amended by Decree of the Board of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number 36 of 2018 concerning the Composition of Membership of the Board of Commissioners of PT Bank The Regional Development of East Nusa Tenggara, decided that the membership structure of the Bank NTT Risk Monitoring Committee consisted of an Independent Commissioner, and 2 (two) independent parties.

In fiscal year 2018 from 1 January to 27 May 2018 the composition of the Risk Oversight Committee has 3 (three) members consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson, 2 (two) people as members, but since 28 May 2018 to 31 December 2018, according to SK. Directors No.36 year 2018 dated 28 May 2018 concerning: Membership Composition of the Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, as of 28 May 2018, Mr. Sukardan Aloysius replaced Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum as Chair of the Risk Monitoring Committee.

The purpose of the establishment of the Risk Monitoring Committee is to ensure that the framework that has been prepared in the Risk Management work unit has provided adequate protection against the Bank's risk exposure, both operational and non-operational.

The Risk Monitoring Committee was formed with the aim of evaluating the suitability of the Risk Management policy with the implementation of the policy and

kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota.

Dua orang pihak independen pada posisi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas terdiri dari:

1. Seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
2. Seorang yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit, to provide recommendations and suggestions on various company activities so that the Board of Commissioners should be concerned in carrying out supervisory duties and functions of the Board of Directors.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the Risk Monitoring Committee has 3 (three) members, consisting of 1 (one) from the Independent Commissioner as Chairperson and 2 (two) people from independent party as a member.

Two independent parties in the position of members of the Risk Monitoring Committee mentioned above consist of:

1. A person who has expertise in finance; and
2. A person who has expertise in the field of risk management

The composition and composition of the Risk Monitoring Committee membership are as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank NTT Membership Structure of the NTT Bank Risk Monitoring Committee	
Nama Name	Jabatan Position
Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum	Ketua (Komisaris Independen) Sampai dengan 27 Mei 2018) Chairperson (Independent Commissioner) until May 27, 2018)
Sukardan Aloysius	Ketua (Komisaris Independen) (28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019) Chairperson (Independent Commissioner) (May 28, 2018 to May 27, 2019)
Mikael Ngefak	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee
Theresia Gitamora Dua Nurak, SH	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maupun Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yang mana dalam isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan Tata Kelola Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

The entire membership of the Risk Monitoring Committee has fulfilled the independence, expertise, integrity and moral criteria that are required by the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Decision of the Board of Directors of the Regional Development Bank East Nusa Tenggara Number : 30 of 2006 concerning Determination of Code of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance, which in the contents of the provisions stipulates the objectives of implementing NTT Bank Governance and other related regulations / provisions.

Tabel Independensi Independence Table			
Aspek Independensi Independence Aspect	Sukardan Aloysius	Mikael Ngefak	Theresia Gitamorata Nurak
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Do not have financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi <i>Has no management relationship at Bank NTT, subsidiaries and affiliated companies</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT. <i>Does not have a shareholding relationship at Bank NTT.</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or members of the Audit Committee</i>	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. <i>Not serving as administrator of political parties, local government officials.</i>	√	√	√

## Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Peran dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, adalah:

## Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The roles and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning the Establishment of the Code of Conduct Guidelines and the Code of Corporate Governance, are:



1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dimaksud.
2. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Secara garis besar, selama tahun 2018 fokus Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara cukup memadai.
2. Komite Pemantau Risiko cukup sering melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terlihat dari frekuensi rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko.

### Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran –saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 3 (tiga) kali rapat/ pembahasan, sebagai berikut:

1. Evaluate the suitability between risk management policies and the implementation of said policies.
2. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the risk management committee and risk management work unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.

### Follow-up of the Risk Monitoring Committee Work Program

Broadly speaking, during 2018 the focus of activities carried out by the Risk Monitoring Committee, among others, are as follows:

1. The Risk Monitoring Committee has adequately evaluated the policies and implementation of risk management.
2. The Risk Monitoring Committee often monitors and evaluates the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit, as seen from the frequency of meetings held by the Risk Monitoring Committee.

### Risk Monitoring Committee Meeting Activities

The Risk Monitoring Committee meetings have been carried out according to the needs of the Bank and can only be carried out if attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including an Independent Commissioner.

Based on the tasks and focus of the above activities, during 2018 the Risk Monitoring Committee has discussed and delivered suggestions covering various important activities carried out by the Bank in 3 (three) meetings, as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
1.	1 Maret 2018	1. Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV 2. Warna Sari. 1. Discussion of the Quarter IV Risk Profile 2. Warna Sari.	√	BMA	√	√
2.	1 Maret 2018	1. Pembahasan Hasil Audit SKAI Triwulan IV/2017 2. Pembahasan Profil Risiko 1. Discussion of Audit Results of the Quarter IV / 2017 IAU 2. Discussion of Risk Profiles	√	BMA	√	√
3.	4 Juli 2018	1. Pembahasan tugas – tugas Komite Pemantau Risiko 2. Pembahasan Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko 3. Pembahasan Risiko Kredit dan Risiko Operasioal 4. Pembahasan Tatib dan SK Komite Pemantau Risiko. 1. Discussion of the duties of the Risk Monitoring Committee 2. Discussion on the Performance Evaluation of the Risk Monitoring Committee 3. Discussion of Credit and Operational Risk 4. Discussion of the Standing Orders and the SK of the Risk Monitoring Committee	B	√	√	√

\*Keterangan Kode Nama Peserta

- (1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum
- (2) Sukardan Aloysius
- (3) Michael Ngefak
- (4) Theresia Gitamorata Dua Nurak

\*Code Description Name of Participant

- (1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum
- (2) Sukard and Aloysius
- (3) Michael Ngefak
- (4) Nurak's Second Gitamorata Theresia

\*Kode Kehadiran :

- √ = Hadir
- B = Berhenti
- TH = Tidak Hadir

\* Attendance Code:

- √ = Present
- B = Stop
- TH = Not Present

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

The attendance level of each member in the Risk Oversight Committee meetings both internally and coordination meetings is as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1	Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum	1	100%
2	Sukardan Aloysius	1	100%
3	Michael Ngefak	4	100%
4	Theresia Gitamorata Dua Nurak, SH	3	75%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

The results of the decisions of the Committee meeting are based on consensus meetings and set forth in a minutes of meeting signed by all present and well-documented members of the Committee including dissenting opinions that occur at the committee meeting along with the reasons for such dissent. The results of the Committee meeting are recommendations that can be utilized properly by the Board of Commissioners.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

## REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.

### Structure, Membership, Skills, and Independence of the Remuneration and Nomination Committee.

Sebagaimana pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya diimplementasikan lebih rinci dengan beberapa ketentuan, yakni Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT

As the establishment of the Audit Committee and Monitoring Committee the basic risk of establishing the NTT Bank Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 01 of 2008 concerning Audit Committee Guidelines, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara, which is further implemented in more detail with several provisions, namely the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 20 Year 2014 dated February 17, 2014 concerning Dismissal and Appointment of Chairpersons

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang menetapkan bahwa anggota Komite terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan seorang pihak Bank NTT sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 69 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

and Members of the Board of Commissioners of the PT Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank which stipulates that the Committee members consist of an Independent Commissioner, and a Bank NTT party in accordance with the Decree of the Directors of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 69 of 2015 concerning Dismissal and appointment of Chairperson and Member of the Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

Pada tahun buku 2018 sejak tanggal 1 Januari s/d 27 Mei 2018 susunan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia sebagai anggota, akan tetapi sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018, sesuai SK. Direksi No.36 tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal : Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka terhitung tanggal 28 Mei 2018, Bapak Sukardan Aloysius menggantikan Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan Samuel Djoh Despantsianus sebagai Anggota Komite dengan susunan dan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

In fiscal year 2018 from 1 January to 27 May 2018 the composition of the Remuneration and Nomination Committee has 2 (two) members consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson, 1 (one) and 1 (one) Executive Officer which oversees the Human Resources work unit as a member, but from 28 May 2018 to 31 December 2018, according to the Decree. Directors No.36 year 2018 dated 28 May 2018 regarding: Membership Composition of the Board of Commissioners of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, starting 28 May 2018, Mr. Sukardan Aloysius replaced Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum as Chair of the Remuneration and Nomination Committee and Samuel Djoh Despantsianus as Committee Member with the following composition and composition of membership:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT Bank NTT Membership Composition of Bank NTT Bank NTT's Remuneration and Nomination Committee	
Nama Name	Jabatan Position
Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum	Ketua (Komisaris Independen) Sampai dengan 27 Mei 2018 Chairperson (Independent Commissioner) Until May 27, 2018
Sukardan Aloysius	Ketua ( Komisaris Independen) (28 Mei- 27 Mei 2019) Chairperson (Independent Commissioner) (28 mei- 27 mei 2019)
Semuel Djoh Despantsianus	Anggota Komite Committee member
Sola Thadeus	Anggota Komite (Kepala Divisi SDM) Committee Member (HR Division Head)

Seluruh keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTT dan peraturan, ketentuan terkait lainnya.

The entire membership of the Remuneration and Nomination Committee has met the criteria of independence, expertise, integrity and good morals that are required in the NTT Bank Good Corporate Governance Guidelines and regulations, other related provisions.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Remuneration and Nomination Committee do not have financial, management, share ownership and / or family relations with the Board of Commissioners, Directors and / or relations with the Bank, which can affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Independence Aspect	Sukardan Aloysius	Semuel Djoh Despantianus	Sola Thadeus
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi; <i>Do not have financial relations with the Board of Commissioners and Directors;</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi; <i>Has no management relationship at Bank NTT, subsidiaries or affiliated companies;</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT; <i>Does not have a shareholding relationship at Bank NTT;</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit; <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or fellow members of the Audit Committee;</i>	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. <i>Not serving as administrator of political parties, local government officials.</i>	√	√	√

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi ;

### Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee;

Pelaksanaan peran dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan

The implementation of the roles and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee as Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number:

Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan di bidang remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

### **Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

30 of 2006 concerning the Establishment of the Code of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance, are:

1. Evaluating policies in the field of remuneration;
2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for the Board of Commissioners, Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding overall Executive Officer and Employee remuneration policies to be submitted to the Board of Directors;
4. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and / or replacing members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted at the General Meeting of Shareholders;
5. Providing recommendations regarding prospective members of the Board of Commissioners and / or Directors to the Board of Commissioners to be submitted at the General Meeting of Shareholders;
6. Provide recommendations regarding Independent Parties who will be members of the Committee to the Board of Commissioners.

### **Remuneration and Nomination Committee Meeting Activities**

The Remuneration and Nomination Committee meetings have been carried out according to the needs of the Bank of NTT and can only be implemented if attended by at least 51% (fifty one percent) of the members including an Independent Commissioner and Executive Officer.

## Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan Bank sebanyak 12 (dua belas) kali rapat yaitu :

## Committee meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) year.

Based on the tasks and focus of the aforementioned activities, during 2018 the Remuneration and Nomination Committee has discussed and submitted suggestions covering various important activities carried out by the Bank 12 (twelve) meetings, namely:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
1.	12 Februari 2018	1. Ha-hak Bapak Adrianus Ceme, Sdr Salmun Teru dan Sdr. Adi Rano 2. Rencana kenaikan gaji Pegawai 3. Rencana kenaikan tunjangan kendaraan Pengurus Bank NTT; 4. Rencana kenaikan penghasilan komite-komite 1. The rights of Mr. Adrianus Ceme, Mr. Salmun Teru and Mr. Adi Rano 2. Plans for employee salary increases 3. Planned increase in allowances for Bank NTT Management vehicles; 4. Plans to increase the income of the committees	√	BMA	BMA	√
2.	13 Februari	Pembayaran hak-hak bagi Pejabat dan Staf Bank NTT yang telah dibebaskan dari hukuman Pengadilan Tipikor. Payment of rights for NTT Bank Officials and Staff who have been released from the Corruption Court sentence.	√	BMA	BMA	√
3.	28 Februari 2018	Menelaah berkas Calon Pengurus sesuai surat OJK Nomor SR-21/PB.121/2018 tanggal 20 Februari 2018 dan Kenaikan gaji Pegawai dan Komite serta penghargaan pasca berakhirnya masa bakti Examine the Candidates for Management in accordance with OJK letter Number SR-21 / PB.121 / 2018 dated 20 February 2018 and Employee and Committee salary increases and awards after the expiration of the service period	√	BMA	BMA	√

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
4.	30 Mei 2018	Tindak lanjut hasil RUPS Bank NTT tentang Dirut dan Dirum. <i>Follow-up on the results of the Bank NTT GMS regarding the Managing Director and Director General.</i>	B	√	√	√
5.	07 Juni 2018	Pembahasan Persiapan RUPS LB Bank NTT. <i>Discussion on Preparation of NTT LB Bank RUPS.</i>	B	√	√	√
6.	21 Juni 2018	Pembahasan Persiapan sebelum melaksanakan wawancara <i>Discussion Preparation before carrying out the interview</i>	B	√	√	√
7.	02 Juli 2018	Persiapan pengisian berkas Para Calon Direksi Bank NTT. <i>Preparation of filling in the files of the Candidates for Bank NTT Directors.</i>	B	√	√	√
8.	10 Juli 2018	Evaluasi berkas Para Calon Anggota Direksi Bank NTT. <i>Evaluation of files for Candidates for Members of the Bank NTT Board of Directors.</i>	B	√	√	√
9.	30 Oktober 2018	Informasi tentang Pengurus Bank NTT oleh Tim Pembina BUMD NTT <i>Information about Bank NTT Management by the NTT BUMD Development Team</i>	B	√	√	√



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
10.	05 Nopember 2018	<p>1. Mengadakan RUPS untuk membatalkan RUPS sebelumnya.</p> <p>2. Melakukan review SOP KRN yang ada karena setiap periode, SOP berubah-ubah;</p> <p>3. SOP yang dibuat saat ini adalah untuk membuka ruang bagi yang professional dari Bank lain untuk bekerja di Bank NTT, setelah lama mengabdikan di luar NTT.</p> <p>4. Membuka ruang untuk anak muda yang berprestasi dan pintar untuk bekerja walaupun usianya masih muda, sehingga bagi calon Direksi yang berumur 45 tahun supaya dihilangkan,</p> <p>5. Dalam peraturan OJK tidak ditemukan batas usia minimum Direksi.</p> <p>6. Pembatasan maksimum umur Dewan Komisaris pada saat melamar supaya dihilangkan, sebenarnya umur yang lebih tua dinilai lebih matang dalam berpikir dan lebih bijak dalam mengambil keputusan.</p> <p>7. Dengan demikian maka agenda RUPS yang akan datang adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatalan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya (02 Juli 2018)</li> <li>• Perubahan SOP pemilihan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.</li> <li>• Meminta KRN Bank NTT untuk melakukan seleksi ulang atas calon-calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum</li> </ul> <p>1. Hold a GMS to cancel the previous GMS.</p> <p>2. Reviewing existing KRN SOPs because each period, SOP changes;</p> <p>3. The current SOP is to open up space for professionals from other banks to work at Bank NTT, after serving long periods outside NTT.</p> <p>4. Open space for bright and bright young people to work even though they are young, so that 45-year-old candidates for Directors are eliminated,</p> <p>5. In OJK regulations no minimum age limit for the Directors is found.</p> <p>6. Restricting the maximum age of the Board of Commissioners when applying to be eliminated, actually older age is considered more mature in thinking and wiser in making decisions.</p> <p>7. Therefore, the upcoming AGMS agenda is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancellation of GMS Nomination of previous Directors (July 2, 2018)</li> <li>• Changes in the SOP for the selection and replacement of the Board of Commissioners and Directors of NTT Bank.</li> <li>• Requesting the Bank NTT KRN to re-select candidates for the Board of Commissioners, President Director and General Director</li> </ul>	B	√	√	√

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta Participant Code			
			1	2	3	4
11.	19 Nopember 2018	Penyempurnaan : SOP dan Time Schedule pemilihan dan penggantian Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum Bank NTT <i>Improvement: SOP and Time Schedule for selecting and replacing the Board of Commissioners, President Director and Bank NTT General Director</i>	B	√	√	√
12.	29 Nopember 2018	1. Penetapan Time Line proses penerimaan Calon Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum Bank NTT; 2. Penetapan Tim Wawancara calon, dari pihak independen eksternal daro akademisi 3. Menyetujui pengusulan honor Tim wawancara kepada Direksi Bank NTT. 4. Menugaskan Kepala Sekretariat Dewan Komisaris untuk menghubungi dan menyiapkan surat pemberitahuan kepada Pewawancara dimaksud. <i>1. Determination of Time Line acceptance process for Candidates for Commissioners, Managing Directors and General Directors of Bank NTT; 2. Determination of prospective Interview Teams, from external independent parties from academics 3. Approved the honorarium proposal for the Interview Team to the NTT Bank Directors. 4. Assign the Head of the Secretariat of the Board of Commissioners to contact and prepare a notification letter to the Interviewer in question.</i>	B	√	√	√

\*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum
- 2) Sukardan Aloysius
- 3) Samuel Djoh Despantianus
- 4) Sola Thadeus

\*Kode Kehadiran :

√ = Hadir

B = Berhenti

BMA = Belum menjadi Anggota

\* Code Description Name of Participant

- 1) Petrus Elias Jemadu, S.H, M.Hum
- 2) Sukard and Aloysius
- 3) After Djoh Despantianus
- 4) Sola Thadeus

\* Attendance Code:

√ = Present

B = Stop

BMA = Not yet a Member

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

The attendance level of each member in the Remuneration and Nomination Committee meetings both internally and coordination meetings is as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
1	Petrus Elias Jemadu, S.H, M. Hum	3	100%
2	Sukardan Aloysius	9	100%
3	Semuel Djoh Despansianus	9	100%
4	Sola Thadeus	12	100%

Keputusan Rapat Komite remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

The decisions of the Remuneration and Nomination Committee Meeting are based on consensus meetings, decision making is based on the majority of votes, and all decisions of the Committee meetings are binding on all Committee members.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

The results of the decisions of the Committee meetings are set forth in a minutes of meeting signed by all members of the Committee present and documented.

## KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI

### Committees under the Board of Directors

#### Komite Asset & Liability (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap dibawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Bank NTT yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Bank NTT (asset and liabilities management). Pembentukan Komite ALCO dan SSG – ALCO adalah sesuai dengan SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang Asset Liability Committee (ALCO) dan Staff Supporting Group – Asset Liability Committee (SSG-ALCO) PT. Bank NTT tanggal 30 Juni 2006 dan SK nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Direksi Nomor 52 Tahun 2006 tentang Asset Liability Committee (ALCO) dan Staff Supporting Group - Asset Liability Committee (SSG- ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 7 Mei 2015.

#### Fungsi Pokok ALCO

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank NTT, termasuk kebutuhan dana tidak terduga dan meminimalisir idle funds.
2. Mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan dan menetapkan arah kebijakan strategis manajemen dalam mengelola aktiva dan pasiva bank.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (pricing policy) untuk produk produk dana, pinjaman dan Rekening antar Kantor (RAK).

#### Asset & Liability Committee (ALCO)

The Asset & Liability Committee (ALCO) is a Committee that remains under the Board of Directors with the mission of achieving optimum Bank NTT profitability levels as well as controlled liquidity risk and interest rate risk, through the establishment of Bank NTT assets and liabilities management policies and strategies.

The formation of the ALCO and SSG - ALCO Committee is in line with the Directors Decree Number: 52 of 2006 concerning Asset Liability Committee (ALCO) and Supporting Group Staff - Asset Liability Committee (SSG-ALCO) PT. NTT Bank dated 30 June 2006 and Directors Decree Number: 78 of 2008 concerning Amendments to Attachment 1 and Attachment II to Directors Decree Number: 52 of 2006 concerning Legal Position of ALCO Meeting Resolutions of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara dated June 30, 2006.

#### ALCO Main Function

1. Establish and evaluate liquidity management policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations, meet Bank NTT's liquidity needs, including unexpected funding needs and minimize idle funds.
2. Having duties and responsibilities to formulate and determine the direction of management's strategic policy in managing bank assets and liabilities.
3. Establish and evaluate policies and strategies related to market risk, namely interest rate risk.
4. Establish and evaluate price policies and strategies (pricing policy) for product funds, loans and Inter-Office Accounts (RAK).

5. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
6. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimum.

### **Wewenang ALCO**

Alco mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis dibidang pengelolaan asset dan liabilitas Bank NTT (*asset and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, seperti :

1. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan dan giro;
2. Menetapkan suku bunga pinjaman;
3. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;
4. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga yang sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

### **Keanggotaan ALCO dan Staff Supporting Group-ALCO**

Susunan Anggota ALCO adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama  
 Ketua Pengganti : Direktur Pemasaran Dana  
 Sekretaris : Kepala Divisi Treasury

Anggota

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Pemasaran Dana
3. Direktur Pemasaran Kredit
4. Direktur Umum
5. Kepala Divisi Kredit
6. Kepala Divisi Supporting Kredit
7. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI
8. Kepala Divisi Kepatuhan

5. Establish and evaluate policies and strategies in structuring investment portfolios.
6. Establish and evaluate policies and structuring strategies for balance sheet structure through anticipation of changes in interest rates to achieve the optimum net interest margin.

### **Authority of ALCO**

Alco has the authority to make strategic decisions in the management of Bank NTT's assets and liabilities (assets and liabilities management) insofar as they do not exceed the authority of the Board of Directors, such as:

1. Establish deposit rates, savings and current accounts;
2. Establish loan interest rates;
3. Establish funding and investment strategies;
4. Establish limits relating to liquidity risk, interest rate risk that is in accordance with the overall risk-taking policy.

### **ALCO Membership and Support Group-ALCO Staff**

The ALCO Membership Structure is as follows:

Chair : President Director  
 Substitute Chair : Fund Marketing Director  
 Secretary : Head of Treasury Division

Members:

1. Compliance Director
2. Fund Marketing Director
3. Director of Credit Enlargement
4. General Director
5. Head of the Credit Division
6. Head of Credit Supporting Division
7. Head of Supervision & Internal Audit Division
8. Head of Compliance Division

9. Kepala Divisi Operasional
10. Kepala Divisi Kualitas Pelayanan
11. Kepala Divisi Dana Jasa
12. Kepala Divisi Manajemen Risiko
13. Kepala Divisi Rencorsec
14. Kepala Divisi SDM
15. Kepala Divisi IT
16. Kepala Divisi Umum

Susunan Keanggotaan Staff Supporting Group – ALCO adalah sebagai berikut :

Koordinator : Kepala Sub Divisi Dana

Anggota :

1. Kepala Sub Divisi Treasury Operasional
2. Kepala Sub Divisi Transaksi DN/LN
3. Kepala Sub Divisi Riset dan Pengembangan
4. Kepala Sub Divisi Akuntansi Keuangan
5. Kepala Sub Divisi Anggaran dan Laporan
6. Kepala Sub Divisi Bisnis UKM dan Umum
7. Unit Kerja atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.

## Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

1. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai :
3. Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
4. Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga dan lain sebagainya
5. Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman
6. Strategi bersaing dan penguasaan pangsa pasar produk dana dan pinjaman
7. Kendala penerapan hasil keputusan ALCO
8. Perilaku nasabah dan perubahannya

9. Head of Operations Division
10. Head of Service Quality Division
11. Head of Service Fund Division
12. Head of Risk Management Division \
13. Head of the Rencorsec Division
14. Head of HR Division
15. Head of IT Division
16. Head of General Division

The composition of the Supporting Group - ALCO Staff Membership is as follows:

Coordinator : Head of Fund Sub Division

Members:

1. Head of the Treasury Operations Sub Division
2. Head of Transaction Sub Division DN / LN
3. Head of Research and Development Sub Division
4. Head of the Financial Accounting Sub Division
5. Head of Budget and Sub Division Sub Division
6. Head of the SME and General Business Sub Division
7. Work Units or Employees appointed by the Directors.

## Duties and Responsibilities of ALCO

1. Provide input to the ALCO secretary in preparing the agenda and meeting materials.
2. Provide input in the form of information and analysis at the ALCO meeting, regarding:
3. The methodology for pricing funds and loan products.
4. Methodology for measuring liquidity risk, interest rate risk and so on
5. Competitiveness of interest rates on loan and loan products
6. Competitive strategies and mastery of the market share of fund and loan products
7. Constraints in applying the results of the ALCO decision
8. Customer behavior and changes

## Rapat ALCO

1. Terdiri dari rapat ALCO rutin, rapat ALCO khusus dan rapat ALCO SSG-ALCO
2. Peserta rapat ALCO adalah anggota ALCO dan anggota SSG-ALCO yang ditunjuk, dengan ketentuan masing-masing tidak boleh diwakilkan.
3. Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan diselenggarakan dalam minggu ke empat.
4. Jadwal rapat ALCO khusus ditentukan tersendiri oleh ketua ALCO atau diusulkan oleh sekretaris ALCO.
5. Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah anggota ALCO.
6. Sekretaris ALCO menyusun anggota rapat ALCO sesuai executive summary yang disampaikan oleh SSG-ALCO dan/atau proposal yang disampaikan oleh Unit Kerja.

## Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO dan Unit Kerja

Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO adalah :

1. Untuk keperluan rapat ALCO, SSG-ALCO bertugas:
2. Mengusulkan agenda rapat ALCO kepada sekretaris ALCO
3. Menghimpun data atau informasi keuangan intern dan ekstern
4. Menghimpun data informasi keuangan dan perekonomian makro
5. Melakukan analisa dan menyusun executive summary
6. Menyelenggarakan rapat SSG-ALCO bersama sekretaris ALCO
7. Menyampaikan executive summary kepada sekretaris ALCO
8. Mengikuti rapat ALCO

## ALCO Meeting

1. Consists of regular ALCO meetings, special ALCO meetings and SSG-ALCO ALCO meetings
2. Participants in the ALCO meeting are members of the ALCO and designated SSG-ALCO members, with each provision not to be represented.
3. ALCO meetings are held at all times, at least once in 2 (two) months and held in the fourth week.
4. ALCO meeting schedule specifically determined by the chairman of the ALCO or proposed by the ALCO secretary.
5. ALCO meetings are valid if attended by at least 50% (fifty percent) + 1 of the total members of ALCO.
6. The ALCO Secretary prepares ALCO meeting members according to the executive summary submitted by SSG-ALCO and / or the proposal submitted by the Work Unit.

## Main Tasks of SSG-ALCO Members and Work Units

The Main Tasks of SSG-ALCO Members are:

1. For the purposes of ALCO meetings, SSG-ALCO is in charge of:
2. Propose the ALCO meeting agenda to the ALCO secretary
3. Collect internal and external financial data or information
4. Collect data on financial information and macroeconomics
5. Analyze and organize executive summary
6. Organized SSG-ALCO meetings with the ALCO secretary
7. Submits an executive summary to the ALCO secretary
8. Join A LCO meetings

9. Mengembangkan model-model perhitungan dan analisa data
10. Menyampaikan penjelasan yang diperlukan dan diminta oleh ALCO

Tugas Unit kerja adalah :

1. Menyusun proposal yang dipandang penting untuk dibahas dalam rapat ALCO
2. Secara rutin menyiapkan dan menyampaikan data atau informasi yang diperlukan oleh SSG-ALCO
3. Melaksanakan dan memedomani setiap keputusan rapat ALCO.

Tanggung jawab unit kerja adalah :

1. Menjamin akurasi data atau informasi yang disampaikan kepada SSG-ALCO
2. Ketepatan waktu penyampaian data informasi kepada SSG-ALCO
3. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat ALCO yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.
4. Terlaksananya keputusan rapat ALCO

Anggota rapat ALCO sebagai Pemimpin Unit Kerja masing-masing secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan masukan kepada SSG-ALCO tentang keadaan atau perkembangan keuangann Bank dan perkembangan keuangan/perekonomian makro serta perkiraan perubahan suku bunga perbankan.

### Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
2. Setiap hasil keputusan rapat ALCO yang telah dirumuskan harus sudah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris ALCO selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penyelenggaraan rapat ALCO.

9. Develop data calculation and analysis models
10. Submitting explanations needed and requested by ALCO

The work unit's tasks are:

1. Following proposals deemed important to be discussed at the ALCO meeting
2. Routinely preparing and delivering data or information required by SSG-ALCO
3. Carry out and follow every ALCO meeting decision.

The responsibilities of the work unit are:

1. Ensure the accuracy of data or information submitted to SSG-ALCO
2. Timeliness of delivering information data to SSG-ALCO
3. Following up on the results of the ALCO meeting decisions which still require further elaboration.
4. Implementation of ALCO meeting decisions

Members of the ALCO meeting as the Leaders of their respective Work Units are specifically responsible for providing input to SSG-ALCO regarding the condition or financial development of the Bank and the development of financial / macroeconomic conditions as well as estimates of changes in bank interest rates.

### Decision-making

1. Decision making in connection with the use of ALCO authority is only taken through the decision of a legitimate ALCO meeting.
2. Every decision of the ALCO meeting that has been formulated must be signed by the Chairperson and ALCO secretary no later than 1 (one) day after the ALCO meeting is held.



3. Setiap keputusan rapat ALCO merupakan hasil keputusan bersama anggota ALCO dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO.
4. Sekretaris ALCO dan SSG-ALCO harus menyampaikan keputusan rapat ALCO kepada masing-masing Unit Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan rapat ALCO ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ALCO

### **Pelaporan Pertanggungjawaban/ Realisasi kerja**

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui :

1. Risalah rapat rutin
2. Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
3. Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas
4. Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat dan data serta informasi yang terkait.

### **Kegiatan/Realisasi Program Kerja ALCO selama tahun 2018**

Selama tahun 2018, ALCO telah mengadakan rapat ALCO 4 (empat\ ) kali rapat dengan agenda rapat :

1. Laporan tindaklanjut keputusan rapat ALCO sebelumnya.
2. Kewenangan Special Rate per Depositor
3. Kewenangan pemberian Special Rate untuk Simpanan Berjangka harus dengan persetujuan Direksi.
4. Kewenangan pemberian Special Rate berlaku khusus untuk dana-dana yang pengendapannya minimal 6 bulan dan wajib mendapat pertimbangan dari Divisi Treasury dan Divisi Dana & Jasa untuk mendapat persetujuan Direksi.

3. Every decision of an ALCO meeting is the result of a joint decision of members of ALCO and has the same legal force as the decision of the Board of Directors, as stipulated in the Decree of the Board of Directors concerning the Legal Position of ALCO Meeting Decisions.
4. The Secretary of ALCO and SSG-ALCO must submit the decision of the ALCO meeting to each Work Unit no later than 1 (one) day after the ALCO Meeting decision is signed by the Chairperson and Secretary of ALCO

### **Reporting on Accountability / Realization of work**

The realization of ALCO's work is reported through:

1. Minutes of routine meetings
2. Minutes of special meetings held to discuss certain matters.
3. Data and information related to the fields discussed
4. Records and opinions of ALCO regarding minutes of meetings and related data and information.

### **Activities / Realization of the ALCO Work Program during 2018**

During 2018, ALCO has held an ALCO 4 (four \) meeting meetings with meeting agenda:

1. Reports of follow-up decisions of previous ALCO meetings.
2. Special Rate Authority per Depositors
3. The authority to grant Special Rate for Time Deposits must be with the approval of the Board of Directors.
4. The authority to grant Special Rate applies specifically to funds with a minimum of 6 months of deposition and must be considered by the Treasury Division and Funds & Services Division to obtain approval from the Board of Directors.

5. Perubahan tarif-tarif Fee Base Income
6. Penurunan suku bunga Kredit Multi Guna efektif dari 16 % menjadi 10% - 11 % .
7. Untuk Deposito dengan Special Rate yang telah berjalan sebelum jatuh tempo WAJIB diinformasikan kepada Depositor bahwa pada saat Jatuh Tempo akan diberlakukan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku (Counter Rate) dan apabila terdapat permohonan Special Rate, WAJIB mendapat persetujuan Direksi.

## KOMITE KREDIT

Misi Komite Kredit adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank NTT dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Prinsip kerja Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 63 Tahun 2010 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Juli 2010.

### Fungsi Pokok Komite Kredit

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan :
  - Debitur-debitur besar/inti

5. Changes in the Base Base Fee rates
6. Decrease in effective Multi-Purpose Credit interest rates from 16% to 10% - 11%.
7. For Deposits with Special Rates that have been running before maturity MUST be informed to the Depositors that at the Maturity Period interest rates will be applied in accordance with the applicable provisions (Counter Rate) and if there is a Special Rate request, MUST be approved by the Directors.

## CREDIT COMMITTEE

The mission of the Credit Committee is to assist the Board of Directors in evaluating and / or giving credit decisions in accordance with the authority limits set by the Board of Directors as stipulated in Bank NTT's Articles of Association by paying attention to business development without leaving the prudent principle.

The working principle of the Credit Committee is in accordance with the Directors Decree Number 63 of 2010 concerning the Head Office Credit Committee of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara dated July 26, 2010.

### Main Function of the Credit Committee

1. Provide guidance if it is necessary to do a more in-depth and comprehensive credit analysis.
2. Provide a decision or recommendation on the design of credit decisions submitted by the recommendation / proposer related to:
  - Large / core debtors

- Industry yang spesifik
- Permintaan khusus dari Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan Asset and Liability Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

- Specific industry
- Special requests from the Directors.
- Coordinate with the Asset and Liability Committee (ALCO) in aspects of credit funding and adjusting corporate loan interest rates.

## Jenjang Komite Kredit

Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Kredit dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yaitu :

1. Komite Kredit Korporasi
2. Komite Kredit Komersial.

## Level of Credit Committee

In carrying out its activities the Credit Committee is grouped by credit category, namely:

1. Corporate Credit Committee
2. Commercial Credit Committee.

## Wewenang Komite Kredit

Kewenangan Komite Kredit dalam memberikan Keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Kredit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi ataupun dalam Manual Bidang Perkreditan (SOP) yang berlaku di Bank NTT.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Kredit :

1. Dari strategi besarnya kewenangan :  
Komite Kredit bewenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan dalam ketentuan memutus kredit yang berlaku.
2. Dari segi obyek keputusan kredit ;
3. Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersil di atas nilai tertentu.
4. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
5. Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit, baik yang telah direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

## Authority of the Credit Committee

The authority of the Credit Committee in giving a Decision or recommending a draft credit decision refers to the provisions governing the Authority to Decide Credit as stated in a Decree of the Board of Directors or in the Credit Manual (SOP) applicable at Bank NTT.

Following is the credit scope of the Credit Committee:

1. From the magnitude of authority strategy:  
Credit Committee is authorized to decide on credit in accordance with the amount of maximum authority stipulated in the provisions for deciding the applicable credit.
2. In terms of the object of credit decisions;
3. Give credit decisions for corporate and commercial categories above certain values.
4. Make a decision on the proposed credit facility.
5. Determine plans for takeover / purchase of credit, both those that have been restructured from other financial institutions.

## Keanggotaan Komite Kredit

Organisasi Komite Kredit

1. Sponsor yaitu aparat yang mengajukan proposal kredit.
2. Sekretaris Komite yaitu salah satu orang yang ditunjuk dari Unit Legal
3. Ketua Komite yaitu anggota Komite pemegang limit tertinggi dalam rapat komite.
4. Anggota komite yaitu 2 (dua) orang anggota komite yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite

## Tugas Pokok Anggota Komite Kredit

Tugas Komite Kredit :

1. Mengadakan rapat komite untuk membahas usulan kredit yang diajukan kepada komite (khususnya kredit-kredit produktif)
2. Menggali informasi yang berkaitan dengan kredit yang diusulkan untuk diputus oleh komite.
3. Mengambil keputusan atas usulan kredit yang diajukan kepada Komite.

## Wewenang Komite Kredit

1. Memutus kredit di atas limit kewenangan Pemimpin Cabang
2. Memutus kredit yang diproses oleh Unit Bisnis di Kantor Pusat, diatas wewenang Direksi
3. Memberikan pengarahan dan pendapat atas proposal yang diajukan dalam hal analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
4. Memerintahkan kepada analisis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam hal terdapat kekurangan dalam pembahasan/analisa kredit.

## Credit Committee Membership

Credit Committee Organization

1. Sponsors are officers who submit credit proposals.
2. Secretary of the Committee, namely one of the appointed persons from the Legal Unit
3. Chair of the Committee, namely the Committee member who holds the highest limit in the committee meeting.
4. Members of the committee, namely 2 (two) members of the committee appointed by the Secretary of the Committee

## Main Duty of Credit Committee Members

Duty of the Credit Committee:

1. Hold committee meetings to discuss credit proposals submitted to the committee (specifically productive loans only)
2. Digging up information related to the credit proposed to be decided by the committee.
3. Making decisions on credit proposals submitted to the Committee.

## Authority of the Credit Committee

1. Deciding credit above the limit of the authority of the Branch Leader
2. Decide on credit processed by the Business Unit at the Head Office, above the authority of the Board of Directors
3. Provide guidance and opinions on the proposals submitted in terms of credit analysis that is more in-depth and comprehensive.
4. Instruct analysis to complete the data needed in the event of a deficiency in credit discussion / analysis.

5. Menyetujui dan menolak usulan kredit yang diajukan kepada Komite berdasarkan kemahiran profesional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sekretaris Komite mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Menunjuk dan mengundang rapat anggota komite
2. Menyusun notulen rapat
3. Membuat memorandum komite kredit

Sponsor memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Mengajukan proposal kredit kepada komite
2. Mempresentasikan proposal kredit kepada komite
3. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keakuratan data – data yang disampaikan.

Tanggungjawab dan Unsur Keanggotaan Komite :

1. Masing-masing anggotakomite bertanggungjawab secara profesional terhadap keputusan yang diambil.
2. Keanggotaan Komite terdiri dari orang-orang yang diberi wewenang memutus kredit dengan limit tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.
3. Anggota Komite dipilih dari personil yang berada dilingkup Direktorat Pemasaran.

### **Persyaratan menjadi Anggota Komite**

1. Memiliki pengalaman dibidang perkreditan
2. Memiliki track record yang baik dalam portofolio perkreditan atau
3. Memiliki pengetahuan yang baik dibidang perkreditan.

5. Approve and reject credit proposals submitted to the Committee based on professional skills in accordance with the limits of authority granted to them.

The Committee Secretary has the following duties and authorities:

1. Appoint and invite committee member meetings
2. Arranging minutes of meetings
3. Making a credit committee memorandum

Sponsors have duties and responsibilities:

1. Submit a credit proposal to the committee
2. Presenting credit proposals to the committee
3. Responsible for the correctness or accuracy of the data submitted.

Responsibilities and Elements of Committee Membership:

1. Each committee member is professionally responsible for the decisions taken.
2. Membership of the Committee consists of people who are given the authority to decide on loans with certain limits stipulated by a separate Directors' Decree.
3. Committee members are selected from personnel within the Marketing Directorate.

### **Requirements to be a Committee Member**

1. Have credit experience
2. Having a good track record in a credit portfolio or
3. Have good knowledge in credit.

## Mekanisme Pengambilan Keputusan Kredit

Mekanisme pengambilan keputusan kredit dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Rapat komite secara bersama-sama dalam satu tempat atau
2. Pernyataan pendapat masing-masing anggota di tempat yang berbeda-beda/terpisah dengan cara sirkulasi.

## Mekanisme pengambilan keputusan dalam satu forum rapat :

1. Sekretaris Komite membuka rapat dan mempersilahkan seorang anggota pemegang limit tertinggi bertindak sebagai Ketua untuk memimpin rapat komite.
2. Ketua mempersilahkan Sponsor untuk mempresentasikan proposal kredit yang diajukan.
3. Masing-masing anggota memberikan pendapat atas proposal yang dipresentasikan oleh Sponsor/ Analis, pendapat mana harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.
4. Setiap anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum Komite Kredit.
5. Sekretaris mencatat seluruh pendapat yang relevan dengan permohonan kredit dalam risalah rapat komite
6. Risalah rapat komite ditandatangani seluruh anggota komite dan sekretaris untuk selanjutnya dilampirkan pada lembar Form Memorandum Komite Kredit.

## Mekanisme pengambilan keputusan dengan cara sirkulasi :

1. Sponsor menyerahkan proposal secara sirkulasi dengan cara mendatangi setiap anggota komite di unit kerja masing-masing

## Credit Decision Making Mechanism

Credit decision making mechanism can be carried out by:

1. Committee meetings jointly in one place or
2. Statement of opinions of each member in different / separate places by means of circulation.

## Decision mechanism in one meeting forum:

1. The Committee Secretary opens the meeting and allows a member of the highest limit holder to act as Chairperson to chair the committee meeting.
2. The Chair allows the Sponsor to present the proposed credit proposal.
3. Each member gives an opinion on the proposal presented by the Sponsor / Analyst, which opinion must be contained in the Form Credit Committee Memorandum.
4. Each committee member signs the column provided in the Credit Committee Memorandum Form.
5. The Secretary records all opinions that are relevant to the credit application in the minutes of the committee meeting
6. Minutes of committee meetings are signed by all members of the committee and secretary to be attached to the Credit Committee Form Memorandum sheet.

## Mechanism for decision making by means of circulation:

1. Sponsors submit proposals in circulation by visiting each committee member in their respective work units

2. Setiap anggota memberikan pendapat atas proposal yang diajukan, dan harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.
3. Seluruh anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum komite Kredit.
4. Rapat komite dianggap sah apabila dihadiri 3 (tiga) anggota komite
5. Memorandum komite kredit dianggap sah apabila ditandatangani oleh seluruh anggota komite.

### Keputusan Kredit

Keputusan kredit dikatakan setuju apabila

1. Seluruh rapat anggota komite setuju, atau
2. Ketua dan salah satu anggota setuju

Keputusan kredit dinyatakan naik banding apabila :

1. Ketua tidak setuju namun 2 (dua) anggota lainnya setuju
2. Dalam hal terjadinya naik banding, maka proposal diajukan kepada pemegang limit di atas limit ketua yang tidak setuju, untuk selanjutnya pemegang limit tertinggi tersebut bertindak sebagai ketua komite yang baru menggantikan ketua rapat komite yang tidak setuju.

Keputusan kredit ditolak apabila :

1. Seluruh anggota rapat komite tidak setuju
2. 2 (dua) anggota komite tidak setuju

Keputusan kredit harus dituangkan dalam suatu Memorandum Komite Kredit menggunakan Form Memorandum Komite Kredit :

1. Setiap penolakan terhadap proposal kredit oleh anggota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

2. Each member gives an opinion on the proposal submitted, and must be contained in the Credit Committee Memorandum Form.
3. All committee members sign a signature in the column provided in the Credit committee Memorandum Form.
4. Committee meetings are considered valid if attended by 3 (three) committee members
5. The credit committee memorandum is considered valid if signed by all committee members.

### Credit Decision

Credit decisions are agreed to if

1. All meetings of the committee members agree, or
2. The Chairperson and one of the members agree

Credit decisions are stated to be appealed if:

1. The Chair does not agree, but 2 (two) other members agree
2. In the case of an appeal, the proposal is submitted to the holder of the limit above the limit of the chairman who does not agree, then the highest limit holder acts as the chairman of the new committee replacing the chairman of the committee meeting who disagrees.

Credit decision is rejected if:

1. All members of the committee meeting do not agree
2. 2 (two) committee members do not agree

Credit decisions must be stated in a Credit Committee Memorandum using the Credit Committee Memorandum Form:

1. Any refusal of a credit proposal by a member must provide written reasons for rejection.

2. Hasil Rapat Komite kredit wajib dituangkan dalam risalah rapat komite oleh sekretaris komite dan didokumentasikan secara baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

## Pertanggungjawaban Komite Kredit

Pertanggungjawaban komite dapat disampaikan melalui risalah Rapat Komite Kredit, memorandum keputusan komite kredit yang diedarkan dan laporan berkala Komite Kredit.

## Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Kredit

Selama tahun 2018, Komite Kredit tidak mengadakan rapat Komite

## Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dikelola Bank NTT.

Penetapan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No, 54 Tahun 2018 Struktur Keanggotaan dan Tata Kerja Komite Menejemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Juli 2018.

## Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko

2. The results of the Credit Committee Meeting must be stated in the minutes of the committee meeting by the committee secretary and properly documented.
3. Dissenting opinions that occur in a committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting.

## Accountability of the Credit Committee

The committee's accountability can be delivered through the minutes of the Credit Committee Meeting, the circulating credit committee memorandum of decision and the Credit Committee periodic report.

## Activities / Realization of the Credit Committee Work Program

During 2018, the Credit Committee did not hold Committee meetings

## Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against all risks managed by Bank NTT.

Determination of the Risk Management Committee in accordance with the Directors Decree No, 54 of 2018 Membership Structure and Work Procedure of the Risk Management Committee of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, July 26, 2018.

## Main Function of the Risk Management Committee

1. Preparation of policies, strategies and guidelines for implementing Risk Management



2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan system manajemen risiko yang efektif.
3. Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

### **Wewenang Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

### **Tanggungjawab Manajemen Risiko**

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya, menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas bank yang dapat menimbulkan risiko pada Bank.
2. Membangun pengendalian risiko yang handal
3. Melaporkan secara insidental jika dianggap perlu tentang eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal dan terhadap tingkat kesehatan bank.
4. Menghitung potensi kerugian-kerugian akibat risiko-risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut.
5. Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan produk bank.
6. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tetap sesuai dengan ketentuan .
7. Memantau pelaksanaan dan kinerja pengendalian intern
8. Melaporkann kondisi risiko dan perubahan-perubahan secara rutin kepada Direksi.

2. Improvement or improvement of the implementation of risk management based on the results of evaluating the implementation of effective risk management processes and systems.
3. Justification of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities).

### **Authority of the Risk Management Committee**

The Risk Management Committee has the authority to review and provide recommendations regarding matters relating to risk management.

### **Risk Management Responsibilities**

1. Coordinating and cooperating with other work units, implementing risk management policies in all bank activities that can pose a risk to the Bank.
2. Build reliable risk control
3. Report incidentally if deemed necessary regarding risk exposures that affect capital and the soundness of the bank.
4. Calculating potential losses due to existing risks, and calculating the amount of capital value that must be provided to cover these losses.
5. Establish risk limits for each exposure, per group and per individual customer, per business activity and bank products.
6. Monitor the implementation of risk management strategies and policies in accordance with the provisions.
7. Monitor the implementation and performance of internal control
8. Report the risk conditions and changes regularly to the Directors.

9. Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko
10. Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif
11. Pengelolaan Capital at Risk.

9. Controlling the bank's long-term planning and investment while paying attention to risk management policies
10. Placing the risk management unit in each business unit, so that the risk control function is active
11. Capital Management at Risk.

## Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

## Membership of the Risk Management Committee

Direktur Kepatuhan: Compliance Director	Ketua merangkap anggota tetap Chairperson, also permanent member
Direktur Umum: General Director	Anggota tetap Permanent member
Direktur Pemasaran Dana: Fund Marketing Director	Anggota tetap Permanent member
Direktur Pemasaran Kredit: Credit Marketing Director	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Manajemen Risiko: Head of Risk Management Committee	Sekretaris merangkap anggota tetap Secretary is also a permanent member
Kepala Divisi Pengawasan: Head of the Supervision Division	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Kepatuhan: Head of Compliance Division	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary: Head of Planning & Corporate Secretary Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member
Kepala Divisi Sumberdaya Manusia: Head of the HR Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Operasional: Head of the Operations Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Umum: Head of the General Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Informasi Technology: Head of IT Division	Anggota tidak Tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Supporting Kredit: Head of Credit Supporting Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Pemasaran Kredit: Head of Credit Marketing Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Treasury: Head of Treasury Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Kualitas Layanan dan Produk: Head of Service and Product Quality Division	Kepala Divisi Kualitas Layanan dan Produk: Head of Service and Product Quality Division
Kepala Divisi Dana dan Jasa: Head of Funds and Services Division	Kepala Divisi Dana dan Jasa: Head of Funds and Services Division

## Tugas Pokok Anggota Komite Manajemen Risiko

1. Memberikan masukan kepada sekretaris komite manajemen risiko berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan agenda yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko .
3. Arah dan sasaran Bank NTT dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan.
4. Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
5. Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank NTT dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (risk appetite)
6. Hasil kajian mengenai eksposur yang dihadapi Bank NTT beserta dampaknya.
7. Penilaian kecukupan modal Bank NTT dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario stress testing.
8. Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, contingency funding plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario) dan metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Bank NTT.

## Rapat Komite Manajemen Risiko

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

1. Mengadakan rapat Global Risk minimal 3 (tiga) bulan sekali
2. Mengadakan rapat insidental di luar jadwal apabila diperlukan,

## Main Duty of Members of the Risk Management Committee

1. Provide input to the secretary of the risk management committee in the form of topics and meeting materials that will be discussed at the Risk Management Committee meeting.
2. Provide input in the form of information and analysis related to the agenda discussed at the Risk Management Committee meeting.
3. Bank NTT's direction and objectives in formulating policies, strategies and guidelines for implementing risk management as well as changes if needed.
4. Assessment of the effectiveness of the implementation of the risk management framework.
5. Developments and trends in total risk exposure from NTT Bank and propose an acceptable overall risk tolerance level (risk appetite)
6. Results of studies on the exposure faced by NTT Bank and its impacts.
7. Assessment of Bank NTT's capital adequacy in dealing with the risk of losses arising by using various stress testing scenario.
8. Proposed development of risk measurement methods, contingency funding plan in the worst case scenario and other methods related to Bank NTT risk management.

## Risk Management Committee Meeting

The following are some provisions regarding the Risk Management Committee meeting

1. Hold a Global Risk meeting at least 3 (three) months
2. Hold incidental meetings outside the schedule if needed,

3. Quorum Rapat Komite Manajemen Risiko tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua dan Ketua Pengganti dan 50 % anggota plus 1 (satu).
4. Notulen/risalah Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan .
5. Keputusan Rapat adalah merupakan Keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan ke Rapat Direksi.

### **Pelaporan Pertanggungjawaban/ Realisasi Kerja komite Manajemen Risiko**

Pertanggungjawaban dan relaisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui :

1. Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko
2. Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan)

### **Kegiatan Komite Manajemen Risiko Program Kerja Tahun 2018**

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Risiko tidak mengadakan rapat Komite , tetapi mempunyai program kerja Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :

1. Menginformasikan mengenai kondisi NPL, baik secara konsolidasi dan masing-masing kantor cabang
2. Melakukan credit risk stress test dan market risk stress test serta liquidity risk stress test.

3. Quorum of the Risk Management Committee Meeting is reached if at least attended by the Chairperson and the Substitute Chair and 50% of the members plus 1 (one).
4. Minutes / Minutes of Decisions of Meetings signed by all meeting participants must be completed and accepted by committee members no later than 2 (two) working days after the meeting date. The decision must be followed up as soon as possible by the work unit concerned.
5. Meeting decisions are a decision of the Risk Management Committee which must still be submitted to the Board of Directors Meeting.

### **Reporting of Accountability / Work Realization of the Risk Management committee**

Accountability and realization of the Man Committee's work Risk management is reported through:

1. Periodic written reports at least once in 1 (one) year to the Directors, regarding the results of regular meetings at the Risk Management Committee meetings
2. Special reports or activity reports (if needed)

### **Activities of the Work Program Risk Management Committee in 2018**

Throughout 2018, the Risk Management Committee does not hold Committee meetings, but has the Risk Management Committee work program as follows:

1. Informing about the condition of the NPL, both on a consolidated basis and each branch office
2. Conduct credit risk stress tests and market risk stress tests and liquidity risk stress tests.

3. Menginformasikan tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara bulanan, Profil Risiko, secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.

## Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi sejalan dengan strategi Bank NTT. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan bersaing Bank NTT dan peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 23 : Tahun 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 26 Maret 2012.

### Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Mereview dan merekomendasikan rencana strategis teknologi informasi agar sejalan dengan rencana bisnis Bank NTT.
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan teknologi informasi pada kegiatan usaha Bank NTT.
3. Memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada Bank NTT.

3. Informs about the obligation of Minimum Capital Adequacy (KPMM) on a monthly basis, Risk Profile, on a quarterly basis and Bank Soundness in semester.

## Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee was formed to ensure the application of the information technology system in line with Bank NTT's strategy. The Information Technology Steering Committee has a mission to improve the competitiveness of Bank NTT and improve services to customers through the use of appropriate information technology.

The determination of the Information Technology Steering Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 23: Year 2012 concerning the Information Technology Steering Committee of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara dated March 26, 2012.

### The Main Function of the Information Technology Steering Committee

1. Review and recommend strategic information technology plans to be in line with Bank NTT's business plans.
2. Conduct regular evaluations of information technology support in Bank NTT's business activities.
3. Ensure that information technology investments provide added value to Bank NTT.

## Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Ketua (merangkap anggota) :Direktur Umum  
Sekretaris (merangkap anggota) :Kepala Divisi IT

Anggota :

1. Kepala Divisi Operasional
2. Kepala Divisi Umum
3. Kepala Divisi Treasury
4. Kepala Divisi UMKM
5. Kepala Divisi Komersial
6. Kepala Divisi Manajemen Risiko
7. Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

## Wewenang dan tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Rencana strategis teknologi informasi (information technology strategic plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.
3. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
4. Pemantauan atas kerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
5. Upaya peningkatan berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## Membership of the Information Technology Steering Committee

Chairperson (concurrently member) : General Director  
Secretary (concurrently member): Head of IT Division

Members:

1. Head of Operations Division
2. Head of General Division
3. Head of Treasury Division
4. Head of UMKM Division
5. Head of Commercial Division
6. Head of the Risk Management Division
7. Head of Planning & Corporate Secretary Division

## Authority and responsibility of the Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has the following authorities and responsibilities:

1. Information technology strategic plan that is in line with the bank's strategic business plan.
2. Conformity of agreed information technology projects with management information technology strategic plans and bank business activities.
3. Effectiveness of steps to minimize the risk of bank investment in the information technology sector so that the investment contributes to the achievement of the bank's business goals.
4. Monitoring of information technology work and efforts to improve it.
5. Efforts to increase various problems related to information technology that cannot be resolved by user and organizer work units effectively, efficiently and on time.

## Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Untuk mendukung ketersediaan bahan rapat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan rapat, Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi dibantu oleh Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem dan Kepala Sub Divisi Pusat Data Operasional dan Pendukung :

1. Pertemuan Rutin
2. Pertemuan Rutin Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun :
  - Periode I bulan Januari  
Pertemuan untuk membahas strategi, realisasi rencana kerja dan proyek pada tahun berjalan
  - Periode II bulan Juli  
Pertemuan untuk mengevaluasi realisasi rencana kerja dan proyek pada tahun berjalan
  - Periode III bulan November  
Pertemuan untuk mengevaluasi rencana kerja dan proyek sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana strategis untuk tahun depan.
3. Pertemuan Tidak Rutin
4. Untuk membahas permasalahan-permasalahan bidang IT yang timbul pada saat kegiatan operasional atau pada saat proses realisasi rencana kerja dan proyek IT.

## Mekanisme dan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh unsur Komite atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Komite, Sekretaris dan 4 (empat) anggota Komite.
2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite

## Information Technology Steering Committee Meeting

To support the availability of meeting materials and all requirements related to the implementation of the meeting, the Secretary of the Information Technology Steering Committee is assisted by the Head of the System Development Sub Division and the Head of the Operations and Support Data Sub Division:

1. Routine Meeting
2. Routine Meeting of the Information Technology Steering Committee takes place 3 (three) times a year:
  - Period I of January  
Meeting to discuss strategies, realization of work plans and projects in the current year
  - Period II of July  
Meeting to evaluate the realization of work plans and projects in the current year
  - Period III of November  
The meeting to evaluate work plans and projects is one of the references in preparing a strategic plan for next year.
3. Non-routine meetings
4. To discuss IT issues that arise during operational activities or during the process of realization of work plans and IT projects.

## Meeting Mechanisms and Decisions

1. Committee meetings can be carried out and are considered valid if attended by all elements of the Committee or at least attended by the Chair of the Committee, Secretary and 4 (four) Committee members.
2. Committee meetings are chaired by the Chair of the Committee

3. Setiap keputusan yang diambil dicatat dalam notulen dan disusun sebagai rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pelaporan Pertanggungjawaban/ Realisasi Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Sepanjang tahun 2018, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, rapat bersama Direktur Utama, Direktur Umum, dan anggota rapat lainnya membahas tentang :

1. Finalisasi perubahan SK Steering Committee IT
2. Proses Perpanjangan Core Banking.
3. Implementasi GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)
4. Implementasi Kartu Chip (NSICCS)
5. Proses Pengadaan
6. Persiapan Teknologi Core Banking baru, GPN dan Kartu Chip
7. Program Cash Back dan Implementasi Cash Management System
8. Revitalisasi ATM, EDC Merchant dan EDC laku Pandai
9. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
10. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi dan ditandatangani oleh Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi.

### **Program Kerja Tahun 2018**

1. Pengembangan Aplikasi berbasis teknologi chip (NSICCS).
2. Pengembangan aplikasi sesuai regulasi Bank Indonesia & OJK.

3. Every decision taken is recorded in minutes and prepared as recommendations submitted to the Board of Directors.
4. In the event of a difference of opinion, the decision is taken based on the majority of votes.

### **Reporting the Responsibility / Work Realization of the Information Technology Steering Committee**

Throughout 2018, the Information Technology Steering Committee held 4 (four) meetings, meetings with the President Director, General Director, and other meeting members to discuss:

1. Finalization of changes to SK Steering Committee IT
2. Process for Extension of Core Banking.
3. Implementation of GPN (National Payment Gate)
4. Chip Card Implementation (NSICCS)
5. Procurement Process
6. Preparation of new Bench Core Technology, GPN and Chip Cards
7. Cash Back Program and Implementation of Cash Management System
8. Revitalization of ATMs, EDC Merchants and EDC
9. The results of the meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented.
10. Minutes of meetings are made by the Information Technology Steering Committee Secretary and signed by the Chair of the Information Technology Steering Committee.

### **Work Program in 2018**

1. Chip technology-based application development (NSICCS).
2. Application development in accordance with Bank Indonesia & OJK regulations.



3. Pengembangan aplikasi Bansos Non Tunai
4. Aplikasi Fiesta Point Bank NTT
5. Memantau kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
6. Mengevaluasi dan memonitor penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan usaha Bank NTT.
7. Memastikan investasi teknologi informasi memberikan investasi yang optimal.
8. Memastikan efektivitas langkah-langkah meminimalisasi resiko atas investasi Bank NTT pada sektor teknologi informasi
9. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis teknologi informasi

### **Realisasi Kerja Tahun 2018**

1. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis teknologi informasi yang selaras dengan perkembangan bisnis dan sesuai dengan stratejic corporate objective Bank NTT.
2. Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek teknologi informasi.
3. Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran teknologi informasi tahun 2018.

3. Development of Non-Cash Bansos application
4. Bank NTT Fiesta Point application
5. Monitor the performance of information technology and efforts to improve it.
6. Evaluate and monitor the application of information technology in accordance with the business needs of Bank NTT.
7. Ensure that information technology investments provide optimal investment.
8. Ensure the effectiveness of the risk maximization of Bank NTT's investment in the information technology sector
9. Provide recommendations to the Board of Directors to recognize strategic information technology plans

### **Work Realization in 2018**

1. Evaluate and monitor the implementation of strategic information technology projects that are in line with business development and in line with the corporate objective strategy of Bank NTT.
2. Evaluate the implementation of processes and technologies used in the development of information technology projects.
3. Monitor the use of the information technology budget in 2018.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Company Secretary

Sebagai salah satu kelengkapan organ tata kelola perusahaan (GCG), Bank NTT memiliki seorang Sekretaris Perusahaan yang berada di bawah kewenangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi. Penunjukan Sekretaris Perusahaan di Bank NTT didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 104 tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Perseroan terhadap masyarakat dan investor sekaligus memastikan seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Profil Sekretaris Perusahaan 2018

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 94 tahun 2018, tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur saat ini dijabat oleh :

#### **Sonny G. Supersemar Pellokilla, SE**

*Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary*

Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 27 September 2018 hingga sekarang.

Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

As one of the complete corporate governance (GCG) organs, Bank NTT has a Corporate Secretary who is under the authority and is directly responsible to the Directors. The appointment of the Corporate Secretary at Bank NTT is based on the Directors' Decree Number: 104 of 2012, dated September 21, 2012 concerning the dismissal and appointment of and from the structural positions of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

The existence of the Corporate Secretary is intended to improve the Company's services to the community and investors while ensuring that all of the Company's activities are in accordance with the principles of GCG and applicable laws and regulations.

### Profile of the Corporate Secretary 2018

In accordance with Directors Decree Number: 94 of 2018, September 27, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of and in the Structural Position of the PT East Nusa Tenggara Regional Development Bank, the Corporate Secretary of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara is currently held by:

#### **Sonny G. Supersemar Pellokilla, SE**

*Head of Planning & Corporate Secretary Division*

Served as Head of the Planning & Corporate Secretary Division of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara since September 27, 2018 until now.

He has worked as an Executive Officer at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since March 1994 and has held an important position at

sejak Maret 1994 dan pernah menduduki jabatan penting pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni: Penyelia Kredit Kantor Cabang Kefamenanu, Manajer Operasional Cabang Kefamenanu, Pemimpin Cabang Pembantu Baun, Kasubdiv Promosi Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Kefamenanu, dan Pemimpin Cabang Kalabahi.

### **Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan**

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal;
2. Memberi masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya;
3. Sebagai penghubung (contact person) antara Bank dengan OJK dan masyarakat;
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank;
5. Menyiapkan Daftar Khusus Saham;
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi berikut membuat catatan hasil rapat/notulen tersebut ;
7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

### **Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan:**

1. Menyelenggarakan rapat (RUPS, Pengurus, Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen) ;
2. Memfasilitasi hubungan dengan instansi Pemerintah dan institusi terkait lainnya serta para Pemangku Kepentingan;

PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara namely: Credit Supervisor, Kefamenanu Branch Office, Branch Operations Manager Kefamenanu, Baun Auxiliary Branch Leader, Office Promotion Sub-Director Center, Kefamenanu Branch Leader, and Kalabahi Branch Leader.

### **Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary**

The duties of the Corporate Secretary include:

1. Following the development of the capital market, especially the regulations that apply in the capital market;
2. Provide input to the Board of Directors to comply with OJK regulations and implementing regulations;
3. As a contact person between the Bank and OJK and the community;
4. Providing services to the community for any information needed relating to the condition of the Bank;
5. Prepare a Special List of Shares;
6. Attending Board of Commissioners meetings and the following Board of Directors meetings to record the results of the meeting / minutes;
7. Responsible for the implementation of the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

### **Implementation of Corporate Secretary Duties:**

1. Hold meetings (GMS, Management, Board of Commissioners, Directors, Management);
2. Facilitating relations with Government agencies and other relevant institutions and Stakeholders;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Membangun citra positif Perusahaan melalui aktivitas komunikasi dan promosi;</li> <li>4. Menyusun laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan);</li> <li>5. Mengawal pelaksanaan penerapan dan penilaian Tata Kelola Perusahaan;</li> <li>6. Menyusun program dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;</li> <li>7. Penyelenggaraan setiap rapat termasuk pembuatan notulennya dan pengelolaan dokumen yang terkait, dilaksanakan tiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Build a positive image of the Company through communication and promotion activities;</li> <li>4. Compile management reports (monthly, quarterly, semester and yearly);</li> <li>5. Guard the implementation and evaluation of Corporate Governance;</li> <li>6. Develop programs and realize Corporate Social Responsibility programs;</li> <li>7. The implementation of each meeting including the making of the minutes and management of the related documents, is carried out every month with the following details:</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No	Jenis Rapat Meeting Type	2017	2018
1	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	2	4
2	Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Management Meeting (Board of Commissioners and Directors)	5	5
3	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	6	2
5	Rapat Dewan Komisaris dan Komite Board of Commissioners and Committee Meetings	10	1
6	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	6	4

### Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2018, sekretaris Perusahaan dan jajarannya telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain :

### Corporate Secretary Training

During 2018, the Corporate secretary and his staff have participated in education and training programs including:

No.	Judul Pelatihan Title of Training	Tanggal Date	Tempat Place	Nama penyelenggara Name of organizer
I	Sekretaris Perusahaan company secretary			
1.	Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Retirement Preparation Training	9 - 11 April 2018	Yogyakarta	PT Fresh GM Consultant

No.	Judul Pelatihan Title of Training	Tanggal Date	Tempat Place	Nama penyelenggara Name of organizer
2.	<p>Pelatihan Penguatan Fungsi Corporate Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan dan Penguatan Sekretaris Dewan Komisaris Guna Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><a href="#">Training on Strengthening the Corporate Corporate Secretary or Corporate Secretary Function and Strengthening the Secretary of the Board of Commissioners To Improve Coordination of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.</a></p>	03 – 04 Desember 2018	Yogyakarta	Leinad Aganis Consultant
II	Kepala Sub. Divisi Corporate Legal <a href="#">Head of Sub. Corporate Legal Division</a>			
1.	<p>Penyegaran BSMR TB 2018 <a href="#">BSMR TB Refresher 2018</a></p>	06 Juni 2018	Jakarta	LSPP
III	Kasubdiv Humas <a href="#">Sub-director of Public Relations</a>			
1.	<p>Pelatihan Identifikasi Langkah-langkah Strategis untuk Mencapai Efisiensi Bisnis (Meningkatkan Pendapatan Bunga Bersih – Net Interest Income)</p> <p><a href="#">Training for Identifying Strategic Steps for Achieving Business Efficiency (Increasing Net Interest Income - Net Interest Income)</a></p>	12 – 13 Februari 2018	Batam	Leinad Aganis Consultant
2.	<p>Pelatihan Tata Cara Penilaian Penetapan Rating <i>Good Corporate Governance</i> baik untuk Konvensional maupun Syariah dan Tata Cara Penyusunan Langkah-langkah Tindak Lanjut (Action Plan) dalam rangka Perbaikan Peringkat Penilaian <i>Good Corporate Governance</i>, baik untuk Konvensional maupun Syariah.</p> <p><a href="#">Training Procedure for Evaluating the Determination of Good Corporate Governance Rating for both Conventional and Sharia and Procedures for Preparing Follow-Up Steps (Action Plan) in the framework of Improving the Rating of Good Corporate Governance, both conventional and sharia.</a></p>	14 – 15 Februari 2018	Batam	Leinad Aganis Consultant

No.	Judul Pelatihan Title of Training	Tanggal Date	Tempat Place	Nama penyelenggara Name of organizer
3.	Training Profesional Secretary Development Training Profesional Secretary Development	26 – 27 April 2018	Jakarta	ASBANDA
4.	Peran Strategis Corporate Dalam Meningkatkan Reputasi. Strategic Role of Corporate Communications in Increasing Reputation.	19 – 20 Juli 2018	Jakarta	One Point Indonesia
IV	Kasubdiv. Perencanaan Strategis & Anggaran Head of Subdivision Strategic Planning & Budget			
1.	Pelatihan Identifikasi Langkah-langkah Strategis Untuk mencapai Efisiensi Bisnis (Meningkatkan Pendapatan Bunga Bersih – Net Interest Income) Strategic Steps Identification Training to achieve Business Efficiency (Increase Net Interest Income - Net Interest Income)	12 – 13 Februari 2018	Batam	Leinad Aganis Consultant
2.	Pelatihan Peningkatan Pendapatan Melalui Fee Based Income Fee Based Income Through Increased Training	27 – 28 Maret 2018	Bandung	Leinad Aganis Consultant
3.	Pelatihan Program Pimpinan Cabang - 189 Branch Leadership Program Training - 189	23 Juli – 31 Agustus 2018	Jakarta & Taiwan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesai (LPPI)
V	Kasubdiv. Kearsipan Head of Subdivision Filing			
1.	Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Retirement Preparation Training	9 – 11 April 2018	Yogyakarta	PT. Fresh GM Consultant
VI	Pelaksana Executor			
1.	Peran Strategis Corporate Dalam Meningkatkan Reputasi. Strategic Role of Corporate Communications in Increasing Reputation.	19 – 20 Juli 2018	Jakarta	One Point Indonesia
2.	Lokakarya Pengadaan Barang/Jasa Goods / Services Procurement Workshop	30 – 31 Agustus 2018	Yogyakarta	ISTIQOMAH STUDY CENTER

No.	Judul Pelatihan Title of Training	Tanggal Date	Tempat Place	Nama penyelenggara Name of organizer
3.	Pelatihan Persiapan Masa Pensiunan. Retirement Preparation Training.	9 – 11 April 2018	Yogyakarta	PT. Fresh GM Consultant
VII	Sekretaris Secretary			
1.	Pelatihan Reguler FKDKP angkatan ke 1 Tahun Buku 2018 FKDKP Regular Training 1st batch of 2018 Book Year	14 – 15 Maret 2018	Banjarmasin	FKDKP
2.	Pelatihan Efisiensi Bisnis melalui Peningkatan Rasio CASA Business Efficiency Training through Increased CASA Ratio	02 – 03 Mei 2018	Bali	Leinad Aganis Consultant
3.	Training Profesional Secretary Development Secretary Development Professional Training	26 – 27 April 2018	Jakarta	ASBANDA
4.	Seminar Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan FKDKP Seminar on FKDKP's Annual Member Meeting (RUA)	26 Juni 2018	Jakarta	FKDKP
5.	Bank Compliance Training Bank Compliance Training	7 – 8 Agustus 2018	Jakarta	Equilent
6.	Seminar dan Silaturahmi dalam rangka meningkatkan kerja sam bisnis Seminar and Gathering in order to improve business cooperation	20 – 22 Juli 2018	Singapura	Panin Bank

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank, manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam hal proses penetapan suatu arah kebijakan.

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan dari masing-masing unit kerja, sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan mengendalikan kualitas keputusan sehingga terhindar

## TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

In implementing the bank intermediation function, Bank NTT management is often faced with challenges and obstacles in terms of the process of determining a policy direction.

This is caused by differences in expectations and interests of each work unit, so that it will have an impact on the quality of decisions and performance of the results of the decision. To manage and control the quality of decisions so as to avoid the risks and

dari risiko dan kerugian bank, maka diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen untuk menangani perbedaan kepentingan dimaksud.

Pada tahun buku 2014 Bank NTT telah merumuskan dan menerbitkan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 73 Tahun 2014.

Ketentuan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan perusahaan;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya perusahaan yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Prinsip ini diaplikasikan secara terus menerus, melalui peningkatan profesionalisme terkait kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ketentuan kode etik dan tingkah laku (code of conduct) Bank NTT, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yaitu: Nilai-nilai budaya Perusahaan yang dikenal dengan istilah FLOBAMORA.

Makna dari Nilai Budaya ini memberikan arti bahwa seluruh jajaran Bank wajib memiliki sikap Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi Ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah.

losses of the bank, regulations are needed that serve as guidelines for management to deal with the differences in interest.

In the 2014 financial year Bank NTT has formulated and issued a regulation on guidelines for handling conflicts of interest regulated in the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 73 of 2014.

This provision regulates the basic principles of handling conflicts of interest, namely:

1. Prioritizing the interests of the company;
2. Creating openness in handling and monitoring conflicts of interest;
3. Encouraging personal responsibility and exemplary attitudes;
4. Creating and fostering a corporate culture that is intolerant of conflicts of interest.

This principle is applied continuously, through increasing professionalism related to the awareness to practice ethical values contained in the provisions of the NTT Bank's code of conduct and code of conduct, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 30 of 2006 concerning Determination of the Code of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance, namely: Corporate cultural values known as FLOBAMORA.

The meaning of this Cultural Value means that all levels of the Bank are required to have a Flexible, Loyal, Objective, Competitive, Anticipative, Compliance, Business Orientation, Religious and Trustworthy attitude.



Implementasi atas setiap makna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fleksibel, memiliki makna bahwa sikap Pengurus dan Karyawan Bank NTT untuk siap menerima perubahan. Salah satunya adalah peningkatan keahlian, ketrampilan untuk pelaksanaan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan perusahaan.
- b. Loyal, memiliki makna bahwa sikap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, mampu bekerja dengan ikhlas, rela berkorban dan penuh pengabdian serta senantiasa menaati nilai-nilai kebenaran.
- c. Obyektif, memiliki makna bahwa kemampuan mengambil keputusan secara jujur tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan Bank.
- d. Bersaing, memiliki makna bahwa sikap berani berkompetisi dalam mencapai prestasi kerja atau kinerja di atas dari yang telah ditetapkan.
- e. Antisipatif, memiliki makna bahwa sikap yang senantiasa mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas yang potensial merugikan Bank, serta sikap tanggap dan cepat dalam mengambil peluang yang ada potensial menguntungkan Bank.
- f. Mematuhi Ketentuan, memiliki makna bahwa sikap untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Orientasi Bisnis, memiliki makna bahwa sikap untuk selalu memprioritas berjalan dan berhasilnya bisnis atau usaha Bank, karena ini disadari sebagai suatu persyarat dasar menuju tercapainya visi perusahaan.
- h. Religius, memiliki makna bahwa sikap percaya bahwa Tuhan selalu ada pada saat bekerja

Implementation of each of these meanings can be explained as follows:

- a. Flexible, has the meaning that the attitude of the Management and Employees of Bank NTT to be ready to accept changes. One of them is an increase in expertise, skills for carrying out tasks according to the demands and needs of the company.
- b. Loyal, has the meaning that being faithful in carrying out duties and obligations with full responsibility, able to work sincerely, willing to sacrifice and full of dedication and always implement the values of truth.
- c. Objective, means that the ability to make decisions honestly without being influenced by personal interests or other parties that can harm the Bank.
- d. Competing, means that the courageous attitude to compete in achieving work performance or performance above the predetermined.
- e. Anticipatory, means that the attitude that always anticipates the risks that may arise in the implementation of potential tasks is detrimental to the Bank, as well as responsiveness and quickness in taking the opportunities that exist potentially beneficial to the Bank.
- f. Comply with the provisions, has the meaning that the attitude to always comply with the provisions of the law and legislation in force.
- g. Business orientation, means that the attitude to always prioritize the running and success of the business or business of the Bank, because this is recognized as a basic conditional towards achieving the company's vision.
- h. Religious, means that the attitude of believing that God is always there when working so that

sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, penuh kedamaian dan toleran.

- i. Amanah, memiliki makna bahwa mengemban tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tepat dan dapat dipercaya dalam pelayanan.

Dengan diimplementasikannya nilai-nilai dalam Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku diharapkan akan mampu mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun buku 2018, Bank NTT tidak pernah mengalami adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

it creates a comfortable, peaceful and tolerant work atmosphere.

- i. Amanah, has the meaning that carrying out tasks with high integrity and professionalism to create a sense of security, comfort, accuracy and trustworthiness in service.

With the implementation of values in the Code of Conduct and Code of Conduct, it is expected that it will be able to prevent potential conflicts of interest in each activity, including in decision making.

In managing corporate management throughout the 2018 financial year, the NTT Bank has never experienced a transaction containing a conflict of interest, this is revealed in the following table:

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST					
Tahun Year	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position Having Conflict of Interest	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position Having Conflict of Interest	Jenis Transaksi Transaction Type	Nilai Transaksi Value of Transaction	Keterangan Description
2018	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## Penerapan Fungsi Kepatuhan

Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan cara dan strategi memitigasi risiko.

Upaya mitigasi risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Application Of Compliance Functions

Taking into account the Bank's increasingly diverse business challenges and risks, the NTT Bank continues to improve and improve risk mitigation methods and strategies.

The risk mitigation efforts are carried out by increasing compliance with applicable laws and regulations.

Upaya peningkatan kepatuhan tersebut diimplementasikan dengan cara menumbuhkan sifat patuh terhadap aturan yang berlaku bagi semua tingkatan organisasi, salah satu contohnya adalah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh tingkatan organisasi secara berkala dan tersistem.

Maksud penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut diatas, untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan setiap Pengurus maupun seluruh Karyawan Bank NTT sehingga mampu membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa seluruh tingkatan organisasi telah mampu melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya organ perseroan yang berkerja untuk meneliti dan menguji kebijakan-kebijakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/2/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, organ dimaksud adalah seorang Direktur yang disebut dengan nama Direktur Kepatuhan.

Dalam menata kelola perusahaan, Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

Efforts to improve compliance are implemented by developing compliance with rules that apply to all levels of the organization, one example being implementing periodic and systematic education and training programs for all levels of the organization.

The purpose of organizing education and training activities as mentioned above, to improve the skills and skills of each Management and all Bank NTT employees so as to be able to make policies that do not conflict with Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations.

To ensure that all levels of the organization have been able to implement policies that do not conflict with the provisions of Bank Indonesia and applicable laws and regulations, there is a need for a company organ that works to examine and test these policies. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 46/2 / POJK.03 / 2017 dated 31 July 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, the said organ is a Director referred to as the Compliance Director.

In managing corporate governance, the Compliance Director has a duty and is responsible as follows:

1. Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;
2. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank, tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Dalam Tahun Buku 2018 Direktur Kepatuhan Bank NTT telah menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain:

1. Telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dan OJK yang disampaikan secara berkala dan tepat waktu (semesteran) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
2. Menetapkan, langkah – langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Memantau faktor pendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan diantaranya:
  - a. Rasio Kecukupan Modal (KPM) per 31 Desember 2018 adalah sebesar 21.59% di atas rasio rata-rata (CAR) BPD seluruh Indonesia yaitu sebesar 22.05%.

3. Establish compliance systems and procedures that will be used to develop Bank internal provisions and guidelines;
4. Ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the OJK and applicable laws and regulations;
5. Minimizing Bank Compliance Risk;
6. Take precautionary measures so that the policies and / or decisions taken by the Bank's Directors do not deviate from the Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations.
- 7.
8. Perform other tasks related to the Compliance Function

In the 2018 Book Year, the Compliance Director of Bank NTT has determined the steps needed to ensure that the Bank has complied with all OJK regulations and applicable laws and regulations, including:

1. Has periodically reported the implementation of the Compliance Director's duties and responsibilities to the President Director and OJK which are submitted periodically and on time (semester) with copies sent to the Board of Commissioners.
2. Establish, policy steps needed to ensure that the Bank has complied with all applicable rules and regulations.
3. Monitor supporting factors for Bank compliance with provisions including:
  - a. The Capital Adequacy Ratio (KPM) per December 31, 2018 is 21.59% above the average BPD ratio (CAR) throughout Indonesia, which is 22.05%.

- b. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) per 31 Desember 2018 adalah sebesar 2.50 % ;
  - c. Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) primer adalah 6.72% dan GWM sekunder adalah 8.39%.
  - d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak ada pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK.
  - e. Tingkat Kesehatan Bank mempunyai predikat Cukup Sehat dengan Peringkat 3 (PK-3) .
4. Manajemen Bank telah melakukan pengkinian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan ketentuan baru kepada pejabat dan petugas pelaksana dalam jajaran organisasi Bank sebagai salah satu strategi mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank.

### Unit Kerja Dibawah Direktur Kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

### Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada

Sepanjang tahun 2018 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, standar – standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta

- b. The ratio of Troubled Loans (NPL) per December 31, 2018 is 2.50%;
  - c. Primary Statutory Reserves (GWM) is 6.72% and secondary GWM is 8.39%.
  - d. The Legal Lending Limit (LLL), there are no loans to related or non-related parties, both individuals and groups that violate the LLL provisions.
  - e. Soundness of the Bank has a rating of Fairly Healthy with Rank 3 (PK-3).
4. The Bank's management has updated and disseminated new policies and provisions to officials and implementing officers within the Bank's organizational ranks as a strategy to encourage the creation of a Bank Compliance culture

### Work Unit Under the Compliance Director.

In implementing the compliance function, the Compliance Director is assisted by the Compliance Division and the Risk Management Division. The Duties and Responsibilities of the Compliance Division and Risk Management Division are regulated in the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 29 of 2014 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

### Adjustments to Existing Regulations

Throughout 2018 the Bank has sought to maintain compliance with applicable regulations and laws, other compliance standards that have been set internally, provisions regarding good corporate governance, and fulfillment of agreed commitments,

pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non operasional.

Namun masih terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik – praktik prinsip Tata Kelola dan praktek kepatuhan benar – benar melekat dalam kegiatan kerja sehari – hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati – hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya non compliance issue dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

### **Kewajiban Penerapan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)**

Upaya mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dilaksanakan Bank NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 52 tahun 2010 tentang Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

both internal and external parties, especially for each operational work unit by conducting periodic reviews of the compliance of the majority of operational and non-operational work units.

But there are still things that need to be improved, concerning the understanding and discipline of employees towards the Bank's internal rules and regulations as well as the control system for the applicable implementation, thus continuous improvements are made so that the application of Good Corporate Governance principles and compliance practices is truly inherent in daily work activities.

In general, the implementation of compliance has been going well with the increase in the implementation of prudential principles, the acceleration of completion of compliance tests with draft procedures and policies, analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies and better frequency and reduced non compliance issue in the test compliance with the design of business decisions.

### **Obligation to Implement APU and PPT (Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding)**

Efforts to implement Bank Indonesia Regulation Number: 12 / POJK.01 / 2017 dated March 27, 2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs for Commercial Banks implemented by the NTT Bank by issuing a Decree of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 52 of 2010 concerning Anti-Money

Pendanaan Terorisme (Pedoman APU & PPT) di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman ini, Bank NTT selalu melaksanakan serangkaian sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

Selain itu, Bank NTT akan terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK yang masih terkait dengan penerapan APU dan PPT.

Laundering and Prevention of Terrorism Funding Guidelines (APU & PPT Guidelines) within the PT Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank.

To increase understanding of this guideline, Bank NTT always carried out a series of socialization to all work units at the Head Office, Branch Offices and Sub-Branch Offices.

In addition, Bank NTT will continue to improve various weaknesses in terms of the obligation to submit a Cash Financial Transaction Report to PPATK which is still related to the implementation of AML and PPT.

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

### Application of the Internal Audit Function

Dalam rangka implementasi terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Peraturan OJK Nomor : 46/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), setiap Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam PBI tersebut.

Pada Bank NTT, pelaksanaan fungsi audit intern tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit kerja pada Bank NTT.

Divisi Pengawasan & SKAI memiliki auditor intern yang ditempatkan di Kantor Pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Resident Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka fungsi Residen Inspektur (RI) diubah menjadi Internal Auditor untuk Kantor Pusat dan Internal Control untuk Kantor Cabang. Salah satu tugas dari Internal Control adalah menyampaikan Laporan Profil Risiko Cabang dan Lost Event Database.

In the framework of implementing Bank Indonesia Regulation number 1/6/1999 dated September 20, 1999 concerning Assignment of Compliance Director and OJK Regulation Number: 46 / POJK.03 / 2017 dated July 31, 2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Function and Implementation of Standards Implementation of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB), each Bank is required to implement the internal audit function as stipulated in the PBI.

At Bank NTT, the implementation of the internal audit function is carried out by the Supervision & Internal Audit Division whose scope of work is to examine the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all work units at Bank NTT.

The Supervision & Internal Audit Division has internal auditors who are stationed at the Head Office who are responsible to the Head of the Internal Audit & Internal Audit Division.

In accordance with the Decree of the Board of Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number 122 of 2015 dated December 2, 2015 concerning Dismissal and Appointment of Resident Position Inspectors to be the Auditor and Internal Control of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the Resident Inspector (RI) function was changed to Internal Auditor for Head Office and Internal Control for Branch Offices. One of the tasks of Internal Control is to submit the Branch Risk Profile Report and Lost Event Database.



## Profil Kepala SKAI

### Christofel S. M. Adoe, S.Sos

Kepala Divisi Pengawasan & SKAI

Lahir di Kalabahi pada tanggal 13 Februari 1969. Meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Niaga pada Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1993. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang.

Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada Biro Pengawasan Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kepala Sub Divisi Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat, Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Jumlah pegawai (Auditor internal) pada unit audit internal Bank NTT pada tahun 2018 sebanyak 12 orang, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Kepala Divisi
2. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektorat Wilayah I
3. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektorat Wilayah II
4. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Anti Fraud
5. 8 (delapan) Internal Auditor Kantor Pusat

## Kualifikasi/Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Saat ini dalam Unit Audit Internal Bank NTT,

1. 1 (satu) orang telah mendapat gelar Profesional Internal Audit (PIA).

## Profile of Head of Internal Audit Unit

### Christofel S. M. Adoe, S.Sos

Head of Supervision & Internal Audit Division

Born in Kalabahi on February 13, 1969. He holds a Social Bachelor degree from the Faculty of Administrative Sciences majoring in Commerce Administration at Nusa Cendana University Kupang in 1993. He has served as Head of the Supervision & SKAI Division since October 19, 2011 until now.

He has worked as an Executive Officer at the NTT Bank Supervision Bureau since October 1994 and has held an important position at Bank NTT namely: Deputy Branch Manager of Atambua, Head of Division II Regional Supervision Division Head Office, Business Manager of Kupang Main Branch, Acting. Head of Headquarters Retail Business Division, Acting. Head of Division of Commercial Business Head Office, Head of Commercial Business Division Head Office, Head of Internal Audit Work Unit (SKAI).

The number of employees (internal auditor) in the NTT Bank internal audit unit in 2018 is 12 people, which consists of:

1. 1 (one) Division Head
2. 1 (one) Head of Regional Inspectorate Sub Division I
3. 1 (one) Head of Regional Inspectorate Sub Division II
4. 1 (one) Head of the Anti Fraud Sub Division
5. 8 (eight) Head Office Internal Auditors

## Qualification / Certification as an Internal Audit Professional

Currently in the NTT Bank Internal Audit Unit,

1. 1 (one) person has obtained a Professional Internal Audit (PIA) degree.

2. 9 (Sembilan) orang telah mendapat gelar Qualified Internal Audit (QIA).
3. 3 (tiga) orang telah mendapat gelar Certified Forensic Auditor (CFRA)
4. 2 (dua) orang telah mendapat gelar Akuntansi (Ak)

## Pendidikan dan Latihan

Sebagai upaya peningkatan kompetensi auditor maka dalam tahun 2018 pejabat maupun Internal Audit telah diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan latihan sebagai berikut :

Pelatihan Tingkat *Managerial Qualified Internal Auditor* (QIA), Pelatihan Audit Efisiensi Bisnis (Untuk Mengidentifikasi In-Efisiensi Pengelolaan Bisnis yang berdampak pada Pendapatan Bunga Bersih-Net *Interest Income*, Workshop Penyusunan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Audit Internal Bank dan *Wealth Management*, Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) *The Auditor Of the Future*, Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Bank Umum, Kegiatan Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, Pelatihan/Diklat, yaitu Public training "Efisiensi Bisni Melalui Peningkatan Rasio CASA, Pelatihan/Diklat Yaitu *Auditor's Talk* "Sinergi Internal Auditor dan Eksternal Auditor" dalam rangka penguatan Kapabilitas Pengawasan Keuangan Negara", Pelatihan Pemimpin Cabang, Pelatihan "Identifikasi & Penanganan Transaksi yang Mengandung Unsur Benturan Kepentingan, Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK), Kegiatan Refresing dan Evaluasi Pelaporan SLIK, Pelatihan Workshop *Good Corporate Governance* se Jawa – Bali- Nusra, Sosialisasi PBI No. 2017/PBI/2018 dan Peraturan Antar Dewan Gubernur (PADG) Ektern No,20/19/PADG/2018

2. 9 (Nine) people have obtained the title of Qualified Internal Audit (QIA).
3. 3 (three) people have received the title of Certified Forensic Auditor (CFRA)
4. 2 (two) people have obtained an Accounting degree (Ak)

## Education and training

As an effort to improve auditor competency, in 2018 officials and Internal Audit have been included in various education and training as follows:

*Managerial Qualified Internal Auditor (QIA) Level Training, Business Efficiency Audit Training (To Identify In-Efficiency of Business Management that has an impact on Net Interest Income Net Interest Income, Workshop mentions Compilation of Indonesian National Work Qualification Framework (KKNI) in Internal Bank Audit and Wealth Management , National Audit Internal Seminar (SNIA) The Auditor Of the Future, Socialization Activities of Commercial Bank Activities, Information Session on Handling Alleged Banking Crimes, Training / Training, namely Public training "Business Efficiency through Increasing CASA Ratios, Training / Education Training, Auditor's Talk" Synergy of Internal Auditor and External Auditor "in the framework of strengthening the Capability of State Financial Supervision", Branch Leader Training, Training "Transaction Identification & Handling that Contain Conflict of Interest Elements, Training of Bank Staff and Leadership Schools (SESPIBANK), Refresing and Evaluation Activities of SILK Reporting, Training on Good Corporate Governance Workshop in Java - Bali-Nusra, Socialization of PBI No. 2017 / PBI / 2018 and Ektern No, 20/19 / PADG / 2018 Inter Board*

tentang Indonesia *Overnight Index Average* (IndoNIA) dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR),

of Governors Regulation (PADG) on the Indonesia Overnight Index Average (IndoNIA) and the Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR),

Pelatihan Evaluasi dan Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia, Pelatihan Penilaian Agunan (APPRAISAL), Kegiatan Konferensi Nasional IAIB, Kegiatan Sosialisasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK) RTGS, BI SSS, BI ETP dan SKBNI .

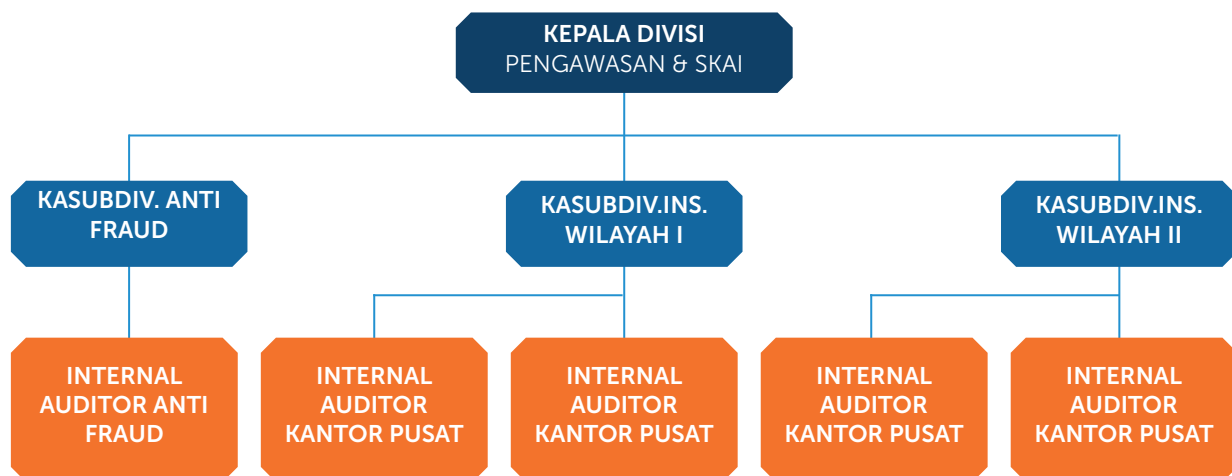
Training on Evaluation and Cash Management of Bank Indonesia Deposits, Collateral Assessment Training (APPRAISAL), IAIB National Conference Activities, Activities for Promotion of RTGS Compliance Inspection Report (LHPK), BI SSS, BI ETP and SKBNI.

### Struktur Organisasi Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

### Organizational Structure of the Supervision Division & Internal Audit Work Unit (SKAI)

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, Divisi SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama

Based on Bank NTT's Organizational Structure, the Internal Audit Division is directly under the supervision of the President Director



### Laporan Audit Internal

### Internal Audit Report

Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2018, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan Spot Audit terhadap 14 (empat belas) Kantor Cabang dari 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus dan 12 (dua belas) Kantor Cabang dengan

In accordance with the annual audit work program in 2018, the Supervision & Internal Audit Division has conducted Spot Audit of 14 (fourteen) Branch Offices of 1 (one) Main Branch Office, 1 (one) Special Branch Office and 12 (twelve) Branch Offices with

fokus utama pada bidang kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit, mengungkapkan indikasi kecurangan, memantau upaya cabang dalam penyelesaian kredit bermasalah, subrogasi dan hapus buku maupun dan membenahi administrasi kredit serta pemantauan terhadap pelaksanaan APU & PPT.

Setiap semester telah disampaikan laporan Pelaksanaan Pokok – Pokok Hasil Audit maupun Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan BI-RTGS, SKN-BI, Audit BI Srippless Securities System (BI-SSSS), Audit BI Electronic Trading Platform (BI-ETP), Audit Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dan Security Audit terhadap beberapa permasalahan yang berpotensi merugikan bank baik dari segi financial maupun reputasi.

## Pengembangan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POPJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran Internal Audit Charter (Audit Charter) Bank NTT dan telah diterapkan oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh oleh Dewan Komisaris Bank NTT pada tanggal 10 Oktober 2014. Internal Audit Charter (IAC) ini memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode etik, kompetensi dan syarat auditor, dukungan manajemen, pengembangan auditor dan hubungan SKAI dengan auditor ekstern.

the main focus is on credit in the context of credit risk mitigation, uncovering indications of fraud, monitoring the efforts of branches in resolving non-performing loans, subrogating and removing books and and fixing credit administration and monitoring the implementation of AML & CFT.

Each semester, the Audit Results Principal Implementation Report and the Anti-Fraud Strategy Implementation Report have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) according to the time specified in the Bank Indonesia Regulation (PBI).

In 2018 an examination of the implementation of BI-RTGS, SKN-BI, Audit of BI Srippless Securities System (BI-SSSS), Audit of BI Electronic Trading Platform (BI-ETP), Audit of National Black List Management Office (KPDHN) and Security Audit of some problems that have the potential to harm the bank both in terms of financial and reputation.

## Internal Audit Development

In line with the Financial Services Authority Regulation Number: 46 / POPJK.03 / 2017 dated 31 July 2017 concerning Implementation of Compliance Function and Implementation of Standards for Implementation of Commercial Bank Internal Audit Functions, Bank NTT has updated the NTT Bank Internal Audit Charter (Audit Charter) and has been implemented by the Board of Directors of Bank NTT and approved by the Board of Commissioners of Bank NTT on October 10, 2014. This Internal Audit Charter (IAC) contains the vision and mission, objectives and scope of activities, structure and position, duties, responsibilities and authorities, code of ethics, competence and requirements of auditors, management support, auditor development and SKAI relations with external auditors.

## Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah bagi perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

## Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit.

## Objectives and Scope of Activities of the NTT Bank Internal Audit Work Unit

1. Activities carried out by the Bank NTT Internal Audit Work Unit aim to provide input and recommendations for improvements that are of added value for the improvement and improvement of quality, effectiveness of risk management and the adequacy and effectiveness of internal controls.
2. The scope of activities of the NTT Bank Internal Audit Unit includes the implementation of assurance and consultation on the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all aspects / activities of Bank NTT at all levels of management in all Bank NTT work units.

## Position of the NTT Bank Internal Audit Work Unit

The position of the NTT Bank Internal Audit Work Unit is formed in such a way as to guarantee the independence and objectivity of the implementation of its duties and responsibilities as mandated in the provisions, namely as follows:

1. The NTT Bank Internal Audit Work Unit is headed by a Head who is directly responsible to the President Director.
2. The Head of the NTT Bank Internal Audit Work Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority.
3. The Head of the NTT Bank Internal Audit Unit can communicate directly with the Board of Commissioners to inform matters relating to the audit.

Pemberitahuan informasi kepada Dewan Komisaris tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, hanya karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
5. Auditor Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.
6. Auditor Satuan Kerja Audit Intern dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta bersifat strategis.

### **Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT**

1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah :
  - a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit.
  - b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, Teknologi Sistem Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

Notification of information to the Board of Commissioners is reported to the President Director with a copy to the Compliance Director.

4. The President Director can dismiss the Head of the NTT Bank Internal Audit Work Unit, after obtaining approval from the Board of Commissioners, only because the Head of the NTT Bank Internal Audit Unit does not fulfill the requirements and obligations as an auditor for the Internal Audit Unit as stipulated in applicable internal and external provisions and / or fail or incapable of carrying out tasks.
5. Auditors The Internal Audit Unit is responsible to the Head of the Internal Audit Unit in accordance with the structure of the NTT Bank Internal Audit Work Unit.
6. Auditors The Internal Audit Work Unit can act as a consultant for internal parties who need it, especially matters relating to their field of work and are strategic in nature.

### **Duties, Responsibilities and Authorities of the NTT Bank Internal Audit Work Unit**

1. The Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit are:
  - a. Assist the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision and guidance by outlining operationally both the planning, implementation and monitoring of follow-up audit results.
  - b. Make analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, Information Systems Technology and other activities through direct or indirect inspection.

- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
  - d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
  - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen.
  - f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
  - g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
  - h. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan fraud yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan ekstern yang berlaku maupun pedoman strategi anti fraud Bank NTT.
  - k. Bekerja sama dengan Komite Audit.
  - l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.
  - m. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas kegiatan audit yang
- c. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the policies of the Board of Directors of Bank NTT and provide consultations to provide added value and improve the quality of risk management and corporate governance controls.
  - d. Identify all possibilities to improve and improve the efficiency and effectiveness of using resources and funds.
  - e. Provide suggestions for improvement and objective information about audit results to all levels of management.
  - f. Make and submit Audit Results Reports to the President Director and copy to the Compliance Director periodically in accordance with applicable regulations.
  - g. Monitor, analyze and report on the implementation of suggested improvements.
  - h. Prepare an Implementation Report and Principal Audit Results and submit to the Financial Services Authority.
  - i. Prepare and submit reports on any audit findings that are expected to disrupt the business continuity of Bank NTT to the Financial Services Authority.
  - j. Prepare and submit a report of fraud that occurred to the Financial Services Authority in accordance with the applicable external provisions and guidelines for Bank NTT's anti-fraud strategy.
  - k. Cooperating with the Audit Committee.
  - l. Prepare written policies and procedures as guidelines for Internal Auditors in carrying out their duties.
  - m. Develop a program to test and evaluate the

- dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan kegiatan audit selanjutnya.
- n. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor.
2. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT memiliki kewenangan untuk :
- a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
  - b. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan.
  - c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dan bebas dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit maupun dengan Anggota Direksi lainnya.
  - d. Melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
  - e. Melakukan audit pendalaman (khusus/ investigasi) bila dianggap perlu.
  - f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit.
  - g. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.
  - h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

- quality of audit activities carried out to improve / improve subsequent audit activities.
- n. Carry out education in a sustainable manner in accordance with the duties and competencies of the auditor.
2. The NTT Bank Internal Audit Work Unit has the authority to:
- a. Having unlimited access to all functions / levels of the organization, records, employees, resources and funds as well as other NTT Bank assets and even third parties (if deemed necessary) related to the conduct of audits and consultations.
  - b. Plan and implement audits by allocating resources and funds, determining frequency, determining personnel, determining audit techniques / methodologies, selecting subjects and determining the scope of audit activities required.
  - c. Have access / direct communication channels with the Board of Commissioners through the Audit Committee and other members of the Board of Directors.
  - d. Conduct regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and / or the Audit Committee.
  - e. Conduct deepening audits (special / investigation) if deemed necessary.
  - f. Provide recommendations whether in the form of sanctions or improvements that are deemed necessary, on an audited problem.
  - g. Coordinate with external auditors.
  - h. Use the services of external parties in the conduct of audits if deemed necessary.



## Dukungan Manajemen Terhadap Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mendapat dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris dan semua tingkat Manajemen, sehingga dapat melaksanakan kegiatan auditnya tanpa hambatan/ intervensi dari pihak manapun termasuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai rekomendasi.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan semua tingkatan manajemen dilarang mempengaruhi dan/atau melakukan intervensi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit yang obyektif.
3. Auditor Bank NTT dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator bagi pihak intern bank untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan sistem operasional prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan catatan bahwa advice yang diberikan oleh auditor bukan merupakan suatu legitimasi atas berjalannya suatu transaksi/ kegiatan dari auditee).
4. Karena alasan keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cara sampling termasuk didalamnya karena sistem risk based audit dalam rangka menetapkan unit kerja dan ruang lingkup yang akan diaudit, maka setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari yang tidak dapat terdeteksi karena sistem audit tersebut ; kepada auditor dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya temuan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kepada auditor dapat

## Management Support for the NTT Bank Internal Audit Work Unit

1. The activities of the Internal Audit Unit receive full support from the Board of Directors, the Board of Commissioners and all levels of Management, so that they can carry out audit activities without obstacles / intervention from any party including following up on the findings of the Internal Audit Work Unit audit recommendations.
2. The Board of Commissioners, Directors and all levels of management are prohibited from influencing and / or intervening in the activities of the Internal Audit Work Unit carried out based on objective audit principles.
3. Bank NTT Auditors are exempt from all the authority and responsibility to carry out operational activities carried out by Bank NTT but can act as consultants and catalysts for internal bank parties to ensure that every operational policy and system implementation procedure has been implemented in accordance with valid (with a note that the advice provided by the auditor is not a legitimacy for the operation of a transaction / activity from the auditee).
4. For reasons of time and resource limitations so that the inspection is carried out by sampling including the system risk based audit in order to determine the work unit and scope to be audited, then any problems that occur in the future that cannot be detected due to the audit system; the auditor is exempt from all claims for the absence of findings related to the problem that occurred. Furthermore, the auditor can be assigned to review all the problems that occur (advanced /

ditugaskan untuk mereview seluruh permasalahan yang terjadi (audit lanjutan/khusus/investigasi) untuk memberi masukan yang tepat dan konstruktif kepada Direksi sebelum diambil keputusan.

5. Auditor Bank NTT merupakan profesi yang wajib dilindungi oleh manajemen sehingga Auditor Bank NTT tidak mudah untuk dimutasi ke unit kerja lainnya, oleh karena itu, kepada auditor Bank NTT diberikan jenjang karir khusus.
6. Kepala SKAI dan Auditor-nya tidak dapat diberhentikan dan/atau dimutasi karena hasil auditnya.
7. Auditor dapat dimutasi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala SKAI termasuk penerimaan auditor baru harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Kepala SKAI sebelum ditetapkan sebagai auditor internal Bank NTT.

special audit / investigation) to provide appropriate and constructive input to the Board of Directors before a decision is made.

5. Bank NTT Auditors are professions that must be protected by management so that the NTT Bank Auditors are not easily transferred to other work units, therefore, Bank NTT auditors are given special career levels.
6. The Head of the Internal Audit Unit and its Auditors cannot be dismissed and / or transferred because of the results of the audit.
7. The auditor can be transferred with the knowledge and approval of the Head of the Internal Audit Unit including the acceptance of new auditors to be consulted first with the Head of the Internal Audit Unit before being determined as Bank NTT's internal auditor.

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

### Implementation of the External Audit Function

Salah satu keputusan RUPS Tahun Buku 2018, antara lain memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT. Penunjukkan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku 2018

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2018 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tanggal 31 Desember 2018 dengan mendapat opini "*Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material*".

One of the resolutions of the 2018 Book Year GMS, among others, gave the Board of Commissioners the authority to appoint a Public Accounting Firm (KAP) as an independent external auditor to examine Bank NTT's financial statements. The appointment of KAPs registered with Bank Indonesia / OJK is based on the results of recommendations from the Audit Committee.

Based on the agreement, the Board of Commissioners is in accordance with the recommendations of the Audit Committee to appoint Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan to audit NTT Bank's financial statements for the 2018 financial year

The appointment of Public Accountants Office (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, the KAP is an entity registered with Bank Indonesia and BAPEPAM-LK, not providing other services to Bank NTT that year so as to avoid possible conflicts of interest, and does not carry out audit work on Bank NTT Financial Reports for more than 5 (five) consecutive years.

The appointed KAP has submitted the audit results and the management letter to the Bank on time, is able to work independently, meet the professional standards of public accountants and work agreements and the scope of the audit that has been determined.

The audit results of Bank NTT's Financial Statements for Book Year 2018 which have been submitted by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, December 31, 2018 by obtaining the opinion "Presenting fairly in all material respects".

## Eksternal Audit

Untuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal, maka Dewan Komisaris dengan menggunakan amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas Laporan keuangan Bank NTT Tahun Buku 2018 dengan total biaya sebesar Rp.720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sesuai Kontrak Kerja Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2018 antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Atas penunjukkan ini Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan Bank NTT.

## Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank NTT selama tahun 2014 – 2018 :

## External Audit

For the conduct of bank audits by external parties, the Board of Commissioners using the mandate given by the GMS has appointed Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan for the NTT Bank Financial Statements 2018 with a total cost of Rp.720,000,000 (Seven hundred twenty million rupiahs), in accordance with the Work Contract of the Financial Statements of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the Book Year 2018 between the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara and the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Upon the appointment of this Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, they did not provide other services other than audits of Bank NTT's financial statements.

## Public Accountant Office (KAP)

The following is the Public Accountant Office that audits the NTT Bank Financial Statements during 2014 - 2018:

Tahun Buku Fiscal year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Audit Lainnya Other Audit	Fee Audit Fee Audit (Rp)	Apini Audit Apini Audit
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan dan Pendampingan Obligasi Audit of Financial Statements and Bond Assistance	Rp. 720.000.000	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Presenting fairly in all material things".
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Rp. 440.000.000	"Menyajikan secara wajar" "Presenting fairly"
2016	Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Rp.490.000.000	"Tanpa Modifikasian" "Without Modification"

Tahun Buku Fiscal year	Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	Audit Lainnya Other Audit	Fee Audit Fee Audit (Rp)	Apini Audit Apini Audit
2015	Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Rp.486.250.000	"Tanpa Modifikasian" "Without Modification"
2014	Drs. J. Tanzil & Rekan	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Rp.475.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Fairness

## Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Bank NTT. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan Bank NTT dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan Bank NTT tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Semakin besar volume usaha/skala Bank NTT semakin penting arti dari Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal di Bank NTT dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara of site dan on site oleh setiap unit pengendalian internal pada setiap unit pengendalian pada setiap Divisi dan kantor operasional Bank NTT.

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di Bank NTT mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut *Three Lines Of Defense* yang dapat digambarkan sebagai berikut :

## Internal Control System

Internal control includes the unity of methodologies, policies, procedures and organizational arrangements aimed at identifying, measuring, monitoring and controlling risks arising from Bank NTT activities. The approach taken to measure, monitor and control risk is based on a risk-based approach.

Internal Control is a very important part so that the goals of Bank NTT can be achieved. Without internal control, the goals of Bank NTT cannot be achieved effectively and efficiently.

The greater the business volume / scale of Bank NTT the more important the meaning of Internal Control.

Internal Control at Bank NTT is carried out by covering all aspects of the business both from the Asset and Liabilities side, with the implementation of supervision carried out on site and on site by each internal control unit in each control unit in each Division and Bank NTT operational office.

The risk management and internal control framework at Bank NTT adopts a layered defense principle called *Three Lines Of Defense* which can be described as follows:

First Level of Defense	Second Level of Defense	Third Level of defense
Line of Bussiness & Support Functions	National Fraud and Collection Division	Internal Audit
Operatioanl Units	Divisions	External Audit
System of Internal Controls	Legal/Compliance	External Audit

## Kesesuaian sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Divisi Pengawasan sebagai pelaksanaan pengendalian internal di Bank NTT memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada kebijakan Pedoman Audit Intern yang dimiliki Bank NTT yang dibuat dengan berpatokan pada teori COSO dan BIS *Principles on Internal Control Practises*.

Bank NTT memiliki Struktur Organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis. Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja *quality assurance* Bank NTT melalui Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal berdasarkan COSO.

Bank NTT menyadari bahwa pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing system/unit kerja yang ada dalam Bank NTT dan dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional PT. Bank NTT menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasional bank dan mencegah terjadinya penyalahgunaan system dan *human error*.

## Tujuan Pengendalian Internal

Sistim Pengendalian Intern secara fungsional berada di bawah Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan berada

## Conformity of the Internal Control system with COSO

The Supervision Division as the implementation of internal control at Bank NTT has a work reference standard (SOP) which is based on the NTT Internal Audit Guidelines owned by Bank NTT which is based on COSO and BIS *Principles on Internal Control Practices*.

NTT Bank has an Organizational Structure that is well-made and suitable for quality assurance management. This is based on the philosophy that all business functions must act as the main person in charge of managing quality assurance in each business unit. The philosophy above is the basis for structuring the Bank NTT quality assurance framework through the Three Levels of Defense with the Internal Control framework based on COSO.

Bank NTT realizes that Internal control is part of each system / work unit within the NTT Bank and is used as a procedure and operational guidelines for PT. Bank NTT uses the Internal Control System to direct bank operations and prevent misuse of systems and human errors.

## Internal Control Objectives

The Internal Control System is functionally under the Supervision Division. The Supervision Division is

di bawah Direktorat Utama, dengan memiliki 1 (satu) orang Kepala Divisi, 2 (dua) orang Kepala Sub Divisi Inspektorat (Inspektorat Wilayah 1 dan Inspektorat wilayah 2), 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi Anti fraud, serta 8 (delapan) orang Internal Auditor.

Pembagian Wilayah Inspektorat sebagai berikut :

- I. Inspektorat wilayah 1 mencakup : Kantor Cabang Utama Kupang, Kantor Cabang SoE, Kantor Cabang Kefamenanu, Cabang Kalabahi, Kantor Cabang Atambua, Kantor Cabang Betun, Kantor Cabang Waingapu, Kantor Cabang Waikabubak, Kantor Cabang Anakalang, Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang Rote, dan Kantor Cabang Sabu.
- II. Inspektorat Wilayah 2 mencakup : Kantor Cabang Khusus Kupang, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Kantor Cabang Lewoleba, Kantor Cabang Labuan Bajo, Kantor Cabang Ruteng, Kantor Cabang Bajawa, Kantor Cabang Ende, Kantor Cabang Mbay, Kantor Cabang Borong, Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Larantuka.

Sedangkan untuk pemeriksaan audit pada Kantor Pusat Bank NTT, juga dengan pembagian sebagai berikut :

1. Inspektorat wilayah 1 : Divisi SDM, Divisi Kualiatas Pelayanan, Divisi Kepatuhan, Divisi Operasional, Divisi Umum dan Divisi Umum dan Divisi Corporate Secretary.
2. Inspektorat Wilayah 2 : Divisi IT, Divisi Soppoting Kredit, Divisi Kredit, Divisi Pemasaran Kredit, Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Dana & Jasa.

Sistim Pengendalian Intern juga didukung dengan sistim operasioanal dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan

under the Main Directorate, by having 1 (one) Division Head, 2 (two) Heads of the Inspectorate Sub Division (Regional Inspectorate 1 and Regional Inspectorate 2), 1 (one) Head of the Anti Fraud Sub Division, and 8 (eight) Internal Auditors.

Division of Inspectorate Area as follows:

- I. Regional Inspectorate 1 includes: Kupang Main Branch Office, SoE Branch Office, Kefamenanu Branch Office, Kalabahi Branch, Atambua Branch Office, Betun Branch Office, Waingapu Branch Office, Waikabubak Branch Office, Anakalang Branch Office, Waitabula Branch Office, Rote Branch Office and Sabu Branch Office.
- II. Regional Inspectorate 2 includes: Kupang Special Branch Offices, Surabaya Branch Offices, Lewoleba Branch Offices, Labuan Bajo Branch Offices, Ruteng Branch Offices, Bajawa Branch Offices, Ende Branch Offices, Mbay Branch Offices, Borong Branch Offices, Maumere Branch Offices and Branch Offices Larantuka.

Whereas for audit audits at the NTT Bank Head Office, also with the following distribution:

1. Regional Inspectorate 1: HR Division, Service Quality Division, Compliance Division, Operational Division, General Division and General Division and Corporate Secretary Division.
2. Regional Inspectorate 2: IT Division, Soppoting Credit Division, Credit Division, Credit Marketing Division, Treasury Division, Risk Management Division and Funds & Services Division.

The Internal Control System is also supported by operational systems and procedures (SOPs) which are Guidelines for carrying out duties and responsibilities in

tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional dengan menggunakan pelaporan secara sistem yang disampaikan oleh Internal Control (IC) yang ada pada masing-masing kantor cabang. Adapun aplikasi manajemen risiko yang akan digunakan oleh Bank NTT yaitu :

#### 1. Aplikasi Lost Event Database (LED)

Aplikasi ini digunakan oleh Internal Control (IC) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut sebagai risk taking unit untuk melaporkan semua risk event yang terjadi pada unit kerja tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mewajibkan pihak Bank untuk memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko operasional, dimana untuk mengelolanya harus didukung dengan data yang akurat, update dan komprehensif.

LED (Loss Event Database) merupakan aplikasi untuk menginventarisir data kerugian dan potensi kerugian bank dan perencanaan tanggapan risiko terkait dengan pengelolaan risiko operasional.

each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, Cash Office and USPD Office. Bank NTT has implemented a Risk Management Application that is used to manage 8 (eight) risks required by the Financial Services Authority (OJK).

This risk management application aims to minimize the risks that will occur in operational activities by using system reporting delivered by Internal Control (IC) in each branch office. The risk management application that will be used by Bank NTT is:

#### 1. Application for Lost Event Database (LED)

This application is used by the Branch Office Internal Control (IC), hereinafter referred to as the risk taking unit to report all risk events that occur in the work unit.

In accordance with Circular Number 34 / SEOJK.03 / 2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, requires the Bank to have and implement Risk Management that is tailored to the internal and external environment, complexity of business activities, and supported by resources adequate.

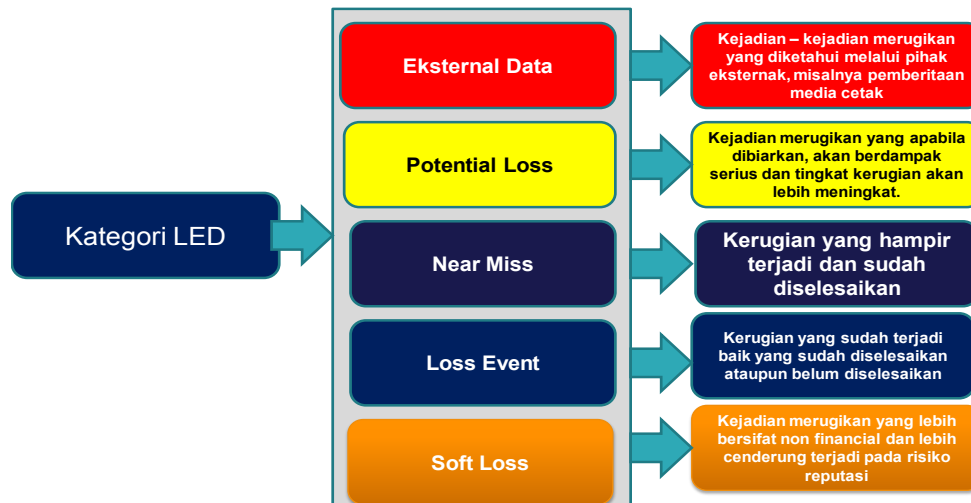
One risk that must be managed by the Bank is operational risk, where to manage it must be supported by accurate, updated and comprehensive data.

The LED (Loss Event Database) is an application to menginventarisir data loss and potential bank losses and risk response planning related to operational risk management.

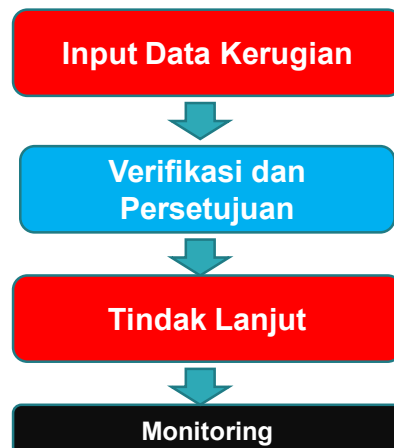




## Kategori Loss Event Database

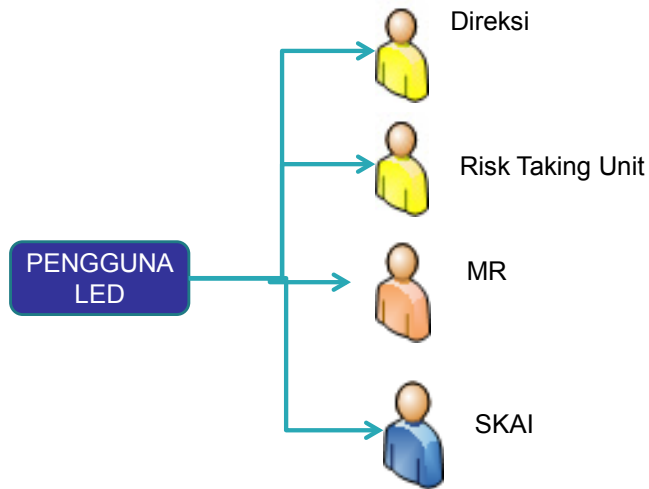


## Workflow Manajemen LED

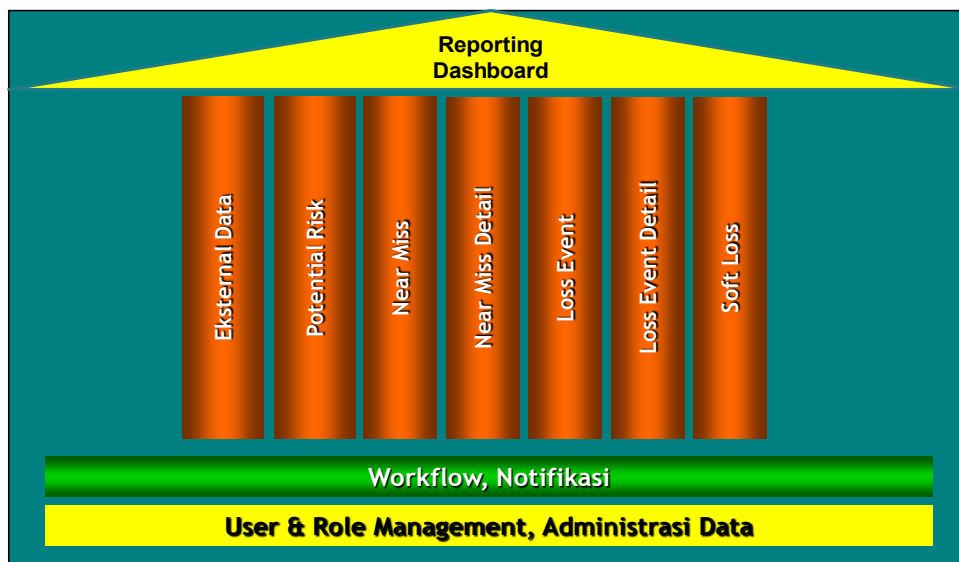




## PENGGUNA LED



## Konfigurasi Modul Aplikasi LED



Divisi Manajemen Risiko sebagai yang mengawal manajemen risiko Bank telah mengimplementasikan pengelolaan Loss Event Database sebagai upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi dan monitoring kerugian dan risiko Cabang.

- 1) User & Role Management merupakan modul untuk mengelola hak akses pengguna aplikasi dan mendaftarkan pengguna aplikasi.
- 2) Administrasi Data merupakan modul yang berfungsi untuk proses pengelolaan data master aplikasi.
- 3) *Workflow* merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani alur proses bisnis sehingga dapat diterapkan pada aplikasi dengan tepat.
- 4) Notifikasi merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani pemberitahuan / notifikasi kepada user yang dimaksud untuk melakukan tugas sesuai dengan tahapan proses bisnisnya.
- 5) Reporting & Dashboard merupakan modul untuk mengelola laporan menyekuruh dari data-data kerugian yang dihasilkan baik berupa tabel maupun grafik.
- 6) Eksternal data merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian merugikan yang diketahui melalui pihak eksternal misalnya pemberitaan media cetak.
- 7) Potential risk merupakan modul yang berfungsi mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

The Risk Management Division, which oversees the Bank's risk management, has implemented the management of the Loss Event Database as an effort to identify, measure, mitigate and monitor Branch losses and risks.

- 1) User & Role Management is a module to manage application user access rights and register application users.
- 2) Data Administration is a module that functions for the application master data management process.
- 3) Workflow is a function in applications that can handle the flow of business processes so that they can be applied to the application appropriately.
- 4) Notification is a function in the application that can handle notifications / notifications to the intended user to perform tasks according to the stages of the business process.
- 5) Reporting & Dashboard is a module for managing all-round reports from loss data generated in the form of tables and graphs.
- 6) External data is a module that functions to manage input data of adverse events that are known through external parties, for example reporting on print media.
- 7) Potential risk is a module that functions to manage input data on risk events that do not cause losses and opportunity costs are defined as losses / costs arising from loss of opportunity to earn income.

- 8) Near Miss merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 9) Near Miss Detail merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola kejadian risiko yang disertai dampak risiko berupa penyebab terjadinya risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 10) Loss Event merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial serta termasuk yang mungkin timbul dari setiap event.
- 11) Loss Event Detail merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang disertai dengan dampak yang ditimbulkan beserta pengendaliannya dengan data yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Database kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial yang mungkin timbul dari setiap event.
- 12) Soft Loss merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari terjadinya Risk Event. Kerugian tersebut bisa finansial bisa juga non finansial.

- 8) Near Miss is a module that functions to manage input data on risk events that do not cause losses and opportunity costs are defined as losses / costs arising from loss of opportunity to earn income.
- 9) Near Miss Detail is a module that functions to manage risk events accompanied by the impact of risks in the form of risk occurrences that do not cause losses and opportunity costs are defined as losses / costs arising from the loss of opportunities to obtain income.
- 10) Loss Event is a module that functions to manage the data input losses experienced or experienced by banks, which have been organized regularly with certain classifications. The said loss includes financial and non financial losses and includes those that may arise from each event.
- 11) Loss Event Details is a module that functions to manage input data loss experienced or experienced by a bank, which is accompanied by the impact and control with data that has been organized regularly with certain classifications. The intended loss database includes financial and non-financial losses that may arise from each event.
- 12) Soft Loss is a module that functions to manage the input of loss data as a consequence of the occurrence of a Risk Event. These losses can be financially non-financial.

## 2. Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC)

Aplikasi Profil Risiko Cabang merupakan Aplikasi untuk mengelola risiko inherent dan KPMR pada masing-masing Cabang bank dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan aktivitas bank. Parameter didasarkan pada kompleksitas dan karakteristik usaha bank yang diturunkan kepada Kantor Cabang.

Aplikasi ini juga merupakan wahana Business Process Alignment antara Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi Pengawasan, dimana Laporan Profil Risiko Kantor Cabang yang dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dapat digunakan oleh Divisi Pengawasan sebagai referensi Risk Based Audit (RBA), aplikasi ini dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Berorientasi Risiko  
Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dan memperhatikan arah (trend) risiko ke depan.
- b) Komprehensif & Terstruktur  
Penilaian profil risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis atas parameter jenis risiko untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari masing-masing parameter penilaian-penilaian terhadap kondisi usaha cabang.
- c) Proporsionalitas  
Penggunaan indikator atau parameter dalam tiap jenis risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha cabang.

## 2. Branch Risk Profile Application (PRC)

The Branch Risk Profile application is an application to manage inherent risk and KPMR in each bank branch by using parameters that are in accordance with bank activities. Parameters are based on the complexity and business characteristics of the bank which are derived from the Branch Office.

This application is also a vehicle for Business Process Alignment between the Risk Management Division and the Supervision Division, where Branch Risk Profile Reports managed by the Risk Management Division can be used by the Division of Supervision as a Risk Based Audit (RBA) reference, this application can be used with the following considerations :

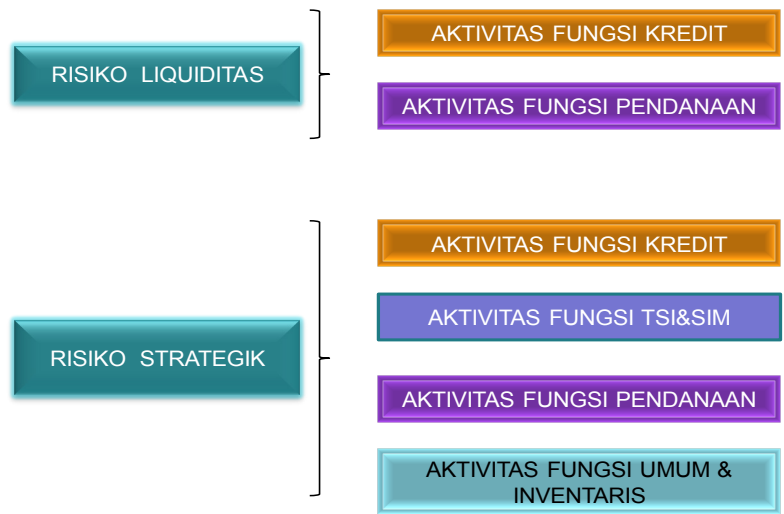
- a) Risk-oriented  
This is done by identifying the root causes, considering the impact of these risks, and paying attention to the risk direction going forward.
- b) Comprehensive & Structured  
The risk profile assessment is carried out thoroughly and systematically over the parameters of the risk type to determine the relationship and influence of each parameter of the assessments on the business conditions of the branch.
- c) Proporsality  
The use of indicators or parameters in each type of risk is carried out by taking into account the characteristics and complexity of the branch business.

d) Materialitas dan signifikansi  
Penentuan materialitas dan Signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai.

d) Materiality and significance  
Determination of materiality and significance is based on analysis supported by facts, data, and adequate information.

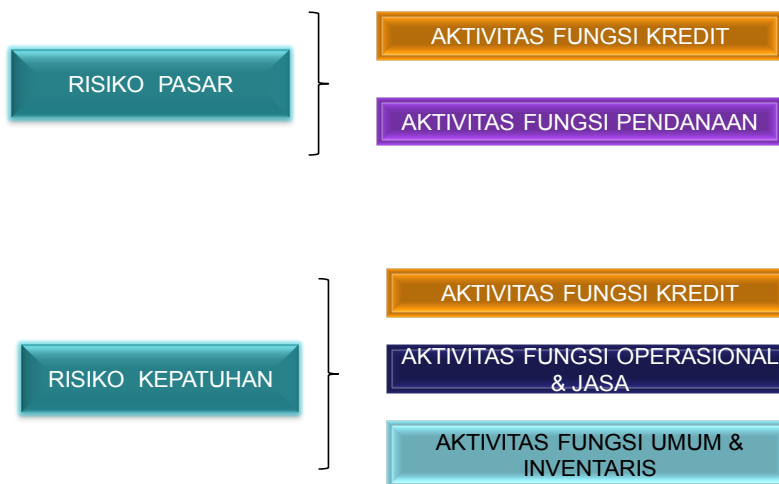


### Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent

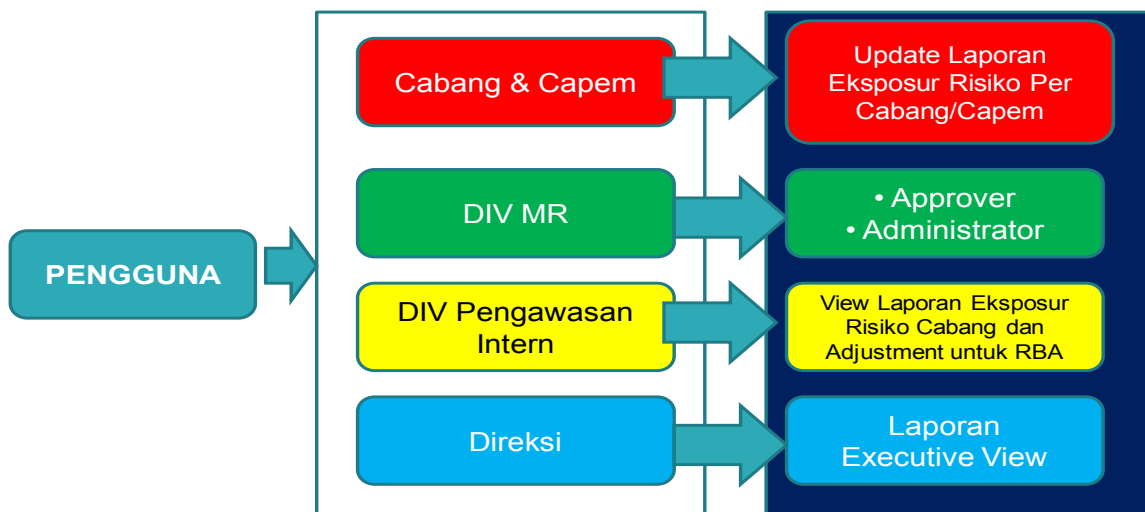




## Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent



## Pengguna Aplikasi



Bank NTT menjalankan system pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok sebagai berikut :

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi.  
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasional kantor sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan Bank NTT.
2. Tujuan pelaporan  
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan akuntansi (transaksi keuangan) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  
Bahwa pengendalian internal tersebut untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpajakan maupun kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil/output dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal tercapai, maka Bank NTT harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

Bank NTT runs an internal control system based on the objectives of internal control, which includes three main points as follows:

1. Operational objectives related to the effectiveness and efficiency of operations.  
That internal control is intended to improve the effectiveness and efficiency of all office operations so that it can control costs aimed at achieving Bank NTT's goals.
2. Reporting objectives  
Whereas internal control is intended to improve the reliability of data and accounting records (financial transactions) in the form of financial statements and management reports so as not to mislead the users of these reports and can be tested for their truth.
3. The purpose of compliance with applicable laws and regulations.  
That internal control is to increase bank compliance with the laws and regulations set by the government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), Taxation and the policies of the entity itself.

The three objectives of internal control are the results / output of a good internal control, which can be achieved by paying attention to the elements of internal control which is a process to produce internal control, then the NTT Bank must consider the elements of internal control.



## Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan efektivitas pengendalian internal Bank NTT, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem.

Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas sistem pengendalian internal yang digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian/prosedur/sistem.

## Permasalahan Hukum

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi 6 (enam) kali kejadian terkait sengketa hukum dengan latar belakang penyebabnya adalah wan prestasi terhadap kontrak dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## Evaluation of the Level of Effectiveness of the Internal Control System

The Internal Audit Work Unit (SKAI), which is part of the Internal Control System, conducts audits to ensure the effectiveness of NTT Bank's internal controls, through independent evaluations of the adequacy and compliance with policies, procedures and systems.

The results of the evaluation of the implementation of the internal control system is one of the basic management to determine the effectiveness of the internal control system that is described through an audit rating which is the basis for the improvement of improvements, among others in the form of updates / procedures / systems.

## Legal Problems

Within the last 1 (one) year there have been 6 (six) events related to legal disputes with a background of causes which are achievements of contracts and actions that are contrary to the law.

The number of legal problems faced by the Bank and has been submitted through legal proceedings, during the period of 2018 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Problems	Jumlah Jumlah		
	Sengketa Niaga Commercial Dispute	Perdata Civil	Pidana Driminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian); Has been completed (already has permanent legal force / peace efforts);	1	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	-	4	1

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah:

1. Kasus gugatan perdata terkait agunan kredit PT Galo Perdana (Nasabah Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan lokasi agunan terletak di Labuan Bajo) dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- dan biaya operasional Rp. 46.078.000,-
2. Kasus sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klas iA Kupang (Wanprestasi Agunan dilakukan oleh nasabah kredit Cabang Khusus, debitur an. Servasius Phodi dan Gregorius Soter) dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 3.050.000.000,- dimana sengketa perdata dimaksud telah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang telah dilakukan pembacaan putusan pada tanggal 16 Januari 2018.
3. Sengketa dugaan korupsi tindakan pidana korupsi di Kantor Pusat (pengadaan lisensi Microsoft Society Bank NTT) dengan taksiran kerugian sesuai hasil audit BPKP NTT senilai Rp. 2.180.100.965,- dimana dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lisensi Moirosoft PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2015 telah sampai pada tahap pengajuan Kontra Memori Kasasi Mahkamah Agung RI.
4. Kasus Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kupang, Penggugat : Lanny M Tadu, SE, Tergugat ; Rahmat, SE dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, pihak penggugat kepada tergugat agar segera mengembalikan 5 bidang sertifikat tanah yang telah diagunkan kepada tergugat dalam hal ini PT Bank NTT.

Legal problems that occur related to cases that are still in the process of completion are:

1. Case of civil suit related to credit collateral of PT Galo Perdana (Customer of Bank NTT Kupang Main Branch with collateral location located in Labuan Bajo) with estimated loss of Rp. 500,000,000, - and operating costs of Rp. 46,078,000, -
2. Civil dispute cases in the iA Kupang District Court (Collateral Defaults are conducted by Special Branch credit customers, debtors, Servasius Phodi and Gregorius Soter) with estimated losses of Rp. 3,050,000,000, - where the civil dispute referred to arrived at the trial stage in Kupang District 1A District Court which had been read out on January 16, 2018.
3. The alleged dispute about corruption in corruption at the Head Office (procurement of Microsoft Society Bank NTT licenses) with estimated losses in accordance with the results of the NTT BPKP audit worth Rp. 2,180,100,965, - where the alleged corruption of the procurement of license Moirosoft PT. The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara for the 2015 Fiscal Year has arrived at the stage of submitting a Counter Memory of the Cassation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
4. Cases of Civil Disputes in the Kupang District Court, Plaintiff: Lanny M Tadu, SE, Defendant; Rahmat, SE and PT. The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the plaintiff, told the defendant to immediately return the 5 fields of land certificates that had been pledged to the defendant in this case PT Bank NTT.

5. Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Debitur PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Kreditur Bank dan Pemenang MTN salah satunya (PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur), Bank NTT pada tanggal 22 Maret 2018 melakukan Pembelian MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) dari MNC Securities dengan jenis MTN adalah MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 Seri D sejumlah Rp. 50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Kupon Bunga 10.50% (sepuluh koma lima puluh persen), dan pada tanggal 26 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Perkara 52/PDT.SUS-PKPU/PN.JKT.PST.JO.NO.10/PDTSUS-PAILIT/2018/PN.JKT.PST, yang menyatakan PT SNP sebagai Pemohon PKPU, PAILIT dengan segala akibat hukumnya.
6. Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Penggugat: Carolin W Moku, Felix Meko, Wilhelmus Jakobus Meko, Zakarias Maximus Meko, Maria Lilyana Meko, Hendrikus Kilon Oba Meko, Wilfrida M.B.Meko, Wilfridus Yoseph Juan Meko, Tergugat : Bupati TTU, Bank NTT, Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional c.q Kepala Kantor Pertanahan BPN Provinsi NTT c.q Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Commercial Disputes in the Central Jakarta District Court, Debtor PT. Sunprima Nusantara Bank Creditors and MTN Winners One of them (PT East Nusa Tenggara Regional Development Bank), NTT Bank on March 22, 2018 Purchased PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. NSP) MTN from MNC Securities with MTN type VI MTN SNP Stage 1 Year 2018 Series D in the amount of Rp. 50,000,000,000 with a period of 2 years which will mature on March 23, 2020 with a Interest Coupon of 10.50% (ten point fifty percent), and on October 26, 2018 the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has issued a Decision with Number Case 52 / PDT.SUS-PKPU / PN.JKT.PST.JO.NO.10 / PDTSUS-PAILIT / 2018 / PN.JKT.PST, which states PT SNP as PKPU Applicant, PAILIT with all its legal consequences.
6. Civil Disputes in the District Court of Kefamenanu, Plaintiff: Carolin W Moku, Felix Meko, Wilhelmus Jakobus Meko, Zakarias Maximus Meko, Maria Lilyana Meko, Hendrikus Kilon Oba Meko, Wilfrida MBMeko, Wilfridus Yoseph Juan Meko, Defendant: Regent of TTU, Bank NTT, Accused of Defendants: Ministry of Agrarian and Spatial Planning of National Land Agency cq Head of BPN Land Office of NTT Province cq Head of BPN Land Office North Timor Tengah Regency.

## AKSES INFORMASI

### Information Access

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Perseroan senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan.

Ada tiga media yang digunakan oleh Bank NTT sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu media cetak, televisi dan radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan mencakup segala kegiatan Bank yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui dokumen cetakan yang berupa *Annual Report*, *Company Profile* dan Brosur.

Sementara melalui televisi dan radio, Bank NTT menyebarluaskan data dan informasi perusahaan dalam bentuk pemasangan adlips/spot radio dan info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.

### Aktivitas Media Relations

#### Siaran Pers dan Coverage Pemberitaan Bank NTT

Bank NTT senantiasa berusaha memberikan keterbukaan informasi melalui media massa, salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan adalah melalui siaran pers dimana selama tahun 2018 Bank NTT telah melakukan 2 (dua) kali siaran pers sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi keuangan maupun

In implementing the principles of accountability and transparency of company information, the Company always presents and publishes all information related to performance, change and development carried out.

There are three media used by Bank NTT as a means of distributing company data and information, namely print, television and radio. Regarding print media, the NTT Bank disseminates information to the public in the form of news and financial report publications. The news disseminated includes all Bank activities that need to be known by the public. In addition, Bank NTT also distributes company data and information through printed documents in the form of Annual Reports, Company Profiles and Brochures.

While through television and radio, Bank NTT disseminated company data and information in the form of adlips / spot radio and Bank NTT info. This cooperation is one form of corporate accountability and transparency to stakeholders.

### Media Relations Activities

#### Press Releases and Coverage of Bank NTT News

NTT Bank always strives to provide information disclosure through mass media, one form of information disclosure that is carried out is through press releases where during 2018 Bank NTT has conducted 2 (two) press releases as a form of information disclosure to the public related to financial conditions and important information others that are

informasi penting lainnya yang dianggap penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Berikut adalah daftar siaran pers yang disampaikan oleh Bank NTT sepanjang tahun 2018 :

considered important to be formulated to the public. The following is a list of press releases submitted by NTT Bank throughout 2018:

REKAPAN SIARAN PERS TAHUN 2018 PRESS RELEASE RECORDING IN 2018		
No	Tanggal Date	Materi Siaran Pers Press Release Material
1	03 Januari 2018	Kinerja Keuangan Tahun Buku 2017 Financial Performance for Book Year 2017
2	22 September 2018	Launching CMS dan Program Cash Back Launching CMS and Cash Back Program

Sepanjang tahun 2018, Bank NTT mendapat jumlah pemberitaan sebanyak 207 kali, pemberitaan melalui media cetak sebanyak 170 kali dan pemberitahuan melalui media online sebanyak 37 kali dengan rincian sebagai berikut :

Throughout 2018, the NTT Bank received 207 news reports, reporting through print media 170 times and notification through online media 37 times with the following details:

COVERAGE PEMBERITAAN BANK NTT TAHUN 2017 COVERAGE OF INFORMATION ON BANK NTT 2017				
Pemberitahuan Notification	Positif Positive	Negatif Negative	Netral Neutral	Total Total
Media Cetak Print media	110	26	34	170
Media Online Online media	31	2	4	37
Total	141	28	38	207

### Media Gathering Dan Media Visit

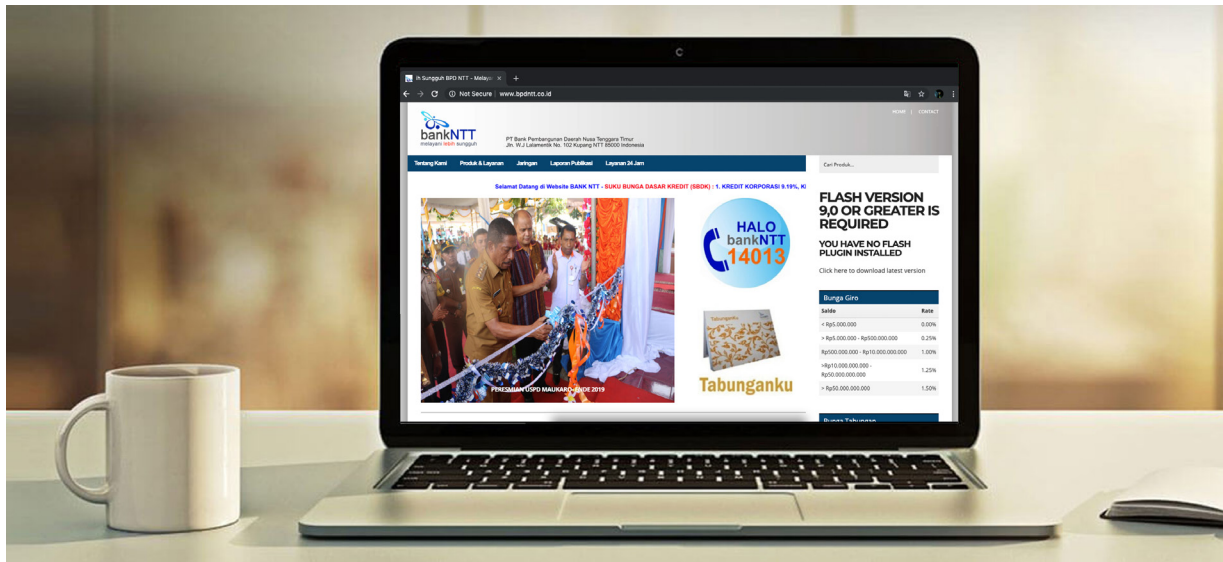
Dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara Bank NTT dengan media masa, maka Bank NTT juga melakukan aktivitas media gathering maupun media visit.

### Media Gathering and Media Visit

In order to improve good relations between Bank NTT and mass media, Bank NTT also conducts media gathering and media visits.

## Aktivitas Keterbukaan Informasi Via Website, Media Jejaring Sosial dan Call Center

## Activities of Information Disclosure Via Website, Social Network Media and Call Center



Keterbukaan informasi mendapat perhatian khusus dari Manajemen Bank sebagaimana yang diamanatkan melalui peraturan Bank Indonesia No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Keuangan Bank Umum Konvensional.

Keterbukaan terhadap hal ini, khususnya dalam menyampaikan sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat di website Bank NTT maka Bank NTT telah membuat website yang khusus mengelola sejumlah informasi penting yang perlu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Pengelolaan website Bank NTT dengan alamat : [www.bpdntt.co.id](http://www.bpdntt.co.id).

Information disclosure has received special attention from Bank Management as mandated through Bank Indonesia Regulation No. 6 / POJK.03 / 2015 dated 31 March 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports as well as Financial Services Authority Circular Letter No.11 / POJK.03 / 2015 dated 17 April 2015 concerning Transparency and Financial Publication of Conventional Commercial Banks.

Openness to this matter, especially in submitting a number of reports and other important information that must be posted on the Bank NTT website, Bank NTT has created a website that specifically manages a number of important information that needs to be publicly disclosed to the public. [.bpdntt.co.id](http://www.bpdntt.co.id).

Adapun jenis laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan melalui website, adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
3. Laporan Publikasi Tahunan.
4. Laporan Tahunan
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
6. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.
  
7. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk dapat memberikan keterbukaan informasi yang baik maka Bank NTT senantiasa melakukan pengembangan dan penambahan fitur akses informasi pada website. Bank NTT juga memperhatikan serta prioritas pengkinian data sehingga informasi masyarakat senantiasa mendapatkan informasi yang ter update.

## **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.**

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan risk appetite sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Risk Toleransi pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 92 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang Kebijakan Penetapan Limit dan Toleransi Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait terus dilakukan dengan langkah melakukan review atas

The types of reports and other information that must be submitted through the website are as follows:

1. Monthly Published Financial Report.
2. Quarterly Published Financial Reports.
3. Annual Publication Report.
4. Annual Report
5. Corporate Governance Implementation Report.
6. Publication of the Basic Credit Interest Rate Report.
7. Information Disclosure Report to Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.

To be able to provide good information disclosure, Bank NTT always develops and adds information access features on the website. The NTT Bank also pays attention to the priority of updating data so that public information always gets updated information.

## **Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds.**

In determining the direction and policy of the Bank in providing funds, the Bank has determined the risk appetite as stated in the Bank Business Plan and Risk Tolerance in the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 58 of 2013 dated June 28, 2013 concerning Limit and Tolerance Determination Policies Risk of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

Efforts to improve and improve policies to provide funds to related parties continue to be carried out by conducting a review of the LLL policy and procedures,

kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK, sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah telah dibentuk Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Kredit Bermasalah. Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank NTT selama tahun 2018 :

while to reduce the rate of growth of non-performing loans a Special Task Force for Settlement of Non-performing Loans has been formed. The table below explains the provision of funds to parties related and individual and group debtors at Bank NTT during 2018:

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Jumlah	
		Debitur Debitur	Nominal Nominal
1	Kepada Pihak Berelasi Kepada Pihak Berelasi	35	18.839
2	Kepada Debitur Inti Kepada Debitur Inti	25	551.541
3	Individual Individual	24	536.077
4	Group Group	1	21.463



# RENCANA STRATEGIS BANK

## Bank Strategic Plan

### Rencana Jangka Pendek Tahun 2018

Beberapa target jangka pendek yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan Market Share Dana Ketiga (DPK) :
  - a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai
    - 1) DPK Minimal 10.78%.
    - 2) Target Market Share DPK 33% .
  - b. Strategi yang dilakukan :
    - 1) Peningkatan penghimpunan dana ketiga (DPK) melalui strategi cross selling, aliansi produk dan kerjasama BUMN,BUMD, Pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya.
    - 2) Evaluasi dan penguatan produk eksisting untuk meningkatkan produk eksiting untuk meningkatkan product value dalam rangka peningkatan dana pihak ketiga untuk segmen nasabah bisnis.
2. Peningkatan penyaluran Kredit dan perbaikan kualitas kredit
  - a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai :
    - 1) Penyaluran kredit minimal tumbuh 9%
    - 2) Market share kredit total minimal 33%
    - 3) Pertumbuhan kredit produktif minimal 11.03%
    - 4) Penagihan kredit macet minimal 20%
    - 5) Rasio NPL turun mencapai maksimal 2.70%
  - b. Strategi yang dilakukan :
    - 1) Meningkatkan penyaluran kredit untuk konsumen dan produktif
    - 2) Meningkatkan penagihan dan fokus pada perbaikan kredit bermasalah

### Short Term Plan for 2018

Some short-term targets that are of concern in business development in 2018 are:

1. Increased Third Fund Market Share (DPK):
  - a. Indicator of success that must be achieved
    - 1) Minimum DPK is 10.78%.
    - 2) DPK Target Market Share 33%.
  - b. Strategy carried out:
    - 1) Increased third fund collection (DPK) through cross selling strategies, product alliances and cooperation between BUMN, BUMD, Government, educational institutions and other private institutions.
    - 2) Evaluation and strengthening of existing products to increase existing products to increase product value in order to increase third party funds for the business customer segment.
2. Increasing credit distribution and improving credit quality
  - a. Indicators of success that must be achieved:
    - 1) Minimum credit distribution grows 9%
    - 2) Market share total credit of at least 33%
    - 3) Productive credit growth of at least 11.03%
    - 4) Bad credit collection of at least 20%
    - 5) The NPL ratio drops to a maximum of 2.70%
  - b. Strategy carried out:
    - 1) Increase lending to consumers and productive
    - 2) Increase billing and focus on improving problem loans

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3) Fokus pada ekspansi kredit yang berkualitas dengan memperhatikan asas prudential banking</p> <p>4) Meningkatkan penyaluran kredit UMKM &amp; KUR yang prudential</p> <p>5) Skim kredit baru antara lain : SKBDN, perhotelan, komersil, transportasi, pembangkit listrik, profesi, hotel, Mikrohydro, Program JARING.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>3) Focus on quality credit expansion by paying attention to the prudential banking principle</p> <p>4) Increase prudential MSME &amp; KUR lending</p> <p>5.) New credit schemes include: SKBDN, hotels, commercial, transportation, power plants, professions, hotels, Mikrohydro, JARING Program.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3. Peningkatan permodalan</p> <p>a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai<br/>Pertumbuhan setoran modal minimal 11.55% .</p> <p>b. Strategy yang dilakukan adalah :<br/>Meningkat sonalisasi bagi para pemegang saham dalam rangka peningkatan modal disetor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>3. Increased capital</p> <p>a. Indicator of success that must be achieved<br/>Growth of capital deposits at a minimum of 11.55%.</p> <p>b. The strategy undertaken is:<br/>Increased sonalization for shareholders in the context of increased paid-in capital.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4. Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan, internal control</p> <p>a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan kualitas GCG bank</li> <li>2) Peringkat profil risiko bank = 2</li> <li>3) Kepatutan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal</li> <li>4) Pencegahan terjadinya fraud</li> </ol> <p>b. Strategy yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan kualitas tata kelola GCG.</li> <li>2) Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan pengelolaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.</li> <li>3) Peningkatan peran audit internal sebagai strategic business partner dalam rangka melakukan audit atas aktivitas operasional bank</li> </ol> | <p>4. Increased Risk Management, Compliance, external control</p> <p>a. Indicator of success that must be achieved</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Improvement of bank GCG quality</li> <li>2) Ranking of bank risk profiles = 2</li> <li>3) Bank compliance with internal and external provisions</li> <li>4)Prevention of fraud</li> </ol> <p>b. The strategy undertaken is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Improved quality of GCG management.</li> <li>2) Development and management of risk management policies and procedures and management of risk management policies and procedures.</li> <li>3) Increased role of internal audit as a strategic business partner in order to conduct an audit of bank operational activities</li> </ol> |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan.</p> <p>5) Memastikan produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>4) Realizing the implementation of a culture of compliance.</p> <p>5) Ensure products and bank operations in accordance with applicable regulations.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>5. Pengembangan produk dan jasa perbankan</p> <p>a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai :<br/>Peningkatan layanan jasa perbankan dan treasury</p> <p>b. Strategy yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerbitan instrument surat berharga obligasi berkelanjutan dengan nilai Rp. 500 miliar.</li> <li>2) Peningkatan transaksi <i>remittance, trade finance and services</i></li> <li>3) Peningkatan penjualan produk pasar modal ; transaksi reksadana.</li> <li>4) Pengembangan <i>delivery channel</i> untuk peningkatan layanan transaksi <i>e-banking</i> bagi nasabah.</li> <li>5) Optimalisasi <i>instrument capital market, forex dan derivatif</i>.</li> </ol> | <p>5. Development of banking products and services</p> <p>a. Indicators of success that must be achieved:<br/>Increased banking and treasury services</p> <p>b. The strategy undertaken is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Issuance of securities for sustainable bonds with a value of Rp. 500 billion.</li> <li>2) Increased remittance transactions, trade finance and services</li> <li>3) Increased sales of capital market products; mutual fund transactions.</li> <li>4) Development of delivery channels for improving e-banking transaction services for customers.</li> <li>5) Optimization of capital market, forex and derivative instruments.</li> </ol> |
| <p>6. Bidang Perencanaan Strategis (<i>strategic planning</i>)</p> <p>a. Indikator keberhasilan yang harus dicapai :<br/>Target program transformasi</p> <p>b. Strategy yang dilakukan adalah :<br/>Proses penyelesaian <i>corporate plan</i> dan pembentukan <i>corporate culture</i> serta penunjukkan unit yang membidangi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>6. Field of Strategic Planning (<i>strategic planning</i>)</p> <p>a. Indicators of success that must be achieved:<br/>Target transformation program</p> <p>b The strategy undertaken is:<br/>Corporate plan completion process and corporate culture formation and appointment of units in charge</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Rencana Jangka Menengah Tahun 2018

Beberapa target jangka menengah yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 adalah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan Market share Dana Pihak Ketiga (DPK) ;
  - a. Alasan Pemilihan Target
    - 1) Tetap meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) melalui strategi cross selling, aliansi produk dan kerjasama BUMN, BUMD, Pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya.
    - 2) Evaluasi dan penguatan produk dana pihak ketiga melalui pengembangan produk dan fitur baru dibidang dana.
    - 3) Diversifikasi dan inovasi pengembangan produk di bidang dana.
  - b. Asumsi
    - 1) Meningkatkan target DPK minimal tumbuh 10% – 15% pertahun
    - 2) Menjaga dan mempertahankan market share DPK minimal tumbuh 30% - 33% pertahun
2. Peningkatan kualitas dan penyaluran kredit
  - a. Alasan Pemilihan Target
    - 1) Meningkatkan penyaluran kredit untuk konsumen dan produktif
    - 2) Meningkatkan penagihan dan fokus pada perbaikan kredit bermasalah melalui peningkatan penagihan kredit bermasalah.
    - 3) Fokus pada ekspansi kredit yang berkualitas dengan memperhatikan asas prudential banking

## Medium Term Plan for 2018

Some of the medium-term targets that are of concern in business development in 2018 are:

1. Maintaining and increasing the Market Share of Third Party Funds (TPF);
  - a. Reasons for Selecting Targets
    - 1) Continue to increase third party funds (DPK) through a cross selling strategy, product alliances and cooperation between BUMN, BUMD, Government, education institutions and other private institutions.
    - 2) Evaluation and strengthening of third party fund products through product development and new features in the field of funds.
    - 3) Diversification and innovation of product development in the field of funding.
  - b. Assumption
    - 1) Increase the target of TPF at a minimum of 10% - 15% per year
    - 2) Maintaining and maintaining a DPK market share at a minimum of 30% - 33% per year
2. Improving the quality and distribution of credit
  - a. Reasons for Selecting Targets
    - 1) Increase lending to consumers and productive
    - 2) Increase billing and focus on improving non-performing loans through increasing non-performing loans.
    - 3) Focus on quality credit expansion by paying attention to prudential banking principles

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4) Memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit program baik secara langsung maupun melalui lembaga linkage dengan pola channeling.</p> <p>5) Meningkatkan penyaluran kredit produktif skala UMKR &amp; KUR .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>4) Expand and improve program lending both directly and through linkage institutions with channeling patterns.</p> <p>5) Increasing productive credit distribution at the UMKR &amp; KUR scale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3. Pemenuhan kebutuhan permodalan</p> <p>a. Alasan Pemilihan Target</p> <p>1) Terus meningkatkan sosialisasi bagi para pemegang saham untuk terus melakukan penyetoran modal</p> <p>2) Persiapan penerbitan Saham Seri B.</p> <p>b. Asumsi</p> <p>Pertumbuhan setoran modal minimal 10 – 15 % per tahun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>3. Meeting capital requirements</p> <p>a. Reasons for Selecting Targets</p> <p>1) Continuously increasing socialization for shareholders to continue making capital payments</p> <p>2) Preparation of Series B Shares issuance.</p> <p>b. Assumption</p> <p>Growth of capital deposits at a minimum of 10-15% per year</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4. Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal control</p> <p>a. Alasan pemilihan target</p> <p>1) Perbaikan kualitas tata kelola/ GCG</p> <p>2) Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko .</p> <p>3) Peningkatan peran audit internal sebagai strategic business partner dalam rangka melakukan audit atas aktivitas operasional bank.</p> <p>4) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan</p> <p>5) Memastikan produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Asumsi</p> <p>1) Perbaikan kualitas GCG bank</p> <p>2) Peringkat profil risiko bank = 2</p> <p>3) Kepatutan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal.</p> | <p>4. Increased Risk Management, Compliance, Internal control</p> <p>a. Reason for choosing a target</p> <p>1) Improved governance / GCG quality</p> <p>2) Development and management of risk management policies and procedures.</p> <p>3) Increased role of internal audit as a strategic business partner in order to conduct an audit of bank operational activities.</p> <p>4)Realizing the implementation of a culture of compliance</p> <p>5) Ensure products and bank operations in accordance with applicable regulations</p> <p>b. Assumption</p> <p>1) Improvement of bank GCG quality</p> <p>2) Ranking of bank risk profiles = 2</p> <p>3) Bank compliance with internal and external provisions.</p> |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4) Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.</li> <li>5) Pencegahan terjadinya fraud</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Completion of follow-up findings of internal and external audits.</li> <li>. Prevention of fraud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>5. Pengembangan produk dan jasa perbankan</p> <p>a. Alasan pemilihan target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan transaksi <i>remittance trade finance and services</i></li> <li>2) Peningkatan penjualan produk Pasar modal; reksadana</li> <li>3) Pengembangan <i>delivery channel</i> Bank NTT untuk peningkatan layanan transaksi <i>e-Banking</i> bagi nasabah.</li> <li>4) Optimalisasi <i>instrument capital market, forex dan derivative</i>.</li> <li>5) Memperluas dan mengembangkan network serta kerjasama dengan bank koresponden maupun financial institution non-bank untuk mendukung pengembangan bisnis bank</li> <li>6) Penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp. 1 triliun yang secara bertahap dimulai tahun 2018 sebesar Rp. 500 miliar</li> <li>7) Instrument surat berharga lainnya seperti NCD/MTN/produk pasar ,odal lainnya.</li> </ul> <p>b. Asumsi :</p> <p>Peningkatan layanan jasa perbankan dan treasury</p> | <p>5. Development of banking products and services</p> <p>a. Reason for choosing a target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Increased remittance transactions in trade finance and services</li> <li>2) Increased sales of capital market products; mutual funds</li> <li>3) Development of Bank NTT's delivery channel for improving e-Banking transaction services for customers.</li> <li>4) Optimization of capital market, forex and derivative instruments</li> <li>5) Expand and develop networks and collaborate with correspondent banks and non-bank financial institutions to support bank business development</li> <li>6) Issuance of sustainable bonds of Rp. 1 trillion which gradually began in 2018 amounting to Rp. 500 billion</li> <li>7) Other securities instruments such as NCD / MTN / market products, other goods.</li> </ul> <p>b. Assumption :</p> <p>Increased banking and treasury services</p> |

## Program Kerja Divisi 2018

1. **Program Kerja Divisi Dana dan Jasa :**
  - a. Pencapaian target Dana Pihak Ketiga minimal sebesar 10.78% di tahun 2018.
  - b. Program kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah

## 2018 Division Work Program

1. **Fund and Service Division Work Program:**
  - a. Minimum target for Third Party Funds is 10.78% in 2018.
  - b. Partnership programs and increased collaboration with the Central Government

- Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, individu serta dana yang bersumber dari masyarakat lainnya.
- c. Form riset pasar dan survey pemasaran dalam rangka pengembangan strategi pemasaran dana.
  - d. Program marketing mix untuk penghimpunan dana melalui promosi produk dan kegiatan promosi lainnya.
  - e. Pemeliharaan Nasabah / Maintenance nasabah, termasuk gathering masing-masing cabang.
  - f. Mengembangkan dan meningkatkan jumlah pemakaian EDC dan melakukan monitoring dan pengendalian berbasis Teknologi Informasi.
  - g. Evaluasi dan Integrated Monitoring di setiap kantor cabang.
  - h. Diklat, Workshop, seminar bagi pejabat dan Team Marketing Funding dibidang Dana & Jasa

## 2. Program Kerja Divisi Treasury

- a. Program transaksi di Dealing Room, transaksi di pasar uang dan pasar modal yang pengakuannya dalam surat berharga yang disimpan sampai jatuh tempo (HTM), *Available For Sale* (AFS) maupun Trading.
- b. Penerbitan Obligasi berkelanjutan Bank NTT senilai Rp. 500 miliar.
- c. Program transaksi Reksadana.
- d. Pengelolaan money changer di 4 (empat) kantor yakni ; Cabang Labuan Bajo, Ende, Atambua dan Rote Ndao.
- e. Pembukaan Kas Titipan Bank Indonesia di Kantor Cabang Labuan Bajo dan Sabu.
- f. Studi banding pelaksanaan kegiatan kliring pada BPD atau Bank Lain.

/ Regional Governments, BUMNs, BUMDs, national private companies, individuals and other community-based funds.

- c. Market research form and marketing survey in order to develop a fund marketing strategy.
- d. Marketing mix program for raising funds through product promotion and other promotional activities.
- e. Customer Maintenance / Customer Maintenance, including gathering of each branch.
- f. Develop and increase the amount of EDC usage and conduct Information Technology based monitoring and control.
- g. Evaluation and Integrated Monitoring in each branch office.
- h. Diklat, Workshops, seminars for officials and Marketing Funding Team in the field of Funds & Services

## 2. Treasury Division Work Program

- a. Transaction program at the Dealing Room, money market and capital market transactions in which securities are held to maturity (HTM), *Available For Sale* (AFS) and Trading.
- b. Issuance of Bank NTT sustainable bonds worth Rp. 500 billion.
- c. Mutual Fund transaction program.
- d. Management of money changers in 4 (four) offices namely; Branches of Labuan Bajo, Ende, Atambua and Rote Ndao.
- e. Opening of Cash for Bank Indonesia Deposits at the Labuan Bajo and Sabu Branch Offices.
- f. Comparative study on the implementation of clearing activities at the BPD or Other Banks.

- g. Penyelesaian selisih rekonsiliasi antar Bank terkait rekening Koran asset sales (BJB dan CIMB) bersama Divisi Pemasaran Kredit dan Divisi Pengawasan
- h. Optimalisasi program Bank Penyalur Gaji/Cash Management (dihimbau kepada setiap kantor cabang untuk mensosialisasikan program tersebut pada dinas-dinas vertikal setempat).
- i. Program pencairan SP2D on Line dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), kerja sama dengan BPKP Pusat / Cash Management.
- j. Pengkinian dan Penyelarasan SOP sesuai dengan perkembangan regulasi.
- k. Pembuatan Aplikasi untuk pengisian LHBU Form 403, 301, 101.
- l. Program Diklat/Workshop/In House Training yang disesuaikan dengan program kerja Divisi Treasury, antara lain : Sertifikasi Dealler, Sertifikasi BSMR dan program peningkatan skill & knowledge, magang, studi banding, dll dapat disesuaikan dengan program pengembangan dari Divisi SDM.

### 3. Program Kerja Divisi Pemasaran Kredit

- a. Peningkatan pembiayaan Mikro dan Kecil termasuk didalamnya pelaksanaan program KUR dan KUM
- b. Pembinaan kepada Kelompok debitur UKM dan Mikro untuk meningkatkan kualitas usaha dan kualitas system administrasi keuangan.
- c. Kerjasama dengan NGO untuk pembinaan debitur mikro.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam keikutsertaan dalam program-program Pemerintah.

- g. Settlement of interbank reconciliation differences regarding asset sales newspaper accounts (BJB and CIMB) with the Credit Marketing Division and Supervision Division
- h. Optimization of the Bank Salary / Cash Management channel program (encouraged by each branch office to disseminate the program to local vertical agencies).
- i. SP2D on Line disbursement program with the application of the Regional Financial Management System (SIMDA), in collaboration with the Central BPKP / Cash Management
- j. Updating and Alignment of SOPs in accordance with developments in regulations.
- k. Making applications for charging LHBU Form 403, 301, 101.
- l. Diklat / Workshop / In House Training Program tailored to the Treasury Division work program, among others: Certification Dealler, BSMR Certification and skills & knowledge improvement programs, internships, comparative studies, etc. can be adjusted to the development program of the HR Division.

### 3. Credit Marketing Division Work Program

- a. Increasing Micro and Small financing includes the implementation of the KUR and KUM programs
- b. Guidance to debtors of UKM and Micro to improve business quality and quality of the financial administration system.
- c. Collaboration with NGOs to foster micro debtors.
- d. Increase cooperation with the Central and Regional Governments in participating in Government programs.



- e. Gathering bersama para Stakeholders dan Shareholders di setiap Kantor Cabang.
- f. Menambah jumlah kerjasama dengan BPR dan lembaga keuangan Mikro.
- g. Meningkatkan volume kredit linkage dengan BPR dan lembaga keuangan mikro. Peningkatan kompetensi perkreditan bagi pejabat pemutus kredit.
- h. Peningkatan kompetensi analis kredit.
- i. Kerjasama dengan asosiasi pengusaha.
- j. Monitoring dan evaluasi atas kredit eksisting.
- k. Penyelesaian selisih rekonsiliasi antar Bank terkait rekening Koran asset sales (Bank Jabar Banten dan Bank CIMB) bersama Divisi Pengawasan.

#### 4. Program Kerja Divisi Supporting Kredit

- a. Pengembangan modul pembahasan kredit seperti ; Kredit Multiguna, Kredit KPR, Kredit Produktif Komersil.
- b. Kerjasama dengan akuntan publik dan perusahaan appraisal.
- c. Pelatihan Appraisal.
- d. Implementasi Aplikasi penjualan jaminan.
- e. Pelatihan dan Refreshing Analis Kredit.
- f. Supervisi pada cabang.
- g. Pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan kredit bermasalah.
- h. Program promo bunga kredit, program Member get Member, program kredit multiguna plus dan program undian kredit konsumsi

#### 5. Program Kerja Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

- a. Kerjasama dengan media : *marketing communication* ( materi, produk & jasa) dan *corporate communication* : ucapan selamat,

- e. Gathering with Stakeholders and Shareholders at each Branch Office.
- f. Increase the amount of collaboration with BPR and Micro financial institutions.
- g. Increase linkage credit volume with BPRs and microfinance institutions. Increasing credit competency for credit breakers.
- h. Increasing the competence of credit analysts.
- i. Collaboration with business associations.
- j. Monitoring and evaluation of existing loans.
- k. Settlement of interbank reconciliation differences related to asset sales newspaper accounts (BJB and CIMB) with the Supervision Division.

#### 4. Supporting Credit Division Work Program

- a. Development of credit discussion modules such as; Multipurpose Loans, Mortgage Loans, Commercial Productive Loans.
- b. Collaboration with public accountants and appraisal companies.
- c. Appraisal Training.
- d. Implementation of collateral sales application.
- e. Training and Refreshing Credit Analysts.
- f. Supervision on branches.
- g. Education and training in the field of handling non-performing loans.
- h. Program for credit interest promotion, Member get Member program, plus multipurpose credit program and consumer credit lottery program

#### 5. Work Program Planning & Corporate Secretary Division

- a. Cooperation with the media: marketing communication (material, products & services) and corporate communication: congratulations,

- pengumuman & advertorial dan *corporate communication* : *Press Conference*.
- b. Pelaksanaan program literasi keuangan : sosialisasi inklusi & literasi keuangan.
  - c. Penyusunan buku pedoman kehumasan antara lain : korespondensi & kesekretariatan (Buku I) serta pengkinian pedoman CSR (Buku II).
  - d. Penerbitan majalah internal.
  - e. Melanjutkan program kerja & anggaran CSR.
  - f. Diklat dan sertifikasi kehumasan & CSR.
  - g. Pelatihan dan ujian calon advokat pada lembaga PERADI/KAI atau lembaga sejenis lainnya.
  - h. Program kerjasama penasehat hukum.
  - i. Sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
  - j. Sosialisasi modus-modus operandi kejahatan perbankan bagi teller dan *customer Service*.
  - k. Penyusunan pedoman alternatif penyelesaian sengketa perbankan.
  - l. RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.
  - m. RUPS LB (Pemilihan Pengurus).
  - n. RUPS LB (Penetapan Pengurus).
  - o. Pembenahan dan Pengelolaan Arsip.
  - p. Penyempurnaan struktur organisasi.
  - q. Pembentukan Change Management Office (CMO).
  - r. Penyusunan Corporate Plan Bank NTT dan pembentukan *corporate culture*.
  - s. Pengklasifikasian Kelas Cabang.
  - t. Survey & Pembukaan Jaringan Kantor.
  - u. Pedoman penyusunan dan Implementasi RBB.
  - v. Program pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan antara lain: sertifikasi bidang perencanaan strategis & anggaran, Pendidikan

- announcements & advertorials and corporate communication: *Press Conference*.
- b. Implementation of financial literacy programs: socialization of inclusion & financial literacy.
  - c. Compilation of public relations manuals including: correspondence & secretariat (Book I) and updating CSR guidelines (Book II).
  - d. Issuance of internal magazines.
  - e. Continuing CSR work programs & budgets.
  - f. Training and public relations & CSR certification.
  - g. Training and examinations of prospective advocates at PERADI / KAI institutions or other similar institutions.
  - h. Program of legal counsel cooperation.
  - i. Certification of procurement of goods and services.
  - j. Socialization of the modus operandi of banking crimes for tellers and customer service.
  - k. Preparation of alternative guidelines for banking dispute resolution.
  - l. Annual 2017 Annual GMS.
  - m. LB GMS (Management Election).
  - n. RUPS LB (Management Board).
  - o. Improvement and Management of Archives.
  - p. Improvement of organizational structure.
  - q. Establishment of a Change Management Office (CMO).
  - r. Preparation of Bank NTT's Corporate Plan and the establishment of corporate culture.
  - s. Class Classification.
  - t. Office Network Survey & Opening.
  - u. Guidelines for the preparation and implementation of RBB.
  - v. Education and training programs in the field of planning include: strategic planning & budget certification, corporate planning education,

corporate planning, budgeting & jaringan kantor serta pendidikan dan pelatihan lainnya.

Di bidang kearsipan antara lain pendidikan dan pelatihan kearsipan, pendidikan dan pelatihan legal anti fraud, pelatihan dan pendidikan penyelesaian sengketa hukum pajak dan pelatihan legal lainnya serta pelatihan di bidang kehumasan.

## 6. Program Kerja Divisi Operasional

- a. Perbaiki Aplikasi Perhitungan Bunga
- b. Implementasi Pinpad.
- c. Pembangunan Data Warehouse
- d. Evaluasi Perjanjian Kerja Sama, Evaluasi *Corebanking System* & Evaluasi Blueprint
- e. Penambahan fitur-fitur baru E-banking Support.
- f. Implementasi Cash Management System.
- g. Pendidikan PSAK 71
- h. Perubahan Blanko Bilyet Deposito & Penyesuaian Menu Frontline
- i. Evaluasi dan Penyesuaian SOP yang berkaitan dengan Layanan, Front Office, dll.
- j. Mengupdate email nasabah (Layanan Rekening Koran via Email)
- k. Pelayanan nasabah untuk mutasi bisnis (Tabungan tanpa Buku)
- l. Penerbitan Kartu Identitas bagi nasabah yang tidak bisa tandatangan (pelayanan nasabah aksara)
- m. Sertifikasi manajemen risiko sesuai kewenangan level
- n. Mengikuti workshop PSAK 71 yang diadakan oleh OJK maupun pihak luar
- o. In house training perpajakan untuk seluruh cabang.

budgeting & office networks and other education and training.

In the field of archives, among others, archival education and training, legal anti-fraud education and training, training and education on tax law dispute resolution and other legal training and training in the public relations field.

## 6. Operational Division Work Program

- a. Improved Interest Calculation Application
- b. Pinpad Implementation.
- c. Construction of a Data Warehouse
- d. Evaluation of Cooperation Agreements, *Corebanking System* Evaluation & Blueprint Evaluation
- e. Add new E-banking Support features.
- f. Implementation of the Cash Management System.
- g. Education PSAK 71
- h. Changes to the Bilyet Deposit Form & Frontline Menu Adjustments
- i. SOP Evaluation and Adjustment relating to Services, Front Office, etc.
- j. Updating customer email (Email Account Service)
- k. Customer service for business transfers (Savings without Books)
- l. Issuance of Identity Cards for customers who cannot sign (customer service)
- m. Risk management certification according to level authority
- n. Following the workshop on PSAK 71 held by the OJK and outside parties
- o. Tax in house training for all branches.

p. Mengikuti workshop pelaporan LBU, Slik & LKPBU yang diadakan oleh Bank Indonesia

## 7. Program Kerja Divisi Umum

- a. Pembangunan Gedung :
  - 1) Pembangunan KC. Waitabula / Sumba Barat Daya
  - 2) Pembangunan KC. Rote Ndao
  - 3) Melanjutkan Pembangunan KC. Kalabahi
  - 4) Pembangunan KC. Borong
- b. Pembelian Tanah :
  - 1) KC. Rote Ndao
  - 2) KC. Mbay
  - 3) KC. Borong
  - 4) KC. Betun
  - 5) KCP. Takari
- c. Renovasi banking hall KCK dan Ruang Layanan Bisnis GLB Dana & Kredit.
- d. Pengadaan Genset untuk Kantor Cabang dan Capem yang belum memiliki genset standar
- e. Pembentukan tim lintas divisi untuk penyesuaian ketentuan pengadaan barang & jasa.
- f. Pengadaan Interior dan Furnitur Gedung Kantor Cabang
- g. Renovasi dan pengadaan furniture ruangan Divisi
- h. Pengadaan 5 (lima) unit mobil kas keliling
- i. Pengadaan kartu ATM berbasis CHIP
- j. Pengadaan mesin Encode Cek, BG dan Warkat Kliring
- k. Diklat dibidang umum

p. Following a workshop on reporting LBU, Slik & LKPBU held by Bank Indonesia

## 7. General Division Work Program

- a. Building Construction:
  - 1) Development of KC. Waitabula / Sumba Barat Daya
  - 2) Development of KC. Rote Ndao
  - 3) Continuing Development K C. Kalabahi
  - 4) Development of KC. Borong
- b. Land Purchases:
  - 1) KC. Rote Ndao
  - 2) KC. Mbay
  - 3) KC. Borong
  - 4) KC. Betun
  - 5) KCP. Takari
- c. KCK banking hall renovation and GLB Dana & Credit Business Room.
- d. Genset Procurement for Branch Offices and Branches that do not yet have a standard generator
- e. Establishment of a cross-division team to adjust provisions for the procurement of goods & services.
- f. Procurement of Interior and Branch Office Furniture
- g. Renovation and procurement of room furniture in the Division
- h. Procurement of 5 (five) mobile cash units
- i. Procurement of CHIP-based ATM cards
- j. Procurement of Encode Check, BG and Clearing Items
- k. Training in the general field

## 8. Program Kerja Divisi Informasi dan Teknologi

- a. Pengembangan fitur-fitur layanan EDC, Pinpad, ATM dan Mobile Banking (SMS bulk, App mobile banking di apple store),
- b. Pengembangan Aplikasi berbasis teknologi chip (NSICCS).
- c. Pengembangan aplikasi sesuai regulasi Bank Indonesia & OJK.
- d. Pengembangan Hardware & Software.
- e. Supporting Program Kerja Divisi berbasis IT.
- f. Program Diklat Bidang IT.
- g. Pengembangan dan Sertifikasi jaringan (SSL), sertikasi ArtaJasa, Finnet, GSP dan MPN
- h. Pengembangan aplikasi Bansos Non Tunai
- i. Pengembangan aplikasi teller QR code
- j. Aplikasi Fiesta Point Bank NTT

## 9. Program Kerja Divisi Kualitas Layanan dan Produk

- a. Pelaksanaan Program Promosi Bank NTT (undian berhadiah, expo, pameran dan event promosi lainnya), penyediaan barang serta materi promosi.
- b. Program Service Excellence Award Bank NTT.
- c. Program Pengukuran Kualitas Layanan.
- d. Pendidikan dan Pelatihan :
  - 1) Strategi efektif dalam bidang promosi.
  - 2) Service excellence.
  - 3) Penanganan pengaduan nasabah

## 10. Program Kerja Divisi Manajemen Risiko

- a. Penerapan penilaian profil risiko cabang secara sistem. (program lanjutan / penyempurnaan).
- b. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko Loss Event Database (LED) pada risk taking unit. (program lanjutan / penyempurnaan).

## 8. Work Program for Information and Technology Division

- a. Development of EDC, Pinpad, ATM and Mobile Banking service features (bulk SMS, mobile banking App at Apple Store),
- b. Chip technology-based application development (NSICCS).
- c. Application development in accordance with Bank Indonesia & OJK regulations.
- d. Hardware & Software Development.
- e. Supporting the IT-based Division Work Program.
- f. IT Training Program.
- g. Network development and certification (SSL), certification of ArtaJasa, Finnet, GSP and MPN
- h. Development of Non-Cash Bansos application
- i. Development of a teller QR code application
- j. Bank NTT Fiesta Point application

## 9. Service and Product Quality Division Division Work Program

- a. Implementation of the Bank NTT Promotion Program (prizes, expos, exhibitions and other promotional events), the provision of goods and promotional materials.
- b. NTT Bank Award Service Excellence Program.
- c. Service Quality Measurement Program.
- d. Education and Training:
  - 1) Effective strategy in the field of promotion.
  - 2) Service excellence.
  - 3) Handling customer complaints

## 10. Risk Management Division Work Program

- a. System implementation of branch risk profile assessment. (advanced program / improvement).
- b. Development of the Loss Event Database (LED) risk management information system at the risk taking unit. (advanced program / improvement).

- c. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko, aplikasi penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Program pendidikan dan pelatihan pada bidang manajemen risiko dan sosialisasi/evaluasi ke cabang-cabang.
- e. Mereview SOP, ketentuan, kebijakan bidang manajemen risiko sesuai regulasi terbaru dengan melakukan studi banding pada bank-bank yang sudah bagus penerapan manajemen risikonya.

**11. Program Kerja Divisi Kepatuhan :**

- a. Membudayakan budaya kepatuhan pada seluruh unit kerja melalui program sosialisasi pemantauan dan compliance award (Gerakan Patuh).
- b. Memastikan secara langsung ke lokasi untuk menguji kebenaran hasil study kelayakan atas usulan perluasan sebuah jaringan kantor sebelum diterbitkannya compliance checklist.
- c. Menilai setiap rencana keputusan atau rancangan kebijakan untuk memastikan bahwa rencana keputusan/rancangan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari PBI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Merekomendasikan atau Berkoordinasi dengan Divisi-Divisi terkait melakukan review dan menyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan external yang berlaku.
- e. Sosialisasi masing-masing cabang dengan materi peraturan terkait dengan APU & PPT dan Kejahatan Perbankan terkini sesuai topik FKDKP.

- c. Development of a risk management information system, an application to assess the soundness of the bank in accordance with applicable regulations.
- d. Education and training programs in the field of risk management and socialization / evaluation to branches.
- e. Reviewing SOPs, provisions, risk management policies in accordance with the latest regulations by conducting comparative studies on banks that have good risk management implementation.

**11. Compliance Division Work Program:**

- a. Cultivating a compliance culture for all work units through a monitoring and compliance award socialization program.
- b. Ensure directly to the location to test the correctness of the results of the feasibility study on the proposed expansion of an office network before the issuance of compliance checklist.
- c. Assessing any planned decisions or draft policies to ensure that the planned decision / draft policy does not deviate from the PBI and the applicable legislation.
- d. Recommend or Coordinate with the relevant Divisions to review and improve the policies, provisions, systems and procedures that are owned by the Bank so that they are in accordance with the applicable external regulations.
- e. Dissemination of each branch with the latest regulatory material related to AML & CFT and Banking Crimes according to the FKDKP topic.

- f. Membuat dan melaporkan laporan kepada:
  - 1) OJK : Laporan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan, Laporan Khusus.
  - 2) PPATK : Laporan TKM, Laporan TKT dan Laporan Sipesat.
  - 3) Direktur Utama.
- g. Divisi Kepatuhan Mengikuti Sertifikasi kepatuhan Level I dan II yang diselenggarakan oleh LSPP Bekerja sama dengan FKDKP.
- h. Divisi Kepatuhan Mengikuti sosialisasi ketentuan eksternal dan diklat (BI, OJK, PPATK, KPK, Lembaga pemerintahan lainnya dan badan atau/ Lembaga lain yang representative dengan ketentuan perbankan).
- i. Melakukan koordinasi dengan divisi SDM tentang penyelenggaraan diklat:
  1. Program APU & PPT.
  2. Pencegahan KKN diperbankan.
  3. Upaya-Upaya dan langkah-langkah Mewujudkan Budaya Patuh.
  4. Manajemen Kepatuhan Bank.
- j. Berkoordinasi dengan FKDKP melalui Diklat yang diselenggarakan untuk memperoleh topik terkini dalam kejahatan perbankan terutama berkaitan dengan Penerapan Program APU & PPT.
- k. Peningkatan Aplikasi Olibs untuk penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme. penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme.

## 12. Program Kerja Divisi Pengawasan / SKAI

- a. Spot Audit Divisi Pengawasan & SKAI untuk Kantor Cabang dan Kantor Pusat Tahun Buku 2018

- f. Make and report reports to:
  - 1) OJK: Task Implementation Report and Compliance Director function, Special Report.
  - 2) PPATK: TKM Report, TKT Report and Sipesat Report.
  - 3) President Director.
- g. Compliance Division Following the Level I and II compliance certifications held by LSPP in collaboration with FKDKP.
- h. Compliance Division Participates in the socialization of external and training provisions (BI, OJK, PPATK, KPK, other government institutions and other agencies or institutions that are representative of banking provisions).
- i. Coordinating with the HR division about organizing training:
  1. AML & PPT Program.
  2. Prevention of KKN is promoted.
  3. Efforts and steps to realize a Compliant Culture.
  4. Bank Compliance Management.
- j. Coordinating with FKDKP through Diklat which was held to obtain the latest topics in banking crimes, especially related to the Implementation of the AML & PPT Program.
- k. Olibs Application Improvement for the implementation of Anti Money Laundering and Prevention of terrorism funding programs. implementation of Anti Money Laundering and Prevention of terrorism funding programs.

## 12. Work Program of the Supervision / SKAI Division

- a. Spot Audit Division of Supervision & SKAI for Branch Offices and Headquarters for 2018 Book Year

- b. Audit SKNBI dan BI-RTGS
- c. Pelaksanaan Zero Defect Program oleh Internal Auditor dan Audit Bulanan Kantor Cabang
- d. Evaluasi Kinerja Internal Auditor setiap triwulanan
- e. Program Sertifikasi Auditor Internal :
  1. Sertifikasi Internal Auditor (QIA) tingkat Managerial untuk 3 orang
  2. Sertifikasi Internal Auditor (QIA) tingkat Dasar untuk Auditor baru
  3. Sertifikasi Anti Fraud (CFrA) untuk 3 orang
- f. Diklat dibidang Audit Lainnya diantaranya bidang Treasury, IT, Kredit dan Pengadaan Barang Jasa untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas audit, dll
- g. Sosialisasi Strategi Anti Fraud di Kantor Cabang/ Capem
- h. Pengadaan Aplikasi Audit IT
- i. Penyelesaian selisih rekonsiliasi antar Bank Kredit terkait rekening Koran asset sales (BJB dan CIMB) bersama dengan Divisi Treasury dan Divisi Pemasaran Kredit.

### 13. Program pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Program review carier path, standarisasi pendidikan berjenjang dan mekanisme pemenuhan jabatan melalui proses Assessment Center.
- b. Program pengaturan kembali kewenangan middle management.
- c. Grading system & remunerasi pegawai.
- d. Job Analysis.
- e. Pengkinian Pedoman SDM.
- f. Penetapan KPI Individual.

- b. Audit of SKNBI and BI-RTGS
- c. Implementation of Zero Defect Program by the Internal Auditor and Monthly Audit of Branch Offices
- d. Evaluation of Internal Auditor Performance every quarter
- e. Internal Auditor Certification Program:
  1. Managerial Internal Auditor (QIA) certification for 3 people
  2. Basic level Internal Auditor (QIA) Certification for new Auditors
  3. Anti Fraud Certification (CFrA) for 3 people
- f. Training in Other Audit fields including Treasury, ITU, Credit and Procurement of Goods Services to be able to support the implementation of audit tasks, etc.
- g. Dissemination of Anti-Fraud Strategies at Branch Offices / Branch Offices
- h. Procurement of IT Audit Applications
- i. Completion of the difference between Bank Credit reconciliation related to asset sales newspaper accounts (BJB and CIMB) together with the Treasury Division and Credit Marketing Division.

### 13. NTT Bank's Human Resources Development Program 2018 as follows:

- a. Program for reviewing path search, standardization of tiered education and mechanism for fulfilling positions through the Assessment Center process.
- b. Program for reorganizing middle management authority.
- c. Grading system & employee remuneration.
- d. Job Analysis.
- e. Updating HR Guidelines.
- f. Determination of Individual KPIs.



- g. Mekanisme penilaian kinerja melalui lembaga Personal Committee Cabang & Personal Committee Pusat.
- h. Penggantian Human Resources Information System (HRIS).
- i. Penerimaan pegawai untuk unit kerja baru tahun 2018.
- j. Pendidikan untuk meningkatkan selling skill & negotiation skill sesuai kebutuhan bisnis unit.
- k. Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang potensi pasar, pengetahuan manajemen pemasaran bank, pengembangan ekonomi wilayah, pendidikan Executive Development Program (EDP), Management Development Program (MDP) dan Staff Development Program (SDP).
- l. Sertifikasi keahlian (Sumber Daya Manusia, Internal Auditor / Qualified Internal Auditor, Fraud Examiner, Risk Management dan Compliance, Credit Analyst, IT System Analyst, Programmer, IT Sec-Admin, Certificate *Corporate Social Responsibility*, Credit Appraisal).

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para Stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

- g. Mechanism of performance assessment through the agency's Personal Committee & Central Personal Committee.
- h. Replacement of the Human Resources Information System (HRIS).
- i. Employee acceptance for new work units in 2018.
- j. Education to increase selling skills & negotiation skills according to the business needs of the unit.
- k. Education to increase knowledge about market potential, knowledge of bank marketing management, regional economic development, education in the Executive Development Program (EDP), Management Development Program (MDP) and Staff Development Program (SDP).
- l. Certification of expertise (Human Resources, Internal Auditor / Qualified Internal Auditor, Fraud Examiner, Risk Management and Compliance, Credit Analyst, IT System Analyst, Programmer, IT Admin, Certificate of Corporate Social Responsibility, Credit Appraisal).

## Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions

The Bank has made transparency on financial and non-financial conditions for stakeholders including publication financial reports and has submitted the report to related parties such as Bank Indonesia and stakeholders according to applicable regulations.

The Bank has prepared and presented financial and non-financial reports in a manner, type and scope as stipulated in the Bank Indonesia Regulation concerning Transparency of Bank Financial Conditions.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Umum;
2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu
3. Bank telah menyampaikan Laporan Tata Kelola tahun 2018 kepada Otoritas jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada Home Page Bank NTT;
4. Bank telah menyusun Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) termasuk melakukan implementasi kepada seluruh Cabang dan Cabang Pembantu;
5. Penyempurnaan sistem PMN didalam Sistem Bank Vision Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi;
6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang;
7. Bank telah melakukan pengkinian data nasabah;

## **Kepemilikan Saham dan Shares Option**

Untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2018, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi NTT.

The forms of submission of information on the Bank's financial and non-financial conditions are as follows:

1. The Bank's Annual Report has been prepared and presented in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning Transparency of Financial Conditions for Commercial Banks;
2. The Bank has published the Annual Report and Published Financial Reports in a timely manner
3. The Bank has submitted the 2018 Governance Report to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and independent parties in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and presented at the Bank NTT Home Page;
4. The Bank has compiled a Guidelines for the Application of Anti Money Laundering (APU) including the implementation of all Branches and Sub-Branches;
5. Improvement of the PMN system in Bank NTT's Bank Vision System by adding 3 (three) new menus for transaction monitoring;
6. The Bank has socialized the Application of Know Your Customer Principles and Anti Money Laundering;
7. The Bank has updated customer data;

## **Share Ownership and Shares Option**

For the period up to December 31, 2018, members of the Board of Commissioners and Directors of NTT Bank do not have shares in NTT Bank, other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other Companies domiciled both inside and outside the NTT Province.

Selama periode tahun pelaporan 2018 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Hubungan Keuangan

- a. Komisaris Utama Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi NTT.
- b. Anggota Dewan Komisaris Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank;
- c. Seluruh anggota Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

During the 2018 reporting year, the NTT Bank did not have an option to buy shares by members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers carried out through stock offers or stock option offers in order to provide compensation given to members of the Board of Commissioners, Directors and Bank Executive Officers.

Financial Relations and Family Relations of Members of the Board of Commissioners and Directors

1. Financial Relations

- a. The President Commissioner of Bank NTT directly has a financial relationship with the Bank's Controlling Shareholders because at this time the position in question is as the Head of the Revenue Agency and Regional Asset Finance Manager of NTT Province.
- b. The members of the Board of Commissioners of Bank NTT are Independent Commissioners who do not have financial relations with other Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders and from Companies whose Controlling Shareholders are the other Board of Commissioners and / or Bank Directors;
- c. All members of the Bank NTT Board of Directors do not have financial relations in terms of receiving income, financial assistance, or loans from the Bank's Controlling Shareholders.

2. Family Relations

The Board of Commissioners and Directors of Bank NTT do not have family relationships up to the second degree among members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

## Penyimpangan Internal

Pada dasarnya bank menerapkan "Zero tolerance untuk tindakan fraud" dan bank tidak mentolerir kejadian fraud khususnya yang dilakukan oleh pihak Internal Bank.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat maka adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal pelaporan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan kategori fraud yang dianggap signifikan oleh Bank adalah :

1. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pejabat eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.
2. Jika kejadian fraud berdampak kepada kerugian financial untuk nasabah sebagai akibat perbuatan oknum internal bank, berapapun nilai kerugian dari kejadian fraud yang dilakukan.
3. Jika kejadian fraud memiliki dampak pada aktifitas operasional Bank, reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian publik, terutama jenis fraud merupakan tipibank.
4. Jika kejadian fraud diduga melibatkan pihak eksternal Bank baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank tanpa bantuan internal bank. Secara tidak langsung berarti bahwa kejadian fraud dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan melibatkan atau dibantu oleh pihak internal bank.

## Internal Deviations

Basically, banks apply "Zero tolerance for fraud" and banks do not tolerate fraud, especially those carried out by the Internal Bank.

As a financial institution those who have the main business as providers of financial services to the community are very important things for banks to maintain the reputation and trust of the public.

In the case of reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority, the Bank determines the category of fraud considered significant by the Bank:

1. If a fraud incident is suspected to involve executive officers and the Bank's Directors because Executive Officers and Directors are the bank's business controllers and have authority in decision making, regardless of the value of the loss from the fraud committed.
2. If the fraud incident affects the financial loss for the customer as a result of the bank's internal actions, regardless of the value of the loss from the fraud committed.
3. If the fraud incident has an impact on the Bank's operational activities, the Bank's reputation and potentially public attention, especially the type of fraud is a type of fraud.
4. If the incident of fraud is suspected to involve the external party of the Bank both directly and indirectly. Directly means that the incident of fraud is carried out by an external bank without internal bank assistance. Indirectly means that the fraud incident is carried out by an external bank by involving or assisted by an internal bank.

5. Untuk kejadian internal fraud yang hanya berdampak pada kerugian Bank tanpa melibatkan pihak eksternal dan tanpa merugikan nasabah atau pihak yang terkait dengan bank, dengan nilai nominal di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan internal terhadap kategori fraud maka selama tahun 2018 terjadi 1 (satu) kali penyimpangan internal yang memenuhi kriteria di atas yang dilaporkan sebagai temuan ke Otoritas Jasa Keuangan yakni Penipuan transaksi pengiriman uang milik nasabah Bank NTT Capem Baun an. PT. BPR TLM/Robert P. Fanggihdae oleh pihak eksternal dengan mengaku sebagai pemilik rekening.

### Strategi Mempertahankan Loan to Deposit Ratio

Strategi mempertahankan Loan Deposit Ratio (LDR) sepanjang tahun buku 2018

1. Mempertahankan rasio LDR sesuai target sebesar 112.18 %
2. Untuk Posisi LDR periode 31 Desember 2018 sebesar 115.28 % dimana rasio LDR melewati batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Meningkatkan penyaluran dana melalui pemberian kredit yang sehat.
4. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga sehingga dapat mendukung penyaluran kredit atau ekspansi bisnis bank.

5. For internal fraud events that only have an impact on the Bank's losses without involving external parties and without harming customers or parties related to the bank, with a nominal value above Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).

Based on internal provisions on the fraud category, then during 2018 there were 1 (one) time internal irregularities that fulfilled the above criteria which were reported as findings to the Financial Services Authority, namely Fraud of money transfer transactions belonging to Baun's Bank NTTCapem customers. PT.BPR TLM / Robert P.Fanggihdae by external parties claiming to be account holders.

### Strategy to Maintain Loan Deposit Ratio

Strategy to maintain Loan Deposit Ratio (LDR) throughout the 2018 financial year

1. Maintaining the LDR ratio according to the target of 112.18%
2. For the LDR position for the period 31 December 2018 amounting to 115.28% where the LDR ratio exceeds the tolerance limit set by Bank Indonesia;
3. Increase the distribution of funds through the provision of healthy loans.
4. Increase the collection of third party funds so that it can support credit channeling or bank business expansion.

## Strategi Pemenuhan Giro Wajib Minimum

1. Pemenuhan GWM Primer selama tahun 2018 berpatokan pada ketentuan regulator yaitu sebesar 6.72% dari rata-rata Dana Pihak Ketiga 2 (dua) minggu sebelumnya dipakai untuk 1 (satu) minggu kedepan, sementara kebijakan untuk mencadangkan kelebihan dana sebesar Rp.3 Miliar untuk mitigasi risiko likuiditas dan GWM Primer setiap hari;
2. Pemenuhan GWM sekunder selama tahun 2018, maka dengan mengacu pada PBI No.15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 dan Surat Edaran No.15/41/DKMP tanggal 01 Oktober 2013 tentang penambahan Kewajiban Prosentase menjadi 4%. Untuk pemenuhannya diperhitungkan dari Penempatan Antar Bank.
3. Pemenuhan GWM sekunder melalui Instrument Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang dibeli dari Bank Indonesia yang besarnya diambil dari rata-rata Dana Pihak Ketiga 2 (dua) minggu sebelumnya yang dipakai untuk 1 (satu) minggu kedepan.
4. Tenor dan Maturity dari masing-masing SBI/SBN/SDBI berbeda, maka telah diperhitungkan dengan cadangan kelebihan/excess reserve dan mengikuti lelang dengan range rate yang ditentukan Bank Indonesia sebelum tanggal jatuh tempo masing-masing SBI/SBN/SDBI.

## Buy Back Obligasi Bank

Obligasi I Bank NTT seri D sebesar Rp. 135 miliar telah Jatuh Tempo pada tanggal 08 Juli 2018, dan pada tanggal 26 Desember 2018 Bank telah menerbitkan Obligasi (lanjutan) pada Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

## Strategy for Compliance with Minimum Requirements

1. Fulfillment of Primary Statutory Reserves during 2018 based on regulatory provisions, which amounted to 6.72% of the average Third Party Funds 2 (two) weeks previously used for the next 1 (one) week, while policies to reserve excess funds amounting to Rp.3 billion for mitigation liquidity risk and Primary GWM every day;
2. Fulfillment of secondary GWM during 2018, by referring to PBI No.15 / 7 / PBI / 2013 dated 26 September 2013 and Circular Letter No.15 / 41 / DKMP dated 1 October 2013 concerning the addition of Percentage Obligations to 4%. The fulfillment is calculated from Interbank Placement.
3. Fulfillment of secondary GWM through Bank Indonesia Certificate Instruments, Government Securities, Bank Indonesia Deposit Certificates purchased from Bank Indonesia, the amount of which is taken from the average Third Party Fund 2 (two) weeks previously used for the next 1 (one) week.
4. The tenor and maturity of each SBI / SBN / SDBI is different, then it has been calculated with excess reserves and participating in the auction with a range rate determined by Bank Indonesia before the maturity date of each SBI / SBN / SDBI.

## Bank Bond Buy Back

Series D Bank NTT Bond I amounting to Rp. 135 billion has expired on July 8, 2018, and on December 26, 2018 the Bank has issued bonds (continued) on the Indonesia Stock Exchange with the following

- √ Seri B dengan nilai nominal Rp. 155.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10.5 % per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tiga tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.
- √ Seri C dengan nilai nominal Rp.80.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10.75% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan, jangka waktu selama lima tahun sampai dengan 21 Desember 2023.
- √ Seri D dengan nilai nominal Rp.37.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 11% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan, jangka waktu selama tujuh tahun sampai dengan 21 Desember 2025. Untuk penerbitan Obligasi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui dan tertuang di dalam Akta Berita acara RUPS.
- √ Series B with a nominal value of Rp. 155,000,000,000, remember the fixed interest rate of 10.5% per year which is paid every three months, a period of three years up to December 21, 2021.
- √ C Series C with a nominal value of Rp.80,000,000,000, remember the fixed interest rate of 10.75% per year which is paid every 3 months, a period of five years up to December 21, 2023.
- √ D Series D with a nominal value of Rp.37,000,000,000, remember the fixed interest rate of 11% per year which is paid every 3 months, a period of seven years up to December 21, 2025. For the issuance of these Bonds, the General Meeting of Shareholders has agreed and stated in the Deed of Minutes of the GMS.

# PEDOMAN PERILAKU

## Code of Conduct

### Pernyataan Etika Bisnis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman perilaku (*code of conduct*) untuk menunjang implementasi Tata Kelola pada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan.

Keberadaan *Code Of Conduct* ditujukan antara lain untuk menerapkan nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan serta menerapkan secara rinci standar perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank NTT dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.

*Code of Conduct* merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan.

Pedoman ini juga merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh manajemen di Perusahaan.

### Isi Kode Etik

Isi Kode Etik/perilaku Karyawan Bank NTT

1. Sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bekerja dan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab kerja keras);
2. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset mitra utama melalui pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.
3. Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya bank yang sehat dan dinamis;

### Statement of Business Ethics

In carrying out its business activities, Bank NTT always encourages the implementation of a code of conduct to support the implementation of Governance in all Management and Employees.

The existence of the Code of Conduct is aimed at, among others, applying the values of the Company into employee behavior and business ethics in accordance with the objectives of the Company as well as implementing detailed behavioral standards that must be demonstrated by all Bank NTT personnel in conducting the Company's business activities.

Code of Conduct is a guideline for individual companies in carrying out company activities in accordance with the expected culture.

This guideline is also a company's business ethics and values that govern how to manage a company in achieving its vision, mission and goals. The Code of Conduct applies to all management in the Company.

### Code of Conduct

Fill in the Code of Ethics / behavior of Bank NTT Employees

1. As a form of faith and piety to God Almighty (working and full of honesty, discipline, hard work responsibilities);
2. Placing every customer as the main partner asset through fast, accurate, safe, and pleasant service for the realization of real customer satisfaction.
3. Realizing HR professionalism in accordance with their respective existence to support the realization of a healthy and dynamic bank;



4. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut dalam bisnis perbankan ini;
5. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang.
6. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berpikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
7. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
8. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan bank secara keseluruhan.
9. Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

### **Sosialisasi dan Pelaksanaan Pedoman Perilaku**

Sosialisasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan melalui proses internalisasi berkala yang diikuti oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh tingkat organisasi yang ada.

Selain sosialisasi, Bank NTT menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang termaksud dalam Kebijakan Perusahaan.

4. Develop entrepreneurial attitude, innovation, creativity and a proactive attitude in carrying out each of their respective job duties and keep away from bureaucratic attitudes as the attitude demanded in this banking business;
5. Placing the performance and quality of the results of individual and group work in order to improve the performance of the bank as a basis for improving employee welfare optimally in a balanced manner.
6. Increase the attitude of positive openness, constructive thinking, broad insights, togetherness, harmony, mutual respect, for the realization of cooperation and a healthy working atmosphere.
7. Increasing caring and responsiveness and early addressing problems that arise in work, which are based on the spirit of togetherness and upholding the interests of the company.
8. Prioritizing the attitude of hard work, diligence and high discipline to realize the performance of the self, the unit and the bank as a whole.
9. Enhancing the bank's image through orderly, neat and timely attitude and behavior, not breaking promises and upholding good social ethics as banking people, ashamed of committing acts that are not commendable.

### **Dissemination and Implementation of the Code of Conduct**

The socialization of Bank NTT's behavioral guidelines was carried out through a periodic process that was attended by all Bank NTT employees from all levels of the existing organization.

In addition to socialization, Bank NTT implements ethical standards in conducting all business activities based on the principles of Governance referred to in Company Policy.

Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

Bank NTT juga melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, Kantor Cabang serta pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Tata Kelola.

Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

## Implementasi Etika Bisnis Perusahaan

Etika bisnis diterapkan mengacu pada kebijakan perusahaan dimana dalam penerapannya Manajemen selalu mengingatkan kembali kepada Karyawan terkait tata nilai dan etika bisnis melalui survei kepada seluruh Karyawan yang di dalamnya memuat kuesioner dan studi kasus terkait pemahaman Tata Kelola, Etika Bisnis, Pakta Integritas, Fraud, Manajemen Risiko, *Whistleblowing*, Pelarangan Gratifikasi, *IT Governance*, Menjaga Keamanan Informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan.

All work units at the Head Office and Branch Offices are required to disseminate Work Ethics to maintain honesty, integrity and fairness in all business activities in their respective work environments.

The NTT Bank also prohibits all levels of the Board of Commissioners, Directors, all work units, Branch Offices and parties involved in conducting transactions that are contrary to the law and principles of Governance.

Bank NTT applies a supervisory function to use audits based on correct and generally accepted principles and always strives for violations of applicable norms and regulations to be subject to sanctions in accordance with the provisions, both administrative and legal. Each work unit is obliged to always follow up on any audit findings submitted by the supervisory function.

## Implementation of the Company's Business Ethics

Business ethics is applied in reference to company policies where in its implementation Management always reminds employees of values and business ethics through surveys to all Employees which includes questionnaires and case studies related to understanding Governance, Business Ethics, Integrity Pact, Fraud, Risk Management, Whistleblowing, Prohibition of Gratification, IT Governance, Maintaining Information Security and other matters relating to corporate governance practices.

Survei dilakukan secara off line dengan menyebarkan kuesioner yang diakhiri dengan pengungkapan persetujuan Karyawan untuk bersedia menjalankan etika bisnis perusahaan.

Metode ini dipandang lebih efektif dan lebih mudah diterapkan untuk dapat menjangkau seluruh Karyawan di seluruh lokasi kerja.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian, Manajemen memberlakukan dua kali survei dalam setahun kepada karyawan yang pekerjaannya sangat dekat dengan risiko pelanggaran, hal ini berbeda dengan karyawan umum yang hanya melakukan survei sekali dalam setahun.

Berdasarkan hasil survei etika bisnis yang dilaksanakan pada tahun 2017, diperoleh potret tingkat pemahaman etika bisnis oleh karyawan dalam ruang lingkup Bank NTT sangat baik.

**Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi**  
Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik sekaligus mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing.

Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance*, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

The survey was conducted off line by distributing questionnaires which ended with the disclosure of employee's approval to be willing to carry out the company's business ethics.

This method is seen as more effective and easier to implement to reach all employees in all work locations.

Regarding the precautionary principle, Management applies two surveys a year to employees whose work is very close to the risk of violations, this is different from general employees who only conduct surveys once a year.

Based on the results of a business ethics survey conducted in 2017, a portrait of the level of understanding of business ethics by employees in the scope of Bank NTT was obtained very well.

**Enforcement of the Code of Ethics and Types of Sanctions**

The Bank always encourages every employee to always adhere to the Code of Ethics while at the same time reminding each other to work with focus, professionalism and ethics in their respective spheres.

In terms of efforts to enforce the Code of Ethics, the Bank determines and regulates it in the Decree of the Directors of PT. Bank NTT Number: 30 of 2006 concerning Determination of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, while for improving the quality of service to customers, the company has Service Quality SOP as well as companies issuing Operational Service Standard Books that must be owned by every NTT Bank employee.

Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri. Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran lisan yang dituangkan dalam coaching form
- b. Surat peringatan
- c. Denda dan atau ganti kerugian
- d. Demosi
- e. Surat pembebasan tugas sementara
- f. Skorsing
- g. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materil, seperti korupsi atau fraud.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM.

Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat

If there is a violation of the Code of Ethics by employees, the Bank may provide sanctions by paying attention to the errors that occur as well as the impact of losses arising in a reputable and material manner as well as the efforts of violators to improve themselves. The form of sanction given is in the form of:

- a. Oral rebuke set forth in the coaching form
- b. Warning letter
- c. fines and or compensation
- d. Demotion
- e. Temporary assignment release letter
- f. Suspension
- g. Work termination

In addition to the form above, sanctions for violating the Code of Ethics can also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments or employee promotion. Legal actions will be given if violations are considered material, such as corruption or fraud.

Sanctions for violators of the Code of Ethics and the parties responsible will be decided based on HR decisions.

The Code of Ethics will always be refined or harmonized according to the conditions of the company and the condition of the community

## Laporan Penegakan Kode Etik Tahun 2018

## Ethics Code Enforcement Report for 2018

No	Unit Kerja Work Unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Sanksi	SK Punishment SK Punishment
1.	Bank NTT Kantor Kas Bupati Ende Bank NTT Cash Office of Ende Regent,	Fraud berupa pengambilan uang dari rekening tabungan nasabah an. Linus Rengga pada Bank NTT Cabang Ende (Kantor Kas Bupati Ende) Fraud in the form of withdrawing money from a customer's savings account. Linus Rengga at Bank NTT Ende Branch (Regent of Ende Cash Office)	3	1.Pemberhentian tidak dengan hormat, an Kiky Nur Ardila Saora. <i>non-honorable Dismissal, for Kiky Nur Ardila Saora.</i>  2.Pernyataan Tidak Puasan an. Maria Avelina D.N.Kumi. <i>Dissatisfied Statement. for Maria Avelina D.N.Kumi.</i>  3. Surat Peringatan/SP 1 An. Weldefina sarlin <i>Warning Letter / SP 1 for Weldefina sarlin</i>	1. SK Nomor : 57/DIR/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.  2. SK. Nomor : 58/DIR/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.  3. SuratNo.324/DIR-DSM/VII/2018 tanggal 31 juli 2018.

No	Unit Kerja Work Unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Sanksi	SK Punishment SK Punishment
2	Bank NTT Kantor Capem Baun. <a href="#">Bank NTT Head of Baun Office.</a>	Penipuan transaksi pengiriman uang milik nasabah Bank NTT Capem Baun an. PT. BPR TLM/Robert P. Fanggidae oleh pihak eksternal dengan mengaku sebagai pemilik rekening <a href="#">Fraud of money transfer transactions belonging to Bank NTT Capem Baun customers. PT.BPR TLM / Robert P.Fanggidae by an external party claiming to be the owner of an account</a>	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peringatan Kedua/ SP II, an Roteharjo B. Amtiran. <a href="#">S e c o n d Commemoration / SP II, for Roteharjo B. Amtiran.</a></li> <li>2. Peringatan Ketiga/ Terakhir an. Oktovianus D.Doka Oka <a href="#">Third / Last Warning Oktovianus for D.Doka Oka</a></li> <li>3. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Rosalinda Cicilya B.Mangikni <a href="#">First Warning / SP 1 for Rosalinda Cicilya B.Mangikni</a></li> <li>4. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Anita Funay <a href="#">First Warning / SP 1 for Anita Funay</a></li> <li>5. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Yosina S.Benu. <a href="#">First Warning / SP 1 for Yosina S.Benu.</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat No.538/ D S M / X / 2 0 1 8 , tanggal 10 Oktober 2018.</li> <li>2. Surat No.539/ DSM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018</li> <li>3. Surat No. 540/ DSM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018</li> <li>4. Surat No. 541/ DSM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018</li> <li>5. Surat No. 543/ DSM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018</li> </ol>

No	Unit Kerja Work Unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Sanksi	SK Punishment SK Punishment
3.	Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Iteng Bank NTT Iteng Branch Office	Pengaduan 13 debitur yang pelayanan kredit tidak sesuai dengan permohonan sehingga tidak menerima gaji sebagaimana mestinya. Complaints 13 debtors whose credit services are not in accordance with the application so that they do not receive the salary properly.	5	<p>1. Pernyataan Tidak Puas an. Calvano Atipati Dissatisfied Statement for Calvano Atipati</p> <p>2. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Yonas Agu First Warning / SP 1 for Yonas Agu</p> <p>3. Anwar</p> <p>4. Yohana Resildis</p> <p>5. Gabriela Fransiska Marta Janggal</p>	<p>1. SK. Nomor : 48 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2018</p> <p>2. Surat Nomor : 84 DSM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018</p> <p>3. Surat Nomor : 85/ DSM/II/2019 tanggal 12 Februari 2018</p> <p>4. SK. Nomor : 49 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018</p> <p>5. SK. Nomor : 50 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018</p>

No	Unit Kerja Work Unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Sanksi	SK Punishment SK Punishment
4.	Bank NTT C a b a n g P e m b a n t u Baun. Bank NTT Baun Auxiliary Branch.	P e r b u a t a n "Perselinguhan" antara Oknum WPCP Bank NTT KCP. Baun dengan Oknum Teller Bank NTT KCP.Baun "Complaint" between the WPCP Bank NTT KCP. Baun with NTT KCP Bank Teller Person. Year	4	1. Pemberhentian dari dan dalam jabatan sebagai Wakil Pemimpin Cabang Pembantu, an. Oktovianus D.Doka Oka. Dismissal from and in position as Deputy Assistant Branch Manager, for Oktovianus D.Doka Oka. 2. Peringatan Pertama / SP 1 an. Peri Jhon Nedy Charles Sine. First Warning / SP 1 an. Peri Jhon Nedy Charles Sine. 3. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Ingrid Sonyalia Manongga First Warning / SP 1 for Ingrid Sonyalia Manongga 4. Peringatan Pertama/ SP 1 an. Roteharjo B. Amtiran First Warning / SP 1 for Roteharjo B. Amtirann	1.SK. Nomor : 86 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 2. Surat Nomor : 471/DSM/IX/2018 tanggal 28 September 2018 3. Surat Nomor : 471/DSM/IX/2018 tanggal 28 September 2018 4. Surat Nomor : 473/DSM/ IX/2018 tanggal 28 September 2018



No	Unit Kerja Work Unit	Kasus Case	Jumlah Pihak yang Terlibat Number of Parties Involved	Sanksi Sanksi	SK Punishment SK Punishment
5.	Bank NTT Kantor Cabang Sabu. NTT Office Sabu.	Ketidakhadiran dan staff (Customer Service & Teller) dan penyalahgunaan oleh Head Teller <i>Absence of Leaders and staff (Customer Service &amp; Teller) and abuse by Head Teller</i>	2	1. Demosi an. Frits R.Dimu Heo <i>Demotion for Frits R.Dimu Heo</i>  2. Pernyataan Tidak Puan an. Apri Silvester Taga <i>Dissatisfied Statement for Apri Silvester Taga</i>  3. Pernyataan Tidak Puan an. Dessie Ratu Pa <i>Dissatisfied Statement for Dessie Ratu Pa</i>  4. Pernyataan Tidak Puan an. Rut Elisa Dimu <i>Dissatisfied Statement for Rut Elisa Dimu</i>  5. Pernyataan Tidak Puan an. Warda A.S. Rauf <i>Dissatisfied Statement for Warda A.S. Rauf</i>	1. SK. No. 60 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018  2. SK No.76 Tahun 2018 tanggal 06 September 2018  3. SK No.75 Tahun 2018 tanggal 06 September 2018  4. SK No.77 Tahun 2018 tanggal 06 September 2018  5. SK No.74 Tahun 2018 tanggal 06 September 2018

## Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

Bank NTT memiliki budaya perusahaan yang dijadikan landasan bagi setiap insan perusahaan. Budaya perusahaan atau *Corporate Culture* adalah sikap dan perilaku Bank, yang harus dicerminkan oleh sikap perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya (*the way we do things around here*).

Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dilingkungan Bank NTT.

## Statement concerning Corporate Culture

Bank NTT has a corporate culture that is the basis for every company person. Corporate culture or Corporate Culture is the attitude and behavior of the Bank, which must be reflected in the attitude of the employees in achieving their mission (*the way we do things around here*).

This attitude and behavior is a reflection of the assumptions, values and norms that exist in the Bank NTT environment.

**Tiga Pilar Budaya Perusahaan**  
Three Pillars of Corporate Culture

Pilar 1	Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan. <i>The integrity of the entire range of HR that is united in the direction of view and efforts to realize the vision, mission of the goals and objectives of the company.</i>
Pilar 2	Bank NTT yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, manajemen yang tangguh padu (persistem dan solid) <i>The NTT Bank that grows healthy and highly competitive and is based on the principle of prudence, public trust, solid management (persistem and solid)</i>
Pilar 3	Kepuasan pelanggan, kepuasan SDM dan kepuasan pemilik sebagai focus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal. <i>Customer satisfaction, HR satisfaction and owner satisfaction as the focus of the main objectives that are always sought to be optimized.</i>

**Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank**  
Nine Item Behavior Bank Corporate Culture

<p>Perilaku 1 : Fleksibel <i>Behavior 1 : Fleksibel</i></p> <p>Bekerja dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerja keras sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. <i>Working with full honesty, discipline, responsibility and hard work as a form of faith and piety to God Almighty.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus perilaku ini adalah pekerjaan pada Bank NTT yang harus diberi arti sebagai pengabdian kepada Tuhan sebagaimana dituntut oleh agama.</li> <li>2. Hasil yang diharapkan agar dapat mewujudkan keiklasan dalam bekerja menghasilkan kerja bermutu tinggi dan optimal.</li> <li>3. Perilaku yang dituntut adalah bahwa bekerja sebagai insan beragama.</li> </ol> <p><i>1. The focus of this behavior is work on the NTT Bank which must be given the meaning of devotion to God as demanded by religion.</i></p> <p><i>2. The results expected to be able to realize keiklasan in work produce high-quality and optimal work.</i></p> <p><i>3. The behavior demanded is that work as a religious person.</i></p>
<p>Perilaku 2 : Loyal <i>Behavior 2 : Loyal</i></p> <p>Menempatkan setiap nasabah sebagai aset paling berharga dengan melayani setiap nasabah secara cepat, akurat, aman, ramah, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata. <i>Putting each customer as the most valuable asset by serving each customer quickly, accurately, safely, pleasantly and pleasantly for the sake of actual customer satisfaction.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus sasaran perilaku ini ditujukan kepada nasabah.</li> <li>2. Hasil yang diharapkan kepuasan nasabah secara nyata dan optimal.</li> <li>3. Perilaku yang dituntut, selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan cara pelayanan cepat, akurat, ramah dan menyenangkan.</li> </ol> <p><i>1. The focus of this behavioral goal is directed at the customer.</i></p> <p><i>2. The expected results of customer satisfaction are real and optimal.</i></p> <p><i>3. Behavior that is demanded, always prioritizes customer satisfaction by means of fast, accurate, friendly and pleasant service.</i></p>

---

Perilaku 3 : Obyektif  
Behavior 3 : Objective

---

Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis.

To realize HR professionalism in accordance with their respective existence to support the realization of a healthy and dynamic Bank.

1. Fokus sasaran, perilaku ini ditujukan kepada perkembangan Bank NTT.
2. Hasil yang diharapkan, Bank NTT sehat dan dinamis.
3. Perilaku yang dituntut selalu menjunjung tinggi dan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Bank dengan menambah pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sebagainya.

1. The target focus, this behavior is aimed at the development of Bank NTT.
  2. Expected results, NTT Bank is healthy and dynamic.
  3. The behavior demanded always upholds and strives to make the best contribution to the progress of the Bank by increasing knowledge, skills, insights and so on
- 

Perilaku 4 : Bersaing  
Behavior 4 : Compete

---

Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap birokrasi.

Develop entrepreneurial, innovative, creative and proactive attitudes in carrying out each work assignment and keep away from bureaucratic attitudes.

1. Fokus sasaran, perilaku ini ditujukan agar Bank memperhatikan paradig kerjanya.
2. Hasil yang diharapkan, pegawai termotivasi untuk mengembangkan peranannya dengan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas, proaktif dan lebih berpartisipasi aktif dalam segenap hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

1. Target focus, this behavior is intended so that the Bank pays attention to its working paradigm.
  2. Expected results, employees are motivated to develop their role with entrepreneurship, innovation, creativity, proactivity and more active participation in all matters related to their respective duties.
- 

Perilaku 5 : Antisipatif  
Behavior 5: Anticipatory

---

Meningkatkan mutu kerja baik secara individual maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal dan berimbang.

Improving the quality of work both individually and in groups in order to improve the performance of the Bank as the basis for improving optimal and balanced employee welfare.

1. Fokus sasaran ditujukan untuk mutu hasil kerja
2. Hasil yang diharapkan, mutu hasil kerja yang selalu meningkat untuk tercapainya hasil usaha Bank NTT dan kesejahteraan pegawai.

3. Perilaku yang dituntut, selalu berusaha meningkatkan kinerja Bank melalui kinerja masing-masing melalui peningkatan mutu hasil kerja yang tinggi untuk tercapainya tujuan usaha Bank (keuntungan) dan tujuan pegawai (kesejahteraan) secara berimbang.

1. The target focus is aimed at the quality of work results.
  2. The expected results, the quality of work that is always increasing to achieve the results of Bank NTT's business and employee welfare.
  3. Demanded behavior, always striving to improve the performance of the Bank through their respective performance through improving the quality of work results that are high for the achievement of the Bank's business objectives (profits) and the goals of employees (welfare) in a balanced manner.
-

---

Perilaku 6 : Mamatuhi Ketentuan  
Behavior 6 : Comply with Provisions

---

Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berfikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat

Increase attitudes of positive openness, constructive thinking, broad insights, togetherness, harmony, mutual care and mutual respect, for the realization of cooperation and a healthy working atmosphere

1. Fokus perilaku ini adalah kerjasama dan hubungan antar pegawai.
  2. Hasil yang diharapkan kerjasama dan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif.
  3. Perilaku yang dituntut adalah selalu berusaha menciptakan keterbukaan, kebersamaan, kerukunan, saling menghargai sebagai acuan bagi terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
1. The focus of this behavior is cooperation and relationships between employees.
  2. Expected results of cooperation and a conducive working environment and atmosphere.
  3. The behavior demanded is always trying to create openness, togetherness, harmony, mutual respect as a reference for the realization of cooperation and a healthy working atmosphere.
- 

Perilaku 7 : Orientasi Bisnis  
Behavior 7 : Business Orientation

---

Meningkatkan kewaspadaan agar tetap mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan meningkatkan sikap

Increase awareness to keep anticipating the possibility of problems and improve attitudes

1. Fokus perilaku ini adalah bersikap preventif agar tidak terjadi masalah, sekaligus penyelesaian masalah yang timbul secara dini.
  2. Hasil yang diharapkan adalah pengembangan early warning sistim pada pemikiran pegawai serta tanggap terhadap masalah-masalah sehingga dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks.
  3. Perilaku yang dituntut adalah selalu bersikap awas, peduli dan tanggap terhadap risiko yang akan terjadi maupun masalah-masalah yang timbul secara dini dan memecahkannya secara bersama-sama.
1. The focus of this behavior is to be preventive so that problems do not occur, as well as solving problems that arise early.
  2. The expected results are the development of an early warning system on employee thinking and responsiveness to problems so that they can be addressed before they develop into complex problems.
  3. The behavior demanded is always being alert, caring and responsive to the risks that will occur and the problems that arise early and solve them together.
-

---

Perilaku 8 : Religius  
Behavior 8 : Religious

---

Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan Bank secara keseluruhan.  
Prioritize the attitude of hard work, diligence and high discipline to realize the performance of the self, the unit and the Bank as a whole.

1. Fokus perilaku ini adalah kinerja pegawai, unit dan Bank secara keseluruhan.
  2. Hasil yang diharapkan adalah pegawai berorientasi pada sasaran dan kinerja.
  3. Perilaku yang dituntut adalah perilaku-perilaku yang tidak terpaku pada proses kerja saja, tetapi kepada pencapaian hasil kerja melalui kedisiplinan, kejujuran, sikap rajin dan tekun serta kerja keras.
1. The focus of this behavior is the performance of employees, units and the Bank as a whole.
  2. The expected results are employees oriented towards goals and performance.
  3. The behavior demanded is behaviors that are not fixed on the work process, but on the achievement of work through discipline, honesty, diligent and diligent attitude and hard work.
- 

Perilaku 9 : Amanah  
Behavior 9 : Amanah

---

Meningkatkan citra Bank melalui penampilan simpatik yang tertib, rapih, tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.  
Improve the Bank's image through sympathetic appearance that is orderly, neat, timely, does not break promises and upholds good social ethics as a banking person, ashamed of committing acts that are not commendable.

1. Fokus perilaku ini adalah menjaga/meningkatkan citra Bank.
  2. Hasil yang diharapkan adalah bersikap tertib selalu tampil rapi, tepat waktu tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik.
1. The focus of this behavior is to maintain / enhance the image of the Bank.
  2. The expected result is that being orderly always looks neat, on time does not break promises and upholds good social ethics.
- 

## Strategi Implementasi Budaya Perusahaan

1. Top Down (Mengalir dari atas ke bawah)  
Perubahan yang ditunjukkan oleh manajer puncak dimana akan/harus diikuti oleh jajaran manajemen menengah dan berikutnya oleh tingkat manajemen tingkat bawah, selanjutnya oleh para pegawai lainnya

## Strategy for Implementing Corporate Culture

1. Top Down (Flowing from top to bottom)  
Changes shown by top managers which will / must be followed by middle management ranks and then by lower level management, then by other employees

2. Cases Methode ( memecahkan masalah-masalah)  
Diskusi pemecahan masalah pada intinya adalah memecahkan masalah yang ada secara dini sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks, sekaligus sebagai media mewujudkan mutu hasil kerja;

3. Strategi Perubahan Mutu Berdasarkan Yang Terfokus menurut prioritas (*Quality focused prioritas strategy*).

Strategi ini adalah berupa pemecahan masalah-masalah yang dibahas dan dipecahkan dengan memperhatikan prioritasnya.

4. Strategi Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Dalam Upaya perbaikan perilaku/mutu tidak boleh mengenal puas dengan dicapainya suatu tingkat perbaikan.

5. Strategi Pendekatan Insani (*Human Approach Strategy*)

Memperbaiki perilaku pegawai akan efektif dengan cara-cara yang manusiawi karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik terutama jika dipergunakan cara-cara yang baik.

2. Cases Meth (solving problems)

The problem solving discussion is essentially solving problems that exist early before developing into a complex problem, as well as a medium to realize the quality of work results;

3. Quality Change Strategy Based on Focused according to priorities (*Quality focused priority strategy*).

This strategy is in the form of solving problems that are discussed and solved by paying attention to their priorities.

4. Continuous Improvement Strategies.

In an effort to improve behavior / quality should not be familiar with the achievement of a level of improvement.

5. Human Approach Strategy (*Humaan Approach Strategy*)

Improving employee behavior will be effective in humane ways because basically everyone has the potential to change to a better state, especially if good methods are used.

## SKEMA BUDAYA PERUSAHAAN



## WHISTLEBLOWING SYSTEM

### Whistleblowing System

#### Whistleblowing System (WBS) di bank NTT

Dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* yang baik serta upaya pencegahan dan penanganan fraud yang dapat merugikan bank baik secara financial maupun non financial dan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen, bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum mekanisme pelaporan pengaduan (x) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, nomor : 60 Tahun 2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Guna mencegah terjadinya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT, maka secara continue dilakukan sosialisasi terkait pencegahan fraud dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali menandatangani Deklarasi Anti Fraud (Anti Fraud Statement).

#### Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System (WBS)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas tindakan fraud yang terjadi di bank NTT di tangani oleh Sub Divisi Anti Fraud yang berada pada Divisi Pengawasan & SKAI.

#### Whistleblowing System (WBS) in NTT bank

In order to create good *Good Corporate Governance* as well as efforts to prevent and handle fraud that can harm banks both financially and non financially and to ensure the effective implementation of mechanisms for resolving complaints of violations as well as efforts to disclose various issues that are not in accordance with the ethical standards applicable in Bank NTT carried out by individual employees and individual management, the NTT bank has issued a legal product whistleblowing system mechanism contained in the Decree of the Directors of the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, number: 60 Year 2012 dated June 7, 2012 concerning the Guidelines Anti Fraud Strategy of PT Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

In order to prevent fraud from being carried out by unscrupulous employees and NTT bank management members, socialization was carried out regarding fraud prevention and required all employees without exception to sign the Anti Fraud Statement.

#### Whistleblowing System (WBS) Handling Mechanism

Regarding the whistleblowing management mechanism, the implementation of prevention and handling of fraud actions that occur in the NTT bank is handled by the Anti Fraud Sub Division which is in the Supervision & Internal Audit Division.



Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat dipakai yaitu :

1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan :  
Direktur Utama/Dewan Komisaris bank NTT c.c.  
Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalametik No.  
102 Kota Kupang-NTT
2. Melalui hotline number : (0380) 840555-309/fax  
(0380) 840570.
3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor  
Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui staff  
Divisi Pengawasan & SKAI (Resident Inspector)  
pada masing-masing Kantor Cabang bank NTT  
untuk selanjutnya dilaporkan ke Divisi Pengawasan  
& SKAI untuk ditindak lanjuti.

### Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran

Terkait dengan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), Divisi Pengawasan & SKAI akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur yang ada di bank NTT yaitu :

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk menghindari terjadinya laporan pengaduan yang sifatnya fitnah.
2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dikategorikan fraud dilakukan oleh oknum karyawan, Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama. Jika laporan tersebut membutuhkan proses investigasi maka dengan persetujuan Direktur Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan melakukan proses investigasi.
3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan proses

The complaints reporting media that can be used are:

1. Officially express with the destination address:  
Managing Director / Board of Commissioners of  
NTT bank c.c. Supervision & IAU Division Jl. W.J.  
Lalametik No. 102 Kupang-NTT City
2. Through the hotline number: (0380) 840555-309  
/ fax (0380) 840570.
3. Reporting of complaints that occur at the NTT  
Bank Branch Office can be submitted through  
the staff of the Resident Inspector (Resident  
Inspector) at each of the NTT Bank Branch Offices  
to be subsequently reported to the Supervision &  
SKAI Division for follow-up.

### Procedure for Follow-Up Complaints of Violations

Related to whistleblowing systems, the Supervision & SKAI Division will follow up according to the procedures in NTT banks, namely:

1. Verify the truth of the complaints report submitted, this is to avoid the occurrence of complaints that are defamatory.
2. If the results of the verification indicate that there is a violation that is categorized as fraud committed by an individual employee, the Supervision & SKAI Division will report the results of the verification to the President Director. If the report requires an investigation process, with the approval of the President Director, the Supervision & SKAI Division will carry out the investigation process.
3. If the violation is allegedly committed by a person of the Board of Directors, then the verification report will be submitted to the Board

investigasi tetap dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada dilakukannya investigasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

### **Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan**

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

### **Komitmen**

Sebagai bentuk komitmen bank NTT dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris bank NTT :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT.

of Commissioners and the investigation process will still be carried out by the Supervision & SKAI Division or the HR Division with the approval of the Board of Commissioners.

4. The period of the verification process until the investigation is carried out no later than 7 (seven) working days and can be extended for 7 (seven) working days.

### **Follow-up Monitoring and Submission of Responses**

1. Monitoring the follow-up of complaints of violations carried out by the Supervision & Internal Audit Division.
2. The Supervision & SKAI Division must inform complaints of violations to the Directors and / or the Board of Commissioners.
3. Bank NTT through the Supervision & SKAI Division can inform and / or provide responses to the status of the process of resolving violation complaints to stakeholders and / or representatives of stakeholders requesting explanations to the bank regarding complaints of violations submitted.
4. Bank NTT is not obliged to provide responses to complaints of violations without proof of identity.

### **Commitment**

As a form of NTT bank commitment in implementing an anti fraud strategy and as a guide for stakeholders in the mechanism of complaints of violations, the bank's Directors and Board of Commissioners of NTT:

1. Responsible for the implementation of a complaint management policy for violations allegedly committed by unscrupulous employees and NTT bank management.

2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang masuk disertai dengan identitas yang lengkap atau yang tidak disertai identitas namun menyertakan bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin adanya perlindungan terhadap pelaporan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dengan menyertakan identitas pelapor dan memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap terjaga.

### Upaya Peningkatan Efektivitas Program Whistleblowing

Bank NTT telah melakukan usaha untuk meningkatkan efektivitas Program *Whistleblowing* seperti :

1. Sosialisasi *whistleblowing* kepada karyawan Bank NTT
2. Mendorong karyawan Bank untuk berani melaporkan kejadian.

### Perlindungan Pelapor (Whistleblower Protection)

Penerapan perlindungan pelapor dan saksi (*Whistleblower Protection*) pada bank NTT dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Pelapor dan Korban, sehingga :

1. Bank NTT tidak akan melakukan tindakan pembalasan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi maupun terminasi kepada pegawai maupun orang yang bertindak atas nama karyawan yang melakukan pelaporan.
2. Bank NTT akan memberikan perlindungan penuh baik untuk identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor dan keluarganya.

2. Ensure that all complaints of infringement are accompanied by a complete identity or that are not accompanied by an identity but include evidence of violation.
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners guarantee the protection of the reporting of complaints of violations submitted by including the identity of the reporter and ensuring that confidentiality of identity is maintained.

### Efforts to Increase the Effectiveness of the Whistleblowing Program

Bank NTT has made an effort to improve the effectiveness of the Whistleblowing Program such as:

1. Dissemination of whistleblowing to Bank NTT employees
2. Encouraging Bank employees to dare to report incidents.

### Whistleblower Protection

The application of whistleblower and witness protection (*Whistleblower Protection*) to NTT banks can refer to the provisions of Law Number 13 of 2006 concerning Reporting and Victim Protection, so that:

1. The NTT Bank will not carry out any retaliation in the form of compensation, discrimination or termination to employees or people acting on behalf of employees who report.
2. The NTT Bank will provide full protection for both the identity of the reporter and the protection of the reporter's security and his family.

3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang melakukan pengaduan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum karyawan atau oknum manajemen bank NTT sehingga dapat menyelamatkan kerugian finansial atau aset milik bank NTT.

3. Bank NTT can provide an incentive as a form of appreciation to employees who make complaints about the occurrence of violations committed by individual employees or individual NTT bank management so that they can save financial losses or assets belonging to the NTT bank.

### Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dan ditindaklanjuti

Dalam tahun 2018 Bank NTT tidak menerima laporan yang dikategorikan sebagai laporan *whistleblowing*, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

### The number of complaints entered and processed and followed up

In 2018 the NTT Bank did not receive reports categorized as *whistleblowing* reports, as in the table below.

Tahun Year	Jumlah Laporan Total Report	Sumber Source		Per 31 Desember 2018	klasifikasi Classification	
2018		0	0	0	0	0

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Diversity Policy Composition of the Board Of Commissioners And Board of Directors

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Bank NTT memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

#### Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Bank NTT memberikan kesempatan yang sama kepada pejabat internal Bank NTT untuk melamar menjadi calon direksi, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja dan usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bisnis Bank NTT. Seluruh anggota

Determination of the composition of the Bank NTT Board of Commissioners is done by considering the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Commissioners is based on banking knowledge, expertise, professional experience, background to support the effectiveness of the duties of the Board of Commissioners.

Bank NTT provides opportunities for everyone, so the nomination of candidates for the Board of Commissioners is reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or source of initial recommendations.

#### Policy on Diversity of Directors' Composition

Determination of the composition of the Board of Directors of NTT Bank is done by considering the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Directors is based on banking knowledge, expertise, professional experience, background in order to support the effectiveness of the duties of the Board of Directors. Bank NTT provides equal opportunity to Bank NTT internal officials to apply to become candidates for directors, therefore the nomination of candidates for Board of Directors is reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or source of initial recommendations.

The current composition of the Board of Commissioners has fulfilled the element of diversity, namely a combination of independence, expertise / education, work experience and age taking into account the needs and complexity of Bank NTT's

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi anggota Dewan Komisaris.

business. All members of the Board of Commissioners have good integrity, competence and financial reputation. This was proven by the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority for members of the Board of Commissioners.

No.	Unsur Keberagaman	Keterangan
1.	Independensi Independency	Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, Bank NTT memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, Bank NTT has 2 (two) Independent Commissioners
2.	Keahlian/Pendidikan Independency	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister dengan berbagai kompetensi berbagai bidang. The education levels of the members of the Board of Commissioners are diverse, ranging from Bachelor, Masters with various competencies in various fields.
3.	Pengalaman Kerja Independency	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada berbagai bidang usaha. The diversity of work experience of members of the Board of Commissioners, among others, comes from professionals in various business fields.
4.	Usia Independency	Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia yang produktif. The age of Board of Commissioners members varies in the productive age range.

## Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank NTT telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

## Diversity in Composition of Directors

The composition of the members of the Bank NTT Directors has reflected the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age, and expertise. Each member of the Board of Directors has high competence that supports the improvement of company performance.

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

### Application of Risk Management

#### Organisasi Manajemen Risiko

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dalam susunan organisasi dan tata kerja Bank NTT disebut dengan Divisi Manajemen Risiko.

Pada pelaksanaan tugasnya, Direksi ini membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independent dan Komite Pemantau Risiko sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris.

KMR beranggotakan Direksi dan Divisi-Divisi yang ada di Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur di dalam Suatu Keputusan Direksi Nomor 49 tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 100 tahun 2006 yang keanggotaannya bersifat tetap dan tidak tetap sesuai kebutuhan Bank.

Sejalan dengan perkembangan usaha, risiko bisnis yang dihadapi, Bank NTT melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian terhadap 8 jenis risiko secara terus menerus, baik secara konsolidasi maupun per cabang dengan menggunakan system (aplikasi).

#### Risk Management Organization

In supporting the implementation of the duties of the Director in charge of Compliance assisted by the Risk Management Unit (SKMR) which in the organizational structure and working procedures of Bank NTT is called the Risk Management Division.

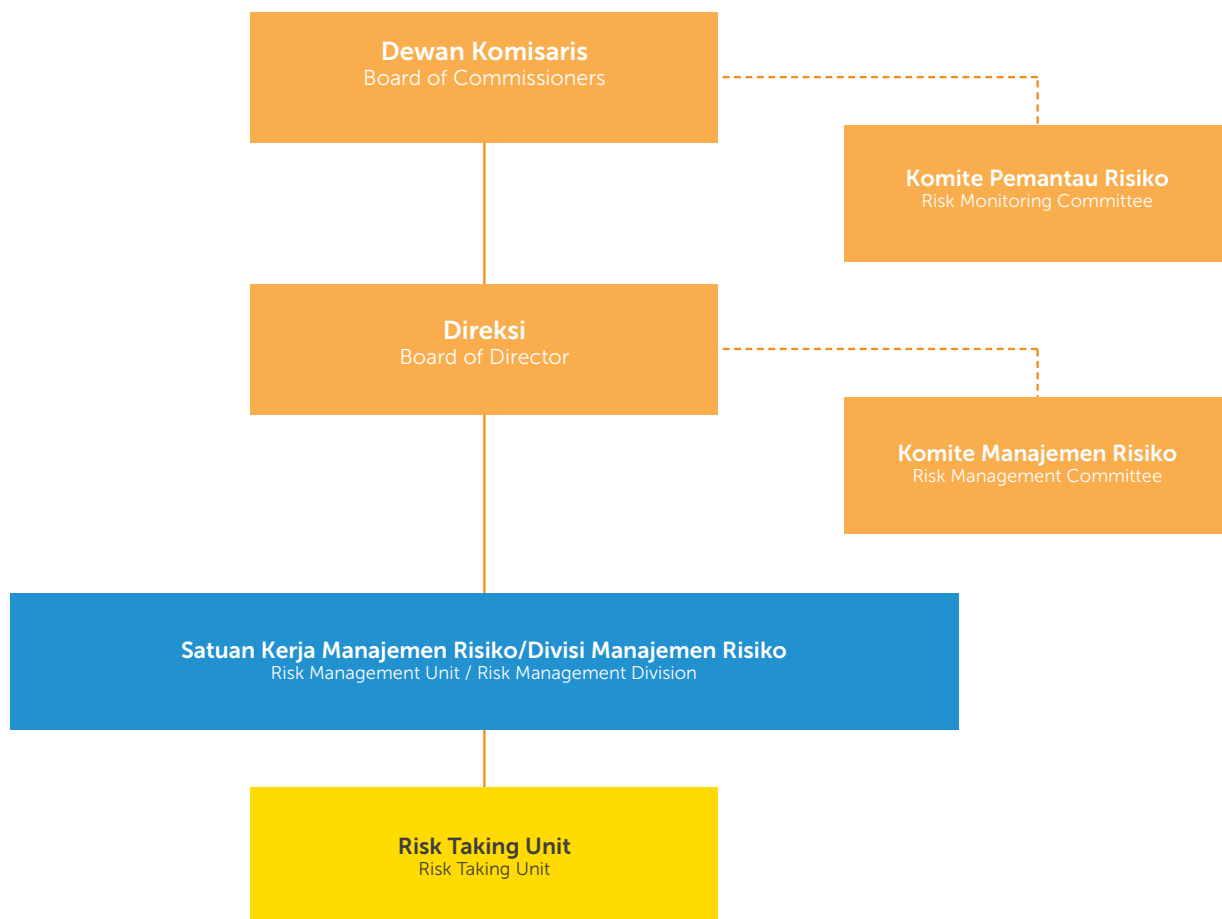
In carrying out its duties, this Board of Directors established a Risk Management Committee (KMR) that carries out an independent risk management evaluation function and the Risk Monitoring Committee as an extension of the Board of Commissioners.

KMR consists of Directors and Divisions at the Bank. The membership of the Risk Management Committee is regulated in a Directors Decree Number 49 of 2004 concerning the Establishment of a Risk Management Committee (KMR), as amended by Decree of the Board of Directors Number 100 of 2006 whose membership is permanent and non-permanent according to the Bank's needs.

In line with business development, business risks faced, Bank NTT continuously identifies, measures, monitors and controls 8 types of risks, both on a consolidated and branch basis using the system.

**Struktur Organisasi Manajemen Risiko Pt. Bank Ntt**      **Risk Management Organizational Structure**

**STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO PT. BANK NTT**  
Organizational Structure Risk Management PT. BANK NTT





Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur didalam SK Direksi Nomor: 54 Tahun 2018, Tanggal 26 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

The membership composition of the Risk Management Committee as stipulated in the Directors Decree Number: 100 of 2006 dated 12 December 2006, is as follows:

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank NTT Membership Structure of the NTT Bank Risk Management Committee	
Nama Name	Jabatan Position
Direktur Kepatuhan: Compliance Director	Ketua merangkap anggota tetap Chairperson, also permanent member
Direktur Umum: General Director	Anggota tetap Permanent member
Direktur Pemasaran Dana: Fund Marketing Director	Anggota tetap Permanent member
Direktur Pemasaran Kredit: Credit Marketing Director	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Manajemen Risiko: Head of Risk Management Division	Sekretaris merangkap anggota tetap Secretary is also a permanent member
Kepala Divisi Pengawasan: Head of the Supervision Division	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Kepatuhan: Head of Compliance Division	Anggota tetap Permanent member
Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary: Head of Planning & Corporate Secretary Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member
Kepala Divisi Sumberdaya Manusia: Head of the HR Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Operasional: Head of the Operations Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Umum: Head of the General Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Informasi Teknologi: Head of IT Division	Anggota tidak Tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Supporting Kredit: Head of Credit Supporting Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Pemasaran Kredit: Head of Credit Marketing Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Treasury: Head of Treasury Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Kualitas Layanan dan Produk: Head of Service and Product Quality Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:
Kepala Divisi Dana dan Jasa: Head of Funds and Services Division	Anggota tidak tetap Non-permanent member:

Dalam pengelolaan risiko Bank NTT menetapkan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit dikelola oleh Divisi Supporting Bisnis dan Divisi Pemasaran Kredit.
2. Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dikelola oleh Divisi Treasury.
3. Risiko Operasional dikelola oleh Divisi Operasional, Umum, IT dan SDM
4. Risiko Reputasi, Strategik dan Hukum dikelola oleh Divisi Perencanaan & Corporate Secretary.
5. Risiko Kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan.

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi, dan bertanggung jawab membantu Direksi dalam:
  - a. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman penerapan manajemen risiko;
  - b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya.
  - c. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
  - d. Membahas dan menetapkan risk manajemen profile bank sesuai kondisi faktual.Komite Manajemen Risiko mendapatkan masukan melalui hasil kerja Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko bank pada seluruh aktifitas operasional bank.
2. Sebagai lembaga yang berfungsi membantu Direksi, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:

In risk management, Bank NTT sets out as follows:

1. Credit Risk is managed by the Supporting Business Division and the Credit Marketing Division.
2. Market Risk and Liquidity Risk are managed by the Treasury Division.
3. Operational Risk managed by the Operations, General, IT and HR Division
4. Reputation, Strategic and Legal Risk is managed by the Planning & Corporate Secretary Division.
5. Compliance Risk by the Compliance Division.

The Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. As an institution that serves to provide recommendations to the Board of Directors, and is responsible for assisting the Directors in:
  - a. Develop policies, strategies and guidelines for implementing risk management;
  - b. Perform repairs or improvements to the implementation of risk management based on the results of evaluations made.
  - c. Establish matters relating to business decisions that deviate from normal procedures.
  - d. Discuss and determine bank profile risk management according to factual conditions.The Risk Management Committee receives input through the work of the Risk Management Division which is responsible for implementing bank risk management in all bank operational activities.
2. As an institution that serves to assist the Directors, the Risk Management Committee is responsible for:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya, menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh aktifitas bank yang dapat menimbulkan risiko bagi bank.
- b. Membangun pengendalian risiko yang handal.
- c. Melaporkan secara inancian maupun insidentil jika dianggap perlu tentang eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal dan terhadap tingkat kesehatan bank.
- d. Menghitung potensi kerugian financial akibat risiko – risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut.
- e. Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan per produk bank.
- f. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tetap sesuai dengan ketentuan.
- g. Memantau pelaksanaan dan kinerja pengendalian intern
- h. Melaporkan kondisi risiko dan perubahan – perubahan secara rutin kepada direksi
- i. Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko.
- j. Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif
- k. Pengelolaan Capital at Risk.

## Laporan Profil Risiko

Pada laporan profil risiko Bank sepanjang tahun 2018 menunjukkan trend tidak stabil dengan peringkat risiko inheren *Moderate* dan sistem pengendalian intern

- a. Coordinating and cooperating with other work units, implementing risk management policies in all bank activities that can pose a risk to the bank.
- b. Build reliable risk control.
- c. Report in an internal or incidental manner if deemed necessary regarding risk exposures that affect capital and the soundness of the bank.
- d. Calculate potential financial losses due to existing risks, and calculate the amount of capital value that must be provided to cover these losses.
- e. Establish risk limits for each exposure, per group and per individual customer, per business activity and per bank product.
- f. Monitor the implementation of risk management strategies and policies in accordance with the provisions.
- g. Monitor the implementation and performance of internal control
- h. Report the risk conditions and changes regularly to the directors
- i. Control bank long-term planning and investment while paying attention to risk management policies.
- j. Place risk management units in each business unit, so that the risk control function is active
- k. Capital Management at Risk.

## Risk Profile Report

The Bank's risk profile report throughout 2018 shows an unstable trend with *Moderate* inherent risk rating and internal control system in the *Fair* position,

pada posisi *Fair*, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah *Moderate*. Dari 8 (delapan) risiko yang terdapat didalam laporan profil risiko Bank yang patut untuk mendapat perhatian adalah, sebagai berikut:

1. Risiko kredit dengan peringkat risiko *Moderate* dengan Trend Stabil/Tetap dibanding tahun buku 2017, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Kualitas Pemberian Kredit dinilai Kurang Baik dimana angka rasio NPL gross untuk posisi Desember 2018 sebesar 2.50 % dan jika dibandingkan dengan NPL posisi Desember 2017 sebesar 3.22 %, maka mengalami penurunan sebesar 0.72%, secara nominal turun sebesar Rp.43.557 juta (Rp.257.413 juta menjadi Rp.213.856 juta), sedangkan kredit hapus buku tahun 2017 sebesar Rp.71.604 juta dan tahun 2018 sebesar Rp.51.858 juta. Ratio NPL Gross kredit tersebut berada di bawah selera risiko 2,70%.
  - b. Kecukupan pencadangan dinilai baik karena relatif kecil yang ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah dikurangi CKPN Kredit bermasalah sebesar 1.35% dan rasio CKPN atas total kredit sebesar 1.35%
2. Risiko Pasar pada peringkat risiko yang *Low* dengan *Trend* Stabil/Tetap dibandingkan dengan Desember 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Rasio "Aset Trading, Derivatif, dan FVO terhadap Total Aset dan Rasio "Kewajiban Trading, Derivatif, dan FVO terhadap Total Kewajiban" nihil .

resulting in a composite risk rating overall is *Moderate*. Of the 8 (eight) risks contained in the Bank's risk profile report that deserve attention, the following are:

1. Credit risk with risk rating *Moderate with Stable / Fixed Trend* compared to 2017 financial year, this can be explained as follows:
  - a. The Quality of Credit Provision is considered *Poor*, where the gross NPL ratio for the position of December 2018 is 2.50% and when compared with the NPL for December 2017 position of 3.22%, it decreases by 0.72%, in nominal terms decreases by Rp.43,557 million (Rp.257,413 million to Rp.213,856 million), while write-off loans in 2017 amounted to Rp.71.604 million and in 2018 amounted to Rp.51,858 million. NPL Ratio Gross credit is below the risk appetite of 2.70%.
  - b. Adequacy of reserves is considered good because it is relatively small as indicated by the ratio of non-performing loans minus CKPN Non-performing loans amount to 1.35% and the CKPN ratio of total loans is 1.35%
2. Low Market Risk at the risk rating with *Stable / Fixed Trend* compared to December 2017, with the following explanation:
  - a. The ratio of "Trading Assets, Derivatives, and FVO to Total Assets and Ratio" Obligations of Trading, Derivatives, and FVO to Total Liabilities "is nil.

- b. Perbandingan antara Asset yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dengan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sebesar 644,16%
  - c. Rasio Perubahan NII terhadap Pendapatan Bunga (disetahunkan) sebesar 3.17% , mengalami kenaikan sebesar 0.69 % dari Posisi Desember 2017 sebesar 2,48%.
  - d. Efektifitas rapat ALCO pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kali.
3. Risiko Likuiditas pada peringkat risiko yang *Moderate* dan **Trend Meningkat** dibandingkan dengan Desember 2017 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bank memiliki asset berkualitas yang terdiri dari; Kas, Penempatan Bank Indonesia, Penempatan Bank Lain serta Sertifikat Bank Indonesia dinilai cukup baik untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo yang dimiliki.
  - b. Kerentanan kebutuhan pendanaan bulan Desember 2018 tinggi, ditunjukkan dengan Rasio 1 month maturity mismatch sebesar 51.65%. Rasio tersebut berada .di atas limit risiko maksimal 25 %.  
Rasio ini juga mengalami peningkatan sebesar 30.72% dari posisi Desember 2017 sebesar 20.93% dan ini berarti arus kas berasal dari asset dan kewajiban di bawah 1 bulan kurang dapat saling tutup dengan baik.
  - c. Rapat ALCO dilakukan 4 kali dalam tahun 2018.
4. Profil risiko Operasional berada pada peringkat risiko *Moderate* dan **Stabil/Tetap** sama dengan posisi Desember 2017, dengan faktor-faktor sebagai berikut:
- b. Comparison between Assets with a maturity of more than 1 year with liabilities with a maturity of more than 1 year amounting to 644.16%
  - c. The NII Amendment Ratio to Interest Income (annualized) is 3.17%, experiencing an increase of 0.69% from the position in December 2017 of 2.48%.
  - d. The effectiveness of the ALCO meeting in 2017 is 4 (four) times.
3. Moderate Risk Liquidity and Rising Trends compared to December 2017 with the following explanation:
- a. Banks have quality assets consisting of; Cash, Bank Indonesia Placement, Placement of Other Banks and Bank Indonesia Certificates are considered good enough to fulfill their maturity obligations.
  - b. The vulnerability of funding requirements in December 2018 is high, as indicated by the 1 month ratio of 51.65% maturity mismatch. The ratio is above the maximum risk limit of 25%. This ratio also increased by 30.72% from December 2017 position of 20.93% and this means that cash flows from assets and liabilities under 1 month are less able to close each other properly.
  - c. ALCO meetings are held 4 times in 2018.
4. The Operational risk profile is in the risk rating of Moderate and Stable / Fixed with the position in December 2017, with the following factors:

a. Secara keseluruhan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank masih dalam batas toleransi Bank dan menunjukkan kompleksitas usaha yang sederhana. Skala aset bank berada di atas Rp. 10 T (Rp.11.368.162 juta) dan produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, struktur organisasi kurang kompleks dan pengguna jasa alih daya minimal yang dapat ditunjukkan antara lain sebagai berikut :

- a.1.1. Kepemilikan bank bersifat individual (tidak mempunyai anak perusahaan). Struktur organisasi bank saat ini terdiri dari 9 tingkat yaitu Direksi, Kepala Divisi, Pemimpin Cabang Utama/Khusus, Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang Utama/Khusus, Wakil Pemimpin Cabang/Kasubdiv, Pemimpin Cabang Pembantu (PCP) Wakil PCP/Officer/Head Teller/Kepala Kantor Kas, Pemimpin Kantor Fungsional dan Pelaksana.
- a.1.2. Jaringan Kantor cukup banyak dan tersebar di NTT menjadi faktor yang mempengaruhi pengawasan manajemen terhadap kantor operasional.
- a.1.3. Produk dan aktivitas bank masih tergolong sederhana, sisi penghimpunan Dana masih didominasi Dana Pihak Ketiga dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito sedangkan sisi penyediaan dana didominasi Pemberian Kredit, Penempatan pada BI dan Bank Lain, Surat Berharga dengan kepemilikan HTM. Namun demikian Layanan pendukung transaksi yang melekat pada produk dinilai mulai kompleks antara lain Electronic Data Capture, SMS Banking, Mobile Banking.

a. Overall the characteristics and complexity of the Bank's business are still within the Bank's tolerance limits and show a simple business complexity. The scale of bank assets is above Rp. 10 T (Rp. 11,368,162 million) and products and services are relatively less varied, the business mechanism is simple, the organizational structure is less complex and users of the minimum outsourcing services can be shown as follows:

- a.1.1. Bank ownership is individual (does not have a subsidiary). The bank's organizational structure currently consists of 9 levels namely Directors, Division Heads, Main / Special Branch Leaders, Branch Leaders / Deputy Main / Special Branch Managers, Deputy Branch Managers / Sub-Branch Heads, Auxiliary Branch Leaders (PCP) PCP / Officer / Head Teller Representatives / Head of Cash Office, Functional and Implementing Office Leader.
- a.1.2. The Office network is quite numerous and spread in NTT to be a factor that influences management oversight of operational offices.
- a.1.3. Bank products and activities are still relatively simple, the side of fundraising is still dominated by Third Party Funds in the form of Demand Deposits, Savings and Deposits while the funding side is dominated by Lending, Placement with BI and Other Banks, Securities with ownership of HTM. However, the support services for transactions inherent in products are considered to be complex, including Electronic Data Capture, SMS Banking, Mobile Banking.

- a.1.4. Bank hanya melakukan outsourcing terhadap tenaga kerja Non-Core Banking yaitu SATPAM dan Office Boy.
  - a.1.5. Sampai dengan Desember 2018 Bank telah menerbitkan 3 produk baru yang diterbitkan yakni Obligasi Bank NTT II, Money Changer dan Cash Management System (CMS).
  - b. Pengelolaan SDM masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan adanya kesalahan berulang sehingga perlu implementasi Key Performance Indicator dan review kebijakan rotasi, promosi, mutasi, tata tertib pegawai dan system informasi SDM.
5. Profil risiko Hukum berada pada peringkat risiko *Low To Moderate* dan *Stabil/Tetap* berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:  
Terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/ atau dampak finansial gugatan kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Bank;
- a. Rasio kerugian yang diperkirakan akibat sengketa hukum terhadap Modal pada Desember 2018 sebesar 0.34 % menjadi 0.32% pada tahun 2018 (masih dalam batas toleransi risiko maksimal 1 %)
  - b. Rasio kerugian yang terjadi dan Biaya Pengacara akibat sengketa hukum terhadap Modal sebesar 0% (masih di bawah batas toleransi maksimal 1%).
  - c. Kasus Hukum yang dialami pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) kejadian, sama dengan jumlah kasus hukum tahun 2017 yakni sebanyak 6 (enam) kejadian (melampaui batas maksimal 2 kejadian)
- a.1.4. The bank only outsourced the Non-Core Banking workforce namely SATPAM and Office Boy.
  - a.1.5. As of December 2018, the Bank has issued 3 new products issued, namely Bank NTT II Bonds, Money Changer and Cash Management System (CMS).
  - b. HR management still has weaknesses that are indicated by repeated errors so that it is necessary to implement Key Performance Indicators and review policies on rotation, promotion, transfer, employee order and HR information systems.
5. The legal risk profile is at the Low To Moderate and Stable / Fixed risk rating based on the following factors:  
There is a litigation process, but the frequency and / or financial impact of the claim is not significant enough to disrupt the financial condition of the Bank and have little impact on the Bank's reputation;
- a. The estimated loss ratio due to legal disputes against Capital in December 2018 was 0.34% to 0.32% in 2018 (still within the maximum risk tolerance limit of 1%)
  - b. The ratio of losses incurred and Lawyer fees due to legal disputes against Capital is 0% (still below the maximum tolerance limit of 1%).
  - c. The legal cases experienced in 2018 were 6 (six) incidents, the same as the number of legal cases in 2017 which were as many as 6 (six) events (exceeding the maximum limit of 2 events)

- d. Terhadap gugatan hukum pidana yang terjadi, Manajemen Bank menyediakan dan menyeleksi pengacara untuk mendampingi kasus hukum sedangkan sengketa hukum perdata, bagian legal korporasi langsung melakukan pendampingan sampai penyelesaian kasus hukum.
6. Profil risiko Reputasi berada pada peringkat risiko *Moderate* dan **Stabil/Tetap** dibandingkan periode Desember 2017, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Frekuensi publikasi negatif sepanjang tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) kali sama dengan tahun 2017 yakni 18 (delapan belas) kejadian (melampaui batas toleransi maksimal 2 kali kejadian).
  - Pada Desember 2017 terdapat 24 Kali pengaduan nasabah meningkat menjadi 31 kali kejadian sampai dengan Desember 2018. (batas toleransi 5 kali kejadian)
7. Profil risiko strategik berada pada peringkat risiko *Low to Moderate* dan **Stabil/Tetap** dibandingkan dengan Desember 2017, hal ini dapat dijelaskan karena faktor-faktor sebagai berikut:
- Pertumbuhan kredit Bank sebesar sebesar 10.21% jauh lebih rendah pertumbuhan kredit perbankan di wilayah NTT sebesar 16.80% (data Nopember 2018).
  - Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 2,87% jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan di wilayah NTT sebesar 10,49% (data November 2018) .
- d. Regarding the criminal lawsuit that occurred, the Bank Management provided and selected lawyers to assist legal cases while civil law disputes, the legal department of the corporation immediately provided assistance until the completion of legal cases.
6. Reputation risk profile is at *Moderate and Stable / Fixed* risk ranking compared to December 2017 period, based on the following factors:
- The frequency of negative publications throughout 2018 is 18 (eighteen) times the same as in 2017, which is 18 (eighteen) events (exceeding the tolerance limit of 2 times).
  - In December 2017 there were 24 times customer complaints increased to 31 events up to December 2018. (tolerance limit 5 times)
7. The strategic risk profile is in the *Low to Moderate and Stable / Fixed* risk rating compared to December 2017, this can be explained because of the following factors:
- Bank credit growth amounted to 10.21%, far lower than the growth of bank credit in the NTT region of 16.80% (data November 2018).
  - The growth of Third Party Funds is 2.87%, much lower than the growth of bank deposits in the NTT region of 10.49% (November 2018 data).



- c. Rasio BOPO Bank sebesar 76,25%, sedikit berada dibawah rata-rata Rasio BOPO BPD seluruh Indonesia sebesar 76,53% dan Rasio BOPO Bank Umum sebesar 78,71% (Data Oktober 2018)
  - d. Rasio CAR Bank sebesar 22,77% berada di atas rata-rata CAR BPD seluruh Indonesia sebesar 21,02% dan sedikit di bawah rata-rata rasio CAR Bank Umum sebesar 22,97% (Data Oktober 2018).
  - e. Rasio NPL Bank sebesar 2,50% dinilai lebih tinggi dibanding Rasio rata-rata NPL Perbankan di wilayah NTT sebesar 1,97 % sedangkan NPL BPD rata-rata sebesar 2,68% (Data Oktober 2018).
8. Profil risiko kepatuhan berada pada peringkat risiko *Low to Moderate* dan **Tidak Stabil/Tetap** dibandingkan dengan Desember 2017, hal ini dapat dijelaskan karena faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Terdapat pelanggaran ketentuan OJK dan Pajak yang telah menimbulkan denda sebesar 0,10% dari Laba Operasional, rasio tersebut berada dibawah limit risiko maksimal sebesar 1%.
  - b. Terdapat 4 (empat) temuan Otoritas Jasa Keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai komitmen penyelesaian maksimal September 2018

Berikut ini disampaikan perbandingan trend laporan profil risiko untuk periode Desember 2017 dan 2018

The following is a comparison of the risk profile report trends for the period December 2017 and 2018

No	Jenis Risiko Types of Risk	Periode Desember 2017 December 2017 period			Periode Desember 2018 December 2018 period		
		Risiko Inheren Risk of Inherent	Sistem Pengendalian Risiko Risk Control System	Risiko Komposit Composite Risk	Risiko Inheren Risk of Inherent	Sistem Pengendalian Risiko Risk Control System	Risiko Komposit Composite Risk
1	Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Fair	Moderate
2	Risiko Pasar Market Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate	Low	Satisfactory	Low
3	Risiko Liquiditas Liquidity Risk	Low To Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Fair	Moderate
4	Risiko Operasional Operational Risk	Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Fair	Moderate
5	Risiko Hukum Legal Risk	Moderate	Fair	Low to Moderate	Low to Moderate	Fair	Low to Moderate
6	Risiko Reputasi Reputation Risk	Moderate	Fair	Low to Moderate	Moderate	Fair	Moderate
7	Risiko Strategik Strategic Risk	Moderate	Fair	Moderate	Low To Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
8	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate	Fair	Low To Moderate	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
	Peringkat Risiko Keseluruhan Overall Risk Rating	Moderate	Fair	Moderate	Moderate	Fair	Moderate

Adapun hasil penilaian atau self assessment terhadap penerapan tata kelola perusahaan Bank NTT adalah sebagai berikut :

Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG/ Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG			
Peringkat Ranking	Desember 2016 December 2016	Desember 2017 December 2017	Desember 2018 December 2018
Individual	<p>Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat <b>3 (Cukup baik)</b>, dimana Bank telah memiliki ketentuan Internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pada aspek <b>Governance Process</b> dan <b>Governance Outcome</b>. Penilaian KPMR bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh manajemen yaitu penyesuaian corporate plan dengan Program Transformasi BPD, penyusunan rencana bisnis bank yang belum terkoordinasi dengan baik, serta tindak lanjut beberapa temuan pemeriksaan umum yang masih belum selesai.</p>	<p>Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat <b>3 (Cukup baik)</b>, dimana Bank telah memiliki ketentuan Internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pada semua aspek GCG yakni <b>Governance Structure, Governance Process</b> dan <b>Governance Outcome</b>. Penilaian KPMR bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat <b>3 (Cukup baik)</b>, dimana Bank telah memiliki ketentuan Internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pada aspek <b>Governance Process</b> dan <b>Governance Outcome</b>. Penilaian KPMR bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh manajemen yaitu penyesuaian corporate plan dengan Program Transformasi BPD, penyusunan rencana bisnis bank yang belum terkoordinasi dengan baik, serta tindak lanjut beberapa temuan pemeriksaan umum yang masih belum selesai.</p>	<p>Hasil penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT dinilai <b>3 (Cukup Baik)</b>, jumlah Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang. Namun secara organisasi masih terdapat 2 (dua) jabatan Direksi yang kosong yaitu Direktur Utama dan Direktur Umum. Jumlah dan Komposisi Komite Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai ketentuan Tata Kelola. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dinilai cukup memadai baik melalui evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun pengawasan realisasi rencana bisnis. Bank juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Namun pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi belum memadai yaitu rapat Komite baru dilakukan pada Semester II Tahun 2018 sesuai hasil pemeriksaan umum tahun 2018. Bank juga telah memiliki ketentuan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Direksi, ketentuan mengenai <i>Business Continuity Plan, Risk Based Audit</i>, ketentuan mengenai benturan kepentingan, dan <i>whistleblowing</i> system. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu penyusunan ketentuan biaya representase, pedoman pengadaan barang dan jasa, dan Corporate Plan. Selain itu bank juga belum menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan teknologi informasi oleh pihak auditor independen tahun 2017.</p>

**Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG/ Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG**

<b>Peringkat Ranking</b>	<b>Desember 2016 December 2016</b>	<b>Desember 2017 December 2017</b>	<b>Desember 2018 December 2018</b>
Individuals	<p>The results of the assessment of the implementation of GCG at NTT Bank are ranked 3 (Good enough), where the Bank has internal provisions that support the implementation of 11 GCG pillars. However, there are still weaknesses in the application of GCG principles, especially in the aspects of Governance Process and Governance Outcome. The bank KPMR assessment which is still rated 3 (fair) shows that there are still problems that need to be resolved by management, namely adjusting the corporate plan with the BPD Transformation Program, preparing a bank business plan that has not been well coordinated, and following up on some general audit findings that have not been completed.</p>	<p>The results of the assessment of the implementation of GCG at NTT Bank are ranked 3 (Good enough), where the Bank has internal provisions that support the implementation of 11 GCG pillars. However, there are still weaknesses in the application of GCG principles, especially in the aspects of Governance Process and Governance Outcome. The bank KPMR assessment which is still rated 3 (fair) shows that there are still problems that need to be resolved by management, namely adjusting the corporate plan with the BPD Transformation Program, preparing a bank business plan that has not been well coordinated, and following up on some general audit findings that have not been completed.</p>	<p>The results of the assessment of the Implementation of NTT Bank Governance are rated 3 (Good), the number of the Board of Commissioners and Directors has met the minimum number of 3 (three) people. But in the organization there are still 2 (two) vacant positions of Directors, namely the President Director and General Director. The number and composition of the Committee of the Board of Commissioners has been fulfilled according to the provisions of Governance. The Board of Commissioners' oversight of the Board of Directors is considered adequate both through evaluation of the follow-up results of the inspection and supervision of the realization of the business plan. The Bank also has a Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee. However, the implementation of the Information Technology Steering Committee's duties is inadequate, namely the Committee meetings are held in Semester II 2018 according to the results of the general inspection in 2018. The Bank also has internal provisions governing the duties and responsibilities of the Board of Directors, provisions regarding Business Continuity Plan, Risk Based Audit, provisions regarding conflicts of interest, and whistleblowing systems. However, there are still a number of things that need to be addressed, namely the preparation of the provisions of the representation fee, guidelines for the procurement of goods and services, and the Corporate Plan. In addition, the bank has not yet followed up all the findings of the information technology examination by the independent auditor in 2017.</p>

## Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko, Bank NTT menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 58 Tahun 2010 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan telah dilakukan penyesuaian sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkupnya yaitu:

### 1. Penetapan Risiko yang Terkait dengan Produk dan Transaksi yang Ada di Bank NTT.

Setiap pegawai diharapkan untuk memahami dan berperan dalam pengelolaan risiko, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dengan demikian masing-masing pegawai mampu pula mengidentifikasi risiko yang melekat terkait produk dan transaksi yang ada pada unit mereka.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan kajian risiko atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas baru, sehingga menjadi dasar untuk mengambil langkah pengendalian risiko setiap Risk Taking Unit pada saat pelaksanaannya. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pihak otoritas lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh setiap unit terkait.

## Risk Management

In managing risk, Bank NTT applies the Risk Management Policy set by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Directors' Decree Number: 58 of 2010 concerning the Establishment of the Risk Management Implementation Guidance Book for PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara and adjustments have been made in accordance with the Decree of the Directors of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara Number: 112 Year 2018 concerning Determination of Risk Management Implementation Guidebook for PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara with its scope, namely:

### 1. Determination of Risks Associated with Products and Transactions Existing at Bank NTT.

Every employee is expected to understand and play a role in risk management, according to their functions and responsibilities, thus each employee is also able to identify inherent risks related to products and transactions in their unit.

The Risk Management Division is responsible for conducting a risk assessment of the new Product and Activities Issuance Plan, so that it becomes the basis for taking risk control measures for each Risk Taking Unit at the time of implementation.

The Compliance Division is responsible for ensuring that all regulations issued by Bank Indonesia and other authorities have been socialized and carried out by each related unit.

Divisi Pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Lini Bisnis dan bagian fungsi Supporting Bisnis melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan tidak terjadi penyimpangan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah disetujui mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal.

**2. Penetapan Penggunaan Metode Pengukuran yang Sesuai Kompleksitas Usaha dan Membangun Sistem Informasi Manajemen yang Dapat Memberikan Output yang Valid.**

Bank NTT menerapkan pendekatan yang konsisten dan disiplin terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya secara transparan. Metode pengukuran yang digunakan secara minimal sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Evaluasi metode akan dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

The Supervision Division is responsible for ensuring that the Business Line and the Supporting Business function part carry out their duties and responsibilities effectively and there is no deviation from all agreed policies and procedures regarding risk management and internal control.

**2. Determination of the Use of Measurement Methods that Match Business Complexity and Build a Management Information System that Can Provide Valid Output.**

Bank NTT applies a consistent and disciplined approach to the identification, measurement, monitoring and control of credit, market, liquidity, operational and other risks in a transparent manner. The measurement method used is minimally in accordance with Bank Indonesia Circular 13/24 / DPNP dated October 25, 2011 Subject: Assessment of Soundness Level of Commercial Banks and POJK Number 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Soundness Rating of Commercial Banks.

Method evaluation will be carried out periodically on the suitability of assumptions, data sources and procedures used to measure risk. Improvements to the risk measurement system are carried out if there are material changes in business activities, products, transactions and risk factors.

**3. Secara Berkala Mereview Limit dan Toleransi Risiko**

Bank NTT senantiasa menerapkan pendekatan yang hati hati dan prudent dalam mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut senantiasa disesuaikan dengan selera risiko (risk appetite) serta Limit dan Toleransi yang akan diambil oleh Bank NTT.

**4. Menetapkan Penilaian Peringkat Risiko dengan Metode yang obyektif**

Setiap jenis risiko yang melekat pada Aktivitas Fungsional dilakukan penilaian guna mendapatkan peringkat risiko pada setiap jenis risiko.

Hasil penilaian peringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu Rendah (*Low*), Rendah Ke Sedang (*Low To Moderate*), Sedang (*Moderate*), Sedang Ke Tinggi (*Moderate To High*) dan Tinggi (*High*).

**5. Penyusunan Rencana Darurat dalam Kondisi Terburuk**

Rencana Darurat dibuat untuk menyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian kejadian yang tidak diharapkan.

**6. Menetapkan Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko**

Sistem pengendalian intern dalam rangka penerapan manajemen risiko dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**3. Periodically Reviewing Limit and Risk Tolerance**

Bank NTT always applies a prudent and careful approach in developing business strategies. The business strategy is always adjusted to risk appetite and the Limit and Tolerance to be taken by Bank NTT.

**4. Establish Risk Rating with an objective method**

Each type of risk inherent in Functional Activities is assessed to obtain a risk rating for each type of risk.

The rating results are in accordance with the Financial Services Authority Circular Number: 14 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning: Commercial Bank Soundness Rating which is categorized into 5 (five) ratings namely Low (*Low*), Low To Medium (*Low To Moderate*), Moderate (*Moderate*), Medium To High (*Moderate To High*) and High (*High*).

**5. Preparation of Emergency Plans in the Worst Conditions**

Emergency Plans are made to ensure the ability to deal with potential crises or unexpected events.

**6. Establish the Internal Control System in the Application of Risk Management**

The internal control system in the framework of implementing risk management is developed by taking into account the following matters:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian Sistem pengendalian Intern dengan jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha.</li> <li>b. Penetapan Wewenang dan tanggung jawab pemantauan Kepatuhan kebijakan, prosedur dan Limit.</li> <li>c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko.</li> <li>d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha.</li> <li>e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.</li> <li>f. Kecukupan prosedur dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>g. Pelaksanaan kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.</li> <li>h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.</li> <li>i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.</li> <li>j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan kelemahan yang bersifat material.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Conformity of the Internal control system with the types of risks inherent in business activities.</li> <li>b. Establishment of authority and responsibility for monitoring compliance of policies, procedures and limits.</li> <li>c. Determination of reporting lines and the clear separation of functions from operational work units to work units that carry out risk control functions.</li> <li>d. Organizational structure that clearly describes business activities.</li> <li>e. Accurate and timely financial reporting and operational activities.</li> <li>f. Adequacy of procedures and ensuring bank compliance with applicable rules and regulations.</li> <li>g. Effective, independent and objective review of procedures for assessing bank operations.</li> <li>h. Adequate testing and review of management information systems.</li> <li>i. Complete and adequate documentation of operational procedures, scope and audit findings and bank management responses based on audit results.</li> <li>j. Periodic and continuous verification and review of handling material weaknesses.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Proses Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2018 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara lain :

## Risk Management Process

Until 2018 the stages of risk management that have been carried out by the NTT Bank related to the Risk Control System include:



1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan antara lain Kebijakan Limit dan Toleransi telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada *Risk Taking Unit*.
  2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada di SKMR melalui pelatihan dan pendidikan antara lain: Pelatihan Membangun Sinergi Unit Kerja APU – PPT dan Manajemen Risiko; Implementasi Risk Assesment dalam Penerapan APU – PPT (Pendukung Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017), Pembekalan Materi dan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 1 Tahun 2018 Angkatan 2, Sosialisasi Ketentuan Bank Umum, Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh OJK, Pelatihan Efisiensi Bisnis melalui Peningkatan Rasio CASA, Perpanjangan Core Banking System, TAL, Mengukur Risiko Operasional Perbankan, TAL, Kick Off Meeting Obligasi Berkelanjutan Bank NTT.
  3. Tahun 2018, Penyempurnaan Aplikasi PRC sesuai temuan OJK, Undanguan Diskusi CP Persyaratan Modal Minimum Risiko Operasional, Sosialisasi Ketentuan Bank Umum, Penyusunan Laporan KPMM & ATMR yang tepat & Komprehensif sesuai dengan POJK, Sosialisasi PBI tentang Indonesia Overnigth index Average & Jakarta Interbank Offered Rate, Forum Tahunan Bloomberg Bersama BPD SI, TAL OJK, Diklat Pimpinan Cabang workshop KDKE (Konsorsium Data Kerugian Eksternal), Undanguan IAIB 10th National Conforence dan Tim Obligasi.
  4. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses risiko pasar, dan terus melakukan peningkatan kemampuan antara lain pengetahuan audit perihal akursi model pengukuran pasar.
1. The process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks has been carried out, among others, the Limit Policy and Tolerance, which has been periodically monitored and carried out to be monitored and communicated to Risk Taking Units.
  2. Enhancing Human Resources in the SKMR through training and education, among others: Training on Building Synergy of APU Work Units - PPT and Risk Management; Implementation of Risk Assessment in APU - PPT Implementation (Supporting OJK Regulation No.12 / POJK.01 / 2017), Debriefing Materials and Compliance Certification Examinations Level 1 Year 2018 Force 2, Socialization of Commercial Bank Provisions, Socialization on Handling Alleged Banking Crimes by OJK, Business Efficiency Training through Increased CASA Ratio, Core Banking System Extension, TAL, Measuring Banking Operational Risk, TAL, BNTT Sustainable Bonds Kick Off Meeting
  3. In 2018, Completion of PRC Applications according to OJK's findings, Invitation to Discussion CP Minimum Capital Requirements for Operational Risk, Socialization of Commercial Bank Provisions, Compilation of Comprehensive & Comprehensive RPM & RWA Reports in accordance with POJK, PBI Socialization of Indonesia Overnigth Index Average & Jakarta Interbank Offered Rate, Annual Forum Bloomberg Together with BPD SI, TAL OJK, Diklat Branch Manager of KDKE workshop (External Loss Data Consortium), Invitation IAIB 10th National Conforence and Bond Team.
  4. Conduct periodic internal audits of the market risk process, and continue to improve capabilities including audit knowledge regarding accuracy of market measurement models.

5. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses likuiditas, dan masih diperlukan pengembangan pengetahuan internal auditor, dan SKMR antara lain mencakup pengkajian, asumsi dan indikator serta kinerja model pengukuran serta akurasi data, aspek Kecukupan rencana pendanaan darurat dan kecukupan limit;
  6. Unit kerja kualitas pelayanan terus melakukan pemantauan pelaksanaan service excellent pada kantor Cabang.
  7. Menempatkan Internal Control pada masing-masing Cabang dalam melakukan pemeriksaan aktivitas Operasional dengan mekanisme H+1 serta pelaksanaan internal audit dilakukan secara periodik guna meminimalisir kejadian berpotensi risiko operasional, hukum, dan melakukan review terhadap pelaksanaan Standar Kualitas Pelayanan pada setiap kantor Cabang.
  8. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab menganalisa secara rutin laporan actual vs target yang disampaikan kepada Direksi secara berkala;
  9. Bank secara rutin melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan SOP terbaru bagi seluruh pegawai
  10. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian secara berkala kepatuhan internal terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Conduct periodic internal audits of the liquidity process, and still need to develop internal auditor knowledge, and SKMR includes, among others, assessment, assumptions and indicators as well as performance measurement models and data accuracy, aspects of Adequacy of emergency funding plans and adequacy of limits;
  6. The service quality work unit continues to monitor the implementation of excellent service at the Branch Office.
  7. Placing Internal Control in each Branch in conducting an examination of Operational activities with the H + 1 mechanism and conducting an internal audit periodically in order to minimize the occurrence of potential operational, legal risks, and conducting reviews on the implementation of Service Quality Standards at each Branch Office.
  8. Establish an authorized work unit and is responsible for regularly analyzing actual vs. target reports submitted to the Board of Directors on a regular basis;
  9. The Bank routinely conducts socialization specifically in relation to the latest SOPs for all employees
  10. Establish an authorized work unit and is responsible for conducting periodic reviews of internal compliance with the applicable legal provisions.

## Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan antara lain :

1. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, yang digunakan oleh Direksi setiap tahun.
2. Menyetujui dan memantau penyediaan dana dalam jumlah besar atau kepada pihak terkait terutama apabila kualitas penyediaan dana (kredit) mulai memburuk.
3. Mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi untuk mengelola aktivitas yang memiliki risiko tinggi, setiap bulan baik melalui rapat komite pemantau risiko, rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

### Direksi

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan oleh Divisi Manajemen Risiko seperti :
  - a) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio pinjaman;
  - b) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga;
  - c) Pertumbuhan kualitas aset maupun pendanaan Bank;
  - d) Kegagalan aktivitas operasional yang dapat berdampak pada kerugian Bank:

## Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors

### Board of Commissioners

The Board of Commissioners actively supervises, among others:

1. Approve and evaluate Risk Management Policies according to risk appetite and risk tolerance, which are used by the Board of Directors every year.
2. Approve and monitor the provision of large amounts of funds or to related parties, especially if the quality of the provision of funds (credit) begins to deteriorate.
3. Evaluate the performance achieved and ensure that the Board of Directors has the competence to manage high-risk activities, every month through the risk monitoring committee meetings, Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors.

### Directors

1. Establish and evaluate Risk Management policies and strategies according to the risk appetite and risk tolerance used by the Risk Management Division such as:
  - a) Growth and quality of the loan portfolio;
  - b) Growth and quality of portfolios associated with fluctuations in interest rates;
  - c) Growth in asset quality and Bank funding;
  - d) Failure of operational activities that could have an impact on the Bank's losses:

- e) Kejadian risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian Bank;
- 2. Memantau permasalahan terkait semua risiko dan memastikan langkah-langkah perbaikan .
- 3. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional, yang ditunjukkan dengan *Zero Tolerance* terhadap Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan pemberian sanksi yang tegas.

Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko.

### **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**

Untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit yang sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit tersebut selalu disosialisasikan kepada seluruh organisasi.

Penetapan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit selalu melalui kajian secara berkala minimal setahun sekali yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.

- e) Legal risk events, reputation risk, strategic risk and compliance risk that can have an impact on the Bank's loss;
- 2. Monitor problems related to all risks and ensure corrective steps.
- 3. Give special attention to operational risk, which is indicated by Zero Tolerance towards Fraud carried out by internal parties with strict sanctions.

The Directors have clear guidelines for their duties and are responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by the Bank as a whole, including evaluating and providing directions for risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Division and submitting these reports to the Board of Commissioners in the form of Risk Profile report.

### **Adequacy of Policies, Procedures, and Limit Determination**

To establish a Risk Management policy, the Board of Commissioners and Directors always consider the risk appetite, risk tolerance and limits according to the scale, characteristics and complexity of the Bank's business. Policies, Procedures and Limit Determinations are always socialized to the entire organization.

Determination of risk appetite, risk tolerance and limit always through periodic review at least once a year which includes the following:

1. Accountability and level of delegation of clear authority.

2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank;
4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memiliki eksposur risiko.

### **Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia Manajemen Risiko.**

Sampai dengan tahun 2018 tahapan – tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT yakni :

1. Evaluasi terhadap Proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko :
  - a) Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya, identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank yang juga meliputi produk dan jasa – jasa lainnya dan telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada Risk Taking Unit.
  - b) Pengukuran risiko dengan melihat keberhasilan dalam mengevaluasi dan mengukur risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk .

2. Documentation of procedures and determination of limits adequately to facilitate the implementation of audit reviews and traces;
3. Implementation of a review of procedures and limit determination periodically at least 1 (one) time in a year according to the type of risk, needs and development of the Bank;
4. Determination of limits is carried out comprehensively on all aspects related to risk, which includes the overall limit, limit per risk, and limit per activity of the bank that has risk exposure.

### **Risk Management Process, Information Systems and Human Resources Risk Management.**

Until 2018 the stages of risk management that have been carried out by Bank NTT are:

1. Evaluation of the process of identification, measurement, monitoring and risk control:
  - a) Risk identification is proactive, covers all bank business activities and is carried out in order to analyze the sources and potential risks and their impacts, identification is done by analyzing all types and characteristics of risks contained in each business activity of the bank which also includes other products and services and periodic monitoring of implementation has been carried out and communicated to Risk Taking Units.
  - b) Measurement of risk by seeing success in evaluating and measuring risk will be influenced by the strength of the control environment that is formed.

2. Evaluasi terhadap kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Sampai dengan tahun 2018, Sistem Informasi Manajemen Risiko mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, inovatif, tepat waktu dan dapat diandalkan, mampu mengakomodir strategi, mitigasi risiko, dan informasi bisa direspon secara cepat oleh manajemen.

### **Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko**

Bank NTT telah menerapkan pengendalian risiko dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Menetapkan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit yang melakukan pengendalian internal dimana pada setiap Kantor cabang memiliki Resident Inspector yang melakukan fungsi internal audit dengan mekanisme kerja H+1.
2. Divisi Manajemen Risiko merupakan unit kerja independen yang membuat kebijakan Manajemen risiko, metodologi pengukuran dan penetapan limit risiko. Proses pengkajian terhadap model dilakukan oleh internal Audit.
3. Setiap produk dan aktivitas baru serta kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi Manajemen Risiko.
4. Terdapat sistem kaji ulang yang Independen dan berkelanjutan terhadap proses dan kerangka manajemen risiko.

2. Evaluation of the adequacy of the Risk Management Information System.

Until 2018, the Risk Management Information System is able to provide accurate, complete, innovative, timely and reliable data, capable of accommodating strategies, risk mitigation, and information that can be responded quickly by management.

### **Risk Management Internal Control System**

Bank NTT has implemented risk control in risk management including:

1. Establish an organizational structure by performing a clear separation of functions between operational work units and units that carry out internal controls where each branch office has a Resident Inspector who performs the internal audit function with the H + 1 working mechanism.
2. The Risk Management Division is an independent work unit that makes risk management policies, methodologies for measuring and setting risk limits. The process of reviewing the model is carried out by internal Audit.
3. Every new product and activity and policy that will be issued is reviewed and monitored by the Risk Management Division.
4. There is an independent and ongoing review system for the risk management process and framework.

# STRATEGI PERMODALAN

## Capital Strategy

### Komposisi Permodalan Bank

#### a. Modal Dasar

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat Notaris Lalu Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, modal dasar Bank adalah Rp. 4.000.000.000.000, terbagi atas:

Saham Seri A Series A shares	300.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000 300,000,000 shares with a nominal value of Rp. 10,000
Saham Seri B Series B shares	100.000.000 lembar dengan nominal Rp. 10.000 100,000,000 shares with a nominal value of Rp. 10,000

Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima deviden dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

### Bank Capital Composition

#### a. Authorized capital

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 08 dated 27 May 2016 made by Notary Lalu Muhamad Supriyadi, S.H, M.Kn, the Bank's authorized capital is Rp. 4,000,000,000,000, divided into:

Series A shares are shares that are only owned by the Provincial Government, City Government and Regency Government. Series A shares have special voting rights, can be exchanged for series B shares, receive dividends and remaining liquidity in advance and have special voting rights in submitting proposals for nominating members of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners. Series B shares are ordinary shares.

#### b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke Dalam Perseroan Terbatas PT. BPD. NTT No.40 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp. 1.284.598.350;

#### b. Issued and paid-up capital and additional paid-in capital

Based on the Deed of Approval of the Addition of Capital Deposit into a Limited Liability Company PT. BPD. NTT No.40 dated January 24 2018 made by Notary Roberto Valentino Mambaitfeto, SH, M.Kn has been approved to increase the issued and fully paid capital in the amount of Rp. 1,284,598,350;

Saham Seri A Series A shares	Rp.128.389.835 lembar saham dengan nominal Rp.10.000 Rp. 128,389,835 shares with a nominal value of Rp. 10,000
Saham Seri B Series A shares	Rp.70.000 lembar saham dengan nominal Rp.10.000,- Rp. 70,000 shares with a nominal value of Rp. 10,000, -

Berdasarkan Laporan Perkembangan Modal Posisi sampai dengan 31 Desember 2018, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Based on the Outstanding Capital Development Report as of December 31, 2018, the composition of shareholders is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah lembar saham ditempat-kan dan disetor penuh The number of shares issued and fully paid	Prosentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Nominal (dalam rupiah) Nominal (in rupiah)
Saham Seri A Series A shares			
Provinsi NTT NTT Province	40.516.200	31.54	405.162.000.000
Pemkot Kupang City Government of Kupang	8.205.000	6.39	82.050.000.000
Pemkab. Kabupaten Kupang Regency Government of Kupang	9.320.952	7.25	93.209.520.000
Pemkab. Timor Tengah Utara Regency Government of Timor Tengah Utara	8.769.187	6.83	87.691.870.000
Pemkab. Timor Tengah Selatan Regency Government of Timor Tengah Selatan	7.684.084	5.98	76.840.840.000
Pemkab. Sumba Timur Regency Government of Sumba Timur	6.300.000	4.90	63.000.000.000
Pemkab. Sumba Barat Regency Government of Sumba Barat	5.500.000	4.28	55.000.000.000
Pemkab. Manggarai Timur Regency Government of Manggarai Timur	5.000.000	3.89	50.000.000.000
Pemkab. Belu Regency Government of Belu	4.227.311	3.29	42.273.110.000
Pemkab. Rote Ndao Regency Government of Rote Ndao	3.555.000	2.77	35.550.000.000
Pemkab. Sumba Barat Daya Regency Government of Sumba Barat Daya	3.300.000	2.57	33.000.000.000
Pemkab. Lembata Regency Government of Lembata	2.992.500	2.33	29.925.000.000
Pemkab. Manggarai Regency Government of Manggarai	2.881.574	2.24	28.815.740.000
Pemkab. Sumba Tengah Regency Government of Sumba Tengah	2.744.438	2.14	27.444.380.000
Pemkab. Manggarai Barat Regency Government of Manggarai Barat	2.500.000	1.95	25.000.000.000



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah lembar saham ditempat-kan dan disetor penuh The number of shares issued and fully paid	Prosentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Nominal (dalam rupiah) Nominal (in rupiah)
Pemkab. Flores Timur Regency Government of Flores Timur	2.500.000	1.95	25.000.000.000
Pemkab. Nagekeo Regency Government of Nagekeo	2.300.000	1.79	23.000.000.000
Pemkab.Sabu Raijua Regency Government of Sabu Raijua	2.200.000	1.71	22.000.000.000
Pemkab. Ende Regency Government of Ende	2.101.578	1.64	21.015.780.000
Pemkab. Malaka Regency Government of Malaka	2.000.000	1.56	20.000.000.000
Pemkab. Sikka Regency Government of Sikka	1.566.346	1.22	15.663.460.000
Pemkab. Alor Regency Government of Alor	1.125.665	0.88	11.256.650.000
Pemkab. Ngada Regency Government of Ngada	1.100.000	0.86	11.000.000.000
Jumlah Saham Seri A Total Serie A Share	128.389.835	99.95	1.283.898.350.000
Saham Seri B Series ABshares			
Charles Amos Corputy	40.000	0.03	400.000.000
L.O. Wila Huky	20.000	0.01	200.000.000
Johan Christian Tallo	10.000	0.01	100.000.000
Jumlah Saham Seri B Total Serie B Share	70.000	0.05	700.000.000
Jumlah Total	128.459.835	100.00	1.284.598.350.000

## Perincian Modal

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dirinci modal Bank sebagai berikut:

## Capital details

Based on OJK Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, Bank capital is specified as follows:

MODAL Modal		
A	MODAL INTI (Tier 1)	1.669.849
	a. Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1)	1.669.849
	1. Modal Disetor	421-422 1,284.598

<b>MODAL</b> Modal		
2. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserve)		426.424
2.1. Faktor Penambah		601.007
a. Agio Saham	431	0
b. Modal Sumbangan	433	247
c. Cadangan Umum	451	349.944
d. Laba Tahun-Tahun Lalu yang dpt diperhitungkan (100%)		0
d.i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	461x25%	0
d.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kew.keuangan	2075 & 2820	0
d.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi		0
e. Laba tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%)		250.816
e.i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	465	250.816
e.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewjbn keuangan	2075 & 2820	0
e.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi		0
f. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan	436	0
g. Dana setoran modal	455	0
h. Waran yang diterbitkan (50%)	471 & 472	0
i. Opsi saham yg diterbitkn dlm rangka program komp berbasis saham (50%)	473,474 & 475	0
j. pendapatan komprehensif lainnya	440	0
k. saldo surplus revaluasi aset tetap	456	0
2.2. Faktor Pengurang		174.583
a. Disagio	432	0
b. Rugi tahun-tahun lalu yg dpt diperhitungkan (100%)		0
b.i. Rugi tahun-tahun lalu	462	0
c. Rugi tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%)		0
c.i. Rugi tahun berjalan	466	0
d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	437	0
e. Pendapatan kompr.lain : kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual	445	0
f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif		172.336
g. PPA Non Produktif		2,247
h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book.		
3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama		41.173
3.1. Perhitungan pajak tangguhan	228	37.491
3.2. goodwill		0
3.3. Aset tidak berwujud lainnya	212	3.682

<b>MODAL</b> Modal		
	3.4. Sel u h penyertaan	0
	3.5. kekurangan modal pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan	0
	3.6. eksposur sekuritisasi	0
	b. Modal Inti tambahan (Additional Tier 1)	0
<b>B</b>	<b>MODAL PELENGKAP ( Tier 2)</b>	<b>81.071</b>
	a. Modal Saham atau lainnya	0
	b. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan modal pelengkap	0
	c. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR)	81.071 .00
	1) Cadangan umum PPA	0
	2) Cadangan umum PPA Transaksi Rekening Administratif	0
	d. Cadangan Tujuan	0
<b>C</b>	<b>FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP</b>	<b>0</b>
	a).Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank	0
	b). Penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain tersebut.	0
<b>D</b>	<b>TOTAL MODAL (A + B - C )</b>	<b>1.750.920</b>

## 1.1. Strategi pengelolaan modal

### a. Sumber Permodalan

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku, dimana modal yang diwajibkan oleh OJK di analisa dalam 2 tier :

1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan Laba periode berjalan setelah pajak
2. Modal tier 2, meliputi Cadangan Umum Aset Produktif (maksimal 1,25% ATMR) dan Cadangan Tujuan.

## 1.1. Capital management strategy

### a. Capital Resources

The Bank calculates capital requirements based on the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2016 dated February 2, 2016 concerning the applicable Capital Adequacy Ratio, where capital required by the OJK is analyzed in 2 tiers:

1. Tier 1 capital, including issued and fully paid capital, general reserves, profit and profit balance for the current period after tax
2. Tier 2 capital, including General Earning Asset Reserves (maximum 1.25% RWA) and Purpose Reserves.

b. Perencanaan Modal

Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan mendukung rencana bisnis, bank memiliki kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara lain:

1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang saham berupa dividen ditentukan oleh besarnya modal yang disetor.
2. Dalam rangka menghasilkan tingkat dividen yang besar, bank melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan menghasilkan rentabilitas yang tinggi.
3. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan/pendekatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota selaku Pemegang Saham.
4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota melalui dukungan atas program pemberdayaan masyarakat dan kepedulian Bank melalui *Corporate Social Responsibility* dan promosi-promosi.

b. Capital Planning

To meet KPMM according to risk profiles and support business plans, banks have policies to maintain strong capital, including:

1. The rate of return to shareholders in the form of dividends is determined by the amount of paid-in capital.
2. In order to produce a large dividend rate, the bank implements various strategies aimed at producing high profitability.
3. Increase Paid-in Capital through an increase / approach to cooperation with the Provincial / District and City Regional Governments as Shareholders.
4. Become a partner of the Regional Government in the economic development of the community in the Regency / City through support for community empowerment programs and Bank's care through Corporate Social Responsibility and promotions.



# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

## Implementation of Risk Management

**Pengungkapan Manajemen Risiko secara kuantitatif sesuai SE BI No. 14/35/DNDP tanggal 10 Desember 2012**

**Disclosure of Risk Management quantitatively according Circular Letter No. 14/35 / DPNP on December 10, 2012**

Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum  
Table 1.a Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks						
No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2017 31 December 2017		31 Desember 2018 31 December 2018		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
I	KOMPONEN MODAL					CAPITAL SCTRUCTURE
	A. Modal Inti	1,562,145		1,637,249		Core Capital (Tier - 1)
	1. Modal Disetor	1,211,598		1,284,598		Paid-in Capital
	2. Cadangan Tambahan Modal	395,749		393,824		Reserves of Additional Paid-in Capital
	3. Modal Inovatif *)					Innovative Capital Instruments *)
	4. Faktor Pengurang Modal Inti *)	45,202		41,173		Tier - 1 Capital Deduction Factor
	5. Kepentingan Non Pengendali					Non-Controlling Interest
	B. Modal Pelengkap	69,801		81,071		Supplementary Capital
	1. Level Atas (Upper Tier 2) *)	69,801				(Upper Tier 2) *)
	2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *)					2. (Lower Tier 2) maximum 50% of Tier - 1 Capital *)
	3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap*)					Tier - 2 Capital Deduction Factor
	C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal pelengkap					Tier - 1 and Tier - 2 Capital Deduction Factor
	Eksposur Sekuritisasi					Securitization exposure
	D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)					ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL (TIER - 3)
	E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK					ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL FOR MARKET RISK ANTICIPATION
	MENGANTISIPASI RISIKO PASAR					MARKET RISK ANTICIPATE

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM						
Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks						
No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2017 31 December 2017		31 Desember 2018 31 December 2018		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C)	1,631,946		1,718,320		TOTAL OF CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E)	1,631,946		1,718,320		TOTAL OF CORE CAPITAL, SUPPLEMENTARY CAPITAL, AND ADDITIONAL SUPPLEMENTARY FOR MARKET RISK ANTICIPATION (A+B+C+E)
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT	5,584,099		6,485,689		RISK WEIGHTED ASSET FOR CREDIT RISK
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL	1,617,014		1,624,466		RISK WEIGHTED ASSET FOR OPERATIONAL RISK
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR			-		RISK WEIGHTED ASSET FOR MARKET RISK
A. Metode Standard						Standardized Method
B. Model Internal						Internal Model
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II: (IV+V)]	22.66		21.59		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK AND OPERATIONAL RISK [II: (IV+V)]
VIII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL & RISIKO PASAR [(III): (IV+V+VI)]	22.66		21.59		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK [(III): (IV+V+VI)]

Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,341,453				1,341,453
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4,247				4,247
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-				
4	Tagihan Kepada Bank	442,896				442,896
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	115,810	16,026	9,593		141,429
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	3,059,441	1,762,516	1,935		4,823,892
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	920,243	653,730	5,448		1,579,421
9	Tagihan kepada Korporasi	877,468	215,185	254,807		1,347,460
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	26,883	28,762	586		56,181
11	Aset Lainnya	375,475	189,728	1,310		566,113
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)					-
	Total	7,163,866	2,865,547	273,679		10,303,092



Table 2.1.a : Disclosure of Net Receivables by Area – Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY AREA – BANK ONLY						Portfolio Category			
31 Desember 2018 31 December 2018					Total				
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region								Total	
Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
			-	-			Receivables on Sovereigns		
518	-	42,974	-	43,492			Receivables on Public Sector Entities		
			-	-			Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution		
			-	-		Receivables on Banks			
186,557	33,883	8,793		229,233		Loans Secured by Residential Property			
			-	-		Loans Secured by Commercial Real Estate			
3,621,020	2,142,698	2,132	-	5,765,850		Employee/Retired Loans			
717,199	503,289.00	5,168	-	1,225,656		Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio			
993,790	347,050	337,721		1,678,561		Receivables on Corporate			
29,083	19,032	76		48,191		Past Due Receivables			
				-		Other Assets			
			-	-		Exposures at Sharia Based Business			
5,548,167	3,045,952	396,864	-	8,990,983		Total			

Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak -  
Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity					
		< 1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn > 5 years	Non- Kontraktual Non- contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,341,453					1,341,453
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		4,247				4,247
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank	359,896	48,000	15,000	20,000		442,896
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	552	1,646	5,799	133,431		141,428
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	27,046	261,652	511,017	4,024,177		4,823,892
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	397,019	321,674	303,465	557,263		1,579,421
9	Tagihan kepada Korporasi	866,519	132,315	140,336	208,291		1,347,461
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	56,181					56,181
11	Aset Lainnya					566,113	566,113
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total	3,048,666	769,534	975,617	4,943,162	566,113	10,303,092

Table 2.2.a : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity – Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY CONTRACTUAL MATURITY – BANK ONLY							Portfolio Category		
31 Desember 2018 31 December 2018						Total			
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity									
< 1 tahun < 1 year	>1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years	>3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years	> 5 thn > 5 years	Non- Kontraktual Non- contractual					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
1,671,359.00					1,671,359.00	Receivables on Sovereigns			
	43,493.00				43,493.00	Receivables on Public Sector Entities			
					-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution			
60,968.00	3,000.00	80,000.00			143,968.00	Receivables on Banks			
					-	Loans Secured by Residential Property			
					-	Loans Secured by Commercial Real Estate			
9,524.00	255,078.00	621,551.00	4,846,349.00		5,732,502.00	Employee/Retired Loans			
55,228.00	285,812.00	258,750.00	312,582.00		912,372.00	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio			
187,961.00	122,534.00	111,649.00	251,966.00		674,111.00	Receivables on Corporate			
1,212,185.00					1,212,185.00	Past Due Receivables			
				533,259.00	533,259.00	Other Assets			
						Exposures at Sharia Based Business(if any)			
3,197,225.00	709,917.00	1,071,950.00	5,410,897.00	533,259.00	10,923,249.00	TOTAL			

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2017 31 December 2017							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	14,401	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	423,603	-	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Rumah Tangga	-	-	-	-	68,283	-
20	Bukan Lapangan Usaha	1,457,983	-	-	-	-	-
21	Lainnya	1,457,983	14,401	-	423,603	68,283	-
Total							

Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR – BANK ONLY								
31 Desember 2017 31 December 2017								
	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai/ Pensiunan Employee/ Retired Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)	Economy Sector
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	-	-	94,394	9,773	798	-	-	Agriculture, Hunting and Forestry
	-	-	10,149	18,532	-	-	-	Fishery
	-	-	1,854	1,755	28	-	-	Mining and Quarrying
	-	-	20,878	40,619	15	-	-	Manufacturing
	-	-	8,516	30,195	-	-	-	Electricity, Gas and Water
	-	-	161,086	317,285	5,842	-	-	Construction
	-	-	403,615	425,250	1,880	-	-	Wholesale and Retail Trading
	-	-	24,247	138,182	-	-	-	Hotel and Food & Beverage
	-	-	37,222	28,268	81	-	-	Transportation, Warehousing and Communications
	-	-	302	2,827	45	-	-	Financial Intermediary
	-	-	6,592	23,705	6	-	-	Real Estate, Rental and Business Services
	-	-	20,196	14,352	-	-	-	Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
	-	-	1,221	5,856	192	-	-	Education Services
	-	-	6,827	2,892	-	-	-	Human Health and Social Work Activities
	-	-	9,436	8,456	31	-	-	Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal
	-	-	2,971	1,075	-	-	-	Activities of Households as Employers
	-	-	24	-	-	-	-	International Institution and Other Extra International Agencies
	-	-	234	-	-	-	-	Undefined Activities
	-	4,009	1,257,685	-	548	-	-	Household
	-	-	-	60,000	-	359,080	-	Non Business Field
	-	4,009	2,067,449	1,129,022	9,466	359,080	-	Others
								Total

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2018 31 December 2018							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2	Perikanan						-
3	Pertambangan dan Penggalian						-
4	Industri pengolahan						-
5	Listrik, Gas dan Air						-
6	Konstruksi		43,493				-
7	Perdagangan besar dan eceran						-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum						-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi						-
10	Perantara keuangan				143,968		-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan						-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib						-
13	Jasa pendidikan						-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial						-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya						-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga						-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya						-
19	Rumah Tangga						-
20	Bukan Lapangan Usaha						229,129
21	Lainnya	1,671,359					-
	Total	1,671,359	43,493		-	143,968	229,129

Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR – BANK ONLY								
31 Desember 2018 31 December 2018								
	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	Aset Lainnya Other Assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any)	Economy Sector
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			15,334		8,664			Agriculture, Hunting and Forestry
	-	-	10,156	21,998	6,199			Fishery
	-	-	1,896	11,278	1,398			Mining and Quarrying
	-	-	23,192	27,713	38,217			Manufacturing
	-	-	1,519	16,723	12,128			Electricity, Gas and Water
	-	-	29,440	149,023	443,931			Construction
	-	-	286,245	184,420	578,854			Wholesale and Retail Trading
	-	-	32,349	91,755	11,820			Hotel and Food & Beverage
	-	-	43,268	30,820				Transportation, Warehousing and Communications
	-	-	552.00	6,766				Financial Intermediary
	-	-	28,643	15,550	31,883			Real Estate, Rental and Business Services
	-	-						Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
	-	-	1,909	5,208	449			Education Services
	-	-	3,224	13,506	2,552			Human Health and Social Work Activities
	-	-	16,860	3,447	9,332			Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal
	-	-	2,184	-	36			Activities of Households as Employers
	-	-	-	-	-			International Institution and Other Extra International Agencies
	-	-	223	-	7			Undefined Activities
	-	-	-	-	-			Household
	-	5,732,502	118	-	-			Non Business Field
	-	-	415,272	5,906	59,674	533,259		Others
	-	5,732,502	912,384	584,113	1,205,144	533,259	-	Total

Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017				
		Wilayah Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	7,390,473	2,926,278	276,085		10,592,836
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired )	692,824	292,749	119,679		1,105,252
	a. Belum jatuh tempo	625,264	246,847	117,731		989,842
	b. Telah jatuh tempo	67,560	45,902	1,948		115,410
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	47,364	7,535	133		55,032
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	65,545	20,920	1,659		88,124
5	Tagihan yang dihapus buku	53,874	24,254	17,672		95,800



2.4.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON AREA - CONSOLIDATED					
31 Desember 2018 31 December 2018					Portfolio Category
Wilayah Region					
Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Wilayah 4 Region 4	Total	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5,537,274	2,972,738	308,793		3,346,329	Receivables
5,506,451	2,955,262	307,877		8,769,590	Receivables is impaired
5,441,653	2,926,327	307,527.00		8,675,507	a. Not to maturity
64,798	28,935	350		94,083	b. Has matured
32,999	3,830	1,644		38,473	Allowance for impairment losses - Individual
59,167	19,682	1,364		80,213	Allowance for impairment losses - Collective
42,618	7,643.00	1,598.00		51,859	Receivables removed the book

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2017 31 December 2017							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	107,959	103,891	4,642	4	5,532	
2	Perikanan	42,297	42,218	186	19	492	
3	Pertambangan dan Penggalian	5,809	5,727	102		77	
4	Industri pengolahan	87,267	87,359	141		1,175	
5	Listrik, Gas dan Air	52,961	49,527	3,500	11,182	59	
6	Konstruksi	633,896	611,249	25,496	37,145	14,023	
7	Perdagangan besar dan eceran	1,000,695	932,034	70,932	5,364	38,929	
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	223,166	224,259	401	121	3,895	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	71,043	69,298	2,071	15	3,324	
10	Perantara keuangan	8,960	8,810	152		125	
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	74,988	70,521	4,646	1,181	660	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2	2				
13	Jasa pendidikan	7,044	6,557	513		372	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,065	7,089	1		19	
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	27,141	27,053	179		361	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3,358	3,380			9	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	345	336	11		17	
19	Bukan Lapangan Usaha	5,641,394	5,680,528	2,437	1	18,875	
20	Lainnya						95,799
	Total	7,995,390	7,929,838	115,410	55,032	88,124	95,799

Table 2.5.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON ECONOMIC SECTORS - BANK ONLY						
31 Desember 2018 31 December 2018						
Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
	Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
26,708	25,101	1,715	2	2,938	-	Agriculture, Hunting and Forestry
38,399	38,679	204	219	623	-	Fishery
14,608	14,555	96		108		Mining and Quarrying
91,960	91,703	727	1,880	1,942	-	Manufacturing
33,062	29,612	3,500	2,748	51	-	Electricity, Gas and Water
688,147	673,064	16,534	17,210	8,915	-	Construction
1,087,948	1,030,044	60,032	11,250	32,838	-	Wholesale and Retail Trading
137,187	137,550	517	2,540	1,746	-	Hotel and Food & Beverage
87,907	87,196	1,176	435	2,512	-	Transportation, Warehousing and Communications
7,362	7,364			23	-	Financial Intermediary
78,737	74,256	4,723	1,182	2,040	-	Real Estate, Rental and Business Services
					-	Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
7,542	7,567			22	-	Education Services
19,504	19,521	25	16	280	-	Human Health and Social Work Activities
29,861	29,894	56	-	375	-	Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal
2,680	2,684	9		476	-	Activities of Households as Employers
					-	International Institution and Other Extra International Agencies
311.00	301	11		50	-	Undefined Activities
6,331,452	6,372,250	1,413	344	19,523	-	Non Business Field
86,216	83,382	3,345	648	5,749		Others
8,769,591	8,724,723	94,083	38,474	80,211	-	TOTAL

Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL			
No	Keterangan	31 Desember 2017 31 December 2017	
		CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	62,466	56,163
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(7,434)	31,961
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan		31,961
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	7,434	
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan		
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan		
	Saldo akhir CKPN	55,032	88,124

Table 2.6.a Movements of Impairment Provision Disclosure - Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

MOVEMENTS OF IMPAIRMENT PROVISION DISCLOSURE - BANK ONLY			
	31 Desember 2018 31 December 2018		Description
	CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"	
	(3)	(4)	
	159,445		Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses
			Additional/reversal allowance for impairment losses during the year-net
	28,626		Reversal allowance for impairment losses during the year
	130,819		Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year
			Other additional allowance during the year
	290,264	-	"Ending Balance-Allowance for Impairment

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL								
31 Desember 2017 31 December 2017								
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT, Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah <a href="#">Receivables on Sovereigns</a>							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <a href="#">Receivables on Development Bank</a>							
	Multilateral dan Lembaga Internasional <a href="#">Multilateral and International Institution</a>							
4	Tagihan Kepada Bank <a href="#">Receivables on Banks</a>		370,883	8,000	53,000			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <a href="#">Loans Secured by Residential Property</a>							
6	Kredit Beragun Properti Komersial <a href="#">Loans Secured by Commercial Real Estate</a>							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <a href="#">Employee/Retired Loans</a>							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <a href="#">Receivables on Micro, Small Business &amp; Retail Portfolio</a>							
9	Tagihan kepada Korporasi <a href="#">Receivables on Corporate</a>		40,000					
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <a href="#">Past Due Receivables</a>							
11	Aset Lainnya <a href="#">Other Assets</a>							
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) <a href="#">Exposures at Sharia Based Business (if any)</a>							
	TOTAL		410,883	8,000	53,000			

Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL								
31 Desember 2017 31 December 2017								
	B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr] B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B-(idn) Less than [Idr]B- Less than Id B-	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							1,341,453	1,341,453
							4,247	4,247
							11,013	442,896
							141,429	141,429
							4,823,892	4,823,892
							1,579,421	1,579,421
							1,307,460	1,347,460
							56,181	56,181
							566,113	566,113
							9,831,209	10,303,092

Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
31 Desember 2018 31 December 2018							
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT, Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah <a href="#">Receivables on Sovereigns</a>		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <a href="#">Receivables on Public Sector Entities</a>						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan <a href="#">Receivables on Development Bank</a>						
	Multilateral dan Lembaga Internasional <a href="#">Multilateral and International Institution</a>						
4	Tagihan Kepada Bank <a href="#">Receivables on Banks</a>		45,751		33,000		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <a href="#">Loans Secured by Residential Property</a>						
6	Kredit Beragun Properti Komersial <a href="#">Loans Secured by Commercial Real Estate</a>						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <a href="#">Employee/Retired Loans</a>						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <a href="#">Receivables on Micro, Small Business &amp; Retail Portfolio</a>						
9	Tagihan kepada Korporasi <a href="#">Receivables on Corporate</a>		40,000		50,000		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <a href="#">Past Due Receivables</a>						
11	Aset Lainnya <a href="#">Other Assets</a>						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) <a href="#">Exposures at Sharia Based Business (if any)</a>						
	TOTAL		85,751	-	83,000	-	-



Table 3.1.b. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL								
31 Desember 2018 31 December 2018								
	B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr] B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B- (idn) Less than [Idr] B- Less than Id B-	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	1,671,359	1,671,359
							43,493	43,493
								-
								-
							65,217	143,968
								-
								-
							5,732,502	5,732,502
							912,372	912,372
							584,111	674,111
							1,212,185	1,212,185
							533,259	533,259
								-
							10,754,498	10,923,249

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 December 31, 2017					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A Eksposur Neraca</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,341,453					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					4,247	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank		382,978				59,918
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					141,429	
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						4,823,892
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		40,000				
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya	417,558					
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	<b>Total Eksposur Neraca</b>	<b>1,759,011</b>	<b>422,978</b>			<b>141,429</b>	<b>4,888,057</b>
<b>B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi						
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	<b>Total Eksposur TRA</b>						
<b>C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>							
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only							
	31 Desember 2017 December 31, 2017				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
	75%	100%	150%	Lainnya			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Balance Sheet Exposure							
Receivables on Sovereigns							
				2,124	212.35	Receivables on Public Sector Entities	
Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution							
				106,555	10,655.46	Receivables on Banks	
				63,643	6,346.31	Loans Secured by Residential Property	
Loans Secured by Commercial Real Estate							
				2,411,946	241,194.60	Employee/Retired Loans	
1,579,421				1,184,566	118,456.58	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	
	1,307,460			1,315,460	131,546.00	Receivables on Corporate	
		13	56,169	84,267	8,426.65	Past Due Receivables	
		148,555		148,555	14,855.50	Other Assets	
Exposures at Sharia Based Business (if any)							
1,579,421	1,456,028	56,169		5,317,114	531,711.44	Total Balance Sheet Exposure	
Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure							
Receivables on Sovereigns							
Receivables on Public Sector Entities							
Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution							
Receivables on Banks							
Loans Secured by Residential Property							
Loans Secured by Commercial Real Estate							
Employee/Retired Loans							
Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio							
Receivables on Corporate							
	266,985			266,985	26,698.50	Past Due Receivables	
Exposures at Sharia Based Business (if any)							
Total Off Balance Transaction							
Counterparty Credit Risk							
Receivables on Sovereigns							
Receivables on Public Sector Entities							
Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution							
Receivables on Banks							

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 December 31, 2017					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan kepada Korporasi						
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk						

Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL							
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018 December 31, 2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,671,359					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					43,493	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank		103,610			40,358	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					5,732,502	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		40,000			50,000	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Neraca	1,671,359	143,610	-	-	-	5,866,353
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only							
	31 Desember 2017 December 31, 2017				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
	75%	100%	150%	Lainnya			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
							Receivables on Corporate
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
							Total Counterparty Credit Risk Exposure
							Total (A+B+C)

Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only							
	31 Desember 2018 December 31, 2018				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
	75%	100%	150%	Lainnya			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
							Balance Sheet Exposure
							Receivables on Sovereigns
					21,747	2,175.00	Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
					40,901	4,090.00	Receivables on Banks
							Loans Secured by Residential Property
							Loans Secured by Commercial Real Estate
					2,866,251	286,625.00	Employee/Retired Loans
	912,372				684,279	68,428.00	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
		584,111			617,111	61,711.00	Receivables on Corporate
			1,212,185		1,818,277	181,828.00	Past Due Receivables
		533,259			533,259	53,326.00	Other Assets
							Exposures at Sharia Based Business (if any)
	912,372	1,117,370	1,212,185	-	6,581,825	658,183	Total Balance Sheet Exposure
							Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
							Receivables on Sovereigns
							Receivables on Public Sector Entities
							Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution

**PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018 December 31, 2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk					
		0%	20%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi						
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6	Tagihan kepada Korporasi						
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only							
	31 Desember 2018 December 31, 2018				ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
	75%	100%	150%	Lainnya			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
					-	-	Receivables on Banks
					-	-	Loans Secured by Residential Property
					-	-	Loans Secured by Commercial Real Estate
					-	-	Employee/Retired Loans
					-	-	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	298,436				298,436	29,843.60	Receivables on Corporate
					-	-	Past Due Receivables
					-	-	Exposures at Sharia Based Business (if any)
	-	298,436	-	-	298,436	29,843.60	Total Off Balance Transaction
					-	-	Counterparty Credit Risk
					-	-	Receivables on Sovereigns
					-	-	Receivables on Public Sector Entities
					-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
					-	-	Receivables on Banks
					-	-	Receivables on Corporate
					-	-	Exposures at Sharia Based Business (if any)
					-	-	Total Counterparty Credit Risk Exposure
	-	-	-	-	-	-	Total (A+B+C)

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL								
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2017 31 December 2017					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A	Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,341,543					1,341,543	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4,247					4,247	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank	442,896					442,896	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	141,429					141,429	
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	4,823,892					4,823,892	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,579,421					1,579,421	
9	Tagihan kepada Korporasi	1,347,460					1,347,460	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	56,181					56,181	
11	Aset Lainnya	566,113					566,113	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Neraca	10,303,092					10,303,092	
B	Eksposur Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi	266,986					266,986	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Rekening Administratif	266,986					266,986	
C	Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							



Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES AND CREDIT RISK MITIGATION - BANK ONLY						
Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2018 31 December 2018					Portfolio Category
	Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other	Bagian Yang Tidak Dijamin Non- secured Part	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						Balance Sheet Exposure
1,671,359					1,671,359	Receivables on Sovereigns
43,493					43,493	Receivables on Public Sector Entities
					-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
143,968					143,968	Receivables on Banks
					-	Loans Secured by Residential Property
					-	Loans Secured by Commercial Real Estate
5,732,502					5,732,502	Employee/Retired Loans
912,372					912,372	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
674,111					674,111	Receivables on Corporate
1,212,185					1,212,185	Past Due Receivables
533,259					533,259	Other Assets
-	-	-	-	-	-	Exposures at Sharia Based Business (if any)
10,923,249	-	-	-	-	10,923,249	Total Balance Sheet Exposure
						Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
						Receivables on Sovereigns
						Receivables on Public Sector Entities
						Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						Receivables on Banks
						Loans Secured by Residential Property
						Loans Secured by Commercial Real Estate
						Employee/Retired Loans
						Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
298,436					298,436	Receivables on Corporate
						Past Due Receivables
						Exposures at Sharia Based Business (if any)
298,436	-	-	-	-	298,436	Total Off Balance Transaction
						Counterparty Credit Risk
-	-	-	-	-	-	Receivables on Sovereigns
-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities

PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL								
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2017 31 December 2017					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
6	Tagihan kepada Korporasi							
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk							
	Total (A+B+C)	10,570,078						10,570,078

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES AND CREDIT RISK MITIGATION - BANK ONLY							
Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2018 31 December 2018					Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part	Portfolio Category
	Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By						
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Corporate
-	-	-	-	-	-	-	Exposures at Sharia Based Business (if any)
-	-	-	-	-	-	-	Total Counterparty Credit Risk Exposure
11,221,685	0	0	0	0	0	11,221,685	Total (A+B+C)

**Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual**  
Credit Risk RWA Calculation Based on Standard Approach - Bank Only

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR ASET DI NERACA				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1,341,453		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4,247	2,123	2,123
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank	442,896	106,555	106,555
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	141,429	63,643	63,643
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	4,823,892	2,411,946	2,411,946
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,579,421	1,184,566	1,184,566
9	Tagihan kepada Korporasi	1,347,460	1,315,460	1,315,460
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	56,181	84,266	84,266
11	Aset Lainnya	566,113		148,555
	TOTAL	10,303,092	5,168,559	5,317,117

Table 6.1.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF ON BALANCE SHEET ASSETS EXPOSURES				
	31 Desember 2018 31 December 2018			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
	1,671,359			Receivables on Sovereigns
	43,493	21,747	21,747	Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
	143,968	40,901	40,901	Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
	5,732,502	2,866,251	2,866,251	Employee/Retired Loans
	912,372	684,278	684,279	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	674,111	617,111	617,111	Receivables on Corporate
	1,212,185	1,818,277	1,818,277	Past Due Receivables
	533,259		138,687	Other Assets
	10,923,249	6,048,565	6,187,253	TOTAL

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	266,985	266,985	266,985
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	TOTAL	266,985	266,985	266,985

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table 6.1.7 Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

KATEGORI PORTOFOLIO	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2018 31 December 2018	PORTFOLIO CATEGORY
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	5,584,099	6,485,689	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER

Table 6.1.2. Exposure Disclosure Obligations Commitments / Contingent on the Balance Sheet

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

EXPOSURE DISCLOSURE OBLIGATIONS COMMITMENTS / CONTINGENT ON THE BALANCE SHEET				
	31 Desember 2018 31 December 2018			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
				Receivables on Sovereigns
				Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
				Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
				Employee/Retired Loans
				Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	298,436	298,436	298,436	Receivables on Corporate
	-	-	-	Past Due Receivables
	298,436	298,436	298,436	TOTAL

Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN /KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank			
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
6	Kredit Beragun Properti Komersial			
7	Kredit Pegawai/Pensiunan			
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
9	Tagihan kepada Korporasi	266,986	266,986	266,986
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	TOTAL	266,986	266,986	266,986

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit  
Tabel 6.2.7. Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

PENGUNGKAPAN TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT Disclosure of Total Credit Risk Management			
Kategori Portofolio	31 Desember 2017 31 December 2017	31 Desember 2018 31 December 2018	Portfolio Category
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	5,584,099	6,485,689	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER



Table 6.2.2 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

CALCULATION OF RISK WEIGHTED ASSETS FOR CREDIT RISK UNDER STANDARDIZED APPROACH				
	31 Desember 2018 31 December 2018			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
	(3)	(4)	(5)	
				Receivables on Sovereigns
				Receivables on Public Sector Entities
				Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
				Receivables on Banks
				Loans Secured by Residential Property
				Loans Secured by Commercial Real Estate
				Employee/Retired Loans
				Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	298,436	298,436	298,436	Receivables on Corporate Past Due Receivables
	298,436	298,436	298,436	TOTAL

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual  
Table 8.1.a. Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only(Jutaan Rp)  
(million Rp)

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA INDIVIDUAL Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only							
No.	Pendekatan Yang Digunakan Approach	31 Desember 2017 31 December 2017			31 Desember 2018 31 December 2018		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir) Gross Profit 3 Years Average	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Profit 3 Years Average	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	862,408	129,361	1,617,014	866,382	129,957	1,624,466
	Total	862,408	129,361	1,617,014	866,382	129,957	1,624,466

Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL				
No.	Pos-pos	Saldo Outstanding	31 Desember 2017 31 December 2017	
			Jatuh Tempo Maturity	
			< 1 bulan < 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I NERACA</b>				
<b>A Aset</b>				
1.	Kas	417,558	391,443	15,675
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	934,215	613,481	64,147
3.	Penempatan pada bank lain	304,933	285,416	11,710
4.	Surat Berharga	551,041		141,938
5.	Kredit yang diberikan	7,995,393	72,407	314,674
6.	Tagihan lainnya			
7.	Lain-lain	176,034	64,126	26,304
	Total Aset	10,379,174	1,626,863	574,448
<b>B Kewajiban</b>				
1.	Dana Pihak Ketiga	7,012,950	1,387,092	884,705
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia			
3.	Kewajiban pada bank lain	743,712		
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	134,715		
5.	Pinjaman yang Diterima	373,345		
6.	Kewajiban lainnya			
7.	Lain-lain	2,114,452	1,444,672	221,028
	Total Kewajiban	10,379,174	2,831,764	1,105,733
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(1,204,901)	(531,85)
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>				
<b>A Tagihan Rekening Administratif</b>				
1.	Komitmen			
2.	Kontijensi			
	Total Tagihan Rekening Administratif			
<b>B Kewajiban Rekening Administratif</b>				
1.	Komitmen			
2.	Kontijensi			
	Total Kewajiban Rekening Administratif			
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif			
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		(1,204,901)	(531,85)
	Selisih Kumulatif		(1,204,901)	(1,736,186)

Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE – BANK ONLY				
31 Desember 2017 31 December 2017				Posts  (2)
Jatuh Tempo Maturity				
> 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month (6)	> 6 bln s.d.12 bln > 6 month to 12 month (7)	> 12 bulan > 12 month (8)		
Balance Sheet				
Assets				
Cash				
10,450				
51,317	41,054	164,216		Placement with Bank Indonesia
7,807				Placements with Bank Indonesia and other banks
233,103	53,000	123,000		Securities
344,220	458,126	6,605,966		Loan
Other Receivables				
17,624	11,808	56,172		Others
664,521	563,988	6,949,354		Total Assets
Liabilities				
807,276	1,562,421	2,371,456		Third Party Fund
Liabilities with Bank Indonesia				
Liabilities with Other Banks				
Securities Issued				
Borrowings				
Other Liabilities				
148,088	99,219	201,445		Others
995,364	1,661,640	3,824,673		Total Liabilities
(290,843)	(1,097,652)	3,124,681		Net assets (liabilities)
Off-Balance Sheet				
Off-Balance Sheet Receivables				
Commitment				
Contingency				
Total Off-Balance Sheet Liabilities				
Off-Balance Sheet Liabilities				
Commitment				
Contingency				
Total Off-Balance Sheet Liabilities				
Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities)				
(290,843)	(1,097,652)	3,124,681		Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)]
(2,027,029)	(3,124,681)	-		Cumulative Differences

Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL				
No.	Pos-pos	Saldo Outstanding	31 Desember 2018 31 December 2018	
			Jatuh Tempo Maturity	
			< 1 bulan < 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I NERACA</b>				
<b>A Aset</b>				
1.	Kas	394,572	364,786	14,965
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	887,158	555,789	66,274
3.	Penempatan pada bank lain	55,629	55,629	-
4.	Surat Berharga	957,201	49,870	177,444
5.	Kredit yang diberikan	8,769,851	223,097	372,021
6.	Tagihan lainnya	-	-	-
7.	Lain-lain	308,595	215,780	30,629
	Total Aset	11,373,006	1,464,951	661,333
<b>B Kewajiban</b>				
1.	Dana Pihak Ketiga	7,607,449	1,152,436	1,556,814
2.	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-
3.	Kewajiban pada bank lain	529,745	250,000	-
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	496,906	-	-
5.	Pinjaman yang Diterima	405,264	-	-
6.	Kewajiban lainnya	-	-	-
7.	Lain-lain	2,327,223	1,627,281	230,981
	Total Kewajiban	11,366,587	3,029,717	1,787,795
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(1,564,766)	(1,126,462)
<b>II REKENING ADMINISTRATIF</b>				
<b>A Tagihan Rekening Administratif</b>				
1.	Komitmen	-	-	-
2.	Kontijensi	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-
<b>B Kewajiban Rekening Administratif</b>				
1.	Komitmen	-	-	-
2.	Kontijensi	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		(1,564,766)	(1,126,462)
	Selisih Kumulatif		(1,564,766)	(2,691,228)

Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)  
(million Rp)

DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE – BANK ONLY				
31 Desember 2018 31 December 2018				Posts  (2)
Jatuh Tempo Maturity				
> 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month (6)	> 6 bln s.d.12 bln > 6 month to 12 month (7)	> 12 bulan > 12 month (8)		
Balance Sheet				
Assets				
14,821	-	-	Cash	
53,019	42,415	169,661	Placement with Bank Indonesia	
-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks	
137,897	191,990	400,000	Securities	
429,445	469,749	7,275,539	Loan	
-	-	-	Other Receivables	
20,521	13,749	27,916	Others	
655,703	717,903	7,873,116	Total Assets	
Liabilities				
847,745	1,528,788	2,521,666	Third Party Fund	
-	-	-	Liabilities with Bank Indonesia	
-	-	279,745	Liabilities with Other Banks	
-	225,843	271,063	Securities Issued	
-	-	405,264	Borrowings	
-	-	-	Other Liabilities	
154,757	103,687	210,517	Others	
1,002,502	1,858,318	3,688,255	Total Liabilities	
(346,799)	(1,140,415)	4,184,861	Net assets (liabilities)	
Off-Balance Sheet				
Off-Balance Sheet Receivables				
Commitment				
Contingency				
-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities	
Off-Balance Sheet Liabilities				
Commitment				
Contingency				
-	-	-	Total Off-Balance Sheet Liabilities	
-	-	-	Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities)	
(346,799)	(1,140,415)	4,184,861	Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	
(3,038,027)	(4,178,442)	6,419	Cumulative Differences	

## URAIAN TABEL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN KARENA TIDAK MEMILIKI EKSPOSURE

1. Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Asing
2. Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
3. Tabel 2.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
4. Tabel 2.3.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
5. Tabel 2.4.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
6. Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
7. Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
8. Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
9. Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif
10. Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual
11. Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
12. Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual
13. Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
14. Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
15. Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
16. Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual
17. Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

## DESCRIPTION TABLES ARE NOT DISCLOSED BECAUSE IT HAS NO EXPOSURE

1. Table 1.b Quantitative Disclosure of Capital Structure of Foreign Banks
2. Table 2.1.b : Disclosure of Net Receivables by Area – Consolidated with Subsidiary
3. Table 2.2.b : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity – Consolidated with Subsidiary
4. Table 2.3.b : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Consolidated with Subsidiary
5. 2.4.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated with Subsidiary
6. Table 2.5.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Consolidated with Subsidiary
7. Table 2.6.b Movements of Impairment Provision Disclosure - Consolidated with Subsidiary
8. Table 3.1.b Disclosure of Net Receivables based on Portfolio Category and Rating Scale - Consolidated with Subsidiary
9. Table 3.2.a. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Derivative Transaction
10. Table 3.2.b.1 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction – Bank Only
11. Table 3.2.b.2 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction – Consolidated with Subsidiary
12. Table 3.2.c.1 Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transaction – Bank Only
13. Table 3.2.c.2 Disclosure of Counterparty Credit Risk - Reverse Repo Transaction - Consolidated with Subsidiary
14. Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
15. Table 4.2.b Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
16. Table 5.1.a Disclosure of Securitization Transaction – Bank Only
17. Table 5.1.b Disclosure of Securitization Transaction – Consolidated with Subsidiary

18. Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individual
19. Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
20. Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
21. Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen
22. Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi
23. Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
24. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
25. Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
26. Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
27. Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
28. Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi
29. Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)
30. Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar
31. Tabel 7.2.a. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual
32. Tabel 7.2.b. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal Value at Risk/VaR) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
33. Tabel 8.1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
34. Tabel 9.1.b. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
35. Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
36. Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas -Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak


Catatan:

Bank tidak mengungkapkan uraian tabel diatas karena tidak memiliki exposure.

18. Table 5.2.a. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities – the Bank as Original Creditor – Bank Only
19. Table 5.2.b. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities – the Bank as Original Creditor – Consolidated with Subsidiary
20. Table 6.1.3 Disclosure of Exposure of Counterparty Credit Risk
21. Table 6.1.4 Disclosure of Exposure of Settlement Risk
22. Table 6.1.5 Disclosure of Securitization Exposure
23. Table 6.1.6 Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit (if available)
24. Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk under Standardized Approach – Consolidated: On Balance Sheet Assets Exposures
25. Table 6.2.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures
26. Table 6.2.3 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Counterparty Credit Risk
27. Table 6.2.4 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Disclosure of Exposure of Settlement Risk
28. Table 6.2.5 Disclosure of Securitization Exposure
29. Table 6.2.6 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit
30. Table 7.1 Disclosure of Market Using using Standardized Approach
31. Table 7.2.a. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk / VaR) Approach – Bank Only
32. Table 7.2.b. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk /VaR) Approach – Consolidated with Subsidiary
33. Table 8.1.b. Quantitative Disclosure of Operational Risk –Consolidated with Subsidiary
34. Table 9.1.b Disclosure of Rupiah Maturity Profile – Bank Consolidated with Subsidiary
35. Table 9.2.a Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile – Bank Only
36. Table 9.2.b Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile - Consolidated with Subsidiary

Notes:

The Bank does not disclose the following table because does not have exposure.

A photograph of a male employee in a white and blue uniform, smiling and holding a document. The background is a blurred office setting with a logo visible on the wall.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY





○ CSR merupakan salah satu upaya Perseroan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan kami pandang sebagai sebuah investasi sosial yang akan turut mendukung terciptanya keberlanjutan perusahaan.

CSR merupakan salah satu upaya Perseroan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan kami pandang sebagai sebuah investasi sosial yang akan turut mendukung terciptanya keberlanjutan perusahaan.

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

### KOMITMEN PERUSAHAAN

Sebagai bank yang telah bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 17 Juli 1962, Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja bank pada beberapa aspek dasar yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tak terpisahkan dari aktifitas perusahaan.

Komitmen Manajemen Bank NTT terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* terus diperbaiki agar tepat sasaran dengan dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris di Kupang.

Dalam rapat tersebut stakeholder memutuskan agar dalam pelaksanaan CSR, Bank NTT membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder, namun untuk penyalurannya tetap mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 56 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai

### COMPANY COMMITMENTS

As a bank that has grown in the midst of the people of East Nusa Tenggara since July 17, 1962, the NTT Bank has played an important role in actively participating through corporate social responsibility programs, this spirit is what underlies management in taking steps through strong commitments to carry out the Responsibility program. On a sustainable basis, Corporate Social Responsibility (CSR) through improving bank performance in several basic aspects covering social, economic and environmental aspects.

In relation to community and environmental empowerment, Bank NTT has always been committed to promoting community empowerment and welfare through bank products and services as well as through Corporate Social Responsibility (CSR) programs that are inseparable from the company's activities.

The commitment of Bank NTT Management to the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program is continually improved so that it is targeted with support from stakeholders as outlined in the Deed of Extraordinary Shareholders Meeting Number: 23 October 07 2013 made by Silvester Joseph Mambaitfeto Notary in Kupang.

In the meeting stakeholders decided that in the implementation of CSR, Bank NTT would build partnerships with all stakeholders, but for the distribution it would still refer to the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 56 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility of PT. Regional Development Bank

pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang diarahkan pada bidang pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan pembinaan oleh raga.

## DASAR PELAKSANAAN CSR

1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Setiap penanaman modal berkewajiban :
  - a. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
  - b. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
  - c. Penjelasan pasal 15 (b) ; "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu). " Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan."  
Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) " setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."
4. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

of East Nusa Tenggara. In accordance with these guidelines, this activity is carried out on an ongoing basis directed at the fields of education, culture, social, economy, health and physical development.

## BASIC OF IMPLEMENTATION OF CSR

1. Law No. 25 of 2007 concerning Investment Every investment is obliged to:
  - a. Carry out corporate social responsibility.
  - b. Respect the cultural traditions of the people around the location of investment business activities.
  - c. Explanation of article 15 (b); "Every investment is obliged to carry out corporate social responsibility".
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company article 47 paragraph 1 (one). "The company that runs its business in and / or related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities."  
This provision aims to continue to create a harmonious, balanced corporate relationship in accordance with the environment, norms and culture of the local community.
3. Government Regulation No. 47 of 2012 article 2 (two) "every company as a legal subject has social and environmental responsibility."
4. Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 56 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.

What is meant by corporate social responsibility is the responsibility inherent in each company to continue to create harmonious relationships and in accordance with the environment, values and norms of the local community.

## LOGO CSR BANK NTT

## BANK NTT CSR LOGO



### Arti Logo CSR

Guna membedakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT. Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang memiliki nilai filosofis tersendiri.

### Gambar tangan

Gambar tangan pada logo *Corporate Social Responsibility* PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang.

### Meaning of CSR Logo

In order to distinguish *Corporate Social Responsibility* activities from the Company's Promotional activities being carried out, PT. Bank NTT designs and uses a special logo in every implementation of the *Corporate Social Responsibility* program that has its own philosophical value.

### Hand drawing

Hand drawing on the *Corporate Social Responsibility* logo of PT. Bank NTT symbolizes sincerity and partnership in implementing social and environmental responsibilities in various fields.

## Warna biru

Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## Warna oranye

Warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT. Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.

## URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Bank NTT menyadari bahwa peranan bisnis haruslah mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengelola hasil dari alam dengan baik. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan, Bank NTT memiliki kontribusi besar dalam ikut menentukan pembangunan industri di Indonesia dan NTT pada khususnya. Sudah menjadi tanggung jawab Bank NTT agar investasi yang didanai tetap memperhatikan pengelolaan persoalan persoalan sosial dan lingkungan.

Perbankan termasuk Bank NTT dan lembaga keuangan, turut berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan arahan Direktur Utama Bank NTT pada Workshop Bank Berkelanjutan (Green Banking) tanggal 7-11 Desember 2015 dengan

## Blue

The blue color symbolizes professionalism, solidarity and loving power in carrying out social and environmental responsibility.

## Orange color

Orange is the color that inspires PT. Bank NTT is one of the pioneers of regional development not only in the area of financial products and services but also in the development of social and environmental capacities in East Nusa Tenggara. All this is done with a passion to make the people of East Nusa Tenggara Province better by synergizing with society and the environment.

## DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

Bank NTT realizes that the role of business must support community welfare and manage natural products well. As one of the companies engaged in the banking industry, Bank NTT has a major contribution in determining industrial development in Indonesia and NTT in particular. It is the responsibility of the Bank NTT so that funded investments continue to pay attention to the management of issues of social and environmental issues.

Banking, including Bank NTT and financial institutions, play a role in achieving sustainable development goals, this is in accordance with the direction of Bank NTT's Managing Director at the Sustainable Bank Workshop (Green Banking) on December 7-11 2015 with National

penyelenggara *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) di Aula Bank NTT Kantor Pusat Kupang. Kebijakan produk investasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek dan generasi sekarang, tetapi juga jangka panjang sehingga Bank NTT dituntut menjaga kepentingan generasi yang akan datang.

Dukungan bagi upaya bersama mengelola persoalan lingkungan dan social masyarakat, merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan Bank NTT dalam menciptakan produk dan jasa perbankan. Untuk itulah Bank NTT berupaya menyediakan portofolio produk berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bank berkelanjutan.

Sebagai perusahaan di sektor perbankan, Bank NTT menyadari penyaluran kredit secara langsung mempengaruhi keberlanjutan usaha dan operasional pada masa masa mendatang. Namun demikian Bank NTT juga tidak dapat mengabaikan pentingnya upaya bersama untuk mengelola keberlanjutan lingkungan. Ke depan, akan diterapkan kebijakan bagi perusahaan permohonan kredit dengan kategori korporasi, dimana Bank NTT mewajibkan perusahaan pemohon kredit dengan kategori korporasi untuk memperhatikan kepatuhan hukum terkait pengelolaan lingkungan.

Bank NTT belum menggunakan peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit dengan kategori korporasi, namun menjadi perhatian serius Bank NTT ke depan agar dapat menerapkan kebijakan ini.

Center for Sustainability Reporting (NCSR) organizers in Bank NTT Hall Kupang Head Office. The investment product policy is not only for short-term interests and current generation, but also long-term so that Bank NTT is required to safeguard the interests of future generations.

Support for joint efforts to manage environmental and social issues of the community is an important aspect that is considered by Bank NTT in creating banking products and services. For this reason, Bank NTT seeks to provide a sustainable product portfolio, with due regard to the provisions of legislation and sustainable bank practices.

As a company in the banking sector, Bank NTT is aware that lending directly affects business sustainability and operations in the future. However, Bank NTT also cannot ignore the importance of joint efforts to manage environmental sustainability. In the future, policies will be applied to credit application companies in the corporate category, where Bank NTT requires companies with credit categories in the corporate category to pay attention to legal compliance related to environmental management.

The NTT Bank has not yet used the PROPER rating (Program for Assessing Performance in Environmental Management) issued by the Ministry of Environment and Forestry, as a consideration in granting loans in the corporate category, but is a serious concern for Bank NTT in the future to implement this policy.

Diharapkan apabila Bank NTT dapat implementasi dari kebijakan ini, mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan, sehingga secara tidak langsung memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman secara maksimum dari Bank NTT.

### **Kebijakan Pengelolaan Lingkungan**

Sepanjang tahun 2018 bentuk kegiatan terkait tanggung jawab kepada lingkungan adalah melalui program efisiensi energi, pengelolaan emisi, pengelolaan air dan limbah, *green office* dan penghijauan. Program ini dijalankan dalam rangka mewujudkan partisipasi dan dukungan Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kerja Perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan bumi.

Sebagai perusahaan perbankan, Bank NTT berkontribusi pada upaya bersama melestarikan lingkungan melalui kebijakan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan industry. Secara bersamaan, Bank NTT juga turut aktif memperhatikan nilai lingkungan dalam melaksanakan kegiatan operasional pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang yang ada di seluruh wilayah NTT.

### **Implementasi Program Efisiensi energi**

#### **Konsumsi Energi**

Dalam kegiatan operasional Bank NTT, energi yang dikonsumsi meliputi energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Perusahaan mengonsumsi energi listrik terutama untuk kebutuhan operasional kantor.

It is expected that if Bank NTT can implement this policy, encourage companies to continue to improve environmental performance, so that it indirectly enables the company to obtain maximum loans from Bank NTT.

### **Environmental Management Policy**

Throughout 2018 the form of activities related to responsibility to the environment is through energy efficiency programs, emissions management, water and waste management, green offices and reforestation. This program is carried out in order to realize the Company's participation and support for environmental sustainability in the Company's work area while improving the quality of life of the earth.

As a banking company, Bank NTT contributes to the joint efforts to preserve the environment through investment policies given to business and industry. Simultaneously, the NTT Bank also actively pays attention to environmental values in carrying out operational activities at the Head Office and Branch Offices throughout the NTT region.

### **Implementation of an Energy Efficiency Program**

#### **Energy consumption**

In Bank NTT's operational activities, energy consumed includes electricity, fuel oil and gas. The company consumes electrical energy, especially for office operational needs.

Selain itu, Perusahaan juga mengonsumsi BBM untuk kebutuhan menopang pasokan listrik PLN (pemadaman bergiliran) sehingga Bank NTT menggunakan mesin listrik (genzet), mobil dinas operasional, baik dengan menggunakan kendaraan milik Perusahaan maupun transportasi umum, sedangkan energi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur Perusahaan.

Jumlah kantor cabang Bank NTT yang cukup banyak membuat konsumsi energi listrik cukup tinggi. Perusahaan tidak memproduksi energi listrik secara mandiri sehingga semua energi listrik yang dikonsumsi bersumber dari jaringan Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN).

Bank NTT berkomitmen untuk terus melakukan inisiatif demi menghemat pemakaian energi listrik di gedung perkantoran dengan upaya sebagai berikut:

1. Penggunaan Lampu yang hemat energi (led) dan jendela kaca untuk penerangan ruangan;
2. Persuasi terhadap karyawan/ti untuk mematikan penerangan, komputer, AC, dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak dipakai
3. Efisiensi waktu kerja dengan mengurangi waktu kerja lembur.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan energi listrik sebagai konsekuensi dari perkembangan bisnis Perusahaan.

Namun dengan penambahan jaringan kantor dan sarana prasarana kantor yang menggunakan energi listrik menunjukkan bahwa pemakaian solar untuk kepentingan mesin genzet pada tahun laporan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5.600 liter menjadi 6.705 liter untuk tahun 2018.

In addition, the Company also consumes fuel for the needs of supporting PLN's electricity supply (rotating blackouts) so that Bank NTT uses electric machinery (operational), operational service cars, either by using Company-owned vehicles or public transportation, while gas energy is used to meet the Company's kitchen needs .

The number of Bank NTT branch offices that make quite a lot of electricity consumption is quite high. The company does not produce electrical energy independently so that all electricity consumed is sourced from the State-Owned Electricity Company (PLN) network.

Bank NTT is committed to continuing the initiative to save electricity consumption in office buildings with the following efforts:

1. Use of energy-saving lamps (led) and glass windows for room lighting;
2. Persuasion of employees / employees to turn off lighting, computers, air conditioners, and other electronic devices that have not been used
3. Work time efficiency by reducing overtime work.

The initiative was carried out to anticipate the increase in electricity demand as a consequence of the Company's business development.

However, the addition of office networks and office infrastructure facilities that use electricity shows that the use of diesel fuel for generator engines in the reporting year has increased from the previous year of 5,600 liters to 6,705 liters for 2018.



Lebih lanjut, dalam hal penggunaan BBM (bensin) untuk aktivitas operasional, Jumlah BBM yang dikonsumsi pada periode pelaporan tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya kurang lebih 35.692 liter menjadi kurang lebih 50.735 liter. Untuk menghemat konsumsi BBM untuk aktivitas operasional kantor dan perjalanan dinas, Bank NTT melakukan inisiatif sebagai berikut:

1. Service kendaraan operasional secara berkala;
2. Mengganti onderdil yang aus untuk mengefisienkan kerja mesin;
3. Menyusun agenda perjalanan dinas secara kolektif antar unit tugas pada kota tujuan yang sama;
4. Mengurangi intensitas perjalanan dinas dengan mengoptimalkan alat-alat komunik

### Konsumsi Material

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan tidak menggunakan material yang langsung diambil dari alam (*raw materials*) untuk kegiatan operasional Perusahaan. Material utama yang digunakan dalam aktivitas operasional kami adalah kertas, alat tulis, dan tinta mesin cetak terutama untuk keperluan membuat surat menyurat, administrasi pelaporan, informasi rekening nasabah dan lain-lain.

### Material yang Digunakan dalam Aktivitas Operasional

Bank NTT menyadari, bahwa penggunaan kertas dan alat tulis secara tidak langsung memiliki dampak terhadap hutan sebagai penyedia bahan baku utama. Atas kesadaran ini, Perusahaan berusaha memulai inisiatif-inisiatif demi kelestarian hutan dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan material dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai berikut:

Furthermore, in terms of the use of fuel (gasoline) for operational activities, the amount of fuel consumed in the reporting period of 2018 has increased from the previous year to approximately 35,692 liters to approximately 50,735 liters. To save fuel consumption for office operations and official travel activities, Bank NTT takes the following initiatives:

1. Service operational vehicles on a regular basis;
2. Replacing worn parts to streamline engine work;
3. Arrange the agenda of official travel collectively between task units in the same destination city;
4. Reducing the intensity of official travel by optimizing communic devices

### Material Consumption

As a company engaged in the financial services sector, the Company does not use raw materials directly for the Company's operations. The main materials used in our operational activities are paper, stationery, and printing machine ink, especially for the purposes of making correspondence, reporting administration, customer account information and others.

### Material Used in Operational Activities

Bank NTT realizes that the use of paper and stationery indirectly has an impact on forests as the main provider of raw materials. For this awareness, the Company seeks to initiate initiatives for forest sustainability in the long term by optimizing the use of materials by applying the 3R principle (*Reduce, Reuse, Recycle*) as follows:

1. Menggunakan kembali amplop dan cover dokumen;
2. Memanfaatkan kertas bekas untuk memo dan note;
3. Mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan *e-paper* dan teknologi informasi, seperti mobile banking dan SMS banking; serta
4. Melakukan pemeliharaan mesin cetak, fax, mesin EDC dan mesin printer lebih efisien dalam penggunaan kertas dan tinta.

### Implementasi Program Pengelolaan Emisi

Emisi udara yang dilepaskan dari aktivitas operasional Perusahaan terutama Gas Rumah Kaca (CO<sub>2</sub>) dan substansi perusak lapisan ozon (CFC, HCFC). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersumber dari penggunaan energi listrik untuk gedung perkantoran serta pembakaran BBM untuk aktivitas transportasi pegawai. Sedangkan substansi pengikis lapisan ozon berasal dari pemakaian pendingin ruangan (AC) yang dipasang pada gedung perkantoran dan fasilitas lainnya.

Bank NTT menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis yang menggunakan energi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti emisi rumah kaca dan zat pengikis ozon. Pada periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan kuantitas emisi yang dihasilkan tersebut.

Namun, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari emisi substansi perusak lapisan ozon dengan melakukan pemeliharaan secara berkala pada kendaraan dinas Perusahaan dan Pendingin Ruangan (AC).

1. Reuse envelopes and document cover;
2. Use used paper for memos and notes;
3. Reducing paper use by using e-paper and information technology, such as mobile banking and SMS banking; and
4. Maintenance of printing machines, faxes, EDC machines and printer machines is more efficient in the use of paper and ink.

### Implementation of the Emission Management Program

Air emissions released from the Company's operational activities are mainly Greenhouse Gases (CO<sub>2</sub>) and ozone-depleting substances (CFCs, HCFCs). Greenhouse Gas (GHG) emissions are sourced from the use of electricity for office buildings and fuel burning for employee transportation activities. While the abrasive substance of the ozone layer comes from air conditioning (AC) that is installed in office buildings and other facilities.

Bank NTT realizes that in carrying out business activities that use energy will have environmental impacts such as greenhouse emissions and ozone abrasives. In the reporting period, the Company has not calculated the quantity of emissions produced.

However, the Company has made several efforts to reduce the environmental impact that comes from emissions of ozone depleting substances by conducting periodic maintenance on Company service vehicles and air conditioners.

## Implementasi Program Pengelolaan Air dan Limbah

### Konsumsi Air

Secara umum, konsumsi air oleh Perusahaan dipergunakan untuk keperluan sanitasi pegawai dan bangunan kantor serta rumah dinas. Pada periode pelaporan, jumlah penggunaan air diambil dari sumber air dari sumur yang dimiliki sendiri dan apabila debit air berkurang pada saat musim kemarau yang cukup panjang maka dilakukan pemesanan air dengan menggunakan mobil tangki air dan pada tahun laporan 2018 konsumsi air mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 1.584 m<sup>3</sup> menjadi kurang lebih 2.000 m<sup>3</sup>.

### Pengelolaan Limbah

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan juga tidak menghasilkan banyak limbah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Limbah utama yang dihasilkan dari aktivitas operasional terdiri dari limbah padat berupa kertas tidak terpakai dan limbah cair berupa air kotor. Berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua jenis limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun demikian, pengelolaan yang baik dan memenuhi standar manajemen lingkungan harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Selama tahun 2018, Bank NTT melakukan pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dengan 1 metode pembuangan yaitu :

- 1) Limbah Kertas: Melalui jasa pengelolaan sampah Dinas Kebersihan dan dikelola oleh bank sampah

## Implementation of Water and Waste Management Programs

### Water consumption

In general, water consumption by the Company is used for employee sanitation needs and office buildings and official homes. In the reporting period, water use was taken from water sources from self-owned wells and if the water discharge was reduced during the long dry season, water was ordered by using water tankers and in 2018 report water consumption increased from the previous year 1.584 m<sup>3</sup> becomes approximately 2,000 m<sup>3</sup>.

### Waste Management

As a company engaged in the financial services sector, the Company also does not produce a lot of waste which has a negative impact on the environment. The main waste generated from operational activities consists of solid waste in the form of unused paper and liquid waste in the form of dirty water. Based on the provisions of the Ministry of Environment, both types of waste are not included in the category of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste. However, good management and meeting environmental management standards must be carried out so as not to have a negative impact on the environment in the future.

During 2018, Bank NTT carried out waste management as a form of corporate social responsibility with 1 disposal method, namely

- 1) Paper Waste: Through the Waste Management Service waste management and managed by a waste bank

2) Limbah plastik: Melalui jasa pengelolaan sampah Dinas Kebersihan dan dikelola oleh bank sampah

Pada periode pelaporan, metode pengolahan limbah kertas, tinta mesin cetak dan alat tulis lainnya dilakukan dengan pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan setempat.

## **URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA.**

Bank NTT dalam melaksanakan aktivitasnya selalu mengedepankan kenyamanan karyawannya. Kenyamanan dalam bekerja merupakan hak dari setiap individu di perusahaan kami. Untuk mmewujudkannya, kami berkomitmen membuat semua karyawan kami tetap termotivasi dan bersemangat dalam berkerja.

Maka dari itu salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan tempat bekerja yang mendukung hal tersebut, baik secara fisik maupun non fisik. Pemahaman seperti inilah yang membuat kami percaya bahwa fasilitas Bank NTT yang baik bagi karyawannya adalah suatu keharusan.

Untuk mewujudkan komitmen kami tersebut dari sudut non fisik, kami menciptakan suasana kerja selaras ditengah keragaman dan kami sangat berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan kami.

2) Plastic waste: Through the Waste Management Service waste management and managed by a waste bank

In the reporting period, waste paper processing methods, ink printing machines and other stationery were carried out by transportation and further processing by the local Sanitation Department.

## **DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THAT ARE RELATED TO EMPLOYMENT, SAFETY AND EMPLOYMENT WELFARE.**

Bank NTT in carrying out its activities always prioritizes the comfort of its employees. Comfort in work is the right of every individual in our company. To make it happen, we are committed to keeping all our employees motivated and passionate about working.

Therefore one of the ways to make it happen is by providing workplaces that support this, both physically and non-physically. This understanding makes us believe that Bank NTT's facilities that are good for its employees are a must.

To realize our commitment from a non physical perspective, we create a harmonious work environment amid diversity and we are very committed to providing equal opportunities to all our employees.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian kami, dalam upaya mendukung komitmen tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas kantor yang baik serta menciptakan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan.

## **Pendidikan dan Pelatihan Karyawan**

Manajemen merupakan alat untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Enam unsur manajemen yaitu : *man, money, method, machines, material, market*, apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Unsur manusia (man) dianggap aset utama organisasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia. Unsur tersebut harus dipelihara dengan baik, bukannya dimanfaatkan secara produktif karena dianggap hanya sebagai faktor produksi. Pengembangan karyawan terus dilakukan oleh perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Pada prinsipnya pengembangan karyawan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan serta mengikuti program pengembangan, langkah selanjutnya ialah penilaian prestasi karyawan oleh manajer untuk menetapkan suatu kebijakan berarti untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya.

Bentuk perhatian tersebut adalah salah satunya dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan. Diharapkan agar melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Pelatihan sumber daya manusia berhubungan erat dengan penilaian terhadap terhadap hasil pekerjaan karyawan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil penilaian. Pelatihan dilakukan agar para karyawan

In addition, the thing that concerns us, in an effort to support this commitment is by building good office facilities and creating rules about occupational safety and health for employees.

## **Employee Education and Training**

Management is a tool for creating desired goals. Six elements of management, namely: man, money, method, machines, material, market, if managed properly will increase efficiency and effectiveness in achieving goals. Human element (man) is considered the organization's main asset in Human Resource management. These elements must be properly maintained, rather than being used productively because they are considered only as factors of production. Employee development continues to be carried out by the company because it will provide benefits to companies, employees, and the consumer community. In principle, employee development is an effort to improve the quality and work ability of employees. After employees are accepted, placed and hired as well as following the development program, the next step is to assess employee performance by the manager to establish a policy that means to give the best attention.

The form of attention is one of which can take the form of education and training. It is hoped that through education and training can improve employee performance.

Training in human resources is closely related to the assessment of the work results of employees, meaning that the training is carried out after the results of the assessment. The training is conducted so that

memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Harapan pendidikan dan latihan agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan akan berdampak pada aktivitas perusahaan yang optimal dan produktif, yang mana hasil akhirnya akan ada pada kualitas dan kuantitas dari pada barang dan jasa yang dihasilkan. Tentunya barang dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, presentasi kerja karyawan dan seberapa besar peranan pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Beberapa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank NTT dapat dilihat pada buku Annual Report ini.

Pada tahun 2018 Bank NTT juga mengikutsertakan pegawai pada pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain Pendidikan Teknik Analisa Lingkungan (TAL) dan *Workshop Green Banking* bagi Bank NTT.

## Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

### Pendekatan Manajemen

Sebagai faktor terbesar penggerak kegiatan operasional perusahaan, kehadiran karyawan sebagai sumber daya manusia perusahaan dalam pemenuhan berbagai fungsi dan tanggung jawab sehari-hari menjadi hal krusial bagi keberlanjutan usaha

employees have the knowledge, abilities and skills in accordance with the demands of the work they do.

The hope of education and training in order to improve employee work performance will have an impact on optimal and productive company activities, which will ultimately result in the quality and quantity of the goods and services produced. Of course the goods and services produced will be in accordance with what was previously planned, both in terms of quantity and quality.

The research is intended to find out how the implementation of education and training, employee work presentations and how much the role of education and training on employee performance. Some of the education and training conducted by Bank NTT can be seen on the HR on this Annual Report book.

In 2018 Bank NTT also included employees in education related to the environment including Environmental Analysis Engineering Education (TAL) and Green Banking Workshop for Bank NTT.

## Sustainable Human Resource Development

### Management Approach

As the biggest factor driving the operations of the company, the presence of employees as a company human resource in fulfilling various functions and daily responsibilities is crucial for the sustainability of the company's business. Timeliness in providing banking

perusahaan. Ketepatan waktu dalam memberikan layanan perbankan, pemberian informasi yang komprehensif kepada para nasabah, hingga respon cepat dalam menangani layanan keluhan nasabah, semuanya bergantung pada kesiapan dan kesigapan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.

Perusahaan terus meningkatkan profesionalisme seluruh sumber daya manusia-nya demi mencapai kualitas kinerja dan perilaku kerja terbaik yang sesuai visi, misi dan budaya organisasi perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terukur melalui berbagai hal, termasuk di antaranya pengembangan sistem, pelatihan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, yang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, hak asasi manusia, dan asas kesetaraan. Berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pemberian upah karyawan yang sesuai menjadi panduan Perusahaan dalam memberikan berbagai manfaat kepada karyawannya.

Perusahaan memandang pegawai sebagai aset strategis paling berharga yang harus dikelola melalui manajemen kerja yang baik dengan memperhatikan prinsip kebebasan, kesetaraan, keselamatan dan keamanan, serta penghargaan harkat dan martabat. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui beragam program pengembangan kualitas pegawai.

Sebagai partisipasi aktif Perusahaan dalam membangun komunikasi dengan para pegawai, Perusahaan

services, providing comprehensive information to customers, up to rapid response in handling customer complaints services, all depends on the readiness and readiness of trained and professional human resources.

The company continues to improve the professionalism of all its human resources in order to achieve the best quality of performance and work behavior that fits the company's vision, mission and organizational culture. For this reason, the company plans and manages targeted and measurable human resources through a variety of things, including system development, training, scholarships and so on.

The company manages human resources well, which pays attention to aspects of welfare, human rights, and the principle of equality. Various applicable rules and regulations and appropriate employee wage standards are the Company's guidelines in providing various benefits to their employees.

The company views employees as the most valuable strategic assets that must be managed through good work management by paying attention to the principles of freedom, equality, safety and security, and respect for dignity. Therefore, the Company always strives to improve employee competency through various employee quality development programs.

As the Company's active participation in building communication with employees, the Company

memiliki beberapa saluran komunikasi yang terdiri dari perundingan, musyawarah mufakat, surat usulan, diskusi dan dialog. Saluran tersebut dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan setiap informasi, kebijakan baru atau kegiatan penting lainnya. Selama periode pelaporan tahun 2018, SP-Bank NTT belum melakukan mediasi dan memperjuangkan hak pegawai yang terkait gaji pegawai, fasilitas pegawai, hak hak pensiunan termasuk isu isu HAM dikarenakan baru terbentuk.

### **Menciptakan Praktek Kerja Yang Layak**

Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam hal perolehan kompensasi, pengembangan diri, dan karir sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing tanpa adanya diskriminasi seperti perbedaan SARA dan jenis kelamin. Selama tahun 2018, tidak terdapat kasus

diskriminasi kepada pegawai yang terjadi di lingkungan kerja terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aspirasi politik dan status sosial.

Selain itu, Perusahaan berkomitmen untuk mencegah insiden pelibatan pekerja anak dan paksa yang melanggar hukum dan norma sesuai dengan ketentuan Perusahaan dengan hanya menerima pegawai yang berusia di atas 17 tahun.

Sehingga, kami dapat memastikan bahwa seluruh Unit Bisnis dan Kantor Cabang tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur dan pekerja paksa serta tidak terdapat operasi dan pemasok Perusahaan yang berisiko mempekerjakan pekerja anak dan pekerja paksa.

has several communication channels consisting of negotiations, consensus agreements, proposal letters, discussions and dialogues. The channel can be used as a medium to communicate any information, new policies or other important activities. During the reporting period of 2018, the NTT SP-Bank has not mediated and championed employee rights related to employee salaries, employee facilities, pensioner rights including issues of human rights issues because they were newly formed.

### **Creating Decent Work Practices**

Every employee has the same rights and opportunities in terms of obtaining compensation, self-development, and career in accordance with their respective performance and competency without discrimination such as differences in SARA and gender. During 2018, there were no cases

discrimination against employees that occurs in the work environment is related to race, color, gender, religion, political aspirations and social status.

In addition, the Company is committed to preventing incidents of inclusion of child labor and forced labor that violate laws and norms in accordance with the provisions of the Company by only accepting employees over the age of 17 years.

Thus, we can ensure that all Business Units and Branch Offices do not employ underage workers and forced workers and there are no Company operations and suppliers who risk employing child labor and forced labor.



Perusahaan juga melakukan seleksi pemasok berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang baik sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Pada periode pelaporan seluruh pemasok telah melalui proses seleksi tersebut, sehingga Perusahaan dapat memastikan bahwa pemasok tidak memiliki dampak negatif terhadap praktik ketenagakerjaan dan HAM.

Perusahaan juga memperhatikan tingkat fleksibilitas beban pekerjaan pegawai yang mencakup waktu kerja bagi pegawai tetap dan pegawai paruh waktu, serta hak cuti. Hal-hal tersebut merupakan upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat menjaga keseimbangan hidupnya sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di Perusahaan.

Disamping cuti tahunan, pegawai wanita juga berhak atas tiga bulan cuti bersalin (*maternity leave*). Pada periode pelaporan, tercatat sebanyak 98 orang pegawai wanita menggunakan hak *maternity leave*.

### **Kesejahteraan Pegawai**

Perusahaan memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawannya berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Secara khusus, dalam penyusunan paket remunerasi, Perusahaan menerapkan asas kesetaraan sehingga tidak membedakan paket berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan pada satu level jabatan terjadi bila terdapat perbedaan atas kinerja, kompetensi atau pengalaman kerja. Lebih lanjut, Perusahaan juga melakukan penyesuaian khusus pada paket remunerasi demi mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia-nya serta menambah nilai kompetitif Perusahaan di tengah-tengah industry.

The company also selects suppliers based on good labor principles as stipulated in the Procurement of Goods and Services Manual. In the reporting period all suppliers have gone through the selection process, so that the Company can ensure that suppliers do not have a negative impact on labor practices and human rights.

The company also pays attention to the level of flexibility of the workload of employees which includes work time for permanent employees and part-time employees, as well as leave rights. These are the Company's efforts to ensure that all employees can maintain their life balance as an integral part of their working life at the Company.

In addition to annual leave, female employees are also entitled to a three-month maternity leave. In the reporting period, there were 98 female employees using the right to leave maternity.

### **Employee welfare**

The company provides compensation that is appropriate for the work of all its employees based on applicable rules and standards. In particular, in preparing the remuneration package, the Company applies the principle of equality so that it does not differentiate packages based on gender, ethnicity, religion, race, and between groups. Differences at one position level occur when there are differences in performance, competence or work experience. Furthermore, the Company also made special adjustments to the remuneration package to encourage increased performance of its human resources and increase the Company's competitive value in the midst of the industry.

Perusahaan menerapkan PSAK (revisi 2013), "imbalan kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, iuran jaminan social, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan.

2. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan paska kerja, seperti pension, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, perusahaan memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank NTT yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank NTT telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program imbalan jasa merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu factor atau lebih seperti

The Company applies PSAK (revised 2013), "employee benefits", which regulates the accounting treatment and disclosure of employee benefits, both short and long term. Banks are also required to recognize liabilities and expenses when employees have provided services and the entity has received economic benefits from these services.

1. Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits such as salaries, benefits, social security contributions, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period the service is provided.

2. Long-term Employee Benefits

Long-term employment benefits and post-employment benefits, such as pensions, long-term leave, awards for service period and proportional service awards are calculated based on Company Regulations that are in accordance with Labor Law No.13 / 2003.

In connection with pension benefits, the company has a defined benefit pension plan for all of its permanent employees. The defined benefit pension plan is funded through payments to the NTT Bank Pension Fund which is determined by calculating the actuary periodically. The establishment of the Bank NTT Pension Fund has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his letter No. KEP-479 / KM.17 / 1996 dated 30 December 1996.

The service benefit program is a pension plan that determines the amount of pension benefits to be received by employees at retirement which usually depends on one or more factors such as age, years of

umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung perusahaan.

Pada tahun 2018, total dana gaji yang dikeluarkan Perusahaan untuk pegawai sebesar Rp.417.577 juta dibanding dengan total dana gaji pada tahun 2017 sebesar Rp.424.598 juta, atau mengalami penurunan sebesar (1.65% ) dari tahun sebelumnya. Perhitungan dan penentuan gaji pokok yang diterima pegawai tidak berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur suku, agama, ras, kelas atau jenis kelamin maupun jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan menghargai setiap kinerja dan prestasi yang dicapai oleh para pegawai tetap melalui pemberian benefit khusus yang diberikan di luar dari penghasilan rutin yang mereka terima.

Mengenai jaminan kesejahteraan pada masa pensiun, usia pensiun untuk seluruh pegawai Perusahaan ditetapkan 56 tahun dengan masa persiapan pensiunan satu tahun sebelum usia pensiun.

Perusahaan mengimplementasikan program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti melalui Program Asuransi Jamsostek dan IDP JHT (Iuran Dana Pensiun Jaminan Hari Tua) sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada periode pelaporan, total nilai kewajiban pensiun Perusahaan pada tahun 2018 mencapai Rp.22.306 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.24.926 juta atau mengalami penurunan sebesar (10.51%). Pada awal tingkat karir pegawai, Perusahaan memastikan bahwa besaran gaji pokok seluruh pegawai yang berada di wilayah operasional Nusa Tenggara Timur

service and amount of compensation. The amount of employee contributions in this pension program is set at 5% of the basic salary of the employee concerned and the rest is borne by the company.

In 2018, the total salary funds issued by the Company for employees amounted to Rp.417,577 million compared to total salary funds in 2017 amounting to Rp.424,598 million, or decreased by (1.65%) from the previous year. Calculation and determination of basic salary received by employees are not based on factors related to elements of ethnicity, religion, race, class or gender or gender. In addition, the Company respects every performance and achievement achieved by permanent employees through the provision of special benefits provided outside of the regular income they receive.

Regarding welfare guarantees in retirement, the retirement age for all Company employees is set at 56 years with a one-year pension preparation period before retirement age.

The company implements a defined contribution pension plan and a defined benefit through the Social Security Insurance Program and IDP JHT (Old Age Pension Fund Pension Contributions) in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In the reporting period, the total value of the Company's pension obligations in 2018 reached Rp.22,306 million compared to 2017 amounting to Rp.24,926 million or a decrease of (10.51%). At the beginning of the employee career level, the Company ensured that the base salary for all employees in the East Nusa Tenggara operational area was 187% above the

sebesar 187% diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan pegawai yang berada di wilayah operasional Surabaya sebesar 86% di atas Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.

Secara umum status kepegawaian Perusahaan terbagi 2 (dua), yaitu: Karyawan Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Struktur imbal jasa antara karyawan tetap dan karyawan kontrak pada umumnya sama, namun Bank memberikan tunjangan Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) kepada Karyawan Tetap.

Komponen imbal jasa Bank NTT terdiri dari :

1. Gaji
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Kesejahteraan
4. Tunjangan Sandang
5. Tunjangan Kendaraan
6. Tunjangan BPJS Kesehatan
7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
8. Tunjangan Pajak
9. Cuti Tahunan dan Cuti Lainnya
10. Tunjangan Hari Raya
11. Dana Pensiun
12. Pesangon (bila mengajukan pensiun dini)
13. Tunjangan Khusus (kemahalan)
14. Jasa Produksi
15. Tunjangan Masa Bhakti
16. Tunjangan lainnya

East Nusa Tenggara Provincial Minimum Wage while employees in the Surabaya operational area were 86% above the East Java Province Minimum Wage .

In general, the employment status of the Company is divided into 2 (two), namely: Permanent Employees (Unspecified Time Work Agreements) and Contract Employees (Certain Time Work Agreements).

The structure of reward services between permanent employees and contract employees is generally the same, but the Bank provides Pension Funds, Health Insurance (BPJS Health) and Workers' Social Security (BPJS Employment) to Permanent Employees.

The components of Bank NTT's services consist of:

1. Salary
2. Position Allowance
3. Personal Benefits
4. Clothing Allowance
5. Vehicle Allowances
6. Health BPJS Benefits
7. Employment BPJS Benefits
8. Tax Benefits
9. Annual leave and other leave
10. Holidays
11. Pension Fund
12. Severance (if applying for early retirement)
13. Special Allowances (overpriced)
14. Production Services
15. Benefits of Bhakti Period
16. Other benefits

Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik dan loyal terhadap Perusahaan dengan memberikan penghargaan dan imbalan setiap lima tahun masa kerja dimulai dari tahun ke 15 masa kerjanya.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan serta memenuhi kebutuhan dasar karyawan, Perusahaan telah meninjau dan memperbaiki fasilitas pinjaman karyawan dengan perubahan yang cukup signifikan yang menjadikannya salah satu yang terbaik di industri perbankan saat ini. Fasilitas pinjaman tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan karyawan seperti pembelian rumah, konstruksi ataupun renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan dan kepentingan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Perusahaan juga memberikan hak cuti karyawan baik untuk pria maupun wanita, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti nikah, dan cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2018, sebanyak 98 karyawati menggunakan hak cuti melahirkan yang diatur dalam Buku VII Pedoman Manusal SDM perihal Hak dan Fasilitas Pegawai. Peraturan tersebut menegaskan :

1. Istirahat melahirkan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah karyawan melahirkan;
2. Dalam hal menyimpang dari ketentuan di atas, karyawan wajib membuat surat pernyataan terkait risiko yang akan terjadi disertai dengan surat keterangan dari dokter/bidan; dan

The company also gives appreciation to every employee who has worked well and loyally to the Company by giving awards and rewards every five years working period starting from the 15th year of his tenure.

In addition, as part of the company's strategy to increase employee motivation and meet the basic needs of employees, the Company has reviewed and renewed employee loan facilities with significant changes that make it one of the best in the banking industry today. The loan facility is very flexible and can be used for a variety of employee needs such as home purchases, construction or renovation of houses, vehicle purchases and other interests that are regulated in accordance with applicable regulations in the company.

The company also provides employee leave rights for both men and women, including annual leave, maternity leave, marriage leave, and leave related to grief in accordance with applicable legislation. In 2018, as many as 98 employees use maternity leave rights as stipulated in Book VII Human Resources Manuscript Guidelines concerning Employee Rights and Facilities. The regulation confirms:

1. Childbirth is held for a maximum of 3 (three) months, which is 1.5 months before giving birth and 1.5 months after the employee gives birth;
2. In the event of deviating from the above provisions, the employee is obliged to make a statement regarding the risks that will occur along with a statement from the doctor / midwife; and

### Proses Rekrutmen yang Berkualitas

Seluruh proses perekrutan yang dilakukan Perusahaan dilaksanakan melalui serangkaian screening proses yang transparan, termasuk tes kemampuan dan kompetensi para calon karyawan, dan didasarkan pada kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di berbagai fungsi dan tugas yang ada.

Pada tahun 2018 Bank NTT melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 103 orang.

### Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, Perusahaan terus mengembangkan sistem yang dapat mencakup seluruh kegiatan terkait perekrutan, pendataan, dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Perusahaan juga mengembangkan manajemen penilaian kinerja yang adil melalui penerapan *balanced scorecard* dan *Key Performance Indicator* (KPI) di level individu maupun unit kerja.

Hasil dari penilaian kinerja menjadi tolok ukur peningkatan karir sesuai kompetensi karyawan dan penentuan imbal jasa.

Perkembangan bisnis yang pesat dengan berbagai tantangan yang dihadapi menuntut manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM agar seluruh pegawai dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui program pendidikan dan pelatihan kompetensi para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan Perusahaan terdiri dari pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, serta berbagai

### Quality Recruitment Process

The entire recruitment process carried out by the Company is carried out through a series of transparent screening processes, including tests of the abilities and competencies of prospective employees, and is based on the need to fulfill human resources in various functions and tasks that exist.

In 2018 Bank NTT recruited 103 employees.

### Employee Competency Development

In managing human resources, the Company continues to develop a system that can cover all activities related to recruitment, data collection and comprehensive human resource development. The company also develops fair performance appraisal management through the application of balanced scorecards and Key Performance Indicators (KPIs) at the individual and work unit level.

Results from performance appraisals are a benchmark for career advancement according to employee competencies and determination of reward.

Rapid business development with various challenges faced requires management to continue to improve its performance. Therefore, the Company continues to strive to develop human resources so that all employees can achieve the performance targets set through the employee education and competency training programs. The competency development activities carried out by the Company consist of career education, professional education, skills, as well as various courses, training, upgrading, seminars,

kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2018, total dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk kegiatan pengembangan kompetensi mencapai lebih dari Rp.15.639 juta dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.10.407 juta atau meningkat sebesar 50,27% dari tahun sebelumnya.

### **Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Perusahaan menyadari pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi setiap pegawai agar dapat bekerja secara aman dan sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitar aktivitas lingkungan operasional, sehingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Pada periode pelaporan, praktik pelaksanaan K3 ditangani oleh Divisi SDM yang meliputi program sosialisasi K3, pelayanan K3, pencegahan penyakit akibat kerja, serta syarat kesehatan kerja.

Salah satu indikator keberhasilan inisiatif Perusahaan pada aspek K3 di tahun 2018 adalah jumlah kecelakaan kerja Perusahaan tercatat zero accident).

Sampai dengan akhir tahun 2018, tidak terjadi insiden yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Bank NTT terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pegawai dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan (semua pegawai didaftarkan sebagai peserta BPJS dan berhak mendapat perawatan kesehatan). Berbagai program kesehatan pegawai termasuk olah raga dilaksanakan di seluruh cabang dan berbagai kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat (dilakukan

workshops, and management and technical training tailored to the needs of the Company. In 2018, the total funds issued by the Company for competency development activities reached more than Rp.15,639 million compared to 2017 amounting to Rp.10,407 million or an increase of 50.27% from the previous year.

### **Occupational Health and Safety**

The company realizes the importance of Occupational Safety and Health (K3) aspects for every employee to be able to work safely and healthily without endangering themselves and the community around the operational environment activities, so as to obtain optimal work productivity. In the reporting period, the practice of implementing K3 was handled by the HR Division which included K3 outreach programs, OHS services, prevention of occupational diseases, and occupational health requirements.

One indicator of the success of the Company's initiatives on the OSH aspect in 2018 is the number of work accidents of the Company recorded as zero accident.

Until the end of 2018, there were no incidents that endangered the health and safety of employees. Bank NTT continues to strive to maintain and improve the health of employees in collaboration with BPJS Kesehatan (all employees are registered as BPJS participants and are entitled to health care). Various employee health programs including sports were carried out in all branches and various campaigns and counseling related to chronic diseases and tips on healthy living (carried out by the NTT Bank Perwabant),

oleh Perwabant Bank NTT), donor darah (baik yang dilakukan oleh pihak ketiga, PMI dan Bank NTT), optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan (*fatigue*) dan stres. Selain itu, untuk menjamin keselamatan setiap pegawai, Bank NTT mengadakan simulasi waspada kebakaran dan evakuasi di setiap cabang terutama cabang yang menempati high-rise building dan jaminan perlindungan kecelakaan diri (BPJS Ketenaga Kerjaan).

### Inisiatif Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan memiliki inisiatif terhadap penerapan prinsip-prinsip K3 yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pegawai maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasional. Inisiatif aspek keselamatan kerja tersidiri atas aspek aspek sebagai berikut :

1. Bangunan kantor dilengkapi dengan kamera CCTV dan dijaga oleh petugas keamanan untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan.
2. Penataan lay out sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
3. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi asuransi kecelakaan kerja.
4. Asuransi kepada pegawai yang meninggal karena kecelakaan kerja maupun kematian biaya.
5. Perusahaan membentuk sistem keamanan kantor yang telah dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan prosedur evakuasi terhadap bencana.
6. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan selama Perusahaan menjalankan aktivitas usaha.

blood donation (both conducted by third parties, PMI and Bank NTT), optimization of rest periods and anticipation of fatigue and stress. In addition, to ensure the safety of every employee, Bank NTT conducts fire alert and evacuation simulations in each branch, especially branches that occupy high-rise buildings and guarantee personal accident protection (BPJS Ketenaga Kerja).

### Occupational Health and Safety Initiative

The company has an initiative towards the implementation of OSH principles aimed at ensuring the occupational safety and health of employees and other people who are active in the operational environment.

The work safety aspect initiative consists of the following aspects:

1. Office buildings are equipped with CCTV cameras and guarded by security personnel to maintain security from crime.
2. Arrangement of lay out of facilities and infrastructure for employees so that they can avoid work accidents.
3. All employees have been included in work accident insurance.
4. Insurance for employees who die from workplace accidents or death costs.
5. The company established an office security system equipped with fire extinguishers and disaster evacuation procedures.
6. Cooperating with the police in matters of security as long as the Company conducts business activities.



7. Meminta pengawalan pihak kepolisian pada saat Perusahaan melakukan aktivitas dropping kas tunai (*anfulling*).
8. Larangan membawa senjata tajam dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan nasabah.
9. Tidak mentolerir penggunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja.

### Inisiatif aspek kesehatan pegawai beserta keluarga

1. Terdapat fasilitas kesehatan berupa :
  - a) Perusahaan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dokter, dan apotik yang ditunjuk di seluruh Nusa Tenggara Timur.
  - b) Fasilitas kesehatan untuk pegawai berikut istri dan anak yang belum berusia 21 tahun (apabila anak yang ditanggung setelah usia 21 tahun dan masih dalam pendidikan tinggi/kuliah maka wajib menyampaikan surat keterangan dari PT tersebut) atau belum pernah bekerja atau belum menikah meliputi pengobatan/ perawatan gigi, rawat inap, bantuan pembelian kacamata, penggantian biaya bersalin, konsultasi psikologis dan pengobatan lain sesuai ketentuan.
2. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.
3. Memfasilitasi pegawai Perusahaan untuk menyalurkan bakat dan menjaga kebugaran fisik melalui penyediaan sarana olah raga seperti :
  - a) Futsal  
Bank memiliki klub futsal sendiri dengan nama Bante FC dan perusahaan berpartisipasi pada

7. Requesting police escort when the Company conducts cash (dropping) cash dropping activities.
8. Prohibition of carrying sharp weapons and the like in the Company's environment that can threaten the safety of employees and customers.
9. Do not tolerate the use of illegal drugs and chemicals that can interfere with work health and safety.

### Health aspects of employees and their families

1. There are health facilities in the form of:
  - a) The company cooperates with BPJS Kesehatan so that health services can be performed in hospitals, health centers, doctors, and designated pharmacies throughout East Nusa Tenggara.
  - b) Health facilities for employees and their wives and children who are not yet 21 years old (if the child is covered after 21 years of age and is still in higher education / college) must submit a certificate from the PT) or has never worked or is unmarried including treatment / dental care, hospitalization, assistance in purchasing glasses, reimbursement of maternity costs, psychological consultations and other treatments according to the provisions.
2. All employees have been included in health insurance and work accidents.
3. Facilitating Company employees to channel talents and maintain physical fitness through the provision of sports facilities such as:
  - a) Futsal  
The bank has its own futsal club with the name Bante FC and the company participates in futsal matches between agencies in the city

pertandingan futsal antar instansi di Kota Kupang dan sekitarnya. Pada tahun 2018 meraih beberapa kejuaraan yakni :

- Juara 1 Turnamen Pegadain CUP di Kupang.
- Juara 1 Turnamen Futsal HUT Pertamina ke 61 di Kupang.
- Juara 2 Open Turnamen "Gerak Sumpah Pemuda 2018" di Kupang.
- Juara 2 Turnamen Futsal Piala Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

b) Bola Volley

Bank memiliki klub bola voley sendiri dengan nama Bank NTT Voley Club yang berkedudukan di Kota Kupang. Pada Tahun 2018, perusahaan turut berpartisipasi dalam kejuaraan tertentu dan meraih beberapa kejuaraan yakni :

- Juara 1 Putri Pniel Cup
- Juara 3 Putra Pniel Cup
- Juara 3 Putra Sion Cup
- Juara 2 Putri Ladies Pertamina Cup
- Juara 2 Putri GMIT Cup
- Juara 1 Putra GMIT Cup
- Juara 1 Pertamina Cup

c) Sepak Bola

Bank memiliki klub Sepak bola sendiri dengan nama Bante FC yang berkedudukan di Kota Kupang. Pada Tahun 2018, perusahaan turut berpartisipasi dalam beberapa kejuaraan dan meraih beberapa kejuaraan yakni :

- Juara 1 Liga Pekerja Indonesia Propinsi NTT di Kupang
- Juara 1 Liga Pekerja Indonesia Zona Regional Bali Nusra di Mataram

of Kupang and its surroundings. In 2018 won several championships namely:

- Winner of 1st CUP Pegadain Tournament in Kupang.
- 1st Winner of the 61st Pertamina FUTAL Tournament in Kupang.
- 2 nd Winner of the 2018 Youth Oath Movement Open Tournament in Kupang.
- 2nd place in the East Nusa Tenggara Governor's Cup Futsal Tournament in Kupang.

b) Volleyball

The bank has its own voley ball club with the name Bank NTT Voley Club which is based in Kupang City. In 2018, the company participated in certain championships and won several championships namely:

- 1st Pniel Cup Women's Champion
- 3rd place winner of the Pniel Cup
- 3rd Prize for Putra Zion Cup
- Champion 2 Ladies Ladies Pertamina Cup
- Champion 2 of the GMIT Cup Princess
- Champion 1 Son GMIT Cup
- Pertamina Cup 1st Winner

c) Football

The bank has its own Football club under the name Bante FC based in the city of Kupang. In 2018, the company participated in several championships and won several championships namely:

- Champion 1 of the Indonesian Workers League in NTT Province in Kupang
- Champion 1 of the Nusra Regional Bali Indonesian Workers League in Mataram

- Peringkat 5 Putaran Liga Pekerja Indonesia Nasional di Jakarta.

- Rank 5 of the National Indonesian Workers League Round in Jakarta.

## URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN.

## DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THAT ARE RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT.

### Kebijakan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.

### Social and Community Development Policy.

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dimasa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat sebagai investasi dimasa yang akan datang guna berkelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang.

A key factor for the success and sustainability of the company in the future is to build a sense of trust from the community and stakeholders. This is done with a community development program as an investment in the future for the company's sustainable future.

Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar berkelanjutan.

Community development is a process of strengthening the community actively and sustainably based on the principles of social justice, equal participation and cooperation. Community development expresses the values of justice, equality, accountability, opportunity, choice, participation, cooperation and sustainable learning processes.

### Program Bina Lingkungan

### Community Development Program

Program bina lingkungan dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasionalnya, melalui program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Community development programs can be interpreted as moral responsibility towards the community or community around the work area and operational, through community development programs with reference to the concept of sustainable development by taking into account the social and environmental dimensions.

Program Bina Lingkungan Bank NTT adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Bank NTT sangat terbuka terhadap berbagai masukan antara lain dari berita di media massa, informasi-informasi dari LSM, Yayasan dan Komunitas.

### **Bidang Pendidikan**

Bank NTT menyadari bahwa pendidikan sangat penting dan dibutuhkan setiap orang. Untuk itu, Bank NTT melakukan penyaluran bantuan pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTT peduli terhadap dunia pendidikan. Program yang dilakukan oleh Bank NTT adalah pemberian beasiswa, melakukan renovasi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bank NTT terhadap pendidikan di tanah air.

### **Bidang Sosial**

Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak biasa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita.

Dalam Bidang Sosial, Bank NTT memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka implementasikan tanggung jawab sosial.

### **Bidang Kesehatan**

Melalui program CSR, Bank NTT turut memberikan perhatian untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan sekitarnya. Dalam kepedulian tersebut Bank NTT melakukan aksi donor darah guna memupuk kepedulian antar sesama serta menuju insan yang sehat.

The Bank NTT Community Development Program is a program to empower the community's social conditions. Bank NTT is very open to various inputs, including news in the mass media, information from NGOs, foundations and communities.

### **Education Sector**

Bank NTT realizes that education is very important and needed by everyone. For this reason, Bank NTT conducts aid distribution in the education sector. This shows that Bank NTT cares about the world of education. The program carried out by Bank NTT is the provision of scholarships, renovations and the construction of educational facilities and infrastructure. This was done as a form of Bank NTT's concern for education in the country.

### **Social Sector**

We must recognize that human beings are social beings because humans are not used to living without contact with other humans even for the smallest business we still need other people to help us.

In the Social Sector, Bank NTT provides social assistance to the community in the framework of implementing social responsibility.

### **Health Sector**

Through the CSR program, Bank NTT also gives attention to improve health in the surrounding environment. In this concern, Bank NTT conducted a blood donation action to foster care among others and towards healthy people.

Sepanjang tahun 2018, Bank NTT telah melaksanakan Program CSR dengan total biaya sebesar Rp. 3.689.647.500 (Tiga enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), program CSR terdiri dari Program CSR Plan dan Program CSR Unplan yang disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut :

Throughout 2018, Bank NTT has implemented a CSR Program with a total cost of Rp. 3,689,647,500 (Three six hundred eighty nine million six hundred forty seven thousand five hundred rupiahs), the CSR program consists of the CSR Plan Program and the Unplan CSR Program which is distributed in the following fields:

NO	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI REALization
I	BIDANG PENDIDIKAN EDUCATION SECTOR		
	RINCIAN DETAILS		
1	Bantuan Biaya HUT PGRI Kota Kupang Support Fee for City PGRI Kupang Anniversary	17 Mei 2018	Rp.15.000.000
2	Bantuan Pembangunan Aula SMPK Santisisme Hokeng, Flores Timur Development Assistance for Santisisme Hokeng Middle School Hall, East Flores	30 April 2018	Rp.25.000,000
3	Bantuan Beasiswa Semester IV bagi Mahasiswa STIP Curug, Jawa Barat Semester IV Students Scholarship for STIP Curug, West Java	7 Mei 2018	Rp.9.167,500
4	Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Konstruksi Bambu Semen untuk Desa Tanarawa, Kabupaten Sikka Construction for Tanarawa Village, Sikka Regency	16 Oktober 2018	Rp.57.400,000
5	Bantuan Beasiswa Bagi Anak-anak Petugas Kebersihan di Kota Kupang Scholarship Assistance for Children of Cleaning Officers in Kupang City	31 Oktober 2018	Rp.50.000.000
6	Bantuan CSR untuk Kegiatan Forum Pelajar Kabupaten Sumba Timur CSR Assistance for East Sumba District Student Forum Activities	20 Desember 2018	Rp.28.000.000
7	Bantuan CSR bagi Tim PKK Kabupaten Rote Ndao CSR assistance for the PKK Team in Rote Ndao Regency	31 Desember 2018	Rp.281.520.000
	Total Bidang Pendidikan Total of Education Sector		Rp.466.087.500

NO	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI REALIZATION
II	BIDANG OLAHRAGA SPORTS SECTOR		
	RINCIAN DETAILS		
1	Bantuan Pembangunan Lapangan Volly dan Basket bagi SMA Sta.Maria Homba Karipit SBD Volly and Basketball Field Development Assistance for Sta. Maria High School Homba Karipit SBD	30 Oktober 2018	Rp.60,100,000
2	Bantu CSR Pembangunan Sasana Tinju Boxer Waingapu Helping CSR Development of Boxer Boxing Waingapu Stadium	20 Desember 2018	Rp.35.000.000
	Dipindahkan Transfer		Rp.95.100.000
	Pindahan Transferred		Rp.95.100.000
3	Bantuan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kejuaraan INKAI Pemkab. Sumba Timur Assistance in order to Support INKAI Regency Government Championship East Sumba	20 Desember 2018	Rp.20.000.000
	Total Bidang Olah Raga Sport Sector Total		Rp.115.100.000
III	BIDANG BUDAYA CULTURE SECTOR		
	RINCIAN DETAILS		
1	Bantuan Festival Parade 1001 Kuda dan Festival Tenun Adat Assistance for the 1001 Horse Parade Festival and Custom Weaving Festival	30 Oktober 2018	Rp.100.000.000
2	Bantuan Event Pariwisata dan Budaya Palapang Ndara Pemkab. Sumba Timur Palapang Tourism and Culture Event Support Ndara Regency Government. East Sumba	20 Desember 2018	Rp.25.000.000
3	Bantuan CSR untuk Pariwisata di Sabu Rajjua CSR Aid for Tourism on Sabu Rajjua	20 Desember 2018	Rp.125.000.000
	Total Bidang Budaya Culture Sector Total		Rp.250.000.000

NO	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI REALization
IV	BIDANG KESEHATAN HEALTH SECTOR		
1	Bantuan Kegiatan Plan of Action Fakultas Kedokteran Undana Kupang – Pemprov NTT Assistance for Plan of Action Activities at Undana Kupang Faculty of Medicine - NTT Provincial Government	19 September 2018	Rp.10.646.000
2	Bantuan CSR Program Triple Eliminasi di Puskesmas di 6 Puskesmas di Manggarai Barat Triple Elimination CSR Assistance in Puskesmas in 6 Puskesmas in West Manggarai	31 Desember 2018	Rp.41.750.000
	Total Bidang Kesehatan Health Sector Total		Rp.52.396.000
IV	BIDANG EKONOMI ECONOMIC SECTOR		
1	Bantuan Bagi Pengrajin Anyaman Lontar di Kabupaten TTS Help for Lontar Woven Craftsmen in TTS Regency	25 Juni 2018	Rp.70.000.000
2	Bantuan Pengembangan Tanaman Holtikultura di Kabupaten TTU Horticultural Plant Development Assistance in TTU Regency	16 Oktober 2018	Rp.134.500.000
3	Bantuan Pengembangan Tenun Ikat Kabupaten Belu Belu Regency Ikat Weaving Development Assistance	20 Desember 2018	Rp.150.000.000
4	Bantuan CSR Pertanian, Perkiraan dan Perindustrian bagi Pemkab. Sabu Raijua Agricultural, Estimated and Industrial CSR Assistance for District Government. Sabu Raijua	20 Desember 2018	Rp.275.000.000
5	Bantuan Pengembangan Pertanian Pemkab. Manggarai Regency Government Agricultural Development Assistance. Manggarai	31 Desember 2018	Rp.250.000.000
	Total Bidang Ekonomi Economic Sector Total		Rp.879.500.000
V	BIDANG SOSIAL SOCIAL SECTOR		
	RINCIAN : DETAILS		
1	Bantuan Kegiatan Jambore V PAR GMIT 2018 Pemprov.NTT Help Jamboree V Activities PAR GMIT 2018 Provincial Government. NTT	6 Juli 2018	Rp.40.000.000
2	Program Smart City Sodamolek Pemprov.NTT Sodamolek Provincial Government Smart City Program NTT	29 Juni 2018	Rp.189.900.000
3	Bantuan Konven Kaum Bapak Sinode GMIT Pemprov.NTT Covenant Aid for the Father of the GMIT Pemprov Provincial Government of NTT	20 Juli 2018	Rp.20.000.000
4	Bantuan CSR untuk Pemkab. Flotim CSR Guide for Regency Government. Flotim	30 Juli 2018	Rp.105.000.000

NO	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI REALIZATION
5	Bantuan Hewan Kurban Pemkot Kupang <i>Relief of Sacrificial Animals of the City Government of Kupang</i>	31 Agustus 2018	Rp.100.000.000
6	Bantuan Pembangunan Aula Pertemuan di Pulau Ende Kabupaten Ende <i>Assistance in the Construction of the Meeting Hall on Ende Island in Ende Regency</i>	31 Nopember 2018	Rp.50.000.000
7	Bantuan CSR bagi GKS Bidi Praing di Kab.Sumba Timur <i>CSR Aid for Bidi Praing GKS in East Sumba Regency</i>	20 Desember 2018	Rp.50.000.000
8	Bantuan CSR Renovasi Gereja Reinha Rosario Sikka di Pemkab. Sikka <i>Bantuan CSR Renovasi Gereja Reinha Rosario Sikka di Pemkab. Sikka</i>	20 Desember 2018	Rp.29.000.000
9	CSR Pembangunan Gereja GMIT Sesawi di Pemkab. TTS <i>CSR for Reinha Rosario Sikka Church Renovation in the Regency Government. Sikka</i>	20 Desember 2018	Rp.50,000,000
10	Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Paroki Maria Bunda Selalu Menilong Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur <i>Maria Bunda Parish Church Building Construction CSR Program Always Menilong Kambajawa in East Sumba Regency</i>	20 Desember 2018	Rp. 50.000.000
11	Bantuan Pembangunan Gereja di Kab. Belu <i>Church Development Assistance in Kab. Speckle</i>	31 Desember 2018	Rp.50.000.000
12	Bantuan Gereja Katolik Maria Mater Dei Oepoli dan gereja Paulus Oepoli, Amfoang Timur di Kabupaten Kupang <i>Assistance to the Maria Mater Dei Oepoli Catholic Church and Paulus Oepoli Church, Amfoang Timur in Kupang Regency</i>	7 Januari 2018	Rp.200.000.000
Total Bidang Sosial Social Sector Total			Rp.933.900.000
VI	BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENT SECTOR		
	RINCIAN DETAILS		
1	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT di Fatuleu <i>Assistance for the Commemoration of Environment Day Activities at the NTT Province Level in Fatuleu</i>	11 Juli 2018	Rp.33,800,000
2	Bantuan Tong Sampah sebanyak 12 Unit bagi Pemkab. Sumba Barat <i>12 Units of Trash Assistance for Regency Government. West Sumba</i>	10 April 2018	Rp.21.000.000



NO	NAMA PROGRAM Program Name	TANGGAL Date	REALISASI REALization
3	Bantuan 4 Unit Motor Roda 3 di Kabupaten Sumba Barat <i>Assistance 4 Units of 3 Wheel Motor in West Sumba Regency</i>	9 Agustus 2018	Rp.216.540,000
4	Bantuan Perbaikan PLTMH Wae Mokel di Pemkab. Manggrai Timur <i>Repair of Wae Mokel MHP in Regency Government. East Manggrai</i>	9 Nopember 2018	Rp.207.824.000
5	Bantuan Pembangunan Tugu Harmoni di Kota Kalabahi <i>Harmony Tugu Development Assistance in Kalabahi City</i>	31 Nopember 2018	Rp.100.000.000
6	Bantuan CSR 1 Unit Tangki Air di Pemkab.Malaka <i>CSR Support 1 Water Tank Unit in Regency Government. Malaka</i>	3 Desember 2018	Rp.413.500.000
Total Bidang Lingkungan <i>Enviroment Sector Total</i>			Rp.992.664.000
TOTAL			Rp.3.689.647.500

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2018.

*Attached are the Self Assessment Results of the Implementation of the Good Corporate Governance of the Regional Development Banks of East Nusa Tenggara at the end of the 31st December 2018.*

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum.

*Thus this Report was submitted, to be aware.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR**

Elias Hali Lanan  
Komisaris Utama  
*President Commissioner*

Absalom Sine  
Plt. Direktur Utama  
*Interim President Director*

## Lampiran 1

### Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

#### Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2018

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur  
Peringkat : 3 (Cukup Baik)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
Kategori	Peringkat	Definisi
Individual	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Tata Kelola</i> secara umum <b>Cukup Baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola <b>Cukup signifikan</b> dan perlu tindakan penyelesaian segera.

#### ANALISA

Penerapan Tata Kelola secara umum **Cukup Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut Cukup Signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

##### 1. Governance Structure

Penilaian terhadap *Governance Structure* adalah **peringkat 3 (cukup baik)**, hal ini tercermin dari :

###### a. Jumlah Anggota Pengurus dan Pejabat Eksekutif

###### 1) Jumlah anggota Direksi :

Sesuai Hasil Fit dan Proper Test Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, maka sejak tanggal 26 Mei 2018 anggota Direksi menjadi 3 (tiga) orang yakni :

###### a) Absalom Sine, SE sebagai Direktur Pemasaran Kredit merangkap Plt. Direktur Utama berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukkan Saudara Absalom Sine sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

###### b) Harry Alexander Riwo Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana merangkap Plt. Direktur . Umum berdasarkan :

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-71/d.03/2018 tanggal 13 Mei 2018 menetapkan Saudara Harry Alexsander Riwu Kaho selaku Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur /Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Nomor : 178kan /KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur .
- c) Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan :
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

Dinilai memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) ***“Bank Wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah sedikit 3 (tiga) orang”***

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTT, Direksi Bank NTT sebanyak 5 (lima) orang, dan sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 78 tanggal 25 Mei 2018 memutuskan memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melaksanakan proses seleksi untuk 2 (dua) formasi Jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum yang masih lowong.

2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris :

Sejak tanggal 28 Mei 2018 jumlah Dewan Komisaris menjadi 3 (Tiga) orang sesuai Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

a) Komisaris Utama Bapak Elias Hali Lanan

- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-66/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Saudara Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

b) Komisaris Independen

1) Bapak Sukardan Aloysius

- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-67/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung tanggal 28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019.

2) Bapak Samuel Djoh Despansianus

- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-68/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

- Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung tanggal 28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019.

Hal ini memenuhi komposisi maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab III Pasal 23 ayat (1) ***“Bank wajib memiliki Anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi”***.

3) Jumlah Anggota Komite :

a) Komite Audit

Sejak tanggal 28 Mei 2018 anggota Komite Audit berjumlah 3 orang sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Komposisi Keanggotaan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- (1) Samuel Djoh Despansianus sebagai Ketua
- (2) Dencik Syamsurizal sebagai Anggota
- (3) Yosep Dasi Jawa sebagai Anggota

b) Komite Pemantau Risiko

Sejak tanggal 28 Mei 2018 anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 orang Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Komposisi Keanggotaan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- (1) Sukardan Aloysius sebagai Ketua
- (2) Mikael Ngefak sebagai Anggota
- (3) Theresia Dua Nurak sebagai Anggota

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejak tanggal 28 Mei 2018 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 3 orang Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Komposisi Keanggotaan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- (1) Sukardan Aloysius sebagai Ketua
- (2) Samuel Djoh Despansianus sebagai Anggota
- (3) Sola Thadeus sebagai Anggota

- Berdasarkan Berita acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor : 01 tanggal 02 Juli 2018 menyetujui usulan Komite Remunerasi dan Nominasi calon Direktur utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasius Ola Masan dan Didakus Leba.
- Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 memutuskan :
  - Menyetujui untuk membatalkan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya tanggal 02 Juli 2018 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01 tertanggal 02 Juli 2018 .
  - Menyetujui Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Menyetujui dan meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Ban NTT untuk melakukan seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum.
- Berdasarkan Pernyataan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 maka proses pencalonan Direktur Utama dan Direktur Umum mengalami perubahan karena dilakukan seleksi ulang usulan pencalonan.
- Berdasarkan Pernyataan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 maka Dewan Komisaris yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan Saudara Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama, Sukardan Aloysius dan Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen masa bakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022 dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang usulan pencalonan Dewan Komisaris yang baru.
- Dengan adanya seleksi ulang Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum PT Bank NTT, maka membutuhkan waktu terkait dengan proses fit and proper test oleh OJK dan hal ini sangat berpengaruh pada pemenuhan Struktur Manajemen Bank.

d) Jumlah Pejabat Eksekutif

Pejabat Eksekutif Bank NTT berjumlah 37 orang yang terdiri dari 13 Kepala Divisi dan 24 Pemimpin Cabang, sampai dengan 31 Desember 2018, berkurang 3 orang Pemimpin Cabang yakni Pemimpin Cabang Sabu karena hukuman Jabatan, Pemimpin Cabang Kalabahi yang dipromosi menjadi Kepala Divisi Rencorsec dan Pemimpin Cabang Atambua yang dipromosi menjadi Kepala Divisi Manajemen Risiko.

e) Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang Benturan Kepentingan Sesuai SK Direksi No. 73 tanggal 30 Juni 2014.

f) Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur untuk mengelola risiko likuiditas yakni :

- Kebijakan Stress Test Risiko Likuiditas sesuai Surat Keputusan Direksi No.17 Tahun 2014 tanggal 06 Februari 2014 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengukuran Stress Testing Risiko Likuiditas PT. BPD NTT.
- Kebijakan tertulis mengenai credit line/money market sesuai Keputusan Direksi No.80 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016
- SOP Contingency Funding Plan sesuai Surat Keputusan Direksi No.105 tahun 207 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan Liquidity) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

g) Bank telah melakukan review kebijakan manual perkreditan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan.

h) Bank telah memiliki Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 01 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.

i) Bank telah melakukan mereview Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nomor : 92 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018.

j) Bank telah mereview Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Produk atau Aktivitas Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 103 Tahun 2018, tanggal 08 Oktober 2018.

k) Bank telah mereview Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 112 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018.

l) Aplikasi Profil Risiko Cabang dan Loss Event Database pada seluruh Kantor Cabang yang telah diterapkan sejak Agustus 2016, namun belum dapat memberikan hasil yang optimal karena ada beberapa IC Kantor Cabang yang tidak melaporkan secara benar sesuai fakta lapangan.

- m) Bank masih mereview kebijakan :
- ✓ SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
  - ✓ Pedoman SDM yang meliputi Career Path Analisis Kredit dan Perbaikan Humas Resources Information System (HRIS)
  - ✓ Pedoman kehumasan
  - ✓ Penentuan kelas cabang belum selesai
  - ✓ Bank tidak memiliki pola baku atau dasar perhitungan yang akurat untuk menentukan standar pegawai di kantor Cabang.
- n) Masih terdapat beberapa kelemahan pada bidang kredit yang berdampak pada kenaikan NPL yakni :
- ✓ Kelemahan analisa pemberian kredit baru maupun pada kredit yang diperpanjang jangka waktunya, serta pengabaian terhadap syarat administrasi kredit (ijin usaha, BI Cheking, dokumentasi usaha, dokumentasi usaha, penilaian agunan dan pengikatannya bahkan pengarsipannya).
  - ✓ Lemahnya langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah karena kurangnya optimalisasi potensi penyelesaian kredit, eksekusi agunan maupun kerjasama bank NTT dengan aparat penegak hukum.
  - ✓ Pengawasan dan pembinaan debitur tidak optimal untuk memastikan penggunaan dana kredit sesuai tujuan penggunaan.
- o) Pada bidang Kredit, Bank terkonsentrasi pada pemberian kredit Konsumsi yang sumber pembayarannya dari gaji, akan tetapi NPL Gross kredit masih tinggi dimana secara gabungan sebesar 2,44% sekalipun berada dibawah selera risiko 2.70%.
- p) Pada Bidang Treasury terdapat terdapat kegagalan membayar oleh Sunprima Nusantara Pembiayaan selaku Emiten yang menerbitkan surat berharga MTN sebesar Rp. 50 M. Hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas Treasury dinilai juga mulai berisiko cukup tinggi. Perlu peningkatan SDM di bidang Treasury, SKMR, SKAI untuk menimalisir risiko dan mendukung optimalisasi NII Bank dan rentabilitas melali aktivitas Treasury.
- q) Pada bidang Hukum terjadi 6 (enam) kali kejadian terkait sengketa hukum, untuk itu perlu peningkatan SDM pada SKMR, SKAI, IT, legal berkaitan dengan Teknologi Informasi sehingga mendukung pengendalian intern aktivitas IT guna meminimalisir kejadian hukum yang dapat merugikan bank.



## 2. Governance Process

Penilaian *Governance Process* berada pada peringkat **3 (cukup baik)** yang ditunjukkan dengan :

- a. Penetapan Direktur Pemasaran Kredit An. Absalom Sine merangkap Plt. Direktur Utama sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 177/KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Penunjukkan Saudara Absalom Sine sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- b. Penetapan Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana berdasarkan :
  - Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-71/d.03/2018 tanggal 13 Mei 2018 menetapkan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho selaku Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur /Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- c. Penetapan Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Plt. Direktur Umum berdasarkan :
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur .
  - Penetapan Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana Dan Plt. Direktur Umum, menggantikan Bapak Eduardus Bria Seran selaku Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Umum yang telah berakhir 25 Mei 2018.
- d. Penetapan Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan :
  - Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan menggantikan Saudara Absalom Sine sebagai Plt. Direktur Kepatuhan yang berakhir pada 25 Mei 2018.

- e. Penetapan Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama berdasarkan :
- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-66/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Saudara Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
  - Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 166/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Lanan Elias sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- f. Penetapan Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen berdasarkan :
- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-67/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 167/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- g. Penetapan Sukardan Aloysius sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan :
- Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung tanggal 28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019
- h. Penetapan Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen berdasarkan
- Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-68/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
  - Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- i. Penetapan Samuel Djoh Despantsianus sebagai Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan :
- Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung tanggal 28 Mei 2018 s/d 27 Mei 2019.

- j. berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Mei 2018, menetapkan Komposisi Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :
- 1) Komite Audit
    - Ketua : Samuel Djoh Despansianus
    - Anggota : a) Dencik Syamsurizal
    - b) Yos Dasi Jawa
  - 2) Komite Pemantau Risiko
    - Ketua : Sukardan Aloysius
    - Anggota : a) Mikael Ngefak
    - b) Theresia Dua Nurak
  - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi
    - Ketua : Sukardan Aloysius
    - Anggota : a) Samuel Djoh Despansianus
    - b) Thadeus Sola
- k. Berdasarkan Berita acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor : 01 tanggal 02 Juli 2018 menyetujui usulan Komite Remunerasi dan Nominasi calon Direktur utama yaitu Absalom Sine dan Hilarius Minggu dan calon Direktur Umum yaitu Bonefasius Ola Masan dan Didakus Leba.
- l. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan fungsinya sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.33/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit ad Proper Test) bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank.
- Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses pencalonan jabatan 2 Direksi Bank NTT sesuai Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 01 dalam RUPS bulan Juli 2018 dengan hasil :
- Calon Direktur Utama Bank NTT
    - ✓ Sdr. Absalom Sine
    - ✓ Sdr. Hilarius Minggu
  - Calon Direktur Umum Bank NTT :
    - ✓ Sdr. Bonefasius Ola Masan
    - ✓ Sdr. Adi Leba
  - Proses pencalonan telah sampai pada OJK Pusat dan menunggu panggilan dari OJK Pusat untuk mengikuti fit & proper test.
- m. Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 memutuskan :

- Menyetujui untuk membatalkan RUPS Nominasi Direksi sebelumnya tanggal 02 Juli 2018 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01 , tertanggal 02 Juli 2018
  - Menyetujui Perubahan SOP Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Menyetujui dan meminta Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank NTT untuk melakukan seleksi ulang atas calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum.
- n. Berdasarkan Pernyataan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 maka proses pencalonan Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum mengalami perubahan karena dilakukan seleksi ulang usulan pencalonan.
- o. Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018, membatalkan proses pencalonan calon Direktur Utama dan Direktur Umum yang telah sampai pada OJK Pusat dan menunggu panggilan untuk mengikuti Fit & Proper Test.
- p. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan seleksi ulang calon Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan Pernyataan RUPS Luar Biasa PT Bank NTT Nomor : 48 tanggal 28 November 2018 (point.2) dan telah menetapkan nama-nama calon Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum yang lulus seleksi untuk diajukan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali.
- q. Berdasarkan Hasil konsultasi Komite Remunerasi & Nominasi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT tanggal 14 Desember 2018 maka PSP memutuskan komposisi Calon Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Umum Bank NTT untuk mengikuti fit & proper test sebagai berikut :
- 1) Calon Dewan Komisaris :
    - a) Komisaris Utama : Juvinile Joidjana
    - b) Komisaris Independen : Frans Gana
  - 2) Calon Direktur Utama :
    - a) Izhak Eduard Rihi
    - b) Bili Tjoanda
  - 3) Calon Direktur Umum :
    - a) Lazarus Orapau
    - b) Renal Kandijo
- r. Calon Komisaris, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Umum melengkapi semua persyaratan yang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Fit and Proper Test.
- s. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah menjalankan fungsinya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan manajemen risiko.
- t. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh penting dilakukan perbaikan khususnya terkait pengawasan melekat secara berjenjang guna meminimalisir Fraud dan kegagalan operasional yang disebabkan *Human error*.

- u. Bank belum menindaklanjuti temuan audit OJK sesuai komitmen penyelesaian, maksimal September 2018 yakni :
- Bank belum menyelesaikan (masih memproses) tindak lanjut review ketentuan pengadaan barang/jasa mengikuti Keppres terbaru (target triwulan IV 2016), komitmen pengkinian SOP paling lambat Desember 2017.
  - Ketentuan Teknis Pengadaan Barang Jasa; dalam prosedur pengadaan aplikasi tersebut terdapat Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran dan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Penawaran sebagaimana diatur dalam pasal 20 Angka 4 Keputusan Direksi No.04/PBJ/VI/2010 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan terdapat ketentuan isi kontrak kerja yang tidak konsisten.
  - Terdapat kelemahan pada pengadaan Kalender Bank NTT tahun 2017
  - Penyusunan Corporate Plan sesuai Program Transformasi BPD belum selesai ditetapkan.
- v. Pada tahun 2018 Rapat ALCO dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 07 Maret 2018, 25 Mei 2018, tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 24 September 2018. Terdapat perubahan suku bunga Kredit Multi Guna efektif dari 16 % menjadi 10 - 11% yang diberlakukan sampai dengan bulan Oktober 2018, sedangkan suku DPK tidak mengalami perubahan.

### 3. *Governance Outcome*

Penilaian *Governance Outcome* berada pada peringkat **2 (Baik)** yang ditunjukkan dengan :

- a. Pada tahun 2018 Direksi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 5 Juni 2018, 22 Juni 2018, tanggal 26 Juli 2018 dan 09 November 2018.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan Rapat pada Tahun 2018 sebanyak kali 5 (lima) kali yaitu tanggal 30 Mei 2018, 29 Juni 2018, tanggal 17 September 2018, 05 Oktober 2018 dan tanggal 03 Desember 2018 .
- c. Terdapat sebagian kecil temuan Audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen, yaitu:
  - Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 sebanyak 2 temuan .
  - Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 sebanyak 4 temuan
  - Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 sebanyak 19 temuan
  - Temuan SKAI tahun 2018 sebanyak 93 temuan.
- d. Pertumbuhan NII terhadap pendapatan bunga (disetahunkan) sebesar 3,17% mengalami kenaikan dari Posisi Desember 2017 sebesar 2,48 %.
- e. Pada tahun 2018 Terdapat 4 (empat) kejadian fraud Internal dan eksternal yang dilakukan oleh 4 pegawai Bank NTT.
- f. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara cukup optimal oleh anggota Dewan Komisaris.

- g. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat sesuai SK Direksi No.73 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Benturan Kepentingan.
- h. Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur untuk mengelola risiko likuiditas yakni :
- Kebijakan Stress Test Risiko Likuiditas sesuai Surat Keputusan Direksi No.17 Tahun 2014 tanggal 06 Februari 2014 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengukuran Stress Testing Risiko Likuiditas PT. BPD NTT.
  - Kebijakan tertulis mengenai credit line/money market sesuai Keputusan Direksi No.80 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016
  - SOP Contingency Funding Plan sesuai Surat Keputusan Direksi No.105 tahun 2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan Liquidity) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- i. Bank telah melakukan review kebijakan manual perkreditan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan.
- j. Bank telah mempunyai Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Lampiran Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.
- k. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian yang ditunjukkan CAR sebesar 24.32 % berada diatas ketentuan sesuai profil risiko sebesar minimum 10 - < 11 % .
- l. Dukungan Modal dari Pemegang Saham sangat besar yang ditunjukkan dengan Modal Disetor yang terus meningkat setiap Tahun Buku yaitu : Desember 2015 Rp.790.448 juta, Desember 2016 menjadi Rp. 1.081.098 juta, Desember 2017 menjadi Rp. 1.211.598 juta dan Desember 2018 menjadi Rp. 1.284.598 juta.
- m. Laporan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola dan telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

## Lampiran 2

### Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

#### Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2018

#### Tujuan

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi..
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
  - 1) Kecukupan transparansi laporan.
  - 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - 3) Perlindungan konsumen.
  - 4) Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*.
  - 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan, dan/atau
  - 6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

No	Kriteria / Indikator	Analisis
1.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>  <b>A. Governance Structure</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang</li><li>2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia</li><li>3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat</li></ol>	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  <b>A. Governance Structure</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bank memiliki 3 (tiga) orang Direksi</li><li>2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia</li><li>3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman di bidang operasional lebih dari 20 tahun.</li></ol>

	<p>Eksekutif Bank.</p> <p>4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek ang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	<p>1) Direktur Pemasaran Kredit merangkap sebagai Plt. Direktur Utama</p> <p>2) Direktur Pemasaran Dana merangkap sebagai Plt. Direktur Umum</p> <p>5. Seluruh Anggota Direksi yang ada tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dalam SK Dewan Komisaris No. 11 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. BPD NTT.</p> <p>9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek ang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>10. Seluruh Anggota Direksi melaksanakan tugasnya dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Plt. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>12. Seluruh Anggota Direksi telah Lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK</p> <p>13. Seluruh Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>14. Seluruh Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>15. Semua anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan sering mengikuti diklat/workshop/seminar terkait perbankan.</p> <p>16. Komposisi Direksi tidak lengkap yakni hanya 3 (tiga) yaitu Direktur Pemasaran Kredit merangkap Plt. Direktur Utama, Direktur</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2.</p>	<p><b>B. Governance Process</b></p> <p><b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris</li> <li>2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</li> <li>3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li> <li>4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan sebagaimana diatur dasar dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen</li> </ol>	<p>Pemasaran Dana merangkap Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan. Tidak ada intervensi dari Pemilik.</p> <p><b>B. Governance Process</b></p> <p><b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Direksi telah mengangkat Anggota Dewan Komisaris periode 2018 - 2019 sesuai Keputusan Direksi Nomor 36 tahun 2018 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 36/DkBank NTT/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, perihal : Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris.</li> <li>2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</li> <li>3. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, sebagaimana tercermin dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan Terbatas PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" berdasarkan Akta Notaris Tanggal 25 Mei 2018 Nomor 78 menyatakan, RUPS memutuskan menerima dan mengesahkan Laporan Perkembangan Usaha Tahun 2017 , dengan beberapa catatan.</li> <li>4. Direksi telah mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.</li> <li>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap pemegang saham</li> </ol>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>terhadap pemegang saham.</p> <p>6. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p>	<p>6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank yang baik.</p> <p>7. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun ada sebagian kecil temuan audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Temuan OJK tahun 2015 sebanyak 2 temuan</li> <li><input type="checkbox"/> Temuan OJK Tahun 2017 sebanyak 4 temuan</li> <li><input type="checkbox"/> Temuan SKAI Tahun 2018 sebanyak 19 temuan.</li> <li><input type="checkbox"/> Temuan SKAI Tahun 2018 sebanyak 93 temuan</li> </ul> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulana Direksi ke Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.</p> <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, sesuai SK Dewan Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. BPD. NTT.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.	<p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p><b>Governance Outcome</b></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p>	<p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p><b>Governance Outcome</b></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan beberapa catatan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang saham melalui RUPS dengan beberapa catatan</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat diakses dalam <i>Portal Corporate Unverssity</i> Bank NTT.</p> <p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian Visi dan Misi bank dalam rapat evaluasi dan rapat penyusunan anggaran</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (share option) yang dimiliki Direksi.</p> <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan</p>	<p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinis yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Seluruh Anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya.</li> <li>2. Tidak terdapat Hubungan Keuangan maupun Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.</li> <li>3. Direksi telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola</li> </ol> <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank yang cukup baik, penyelesaian yang cukup baik terhadap permasalahan yang dihadapi Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dinilai belum cukup maksimal, yang ditunjukkan dengan adanya temuan pemeriksaan internal maupun eksternal yang disebabkan <i>Human error</i></p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran dengan memberikan kesempatan mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai sertifikasi yang terkait operasional Bank yaitu sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Pengadaan Barang &amp; jasa, sertifikasi Audit Internal, dan Sertifikasi Kepatuhan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10 Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak padaberkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p> <p><b>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p> <p><b>A. Governance Strucrure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</li> <li>2. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</li> <li>4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan: atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank: c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank</li> </ol>	<p>10. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapatr menyebabkan kerugian bagi Bank.</p> <p><b>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p> <p><b>A. Governance Strucrure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang</li> <li>2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia</li> <li>3. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mimilki saham paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</li> <li>4. Komisaris Utama merangkap jabatannya hanya sebagai Kepala BPPKAD Propinsi NTT, 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya hanya sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana. dan 1 orang hanya sebagai Pensiunan Bank Indonesia Ketiganya tidak sebagai Dekom, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada Lembaga Keuangan lainnya, dan keduanya telah mendapat persetujuan dari OJK..</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank: dan atau d) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</p> <p>5. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>10. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani</p>	<p>5. Komisaris Independen an. Bapak Sukardan Aloysius sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Jabatan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>6. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota komisaris dan/atau Direksi lainnya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada saat mengikuti fit and proper Test.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sesuai Lampiran 1 Rancangan Keputusan Dewan Komisaris PT BPD NTT Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai antara lain memiliki sertikasi Manajemen Risiko Level I dan I</p> <p>9. Semua anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Eksternal Bank</p> <p>10. Komisaris Independen berasal dari pihak independen (dosen), bukan berasal dari Komisaris Non Independen, dan telah</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p> <p>12. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang pelaksanaan</p>	<p>memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Komisaris Independen hanya menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut .</p> <p>12. Seluruh Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.</p> <p>13. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>dengan selalu mengikuti pelatihan/workshop terkait bidang tugas sebagai Komisaris.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 07 Desember 2016</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Penetapan calon Komisaris Independen pada RUPS Tahunan sudah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi dan pergantian Dewan Komisaris telah lulus Fit dan Proper Test sesuai surat OJK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nomor : KEP-66/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Saudara Hali Lanan Elias sebagai Komisaris Utama</li> <li>□ Nomor : KEP-67/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Sukardan Aloysius sebagai Komisaris Independen.</li> </ul> <p>2. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola melalui surat Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat No.03/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Penitipan Gaji Komisaris dan Direksi Bank NTT</li> <li>2. Surat No.06/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor</li> <li>3. Surat No.12/Dk Bank NTT/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 perihal : Pembayaran hak-hak Pegawai yang bebas dari Hukuman</li> <li>4. Surat No.14/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Persetujuan Pemindahan Kantor Cabang Bank NTT Waikabubak</li> <li>5. Surat No.15/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Pengamanan Data IT Bank NTT</li> <li>6. Surat No.15/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Target Tabungan Basic Saving Account (BSA) Tahun Buku 2018.</li> <li>7. Surat No.16/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Compliance Chek List status Kantor</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Cabang Pembantu Weliman.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Surat Nomor : 18/DK Bank NTT/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal : Usulan Kenaikan Penghasilan Komite Dewan Komisaris.</li> <li>9. Surat Nomor : 19/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal : Penyampaian Hasil Pembahasan Laporan Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan IV 2017</li> <li>10. Surat Nomor : 20/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan IV Tahun 2017</li> <li>11. Surat Nomor : 21/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT</li> <li>12. Surat No.22/Dk Bank NTT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT.</li> <li>13. Surat No.23/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Laporan perkembangan Usaha dari Direktorat Utama.</li> <li>14. Surat No.24/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Bank Memastikan Keamanan ATM dan data Nasabah.</li> <li>15. Surat No.31/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Mohon koreksi dan Menerbitkan Keputusan Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT.</li> <li>16. Surat No.36/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris</li> <li>17. Surat No.39/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Tanggapan Laporan Tindakan Fraud Eksternal Bank NTT Kantor Capem Baun</li> <li>18. Surat No.40/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Pelayanan Bank dan Pengamanan Kantor sera Asset-asset pada sat liburan.</li> <li>19. Surat No.44/Dk Bank NTT/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal : Penyampaian Laporan Evaluasi Proses Penunjukkan AP dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit .</li> <li>20. Surat No.50/Dk Bank NTT/VII/2018 perihal</li> </ol>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>: Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Keuangan Bank NTT yang berakhir periode 30 Juni 2018 dan yang berakhir 31 Desember 2018 serta Pendampingan Obligasi Berkelanjutan Tahun Buku 2018.</p> <p>21. Surat No.56/Dk Bank NTT/VII/2018 perihal : Persetujuan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Bank NTT</p> <p>22. Surat No.58/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Tindak lanjut Pemeriksaan Umum dan Khusus GCG TB.2017</p> <p>23. Surat No.66/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 perihal : Mohon Penjelasan Tentang Penyikapan Kredit Macetnya Sdr. Wellem B. Kaleana Deposito , SE</p> <p>22. Surat No72/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyikapan terhadap Penghimpunan Dan Biaya Bunga.</p> <p>23. Surat No73/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris Bank NTT.</p> <p>24. Surat No75/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 perihal : Penanganan Kredit Macet</p> <p>25. Surat No74/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 29Agustus 2018 perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan II Tahun 2018.</p> <p>26. Surat No76/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 3 Septemner 2018 perihal : Pertanggungjawaban Panjar Kantor Pusat Triwulan II dan Posisi Juli 2018.</p> <p>27. Surat No78/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 12 Septemner 2018 perihal : Tindak Lanjut Hasil Joint Audit OJK dan PPAK</p> <p>28. Surat No76/Dk Bank NTT/IX2018 Tanggal 3 Septemner 2018 perihal : Pertanggungjawaban Panjar Kantor Pusat Triwulan II dan Posisi Juli 2018.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>29. Surat No85/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 21Septemner 2018 perihal : Penyampaian Dokumen Hasil Compliance Chek List.</p> <p>30. Surat No85/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 24 Septemner 2018 perihal : Persetujuan Penetapan Selera, Toleransi dan Limit Risiko Bank NTT tahun 2018.</p> <p>31. Surat No.88/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Tanggapan Mitigasi Risiko</p> <p>32. Surat No.89/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Responsi Penyusunan Bisnis Bank dan Anggaran Tahun Buku 2019.</p> <p>33. Surat No.89/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Responsi Penyusunan Bisnis Bank dan Anggaran Tahun Buku 2019.</p> <p>34. Surat No.91/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 perihal : Persetujuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank NTT.</p> <p>35. Surat No.92/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 perihal : Pengadaan Aplikasi Core Banking System Bank NTT.</p> <p>36. Surat No.93/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Upaya Perbaikan GCG</p> <p>37. Surat No.95/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Ekaspansi Kredit Triwulan III Tahun 2018.</p> <p>38. Surat No.97/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal22 Oktober 2018 perihal : Penyampaian Kekurangan Dokumen Calon Direktur Utama dan Direktur Umum Bank NTT.</p> <p>39. Surat No.98/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Produk &amp; Jasa Layanan Bank NTT.</p> <p>40. Surat No.99/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 perihal : Kasus Kredit di Bank NTT Cabang Larantuka yang diadakan kle Ombusman RI.</p> <p>41. Surat No.100/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 1 Nopmeber 2018 perihal :</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Tindaklanjut Pemeriksaan Umum OJK TB 2018.</p> <p>42. Surat No.101/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 1 Nopember 2018 perihal : Konsultasi mekanisme pembatatalan Calon Pengurus.</p> <p>43. Surat No.105/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopmeber 2018 perihal : Pembukaan Jaringan Kantor Bank NTT.</p> <p>44. Surat No.106/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopmeber 2018 perihal : Tindaklanjut bantuan CSR Bank NTT.</p> <p>45. Surat No.111/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopmeber 2018 perihal : Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Triwulan IV 2018.</p> <p>46. Surat No.110/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopmeber 2018 perihal : Rencana Bisnis Bank 2019 - 2021.</p> <p>47. Surat No.113/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopmeber 2018 perihal : Laporan Tindakan Fraud pada Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Kaputu Cabang SoE</p> <p>48. Surat No.119/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 perihal : Pengambilan Uang Tabungan Nasabah oleh Piak Internal.</p> <p>49. Surat No.120/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 perihal : Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Cabang Surabaya.</p> <p>50. Surat No.125/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal : Penyaluran Bantuan Dana CSR.</p> <p>51. Surat No.127/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal : Permohonan fasilitas pertemuan antara Serikat Pekerja Bank NTT dengan PSp Bank NTT.</p> <p>52. Surat No.128/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 perihal : Laporan &amp; Konsultasi Hasil Wawancara Calon Pengurus Bank NTT.</p> <p>53. Surat No.129/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 perihal : Permintaan Melakukan Compliance Chek</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>List.</p> <p>54. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Persetujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor.</p> <p>55. Surat No.131/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 perihal : Kekurangan Berkas Pencalonan Direksi.</p> <p>56. Surat No.132/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal : Ekspansi Kredit Triwulan IV 2018</p> <p>57. Surat No.134/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal : Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah bulan November 2018</p> <p>58. Surat No.134/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 66 Desember 2018 perihal : Persetujuan SOP Hapus Buku Surat Berharga.</p> <p>3. Dewan Komisaris setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terlihat dari Surat-surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi untuk tahun 2018 melalui surat Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat No.03/Dk Bank NTT//I/2018 perihal : Penitipan Gaji Komisaris dan Direksi Bank NTT</li> <li>2. Surat No.06/Dk Bank NTT//I/2018 perihal : Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor</li> <li>3. Surat No.12/Dk Bank NTT//II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 perihal : Pembayaran hak-hak Pegawai yang bebas dari Hukuman</li> <li>4. Surat No.14/Dk Bank NTT//II/2018 perihal : Persetujuan Pemindahan Kantor Cabang Bank NTT Waikabubak</li> <li>5. Surat No.15/Dk Bank NTT//II/2018 perihal : Pengamanan Data IT Bank NTT</li> <li>6. Surat No.15/Dk Bank NTT//II/2018 perihal : Target Tabungan Basic Saving Account (BSA) Tahun Buku 2018.</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Surat Nomor 16/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Compliance Chek List status Kantor Cabang Pembantu Weliman.</li> <li>8. Surat Nomor : 18/DK Bank NTT/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal : Usulan Kenaikan Penghasilan Komite Dewan Komisaris.</li> <li>9. Surat Nomor : 19/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal : Penyampaian Hasil Pembahasan Laporan Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan IV 2017</li> <li>10. Surat Nomor : 20/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan IV Tahun 2017</li> <li>11. Surat Nomor : 21/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT</li> <li>12. Surat No.22/Dk Bank NTT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal : Persetujuan Tambahan Setoran Modal Bank NTT.</li> <li>13. Surat No.23/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Laporan perkembangan Usaha dari Direktorat Utama.</li> <li>14. Surat No.24/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Bank Memastikan Keamanan ATM dan data Nasabah.</li> <li>15. Surat No.31/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Mohon koreksi dan Menerbitkan Keputusan Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT.</li> <li>16. Surat No.36/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris</li> <li>17. Surat No.39/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Tanggapan Laporan Tindakan Fraud Eksternal Bank NTT Kantor Capem Baun</li> <li>18. Surat No.40/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Pelayanan Bank dan Pengamanan Kantor sera Asset-asset pada sat liburan.</li> <li>19. Surat No.44/Dk Bank NTT/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal : Penyampaian Laporan Evaluasi Proses Penunjukkan AP</li> </ol>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit</p> <p>20. Surat No.56/Dk Bank NTT/VII/2018 perihal : Persetujuan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Bank NTT</p> <p>21. Surat No.58/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Tindak lanjut Pemeriksaan Umum dan Khusus GCG TB.2017.</p> <p>22. Surat No.66/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 perihal : Mohon Penjelasan Tentang Penyikapan Kredit Macetnya Sdr. Wellem B.Kaleana Deposito , SE</p> <p>23. Surat No.67/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 perihal : Tanggapan tentang Penegasan Kehadiran pegawai.</p> <p>24. Surat No72/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyikapan terhadap Penghimpunan Dan Biaya Bunga.</p> <p>25. Surat No73/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris Bank NTT.</p> <p>26. Surat No75/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 perihal : Penanganan Kredit Macet</p> <p>27. Surat No74/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 29Agustus 2018 perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan II Tahun 2018.</p> <p>28. Surat No76/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 3 Septemnber 2018 perihal : Pertanggungjawaban Panjar Kantor Pusat Triwulan II dan Posisi Juli 2018.</p> <p>29. Surat No78/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 12 Septemnber 2018 perihal : Tindak Lanjut Hasil Joint Audit OJK dan PPAK</p> <p>30. Surat No76/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 3 Septemnber 2018 perihal : Pertanggungjawaban Panjar Kantor Pusat Triwulan II dan Posisi Juli 2018.</p> <p>31. Surat No80/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 17 Septemnber 2018 perihal : Persetujuan Pemberian Asuransi Jabatan Bagi</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>Komisaris dan Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode 2018 - 2022.</p> <p>32. Surat No.83/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyampaian Dokumen Hasil Compliance Chek List.</p> <p>33. Surat No85/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 21Septemnber 2018 perihal : Penyampaian Dokumen Hasil Compliance Chek List.</p> <p>34. Surat No85/Dk Bank NTT/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 perihal : Persetujuan Penetapan Selera, Toleransi dan Limit Risiko Bank NTT tahun 2018.</p> <p>35. Surat No.88/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Tanggapan Mitigasi Risiko</p> <p>36. Surat No.89/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Responsi Penyusunan Bisnis Bank dan Anggaran Tahun Buku 2019.</p> <p>37. Surat No.91/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 perihal : Persetujuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank NTT.</p> <p>38. Surat No.92/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 perihal : Pengadaan Aplikasi Core Banking System Bank NTT.</p> <p>39. Surat No.93/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Upaya Perbaikan GCG</p> <p>40. Surat No.95/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Ekspansi Kredit Triwulan III Tahun 2018.</p> <p>41. Surat No.97/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal22 Oktober 2018 perihal : Penyampaian Kekurangan Dokumen Calon Direktur Utama dan Direktur Umum Bank NTT.</p> <p>42. Surat No.98/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Produk &amp; Jasa Layanan Bank NTT.</p> <p>43. Surat No.99/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 perihal : Kasus Kredit di Bank NTT Cabang Larantuka yang diadakan kle Ombusman RI.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>44. Surat No.100/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 1 Nopmeber 2018 perihal : Tindakanlanjut Pemeriksaan Umum OJK TB 2018..</p> <p>45. Surat No.105/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopmeber 2018 perihal : Pembukaan Jaringan Kantor Bank NTT.</p> <p>46. Surat No.106/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopember 2018 perihal : Tindakanlanjut bantuan CSR Bank NTT.</p> <p>47. Surat No.111/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 perihal : Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Triwulan IV 2018.</p> <p>48. Surat No.110/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopmeber 2018 perihal : Rencana Bisnis Bank 2019 - 2021.</p> <p>49. Surat No.113/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 perihal : Laporan Tindakan Fraud pada Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Kaputu Cabang SoE</p> <p>50. Surat No.119/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 perihal : Pengambilan Uang Tabungan Nasabah oleh Pihak Internal.</p> <p>51. Surat No.120/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 perihal : Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Cabang Surabaya.</p> <p>52. Surat No.125/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal : Penyaluran Bantuan Dana CSR.</p> <p>53. Surat No.127/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal : Permohonan fasilitas pertemuan antara Serikat Pekerja Bank NTT dengan PSP Bank NTT.</p> <p>54. Surat No.129/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 perihal : Permintaan Melakukan Compliance Chek List.</p> <p>55. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Persetujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>56. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Persetujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>57. Surat No.134/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal : Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah bulan November 2018 Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Persetujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>4. Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank melalui surat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat No.06/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Persetujuan Penambahan Modal pada Modal Disetor</li> <li>2. Surat No.14/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Persetujuan Pemindahan Kantor Cabang Bank NTT Waikabubak</li> <li>3. Surat No.15/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Pengamanan Data IT Bank NTT</li> <li>4. Surat No.15/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Target Tabungan Basic Saving Account (BSA) Tahun Buku 2018.</li> <li>5. Surat No.16/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Compliance Chek List status Kantor Cabang Pembantu Weliman.</li> <li>6. Surat No.23/Dk Bank NTT/II/2018 perihal : Pengalihan fungsi, Tugas dan Tanggungjawab Direktur Umum Bank NTT..</li> <li>7. Surat No.23/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Laporan perkembangan Usaha dari Direktorat Utama.</li> <li>8. Surat No.24/Dk Bank NTT/III/2018 perihal : Bank Memastikan Keamanan ATM dan data Nasabah.</li> <li>9. Surat No.31/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Mohon koreksi dan Menerbitkan Keputusan Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT.</li> <li>10. Surat No.36/Dk Bank NTT/V/2018 perihal : Komposisi Komite-Komite Dewan Komisaris</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. surat No.39/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Tanggapan Laporan Tindakan Fraud Eksternal Bank NTT Kantor Capem Baun</li> <li>12. Surat No.40/Dk Bank NTT/VI/2018 perihal : Pelayanan Bank dan Pengamanan Kantor serta Asset-asset pada saat liburan.</li> <li>13. Surat No.44/Dk Bank NTT/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal : Penyampaian Laporan Evaluasi Proses Penunjukkan AP dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit.</li> <li>14. Surat No.56/Dk Bank NTT/VII/2018 perihal : Persetujuan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Bank NTT</li> <li>15. Surat No.72/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Penyikapan terhadap Penghimpunan Dan Biaya Bunga</li> <li>16. Surat No.74/Dk Bank NTT/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan II Tahun 2018.</li> <li>17. Surat No.89/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 perihal : Responsi Penyusunan Bisnis Bank dan Anggaran Tahun Buku 2019.</li> <li>18. Surat No.91/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 perihal : Persetujuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank NTT.</li> <li>19. Surat No.92/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 perihal : Pengadaan Aplikasi Core Banking System Bank NTT.</li> <li>20. Surat No.93/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Upaya Perbaikan GCG</li> <li>21. Surat No.95/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 perihal : Ekspansi Kredit Triwulan III Tahun 2018.</li> <li>22. Surat No.98/Dk Bank NTT/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 perihal : Pelaksanaan Sosialisasi Produk &amp; Jasa Layanan Bank NTT</li> </ol>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>23. Surat No.105/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopmeber 2018 perihal : Pembukaan Jaringan Kantor Bank NTT.</p> <p>24. Surat No.106/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 7 Nopember 2018 perihal : Tindaklanjut bantuan CSR Bank NTT.</p> <p>25. Surat No.110/Dk Bank NTT/XI/2018 Tanggal 27 Nopmeber 2018 perihal : Rencana Bisnis Bank 2019 - 2021.</p> <p>26. Surat No.120/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 perihal : Permohonan Ijin Pemindahan Alamat Kantor Cabang Surabaya.</p> <p>27. Surat No.125/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 perihal : Penyaluran Bantuan Dana CSR.</p> <p>28. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Peretujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>29. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Peretujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>30. Surat No130/Dk Bank NTT/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 perihal :Peretujuan Penambahan setoran pada Modal Disetor..</p> <p>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank sesuai dengan yang dimuat dalam BPP GCG.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan otoritas lainnya. Hal ini tercermin dari adanya Rapat Komite Audit sebanyak 2 (dua) kali rapat komite. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan Audit yang belum</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>10. Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>	<p>ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Temuan OJK Tahun 2015 sebanyak 2 temuan</li> <li>□ Temuan OJK Tahun 2017 sebanyak 4 temuan</li> <li>□ Temuan OJK Tahun 2018 sebanyak 19 temuan.</li> <li>□ Temuan SKAI Tahun 2018 sebanyak 93 temuan</li> </ul> <p>7. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi pada Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>10. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara cukup efektif dilihat dari frekwensi pelaksanaan Rapat Komite sepanjang tahun 2018 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>13. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak padaberkurangnya</p>	<p>12. Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secaramaksimal, hal ini terlihat dari frekwensi rapat Dewan Komisaris pada 2018 sebanyak 4 (empat ) kali.</p> <p>13. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala antara lain Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali</p> <p>14. Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan pedomana bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG</p> <p>15. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan individu, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16. Tidak terdapat anggota Dewan komisaris yang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, selain remunerasi yang telah ditetapkan Bank.</p> <p>17. Tidak terdapat intervensi pemilik Bank terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat mennyebabkan kerugian bagi Bank.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank</p> <p><b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.</li> <li>2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</li> <li>3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</li> <li>4. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (share option) yang dimiliki Dewan Komisaris.</li> <li>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan</li> </ol>	<p><b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risalah Rapat Dewan Komisaris tahun 2018, telah didokumentasikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</li> <li>2. Hasil rapat Dewan Komisaris tahun 2018 telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan komisaris dan pihak terkait.</li> <li>3. Hasil rapat Dewan komisaris merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris</li> <li>2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.</li> <li>3. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi telah diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2018, bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2018.</li> </ol> </li> <li>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam Pengawasan Bank sejalan dengan peningkatan</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</p> <p><b>3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p><b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b></p> <p>1. Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan; b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen; d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik .</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko ; a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris</p>	<p>kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)</p> <p>6. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kerugian Bank.</p> <p><b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p><b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b></p> <p>1. Keanggotaan Komite Audit telah ditetapkan dalam SK Direksi No.36 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang pihak independen yang ahli di bidang hukum &amp; perbankan.</p> <p>2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam SK Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan <u>Nominasi</u> : a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Non Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succession plan Bank.c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang .e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Bank.</p> <p>4. Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan</p>	<p>Dewan Komisaris Bank NTT yang terdiri dari seorang Komisaris Independen,dan 2 (dua) orang pihak independen yang ahli dibidang hukum &amp; perbankan.</p> <p>3. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan dalam SK Direksi No.69 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota Komite dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif Bank (Kepala Divisi SDM).</p> <p>4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain..</p> <p>5. Rangkap Jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>8. Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p>	<p>yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5. Tidak terjadi perangkapan jabatan.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> <p>7. Pihak Independen yang berasal dari mantan pejabat eksekutif telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>8. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri Oleh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.</p> <p>9. Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>10. Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap ( 1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. (c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Direksi dan Dewan Komisaris telah</p>	<p>10. Komposisi Komite Audit dan Komite Remunerasi &amp; Nominasi memenuhi ketentuan karena terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota Komite.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari frekuensi rapat Komite Audit berdasarkan notulen rapat selama tahun 2016 sebanyak 5 (lima) kali rapat, namun masih terdapat temuan audit baik oleh internal maupun eksternal yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara cukup memadai.</p> <p>1. Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memadai dalam melakukan evaluasi 2. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris</p> <p>7.Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan fungsinya dengan membuat Draft Kajian Perencanaan Pencalonan Direksi dan Komisaris, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penjaringan calon Direksi dan Komisaris PT BPD NTT masa bhakti 2017 - 2021 dan melakukan penjaringan ulang Direksi dan Komisaris masa bhakti 2018 – 2022.</p> <p>4. Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat kajian pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT Tahun 2017 dan Pencalonan Direksi dan Dewan Komisar Bank NTT Tahun 2018 sesuai : Penerapan tata kelola dan peraturan POJK Nomor 45/POJK.03/2015</p> <p>4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7.Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1.Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) telah secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b>4. Penanganan Benturan Kepentingan</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank .</p> <p>3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p>	<p>2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti termasuk pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b>4. Penanganan Benturan Kepentingan</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat sesuai SK Direksi No.73 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Benturan Kepentingan.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p> <p><b>c. Governance Outcome</b></p> <p>1. Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi kejadian yang mengandung Benturan Kepentingan.</p> <p>2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank</p> <p>3. Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya Benturan Kepentingan.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>5. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional .</li> <li>2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif</li> </ol> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain : a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan</li> </ol>	<p><b>5. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Bank NTT menggunakan nama Divisi Kepatuhan (bukan Satuan Kerja Kepatuhan) dan independet terhadap Satuan Kerja Operasional.</li> <li>2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.</li> <li>3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif</li> </ol> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Opini Kepatuhan, Direktur Kepatuhan memastikan setiap kebijakan, ketentuan system dan prosedur yang dikeluarkan sesuai deoringan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dinilai optimal dalam memantau komitmen terhadap regulator yang ditunjukkan dengan komitmen pada OJK (yang belum ditindaklanjuti sebanyak 25 komitmen).</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank</p>	<p>2. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi menyetujui SOP Kepatuhan , memberikan pemahaman kepada Pegawai, mengenai ketentuan-ketentuan, kebijakan yang berlaku. Direktorat Kepatuhan telah melakukan sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pegawai.</p> <p>4. Sesuai temuan OJK menunjukkan bahwa : Satuan Kerja Kepatuhan sudah membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank namun baru terbatas pada penilaian SDM (Gerakan Patuh). Sedangkan pada aktivitas pengadaan barang dan jasa, pengeluaran biaya-biaya dan perkreditan belum dilakukan.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan; f) melakukan tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</li> <li>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</li> <li>3. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank</li> </ol> <p><b>6. Penerapan Fungsi Audit Intern</b> <b>A. Governance Structure</b></p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan belum melakukan identifikasi terhadap pelanggaran ketentuan yang terjadi, baik berdasarkan temuan SKAI dan Auditor Ekstern untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan upaya peningkatan Budaya Kepatuhan antara lain melalui sosialisasi Ketentuan yang sering menjadi pelanggaran.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</li> <li>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</li> <li>3. Bank memiliki track record kepatuhan selama ini baik yaitu selama 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk tahun 2018 memiliki 25 pelanggaran yang dilakukan yakni berupa pelanggaran tindak lanjut komitmen Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan yang melampaui batas waktu.</li> </ol> <p><b>6. Penerapan Fungsi Audit Intern</b> <b>A. Governance Structure</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);b) membentuk SKAI;c) menyusun panduan audit intern.</p> <p>3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p>	<p>1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dan independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2. Bank telah menyusun panduan audit intern, dan telah memiliki Buku Pedoman Anti Fraud.</p> <p>3. SKAI independen terhadap Satuan Kerja Operasional.</p> <p>4. SDM pada Divisi Pengawasan dan SKAI sudah efektif dalam tugasnya dan perlu terus ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain dibidang IT.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Direksi telah mendukung terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen, dengan menempatkan Resident Inspector pada unit kerja.</p> <p>2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris, namun ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> OJK Tahun 2015 sebanyak 2 temuan</li> <li><input type="checkbox"/> OJK Tahun 2017 sebanyak 4 temuan</li> <li><input type="checkbox"/> OJK Tahun 2018 sebanyak 19 temuan</li> <li><input type="checkbox"/> Spot Audit SKAI Tahun 2018 sebanyak 93 temuan.:</li> </ul> <p>1. Surat 19/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Laporan Audit Divisi Pengawasan dan SKAI Triwulan IV Tahun 2017.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber</p>	<p>2. Surat Nomor : 20/DK Bank NTT/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan IV Tahun 2017</p> <p>3. Surat 74/DK Bank NTT/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal : Laporan Profil Risiko PT. Bank NTT Triwulan II Tahun 2018.</p> <p>4. Surat 76/DK Bank NTT/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal : Pertanggung-jawaban Panjar Biaya Kantor Pusat Triwulan II dan Posisi Juli 2018.</p> <p>5. Surat 78/DK Bank NTT/IX/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal : Tindak-lanjut Hasil Joint OJK dan PPATK</p> <p>6. Surat 100/DK Bank NTT/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal : Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum OJK TB 2018.</p> <p>2. Fungsi Audit Intern belum menyeluruh antara lain , review terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.</p> <p>3. Telah dilakukan kaji ulang dan pemeriksaan atas kinerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun 2012.</p> <p>4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5. Tidak terjadi penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumberdaya</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8. SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian : a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; dan c) kualitas kinerja.</p> <p>9. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>10. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (auditee).</p> <p>11. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p>	<p>manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait di bidang audit.</p> <p>7. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank</li> <li><input type="checkbox"/> Telah melakukan penilaian efektivitas SPI</li> <li><input type="checkbox"/> Telah melakukan penilaian kualitas kinerja pada unit operasional melalui desk audit maupun spot audit</li> </ul> <p>9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p> <p>10. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</p> <p>11. Sampai dengan saat ini Pedoman Audit Intern berdasarkan keputusan Direksi No. 20 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000 tentang Buku Pedoman Audit Internal belum dilakukan review.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Direksi telah memastikan tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI belum</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p> <p><b>7. Penerapan Fungsi Audit Ektern</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP paling sedikit memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-</p>	<p>seluruhnya ditindaklanjuti yaitu :</p> <p><input type="checkbox"/> Spot Audit SKAI Tahun 2018 sebanyak 93 temuan</p> <p>3. SKAI bertindak obyektif dalam pemeriksaan</p> <p>4. Fungsi Audit telah dilaksanakan secara memadai</p> <p><b>7. Penerapan Fungsi Audit Ektern</b> <b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai perjanjian kerja, dan menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen sesuai standar profesional akuntan publik dengan ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan audit.</p> <p>2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>undangan.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>5. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7. Akuntan Publik telah melaporkan has Keuangan.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.</p> <p>2. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit</p>	<p>3. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan RUPS</p> <p>4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank dan mampu bekerja secara independen.</p> <p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6. Audit KAP sudah dilakukan secara independen</p> <p>7. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan &amp; Rekan, dengan mendapat opini “Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material”.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2. Telah sesuai dengan ruang lingkup audit</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi</p>	<p><b>8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>2. Bank telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang memadai dan SOP Perkreditan .</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yaitu : Bank menetapkan Limit dan Toleransi Risiko melalui SK Direksi Nomor 58 tahun 2013 dan saat ini sedang dilakukan review terhadap Limit dan toleransi Risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Belum seluruh permasalahan yang dilaporkan oleh SKMR dan SKAI terkait ririko, permasalahan maupun penyimpangan diselesaikan tepat waktu diantaranya : Penerapan Balance Score Card, Kebijakan Internal mengenai BMPK.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko</p>	<p><input type="checkbox"/> Bank telah mereview kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Direksi Nomor 92 Tahun</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk</p>	<p>2018 tanggal 27 September 2018.</p> <p>□ Belum seluruh permasalahan yang dilaporkan oleh SKMR dan SKAI terkait risiko, permasalahan maupun penyimpangan diselesaikan tepat waktu diantaranya : SOP Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman SDM yang meliputi Career Parth Analisis Kredit dan perbaikan Humas Resources Information System (HRIS), DLL.</p> <p>3. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya Fraud dan Kegagalan operasional berulang akibat human error yang melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank, akan tetapi sesuai Keputusan Direksi No.122 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Residen Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan petugas internal Control pada masing-masing Kantor Cabang.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya Kegagalan operasional berulang akibat human error yang melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Komisaris (Manajemen) cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>menyerap risiko kerugian</p> <p><b>9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party ) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (related party) dan/atau penyediaan dana besar (large exposure) telah: a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian</p>	<p><b>9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris No. 06 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal Kewenangan Memutus Pemberian Kredit dan Garansi Bank serta Warkat Garansi Bank Oleh Direksi PT. BPD. NTT terkait penyediaan Dana Pihak Terkait, sedangkan Penyediaan Dana Besar belum ada ketentuannya.</p> <p>2. Prosesnya memadai dan sesuai dengan prinsip kehati – hatian</p> <p>3. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara independen diputuskan oleh Manajemen</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Bank belum memiliki Pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK , namun ketentuan berupa SK Direksi terkait penyediaan sudah ada dan saat ini sedang dikumpulkan SK-SK terkait penyediaan Dana. Bank juga telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>maupun perundang-undangan; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau disersifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2.</p> <p>3. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p><b>10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk</p>	<p>Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>2. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p> <p><b>8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diatur dalam BPP GCG.</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG</p> <p>3. Masih terdapat beberapa bidang tugas yang masih dalam proses review yakni SOP Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman SDM yang meliputi Career Path Analis Kredit dan Perbaikan Humas Resources Information System (HRIS) , Pedoman Kehumasan, dan Penentuan kelas cabang.</p> <p>4. Sistem Informasi Bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang ada dan didukung dengan Standar Internasional telah ditindaklanjuti.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank mentransparasikan Laporan Keuangan dan Laporan Non Keuangan melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulan, Realisasi Bisnis Bank dan melalui Laporan Tahunan Bank,</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p> <p>2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk; e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan publikasi laporan Bank.</p> <p>5. Bank telah menyusun Laporan</p>	<p>kepada Bank Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah di audit oleh Auditor Eksternal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah.</li> <li>□ Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan SK Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</li> </ul> <p>3. Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan SK Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan sesuai Surat Edaran no.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012.</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6. Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a) melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (self assessment) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (self assessment) pada situs web Bank.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>2. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang</p>	<p>kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan Tata Kelola (untuk Tahun Buku 2016) sesuai Surat Edaran No.13/SEROJK.03/2017P tanggal 17 Maret 2017 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2016 hasil Self Assesment Bank tidak berbeda dengan REGULATOR, dan telah dimuat pada situs web Bank.</p> <p>7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2016 hasil Self Assesment Bank tidak berbeda dengan REGULATOR, dan telah dimuat di website Bank NTT.</p> <p><b>D. Governance Outcome</b></p> <p>1. Laporan Tahunan disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya yang diwajibkan oleh REGULATOR.</p> <p>2. Bank telah menampilkan Laporan Tahunan Bank pada homepage Bank NTT untuk periode Laporan Tahunan 2018.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi : a) Laporan keuangan publikasi Triwulanan; dan b) Laporan tahunan.</p> <p>3. Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (self-assessment) serta paling sedikit mencakup: a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g) pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank; h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>5. Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p>	<p>3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip Pelaksanaan tata Kelola (untuk semester II tahun 2018) dan telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah</p> <p><b>11. Rencana Strategis Bank</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan rensif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris</p> <p>3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>4. Direksi telah melaksanakan Rencana</p>	<p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan cukup baik</p> <p>7. Bank secara transparan menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah.</p> <p><b>11. Rencana Strategis Bank</b></p> <p><b>A. Governance Structure</b></p> <p>1. Rencana Bisnis dan corporate plan Bank telah disusun sesuai visi dan misi Bank dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, Sampai dengan saat ini Modal Disetor Bank Rp.1.284.598 juta.</p> <p><b>B. Governance Proses</b></p> <p>1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (achievable) ,memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dengan analisis SWOT.</p> <p>2. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris</p> <p>3. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank dan Corporate Plan sudah disusun oleh Bank.</p> <p>4. Pelaksanaannya cukup efektif, namun ada</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Bisnis Bank (RBB) secara efektif</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan : a) faktor eksternal dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>7. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Rencana Korporasi (corporate plan) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2. Rencana Korporasi (corporate plan) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>3. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi</p>	<p>beberapa point realisasi RBB yang belum efektif.</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB Bank pada umumnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank</li> <li>2) prinsip kehati-hatian;</li> <li>3) penerapan manajemen risiko</li> <li>4) azas perbankan yang sehat</li> </ol> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pengurus.</p> <p>7. Pemilik/Pemegang Saham Bank menunjukkan keseriusan dalam mendukung Rencana Bisnis Bank yang tercermin dari upaya pemilik/pemegang saham untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p><b>C. Governance Outcome</b></p> <p>1. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman RBB Internal belum dimiliki.</p> <p>2. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis dan Corporate Plan kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.</p> <p>3. Rencana Bisnis Bank sudah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat lebih bagi stakeholders.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Pemangku Kepentingan.</p> <p>5. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis).</p> <p>6. Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>7. Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>	<p>5. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (achiveable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dengan analisis SWOT.</p> <p>6. Rencana strategis Bank didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai yang ditunjukkan dengan belum tercapainya beberapa rencana bisnis Bank sampai dengan akhir Tahun 2018.</p> <p>7. Pembagian keuntungan Bank melibatkan Pemegang Saham yang diikuti dengan komitmen Pemegang Saham untuk penambahan Modal dalam mendukung Rencana Strategis Bank.</p> <p>8. Dukungan Modal dari Pemegang Saham sangat baik sehingga Modal Bank tidak kurang dari ketentuan yang berlaku.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah Cukup Baik.
- Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah Cukup Baik.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik.
- Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik.
- Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik.



**bankNTT**

melayani **lebih** sungguh

PT Bank Pembangunan Daerah  
Nusa Tenggara Timur  
Jl. W.J. Lalamentik 102, Kupang  
Nusa Tenggara Timur 85000  
Telp. +62 380 840555  
Fax. +62 380 840567